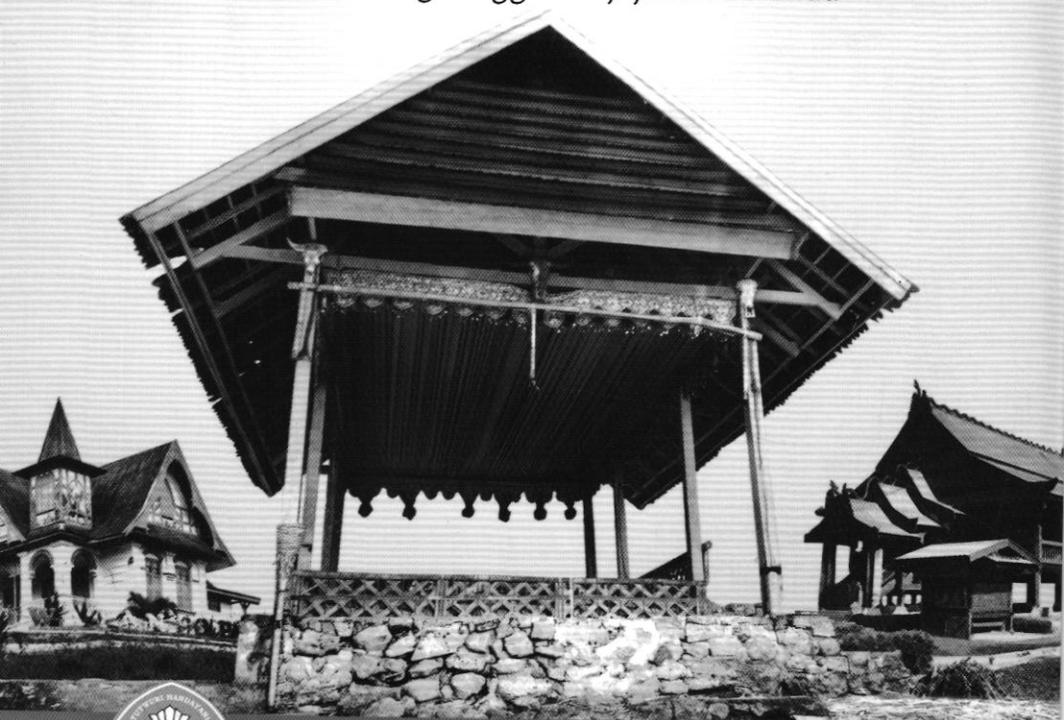


SYAHRIR KILA • SAHAJUDDIN • MUHAMMAD AMIR



SOPPENG

Dari Tomanurung Hingga Penjajahan Belanda



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA SULAWESI SELATAN

SOPPENG

Dari *Tomanurung* Hingga
Penjajahan Belanda

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana
Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Syahrir Kila • Sahajuddin • Muhammad Amir

SOPPENG

Dari *Tomanurung* Hingga
Penjajahan Belanda

PUSTAKA
REFLEKSI

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Soppeng: Dari *Tomanurung* Hingga Penjajahan Belanda
-Makassar: 2018
xii + 238 = 250 hal.; 14,8 x 21 cm

Hak Cipta © pada Penulis
Hak penerbitan pada Pustaka Refleksi. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apa pun harus mendapat izin tertulis dari penulis dan Penerbit Pustaka Refleksi.

Penulis : Syahrir Kila
Sahajuddin
Muhammad Amir
Editor : Andi Wanua Tangke
Tata Letak : JanurJene
Rancang Sampul : Narto Anjala

Penerbit:

PUSTAKA
REFLEKSI

Jln. Tamangapa Raya III
Perum. Tritura A5 No. 10 Makassar 90235
Telp. 0411-494086 – 5057064.
Fax. 0411-494086, Hp. 081343888172 – 081342183116
Email: refleksibooks@yahoo.co.id

*Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved*

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Daerah Sulawesi Selatan

Cetakan I, 2018
ISBN: 978-602-5887-04-8

PENGANTAR PENERBIT



SEJARAH kehadiran Kerajaan Soppeng bermula dari munculnya dua *Tomanurung* yang berasal dari dua tempat berbeda. *Tomanurung* yang satu berasal dari wilayah Sekkanyili bernama We Temmamala dan *Tomanurung* yang lain berasal dari GoariE bernama La Temmapuppu. Keduanya, setelah dinobatkan menjadi raja di wilayahnya masing-masing, para pemangku adat sepakat menikahkan mereka, untuk menyatukan dua kerajaan mereka yang berbeda. Demikianlah awal berdirinya Kerajaan Soppeng yang tertera dalam buku ini.

Buku ini merangkum tiga tulisan yang ditulis oleh tiga penulis. Namun dari ketiga tulisan tersebut merupakan satu kesatuan dalam lintasan Sejarah Kerajaan Soppeng. Bagian Pertama ditulis oleh Syahrir Kila menulis tentang sejarah Soppeng dari *Tomanurung* hingga masuknya Agama Islam di kerajaan tersebut. Selanjutnya, Sahajuddin di Bagian Kedua menulis Perkembangan Kerajaan Soppeng pada Pra dan Pascaperang Makassar. Sedangkan Muhammad Amir menulis di Bagian Ketiga yang berisi tentang Soppeng di masa pemerintahan Hindia Belanda.

Para peneliti yang menulis dalam buku ini, bertujuan tidak lain ingin melestarikan perjalanan sejarah sebuah kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Penerbit,

PUSTAKA REFLEKSI

PENGANTAR EDITOR



KERAJAAN Soppeng merupakan salah satu kerajaan yang diperhitungkan dalam percaturan politik di masa periode kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Namun buku ini tidak secara sepihak hanya membahas bagaimana peranan Kerajaan Soppeng dalam percaturan tersebut. Buku ini lebih fokus pada pergolakan sosial politik dalam perjalanan Kerajaan Soppeng dari masa *Tomanurung*, Masa Kerajaan sampai pada masa Penjajahan Hindia Belanda.

Kehidupan masyarakat Soppeng dimulai pada masa prasejarah yang dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan fosil dan artefak. Penemuan benda prasejarah ini jelas membuktikan bahwa di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Soppeng telah hidup masyarakat prasejarah. Kehidupan mereka sangat bersahaja dan menggunakan batu sebagai alat kehidupan mereka.

Setelah berakhirnya zaman prasejarah dilanjutkan dengan kehidupan zaman berkelompok. Masing-masing kelompok ini dipimpin seorang yang bergelar *matoa*. Masa itu biasa juga disebut sebagai masa *sianre bale tauwe* atau masa kacau balau, siapa yang kuat dan berani,

mereka yang mengendalikan kekuasaan. Masa kekacauan yang tiada henti, akhirnya membuat masyarakat capek dan bosan. Ketika turun *Tomanurung*, para *matoa* menemukan cara mengakhiri masa kekacauan ini dengan meminta *Tomanurung* ini sebagai pemimpin mereka yang dianggap bisa menyatukan dalam perdamaian.

Dari masa *Tomanurung* ini, sebagai cikal bakal berdirinya Kerajaan Soppeng. Meskipun telah menjadi kuat dan bersatu, namun ternyata itu tidak cukup. Kerajaan Soppeng justru mendapat gangguan dari kerajaan-kerajaan lain. Jalan keluarnya Kerajaan Soppeng menjalin kerjasama pertahanan dengan dua kerajaan lokal lainnya yang bertetangga, yaitu Kerajaan Bone dan Kerajaan Wajo dengan membentuk persekutuan yang disebut Tellumpoccoe.

Kehadiran Persekutuan Tellumpoccoe ternyata juga tidak cukup untuk lepas dari gangguan keamanan bagi Kerajaan Soppeng. Kerajaan yang lebih besar dan kuat bernama Kerajaan Gowa melakukan serangan dengan alasan Kerajaan-kerajaan Tellumpoccoe menolak menerima penyebaran Agama Islam.

Kalau menilik percaturan politik di kalangan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, Kerajaan Soppeng tidak sedang dalam persaingan dengan kerajaan lainnya. Justru para pembesar Kerajaan Bone yang cerdas menempatkan Kerajaan Soppeng dalam posisi tersebut, dengan mengikat hubungan kedua kerajaan dalam hubungan kekeluargaan dan perjanjian. Apalagi para pembesar Kerajaan Soppeng mempunyai karakter teguh pada perjanjian. Ketika Kerajaan Bone yang telah takluk pada Kerajaan Gowa dan mengirim tenaga kerja ke Gowa, tidak saja berasal dari wilayah Bone tapi juga diambil dari wilayah Soppeng. Yang menarik, dari sekitar sepuluh ribu tenaga kerja, terselip pula sejumlah para bangsawan Kerajaan Soppeng yang berpengaruh seperti *arung* Palakka, *arung* Bila, *arung* Appanang dan beberapa tokoh bangsawan lainnya.

Dari tokoh-tokoh inilah yang berperan sangat penting dalam pergolakan politik di Sulawesi Selatan pada abad XVII baik sebelum Perang Makassar maupun setelah Perang Makassar. Hasil Perang Makassar menghasilkan dua kekuatan besar yang berpengaruh di wilayah Sulawesi Selatan pada masa itu. Pertama adalah Kerajaan Bone dengan Arung Palakka sebagai pemimpinnya, sementara kekuatan lainnya adalah Kolonial Belanda yang diwakili VOC. Sementara para pembesar Kerajaan Soppeng di kampung halaman mereka lebih memilih tenang-tenang saja.

Setelah VOC dinilai kurang mampu mengatasi secara total wilayah kekuasaan Hindia Belanda, maka Pemerintah Hindia Belanda memutuskan menggantikan peranan VOC dengan Pemerintahan Hindia Belanda yang lebih militeristik. Tanda-tanda itu diwujudkan dalam bentuk ekspedisi militer terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan pada 1905. Bahkan kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan diminta menerima pernyataan penyerahan penuh kekuasaan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Tujuannya untuk mengokohkan kekuasaan kolonial juga menguasai lebih banyak sumber-sumber ekonomi bagi kepentingan Pemerintah Hindia Belanda.

Sistem pemerintahan yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda bersifat militer-sipil. Caranya dengan mengangkat pimpinan pasukan militer pendudukan menjadi kepala pemerintahan pada daerah yang ditaklukkannya. Pola tersebut jelas pejabat yang ditunjuk belum berpengalaman dan wawasan yang masih rendah soal pemerintahan di wilayah yang dipimpinnya. Sebagai jalan tengah, mengangkat pegawai putra daerah yang biasanya dari golongan bangsawan yang berpengaruh – yang sebelumnya ditekan dan disingkirkan, sebagai pembantunya sehingga pemerintahan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pemulihan hubungan kaum bangsawan

berpengaruh dengan pemerintahan Hindia Belanda, belakangan disebut pemerintahan swapraja.

Buku ini cukup cerdas mengantar para pembaca memahami perjalanan kesejarahan sebuah kabupaten yang lahir dari kerajaan yang mempunyai potensi berperan dalam percaturan politik di masanya. Namun lebih memilih sikap perdamaian dan ketenangan. Sikap-sikap tersebut masih terlihat sampai saat ini, dari sikap dan perilaku masyarakat Kabupaten Soppeng, suatu pewarisan sejarah yang positif.

Editor,

ANDI WANUA TANGKE



DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT — v
PENGANTAR EDITOR — vii
DAFTAR ISI — xi

Bagian Pertama

BERDIRINYA KERAJAAN SOPPENG HINGGA MASUKNYA AGAMA ISLAM — 1

- A. Pendahuluan — 1
 - B. Berdirinya Kerajaan Soppeng — 7
 - C. Masa *Tomanurung*: Dua Datu *Seddi Ata* — 12
 - D. Terbentuknya Kerajaan Soppeng Satu Raja Satu Rakyat — 24
 - E. Asal Usul Penamaan Wilayah — 31
 - F. Terbentuknya Persekutuan Tellumpoccoe — 33
 - G. Masuknya Agama Islam Di Kerajaan Soppeng — 66
- Penutup — 81
Daftar Pustaka — 83

Bagian Kedua

PERGOLAKAN DAN PERKEMBANGAN KERAJAAN SOPPENG PADA PRA DAN PASCAPERANG MAKASSAR

— 89

Pendahuluan — 89

Persekutuan dan Pergolakan Sebelum Perang Makassar — 99

Soppeng pada Masa Perang Makassar — 112

Strategi Soppeng Dalam Perang Makassar — 122

Soppeng pada Masa VOC Hingga Hindia Belanda — 135

Kesimpulan — 148

Rokomendasi — 151

Daftar Pustaka — 152

Bagian Ketiga

SOPPENG DI BAWAH KEKUASAAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA 1905-1942 — 155

A. Pendahuluan — 155

B. Sekilas Tentang Kerajaan Soppeng — 163

C. Soppeng Dalam Mata Rantai Ekspedisi Militer Belanda — 184

D. Penataan Wilayah Kekuasaan Belanda — 200

E. Pelaksanaan Pemerintahan — 212

F. Penutup — 225

Daftar Pustaka — 228

TENTANG PENULIS — 235



Bagian Pertama

BERDIRINYA KERAJAAN SOPPENG HINGGA MASUKNYA AGAMA ISLAM

Oleh: Syahrir Kila

A. Pendahuluan

Keterbukaan dan otonomi daerah di era reformasi, membuat banyak orang yang lupa “akar masa lalunya” dan hanya berbicara soal-soal yang sedang dihadapi tanpa diletakkan dalam konteks yang lebih luas. Sementara itu, berbagai persoalan struktural masih dihadapi oleh segenap bangsa ini seperti krisis ekonomi yang berkepanjangan, krisis moral, korupsi, krisis kepemimpinan, kemiskinan dan sebagainya. Pada tataran kebangsaan, berbagai konflik sosial politik di Republik ini juga masih menyisahkan potensi yang mengancam persatuan bangsa.

Ditinjau dari segi diakronis, orang juga hanya senang membicarakan segala persoalan yang menyangkut kekinian dan masa depan. Kebanyakan mereka sudah mengidap penyakit amnesia historis, sehingga aspek kelampauan dari persoalan kekinian sering dilupakan. Jarang orang yang membicarakan sejarah untuk memecahkan persoalan kekinian dan persoalan masa depan. Sejarah hampir tidak pernah dijadikan ukuran atau hanya dilihat sebagai barang antik yang harus dimuseumkan sebab dianggap tidak lagi memiliki relevansi.

Warga bangsa yang cerdas akan mencari jawaban atas segala persoalan tersebut bukan hanya dengan belajar sejarah, tetapi juga belajar dari sejarah. Hal ini serupa dengan apa yang pernah diucapkan oleh Bung Karno yang menyatakan: “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (jasmERAH)”. Dengan belajar dari sejarah, orang akan menjadi lebih arif dan dapat memberikan sumbangan pemikiran ke arah mana seharusnya perjalanan bangsa ini mesti ditempuh.

Jika kemudian disepakati bahwa penulisan sejarah memiliki makna yang signifikan dalam ikut serta memecahkan persoalan-persoalan dalam level kebangsaan, apakah hal yang sama juga berlaku dalam konteks otonomi daerah? Justru dalam era otonomi daerah inilah ilmu sejarah juga dapat dimanfaatkan untuk mengkaji potensi yang dimiliki oleh daerah dalam rangka pembangunan di era otonomi daerah sekarang ini. Berdasarkan pemikiran bahwa program pembangunan sebaiknya harus di dasarkan atas kepribadian dan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Oleh sebab itu, seluruh *stakeholders* (mitra kerja) harus mengetahui kepribadian dan potensi lokal yang dimiliki oleh daerah. Dalam hal ini, penelitian dan penulisan sejarah lokal akan memiliki posisi penting karena hanya dalam sejarahlah kepribadian suatu daerah dapat ditemukan.

Penulisan sejarah dan kesadaran sejarah memang memiliki kaitan yang sangat erat. Penulisan sejarah akan menjadi salah satu sarana untuk menciptakan kesadaran sejarah. Sebaliknya kesadaran sejarah juga akan menstimulasi penulisan sejarah. Dalam tataran kebangsaan, kesadaran sejarah dapat pula merupakan suatu hal yang subyektif dalam artian berkaitan dengan pengalaman dan penghayatan anak bangsa terhadap masa lampau bangsanya. Kesadaran sejarah yang ditunjang oleh pengetahuan masa lampau yang objektif akan menimbulkan empati anak bangsa terhadap bangsanya dengan cara *relive* dan *rethink* terhadap tindakan manusia pada masa lampau.

Untuk selanjutnya, empati ini akan membangkitkan keingintahuan anak bangsa untuk menggali lebih dalam perjalanan bangsanya di masa lampau dalam rangka untuk menemukan jawaban dari mengapa segala sesuatu menjadi seperti apa yang terlihat pada masa kini. Anak bangsa yang memiliki kesadaran sejarah akan mencari jawabannya dengan cara belajar sejarah, dan setelah itu ia akan menjadi lebih arif dan bisa memberikan sumbangan pemikiran.

Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah yang berada di tengah proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari eksistensi masa lalunya. Berdasarkan hasil seminar sejarah yang diikuti oleh semua elemen masyarakat pada 11 Maret 2000, menetapkan bahwa hari jadi atau hari lahir Kabupaten Soppeng jatuh pada 23 Maret 1261 yang sebelumnya jatuh pada 13 Maret 1957. Wilayah ini sebelum abad ke-20 adalah merupakan suatu wilayah kerajaan yang disebut Kerajaan Soppeng. Kerajaan ini membawahi beberapa kerajaan kecil (*akkarungeng*) yang masing-masing berdaulat. Kerajaan Soppeng kemudian menggabungkan wilayahnya ke dalam satu persekutuan yang disebut Persekutuan TellumpoccoE. TellumpoccoE merupakan sebuah persekutuan yang disepakati oleh tiga raja dalam suatu pertemuan yang berlangsung di daerah Timurung. Pertemuan itu dinamakan *Lamungpatue ri Timurung* yang dicetuskan dan direalisasikan pada 1582 (Sjarifuddin, 1989:319).

Aspek terpenting dari Perjanjian TellumpoccoE tersebut, adalah peranan Kerajaan Soppeng dalam dinamisasi politik lokal dan hubungannya dengan kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Sulawesi Selatan ketika itu. Upaya untuk menulis sejarah Kerajaan Soppeng, tak lain adalah upaya untuk mengingat keberadaan masa lalu sebagai suatu *power* atau kekuatan untuk pemikiran kekinian. Hal itu adalah sebuah tindakan imajinatif, sebuah proses konstruksi yang kreatif. Sebab yang diingat adalah yang dipahami, yang dimengerti dan yang

dipahami atau yang dimengerti itu adalah yang diperhatikan, dan yang diperhatikan adalah sesuatu yang diinginkan. Semua proses mengingat masa lalu adalah produk dari kesadaran individu, masyarakat dan bahkan negara. Menulis sejarah Kerajaan Soppeng adalah upaya mengingat untuk menciptakan *colectif memory* sebagai landasan untuk membangun karakter dan jati diri bangsa. Penulisan ini dimulai pada awal berdirinya Kerajaan Soppeng (masa *Tomanurung*) hingga masuknya agama Islam.

Kerajaan Soppeng berdasarkan beberapa artikel lepas disebutkan bahwa ia dibangun atau didirikan seorang *Tomanurung* (orang yang tidak diketahui asal usulnya). Kemudian berkembang menjadi besar (Sumange, 2003: 5-11). Pada perkembangan berikutnya, menempatkan Soppeng harus melakukan beberapa perubahan politik ketika terjadi persaingan antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Gowa. Dikhawatirkan jika Kerajaan Gowa melakukan perluasan wilayah ke daerah Bugis sehingga kerajaan lokal seperti Kerajaan Bone, Soppeng dan Wajo merasa terancam. Hal itu terbukti ketika Kerajaan Gowa (Makassar) melakukan penaklukan wilayah-wilayah Bugis untuk memperluas wilayah pengaruh kekuasaannya. Kerajaan Bone akhirnya diserang pada 1556 oleh Kerajaan Gowa di bawah pimpinan Raja Gowa Karaeng Data Tunibatta, dan ia meninggal dalam pertempuran tersebut (Hamid,dkk.2007: 78). Jenazahnya ditinggalkan oleh pasukannya lalu dikembalikan ke Gowa atas saran dari Kajao Laliddo (penasehat raja Bone) (Poelingomang,dkk.2004:58).

Setelah masa berkabung bagi Kerajaan Makassar, maka dibuatlah suatu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Caleppa (*Ulukanaya ri Caleppa*). Isi perjanjian ini meliputi dikembalikannya beberapa wilayah di sekitar Tanah Bone yang pernah ditaklukkan oleh Kerajaan Makassar. Antaranya: wilayah-wilayah yang terletak di sebelah barat Sungai WalannaE sampai daerah Ulaweng di sebelah utara menjadi

milik Bone. Sungai Tangka menjadi perbatasan antara Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa, negeri Cenrana dikembalikan menjadi wilayah Bone (Patunru, 1969: 50-51).

Perjanjian ini ternyata tidak langgeng dan hanya bertahan hingga kira-kira 10 tahun lamanya. Setelah itu, ketegangan-ketegangan baru kembali terjadi ketika Tana Bone kembali memperkuat pertahanannya di dalam negeri, dengan cara memobilisasi kekuatan-kekuatan pertahanan di wilayah perbatasan. Soppeng dan Wajo yang selama ini berada di bawah pengaruh kekuasaannya mulai diusik sehingga kedua negeri itu mulai mendekatkan diri ke Bone. Realitas itu menyebabkan Kerajaan Makassar mulai melakukan tekanan-tekanan keras kepada Wajo dan Soppeng agar tetap setia kepada kekuasaan Kerajaan Makassar. Sebaliknya, Kerajaan Bone yang merasa mendapat tekanan-tekanan dari Kerajaan Makassar, mengajak kedua kerajaan Bugis yang bertetangga itu melakukan suatu kerjasama untuk menghadapi ekspansif dari Kerajaan Makassar. Kerjasama antara ketiganya lalu diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang disebut “Perjanjian *TellumpoccoE*” atau lebih dikenal dengan nama *LamungpatuE ri Timurung* (Patunru, 1969: 17).

Memasuki awal abad ke-17, yaitu ketika agama Islam mulai masuk ke Sulawesi Selatan dan diterima untuk pertama kalinya oleh raja Tallo yang bernama I Mallingkaan Daeng Manyonri Karaeng Katangka menerima Islam pada 22 September 1605 yang bertepatan pada 9 Jumadil Awal 1015 H. (Kamaruddin, dkk. 1986: 87). Setelah menerima agama Islam, ia diberi gelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Setelah itu, raja Gowa yang bernama I Mangngaranggi Daeng Manra'bia juga menerima agama Islam dengan gelar Sultan Alauddin. Setelah dua tahun kemudian, seluruh rakyat Gowa dan Tallo sudah selesai di-Islam-kan dan sebagai bukti maka dilaksanakanlah sembahyang Jumat yang pertama di Tallo pada 9 November 1607 atau 19 Rajab 1016.

Yang mengislamkan kedua raja tersebut adalah Abdul Makmur Khatib Tunggal atau lebih dikenal dengan nama Datok ri Bandang. Raja ini pulalah yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Sulawesi Selatan, termasuk Kerajaan Soppeng yang menerima agama Islam pada 1609 (Patunru, 1983: 19).

Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Kerajaan Makassar, pada awalnya ditolak oleh beberapa kerajaan lokal yang ada di daerah Bugis. Tiga kerajaan Bugis yang sangat menentang seruan raja Makassar agar menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaan adalah Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo dan Kerajaan Soppeng. Ketiga kerajaan yang dimaksud tersebut menolak dengan alasan bahwa seruan Kerajaan Makassar tersebut berlatar politik untuk menguasai wilayah-wilayah yang ada di Bugis ketika itu. Dasar Kerajaan Gowa untuk menyerukan kerajaan-kerajaan Bugis itu adalah berdasarkan perjanjian yang pernah dibuat jauh sebelumnya. Isi perjanjian yang dimaksud berbunyi "Barang siapa yang menemukan jalan kebaikan di antara mereka, maka hendaklah menyampaikan jalan kebaikan itu kepada yang lainnya".

Meski Kerajaan Gowa telah mengingatkan kembali isi perjanjian yang telah dibuat itu, namun kerajaan-kerajaan lokal Bugis itu tetap menolak seruan itu. Bagi Kerajaan Gowa, tidak ada jalan lain kecuali memaksa mereka untuk menerima ajaran Islam itu. Kerajaan Gowa lalu menyerang mereka, hanya dalam kurung waktu lebih tiga tahun semua kerajaan Bugis telah menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Jalan yang ditempu oleh Kerajaan Gowa tersebut, bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri yang menginginkan kedamaian (jalan damai). Pengislaman kerajaan-kerajaan Bugis itu dikenal dengan nama Perang Islam (*Musu Asallengeng*). Sebenarnya jika dicermati ketika pengislaman itu dilakukan dengan jalan perang, kecurigaan kerajaan-kerajaan Bugis itu yang menganggap hanya

politik belaka dari Kerajaan Makassar, ternyata tidak demikian. Setiap kerajaan yang sudah ditaklukkan itu dan rajanya di-Islam-kan, tidak satupun yang dijadikan sebagai kerajaan *lili* atau taklukan.

Meneliti keberadaan Kerajaan Soppeng pada periode awal terbentuknya kerajaan, tidak segampang membalik telapak tangan, hal ini terkait dengan data awal yang menyangkut masalah ini. Apalagi persoalan ini belum begitu banyak mendapat perhatian dari para sejarawan ataupun peminat sejarah. Itulah sebabnya, sejarah Kerajaan Soppeng pada masa awal terbentuknya sangat kurang data yang diperoleh, kalau pun ada kajian yang membahasnya, itu tidak lebih dari sepenggal bagian saja dari satu tulisan, sehingga belum terungkap secara utuh. Oleh sebab itu kajian ini sangat menarik untuk diteliti yang akan diarahkan untuk mengungkap dan menjelaskan tentang dinamika kesejarahan yang berkaitan dengan masa *Tomanurung* hingga masuknya agama Islam di Kerajaan Soppeng. Untuk itu, karya tulis ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang meliputi: Proses awal terbentuknya Kerajaan Soppeng, serta perkembangannya. Bukan hanya, tetapi juga menyangkut latar terbentuknya Persekutuan TellumpoccoE.

B. Berdirinya Kerajaan Soppeng

Di Sulawesi Selatan dikenal adanya kehidupan manusia purba atau prasejarah yang tersebar pada beberapa wilayah dan telah ditemukan bukti keberadaan mereka berupa peninggalan arkeologisnya. Salah satu daerah yang juga ditemukan beberapa peninggalan arkeologi sebagai bukti keberadaannya adalah di Kerajaan Soppeng. Mereka hidup berkelompok dalam satu kesatuan seketurunan, mereka hanya mempunyai hasil kebudayaan yang sangat tradisional dengan mempergunakan berbagai macam benda untuk dipakai sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Alat-alat

rumah tangga mereka kebanyakan terbuat dari batu, kayu dan tulang binatang (Hadimuljono, tt: 1).

Mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya hanya melakukan pertanian dengan menanam padi dan sayur-sayuran di atas bukit serta peternakan hewan. Bukti-bukti keberadaan mereka, hingga kini masih dapat ditemukan pada berbagai tempat di Kabupaten Soppeng. Orang-orang arkeologi menyebutnya sebagai jaman batu (jaman megalitik) atau biasa disebut dengan istilah tradisi megalitik (jaman batu besar) atau kebudayaan megalitik. Juga ditemukan adanya kehidupan manusia pada jaman neolitik atau jaman batu baru yang ditandai dengan alat-alat yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari yang terbuat dari batu, namun sudah diasah.

Peninggalan-peninggalan dari kebudayaan megalitik dan neolitik ini bertebaran pada beberapa tempat di daerah Soppeng, misalnya di daerah Tinco, Sewo, Goarie dan Umpungeng, Lawo, Pising, Salotungo, Sering dan Sekkanyili serta perkampungan tua di Marioriawa. Daerah-daerah yang disebutkan itu, dikategorikan merupakan perkampungan tua dengan bukti-bukti arkeologi yang ditemukan di daerah tersebut. Bukti-bukti itu adalah; *Petta Allangkanange*” yaitu struktur batu berundak, batu pemujaan, dolmen, dakon (*aggalacangeng*), batu dulang dan batu altar. Selain itu, juga ditemukan tinggalan arkeologi berupa batu bergambar (batu bergores), batu temu gelang, pragmen tembikar dan tulang binatang, serta lumpang batu (Hasanuddin, dkk. 2016:109-110). Selain itu, pada pengamatan yang dilakukan pada dua perkampungan tradisional, yaitu Sekkanyili dan Goarie terdapat situs tempat ditemukannya *Tomanurung* yang menjadi cikal bakal penguasa pertama yang mempunyai struktur pemerintahan yang cukup teratur.

Sistem pemerintahan mereka (sebelum *Tomanurung*) pun sangat sederhana, yaitu dalam satu kelompok diperintah oleh salah seorang dari kelompok itu yang paling tua dan disegani. Sistem pemerintahan

semacam ini sangat rawan terjadinya konflik di antara mereka sendiri sebab banyak sekali kesatuan kelompok di antara mereka. Saling menyerang di antara mereka tidak dapat dihindarkan. Kehidupan masyarakat yang serba tidak teratur itu, membuat mereka hidup dalam keterbatasan dan apa adanya. Diperkirakan ketika memasuki abad ke-14 masih ada kelompok masyarakat yang hidup sebelum terbentuknya Kerajaan Soppeng dan mereka hidup berkelompok di atas bukit dan lereng pegunungan dalam satu garis kekerabatan secara luas yang dipimpin satu orang dari kelompoknya sendiri yang disebut *matoa*.

Ketika zaman berkembang dan mengalami kemajuan, seiring dengan berkembangnya kehidupan sosial politik, satuan kelompok-kelompok masyarakat tersebut, kemudian membentuk kelompok dan satuan unit-unit pemerintahan yang sederhana. Wilayah pemerintahan itu mencakup wilayah sosial pemukiman pada kelompoknya saja yang kemudian disebut *wanua*. *Wanua* ini adalah unit sosial yang mempunyai pemerintahan sendiri, luasnya berbeda antara *wanua* yang satu dengan *wanua* yang lain. *Wanua* dalam artian ini adalah gabungan dari beberapa kampung. Pada masa lampau, kampung biasanya terdiri dari beberapa rumah saja, yaitu antara 10 sampai 20. Pada satu *wanua* biasanya terdapat satu tempat keramat yang biasa disebut *possi tana* dan juga terdapat pohon beringin yang besar dan kadang-kadang dijadikan sebagai tempat pemujaan atau *saukang* (Latif, 2012:75). *Wanua-wanua* yang ada di Soppeng sebelum terbentuknya Kerajaan Soppeng berdasarkan tradisi lokal menyebutkan sedikitnya sekitar 60 *wanua* yang dipimpin oleh seorang *matoa*.

Sebaran peninggalan situs-situs pra sejarah masa awal yang ada di daerah Soppeng, tersebar pada beberapa wilayah. Terutama pada sepanjang aliran Sungai Purba Walannae. Penelitian terbaru di wilayah Talepu, yaitu satu wilayah hunian yang berada di lembah Walannae, Soppeng menyimpulkan bahwa temuan berupa fosil gigi

pada lapisan sedalam 12 meter yang dianggap bukti tertua eksistensi sebuah kebudayaan yang pernah ada di daerah Soppeng. Pertanggalan aktivitas budaya purba yang diperoleh dari wilayah Soppeng memberikan gambaran bahwa sangat memungkinkan Sulawesi Selatan adalah merupakan jembatan antara Jawa dan Flores sebelum kehadiran manusia modern di Sulawesi pada 40 ribu tahun yang lalu (Fakhri, 2016:85).

Bahkan masa lebih tua lagi juga ditemukan di situs Talepu, Soppeng, yaitu jaman batu dengan teknologi pembuatan yang sangat sederhana. Alat-alat batu yang banyak ditemukan adalah di sepanjang aliran Sungai Purba Walannae yang disebut artepak batu Cabenge. Kenyataan itu menunjukkan bahwa manusia purba di wilayah Soppeng telah ada sekitar 200.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Meskipun demikian, sampai sekarang penemuan tentang fosil manusia purba belum ada (Suryatman,dkk, 2016: 38). Juga belum ditemukan tentang fase hunian dari manusia purba yang pernah menghuni wilayah daratan di Soppeng pada masa itu. Termasuk fosil manusia purba yang diperkirakan termasuk jenis *Pithecanthropus Erectus*, pencipta manusia Cabbenge, sampai saat ini belum ditemukan (Hadimuljono,tt:2).Hanya alat-alat batu yang dapat ditemukan sehingga dapat memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana cara-cara hidup mereka ketika berhadapan dengan alam seklitarnya.

Dari gambaran itu menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, di daerah Soppeng telah hidup manusia purba (prasejarah) yang dapat dibuktikan dari berbagai tinggalan yang ditemukan pada masa sekarang. Tinggalan-tinggalan itu berupa alat-alat batu yang dibuat secara sederhana sesuai dengan masanya. Masa itu mendahului masa 60 orang *matoa* yang merupakan peralihan ke masa *tomanurung*. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa masa yang paling menentukan adalah lahirnya Kerajaan Soppeng pada masa transisi, yaitu dari masa

prasejarah ke masa munculnya *tomanurung*. Pada masa pemerintahan 60 *matoa*, sistem pemerintahan wilayah tidak mencerminkan suatu tatanan pemerintahan yang baik. Sebab 60 *matoa* yang pernah memerintah, mereka berdiri sendiri dan aturannya hanya berlaku untuk kelompoknya sendiri. Antara satu *matoa* dan *matoa* lainnya tidak tersinergi sehingga terjadi ketidakseimbangan kehidupan karena yang kuat menguasai yang lemah atau istilah politiknya *sianre bale taue*. Kondisi itu dijelaskan dalam *lontarak*;

“... Dena gare' riaseng arung aga tettassisenna tauwe siewa ada. Pada marana ana'mani taue. Nasionre balena nasiabbelli bellayanna taue. De'toni ade'E apa' iya sia riasenggebicara. Nariyaseng Pitu turungengngi de' arung siaganiro ittana sianre bale taue. Tekke ada tekke bicara ...” (*Lontarak Soppeng*:21 dan Hamid,1991:33).

Artinya:

“... Pada masa itu tidak ada yang namanya penguasa (*arung*) yang dipertuan sehingga tidak ada saling memberikan informasi satu sama lainnya, kecuali hanya kepada kelompoknya saja. Kehidupan masyarakat kacau balau sebab tidak ada aturan yang mengatur dan mengikat mereka. Siapa yang kuat itu yang berkuasa (*sianre bale*) sehingga kehidupan menjadi kacau balau. Tidak ada saling mengharap dan tidak ada aturan hukum, apalagi yang namanya lembaga peradilan. Kondisi ini berlanjut selama tujuh turunan dan tidak mengenal penguasa atau peradilan ...”.

Pada masa ketidakadilan itu, terjadi kemiskinan dan kemelaratan yang dialami oleh penduduk atau kelompok *anang*. Penyebabnya sehingga kondisi kemiskinan dan kemelaratan yang terjadi itu karena semua tanam-tanaman tidak membawa hasil. Tanaman padi selalu kena puso sebab kemarau panjang, bahkan untuk bibit padi yang akan ditanam sudah tidak ada lagi. Masyarakat mau makan namun tidak ada bahan makanan yang dapat dimakan. Oleh sebab

itu, terjadi peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dimana-mana terjadi pencurian, masyarakat sudah tidak kenal teman atau lawan yang penting dapat bertahan hidup dengan cara apapun. Realitas ini diperparah sebab tidak adanya hukum yang memayungi mereka, tidak ada raja atau pemimpin yang dapat didengarkan nasehat dan perintahnya. Akibatnya, masyarakat berbuat semaunya karena ketiadaan pemimpin yang menjadi panutan mereka selama bertahun-tahun lamanya.

Kondisi kacau yang diibaratkan *sianre bale tawe* berlangsung cukup lama, yaitu diperkirakan berlangsung selama *pitu pariama* atau tujuh turunan. Kondisi itulah yang mengakibatkan para pemimpin *anang* menjadi risau sebab masyarakat semakin sulit terkendali. Kehidupan para kelompok *anang* yang berjumlah 60 itu harus mencari solusi. Dalam keadaan bingung, *tomanurung* muncul untuk mendamaikan mereka yang sedang bertikai. Kehadiran *Tomanurung* merupakan sejarah tentang awal terbentuknya sistem pemerintahan baru, yaitu dari pemerintahan atau kekuasaan kelompok *anang* (kaum) ke kelompok persekutuan *anang* yang lebih luas, yaitu kerajaan. Konsep *tomanurung* bagi rakyat Soppeng secara khusus adalah dilukiskan dengan penuh ceritera khayalan sehingga merupakan suatu uraian mithologis. *Tomanurung* dianggap sebagai awal adanya raja yang memulai dan menyusun pemerintahan (Hamid, 1974: 8).

C. Masa *Tomanurung*: Dua Datu *Seddi Ata*

Berakhirnya masa prasejarah di daerah Soppeng, maka fase baru muncul yaitu adanya masyarakat yang hidup secara berkelompok yang terbagi dalam dua kelompok besar. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut terbagi dan menyebar pada dua wilayah besar yang ada di daerah ini, yaitu Soppeng Riaja sebanyak 30 kelompok yang berpusat di Sewo. Sedang 30 kelompok lainnya berpusat Gattareng

yang di sebut Soppeng Rilau. Masing-masing masyarakatnya hidup berkelompok-kelompok, baik dalam kelompok besar di dalam *wanua*, maupun kelompok kecil di dalam *limpo*. Masing-masing kelompok besar dan kecil menempati wilayahnya serta memiliki pemimpin yang disebut *matoa*. *Limpo-limpo* yang ada kemudian menggabungkan dirinya ke dalam satuan kelompok besar yang disebut *wanua* (Hadrawi, 2016: 153-154).

Dalam perkembangannya, ke-60 *matoa* ini mengalami kesulitan sebab terjadinya masa paceklik di wilayah mereka. Kekacauan dan pertikaian terjadi sebab masalah kehidupan sehari-hari yang tidak dapat terpenuhi. Kelompok yang satu menyerang kelompok yang lainnya sehingga terjadi perang saudara. Pada masa itu manusia tidak lagi terpola oleh sistem hukum dan tata aturan kehidupan, kecuali mereka hanya mengenali hukum rimba di mana kelompok yang kuat akan menguasai kelompok yang lemah. Tidak ada lagi aturan dan hukum yang ditaati, apalagi peradilan. Pada masa inilah yang kemudian dikenal sebagai masa kegelapan. Selain itu, peradaban-peradaban yang telah terbangun di antara mereka, hancur akibat ketiadaan panutan dari seorang pemimpin yang baik. Kondisi itu berlangsung hingga ditemukannya seorang pemimpin yang dapat mempersatukan mereka kembali dalam suatu kehidupan baru yang diatur dengan sistem aturan yang ditaati dan akan mendapat ganjaran jika dilanggar.

Untuk mengatasi persoalan yang membelit mereka, maka seluruh *matoa* sepakat untuk mengadakan suatu pertemuan untuk membahas masalah yang sedang dihadapi oleh mereka. Berkumpullah semua pemimpin kelompok untuk membahas situasi yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam pertemuan itu, semua peserta yang hadir menginginkan adanya seorang pemimpin yang dapat memberikan pengayoman dan diikuti perintahnya. Ketika pertemuan

sedang berlangsung, tiba-tiba mereka diusik oleh dua ekor burung kakatua yang terbang rendah dan melintas di atas tempat pertemuan para *matoa* (Wawancara Syarika, Soppeng, 25 Mei 2017; baca juga: Sumange, 2003: 122-126).

Burung kakatua itu rupanya sedang memperebutkan setangkai buah padi yang sudah menguning. Melihat kenyataan itu, para *matoa* merasa heran sebab sudah sekian lama mereka tidak pernah lagi melihat padi apalagi untuk dimakan. Oleh karena itu, tiga orang *matoa* yang memimpin pertemuan itu (*Matoa* Ujung, Botto dan Bila) berinisiatif untuk mengikuti kemana arah terbangnya burung kakatua (*cakkalle*) itu. Untuk tujuan itu, maka ditunjuklah salah seorang dari mereka yang bernama Djunet yang disertai beberapa orang untuk mengikuti burung kakatua tersebut. Ternyata burung itu singgah di depan sebuah mulut gua yang kemudian dikenal dengan nama Sekkanyili (Nur, 2007: 23). Lebih lanjut dijelaskan bahwa setelah mengetahui tempat terakhir burung kakatua itu terbang, lalu orang yang ditugaskan mengikutinya, kembali melaporkan kepada *matoa* Bila, *matoa* Ujung dan *matoa* Botto. Setelah mendengar laporan itu, mereka secara serentak berangkat ke daerah Sekkanyili untuk melihat apa sebenarnya yang ada di daerah itu. Tiba di daerah itu, mereka terkejut sebab ternyata di situ terdapat *wanua* yang dinamakan Sekkanyili dan sangat subur tanahnya. Wilayah ini diperintah oleh seseorang yang bergelar *to manurung* (Wawancara: Cece, pada 9 Februari 2017). Anehnya, walaupun wilayah-wilayah yang di sekitarnya mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang berkepanjangan, namun wilayah ini tidak pernah mengalami hal seperti itu.

Namun, sebelum para *matoa* yang ada di daerah Soppeng Riaja berangkat menemui *Tomanurung* Sekkanyili, maka *matoa-matoa* itu menyampaikan kepada para *matoa* yang berada di daerah Soppeng Rilau perihal keberadaan *Tomanurung* di Sekkanyili. Hal itu tercatat

dalam sumber lokal atau lontarak seperti berikut:

.../Napaisenna matoa Tinco, Jennang Pesse angkanna matoa Padduissengnge To Soppeng Riaja/Napoadanni matoa Ujung, Matoa Botto, Matoa Bila/Makkeda engkaro manurung ri Sekkalnyili/Nae makkedai Matoa Bila, Matoa Botto, Matoa Ujung/Madecengngi tapaisengi padduisenna Soppeng Rilau/Matoa Salotungo, nakadoi padduisseng Riaja/Nassiturusini suroe tampaiwi, purai kuwa engkani Matoa Padduisseng Rilau/Makkedani Matoa Soppeng Riaja, engka tomanurung ri Sekkanyili/Napekkua gare tangngamu/Makkedai Matoa Soppeng Rilau/Madecengngi lao takkarengngi ale/Sarekuammaseammi Puangnge, naia dongiri temmatipa'I mpawai ri mawe ri mabela/Nauma pattarommeng nateaiwi, tateaitoi, puraikuwa lokkani Matoae ennenggepulona.../(Lontarak Soppeng:152-153)

(diterjemahkan secara bebas):

.../Ketika matoa Tinco, Jennang Pesse serta segenap matoa-matoa wilayah persekutuan Soppeng Riaja mengetahui bahwa di daerah Sekkanyili telah muncul seorang Tomanurung/ Segera disampaikanlah hal tersebut kepada matoa Ujung, matoa Botto dan matoa Bila, bahwa:/Ada Tomanurung di Sekkanyili./Berkata matoa Bila, matoa Ujung dan matoa Botto; Sebaiknya hal itu diberitahukan pula kepada ketua persekutuan Soppeng Rilau, yaitu matoa Salotungo"/ Perkataan ketiga matoa tersebut disetujui oleh ketua persekutuan Soppeng Riaja/Maka disepakatilah untuk mengundang mereka/Setelah itu, pada datang 30 matoa dari Soppeng Rilau/lalu berkata matoa-matoa Soppeng Riaja: Ada Tomanurung di daerah Sekkanyili, bagaimana pendapatmu/Berkata ketua Soppeng Rilau/Sebaiknya kita semua enampuluh matoa datang ke sana untuk bersembah sujud, semoga kita dirahmatinya/Semoga beliau berkenan memimnpin dan mengayomi kita semua dalam berbagai hal/ Baik yang dekat maupun yang jauh/Kendatipun ada putusan kita, tetapi tidak disukainya/Kita pun tidak menyukainya.../

Setelah 30 orang *matoa* dari Soppeng Rilau telah hadir dan setuju atas usulan dari *matoa* Ujung, *matoa* Botto dan *matoa* Bila, maka mereka berangkat menuju Sekkanyili untuk menemui *Tomanurung* tersebut. Ketika *matoa* Bila bersama *matoa-matoa* lainnya tiba di depan sebuah gua dan dilihatnya seseorang yang berpakaian indah sedang duduk di atas sebuah batu besar. Melihat orang yang sedang duduk itu, *matoa* Bila lalu bertanya; Siapa gerangan yang sedang duduk di atas batu itu? Salah seorang menjawab bahwa; Itulah yang disebut *Tomanurung* Sekkanyili. Setelah mengetahui bahwa benar itu adalah *Tomanurung*, maka *matoa* Ujung, *matoa* Bila, dan *matoa* Botto mewakili *matoa-matoa* lainnya yang ada di Soppeng membuat suatu perjanjian dengan *Tomanurung* itu.

Perjanjian itu tercatat dalam *lontara* Soppeng seperti berikut:

“.../Makkedai *matoa* Ujung, *matoa* Bila dan *matoa* Botto/
Iana kiengkang maie Lamarupe maelokkeng riamaseang/Ajana
muallajang/Naikona kipopuang/Mudongiri temmatippa'keng/
Musalipuri temma-dingikkeng/Naikona Puwakkeng ri mawe' ri
mabelae/Namuna pattarommeng muteaiwi kitei mutonisa...”/
(*Lontarak* Soppeng, 152).

Terjemahannya:

“.../Berkata *matoa* Ujung, *matoa* Bila, *matoa* Botto/Tuan,
kami datang kemari meminta kebaikanmu/Janganlah engkau
menghilang, engkaulah kami pertuan/Engkau jaga kami dari
gangguan burung pipit/Engkau selimuti kami agar kami tidak
keinginan/Engkau satukan kami seperti ikatan padi, agar
kami tidak bercerai/Engkaulah Tuan kami, yang jauh atau
yang dekat/Jika anak istri kami pun kau benci, akan kami
ceraikan pula/Ataukah ada keputusan kami atau pendapat
kami, Tuan tidak menyetujuinya, maka kami tidak akan
mempertahankannya...”/

Mendengar janji tiga orang *matoa* yang mewakili 60 orang *matoa* di daerah Soppeng, maka *Tomanurung* kemudian berkata:

“.../Makkedani Petta Manurungge ri Sekkanyili: “*Temmubalecorappa*’, *temmuadduwa nawanawappa*, *siceppani matoae ennenggepulona Petta Manurungge ri Sekkanyili/Mkkedatopi Puang Petta Manurungge ri Sekkanyili: Iyatopa kupoadakko mennang, engkatotu sapposisekku tumanurung ri Libureng (Goarie)/Madeceng mulikbureng ale iko to Soppengge/Kudua sapparekko deceng mennang/Naiya datu Soppeng Rilau, datu Soppeng Riaja/Mupasituru tangnga’mu lao mualai/Purai’ kua lokkani matoae ennenggepulona/Lettu ri Libureng kua riasengge GoariE/Napoleini To Manurungge tudang ri balubu naddepparie/Makkedani Matoa Ujung, Matoa Botto dan Matoa Bila/Iyanamai kiengkang Lamarupe’E maelokkeng muamaseang/Ajana muallajang, naiko kipepuang/Mudongiri temmatipa’keng, musalipuri temmadingikkeng, muwassei temmakapakkeng/Naiko puwakkeng ri mawe ri mabelae/Namau nanammeng napattarommeng muteaiwi, kiteai matonasia’/Makkedai Manurungge ri GoariE/Temmubaleccorappa, temmuadduannawa-nawapa, sikadoni adaewe/Iyanaro riaseng akkuluadangenna To SoppengE, nappupunna lettu ri To munrinna datue ri Soppeng natorimunrinna To SoppengE/Makkuniro ammulanna nadua datu ri Soppeng...”/(Lontarak Soppeng: 153).*

Terjemahan bebasnya:

“.../Berkatalah Paduka TomanurungE ri Sekkanyili: Hanya apabila kamu semua tidak akan mengkhianati diriku/ Hanya apabila engkau semua tidak mensejahterakan diriku/ Maka sepakatlah antara Tomanurung di Sekkanyili dengan keenampuluh *matoa*/Selanjutnya, Tomanurung kembali berkata; “Ada pula saudara sepupu satukaliku sebagai Tomanurung di Libureng/Lebih baik engkau semua bersepakat agar kami berdua mencari jalan kebaikan untukmu semua/Dia adalah datu Soppeng Rilau dan aku datu Soppeng Riaja, bersepakatlah dan jemputlah dia/Setelah itu, berangkatlah keenampuluh *matoa* tadi untuk menjemput Tomanurung ri GoariE/Diketemukanlah ia sedang duduk di atas gucinya/Berkatalah *matoa* Bila, *matoa* Ujung dan

matoa Botto/Kedatangan kami semua hanyalah semata-mata untuk memohon rahmatmu/Janganlah hendaknya Paduka kembali ghaib (menghilang dan kembali ke Kayangan) agar Padukalah yang dipertuan untuk memimpin kami kepada jalan keselamatan dan kesejahteraan/serta melindungi kami dari segala marabahaya/Mempersatukan kami secara ketat dan penuh berkah/Engkaulah raja, penguasa kami dalam segala hal/Kalaupun ada anak keturunan kami/putusan kami yang engkau tidak sukai, kamipun juga tidak akan menyukainya/

Berkatalah *Manurung*ge ri GoariE:

“... Hanya saja apabila engkau semua tidak hianat kepadaku, dan engkau semua tidak akan menderitakan saya”/ Disepakatilah ikrar tersebut/Itulah disamakan dengan ikrar atau janji setia antara rakyat (orang Soppeng) dengan raja. Hal ini akan berkelanjutan secara turun temurun sampai kepada anak keturunan kedua belah pihak. Demikianlah asal usul sehingga ada dua raja/datu di Soppeng...”/

Ketika ikrar itu telah disepakati bersama, lamaran lalu dilaksanakan untuk mengawinkan antara kedua *Tomanurung* itu, tapi rakyat Libureng keberatan. Penolakan itu dilatari alasan bahwa setelah perkawinan dilaksanakan, rakyat Libureng (Soppeng Rilau) tidak menginginkan kalau rajanya hanya dijadikan sekedar sebagai ratu atau permaisuri saja. Masyarakat menginginkan rajanya tetap memangku jabatan sebagai raja Marioriwawo dan *datu* Soppeng Rilau. Tuntutan itu disetujui, maka dilangsungkanlah perkawinan antara *Tomanurung* di Sekkanyili yang bernama La Temmamala dengan *Tomanurung* di Goarie, Libureng yang bernama La Temmapuppu.

Perkawinan antara kedua *Tomanurung* tersebut telah mengakhiri kekuasaan dari para *matoa* dan beralih di bawah kuasa *Tomanurung*. La Temmamala kemudian menjadi *Datu* Soppeng Riaja yang pertama dan La Temmapuppu juga menjadi *Datu* di Soppeng Rilau yang pertama.

Sejak usai perkawinan, maka lahirlah dua kerajaan kembar yaitu Kerajaan Soppeng Riaja yang diperintah oleh La Temmamala dan Kerajaan Soppeng Rilau diperintah oleh La Temmapuppu. Kenyataan itu melahirkan kerajaan kembar yang dalam istilah lokal disebut *dua arung seddi ata* atau dua raja satu rakyat (Nur, 2007:24).

Perihal keberadaan *Tomanurung* Goarie dan *Tomanurung* di Sekkanyili, kehadirannya sangat berbeda. *Tomanurung* yang ada di Sekkanyili ditemukan atas petunjuk dua ekor burung kakatua yang melintas di atas tempat pertemuan para *matoa* yang sedang bersidang untuk membahas kondisi *wanua* yang dilanda kekeringan. Sedang *Tomanurung* Goarie ditemukan oleh anak seorang *matoa* yang ada di Marioriwawo bernama La Pateppa. Penemuan itu hanya secara kebetulan ketika La Pateppa bersama tukang gembalanya disuruh oleh ayahnya mencari kerbaunya yang hilang. La Pateppa mencari kerbaunya ke sana sini, akhirnya ia sampai pada suatu hutan bukit tidak jauh dari rumahnya.

Berdasarkan tradisi lisan bahwa ketika La Pateppa mulai memasuki hutan tersebut, ia mendengar tangisan seorang bayi yang tidak diketahui asal suaranya. La Pateppa berusaha mencari suara tangisan bayi itu, akhirnya ia berhasil menemukan sang bayi tergelatak di atas pecahan guci atau *balubu*. La Pateppa sangat kaget sebab kerbau yang dicarinya ternyata berada di samping tempat bayi itu. Kerbau itu menghentak-hentakkan kakinya seakan-akan mengatakan bahwa di kaki saya ada seorang bayi yang menangis. Antara penasaran dan takut, ia lalu mendekati kerbau dan bayi tersebut dan ternyata ia bukanlah setan atau semacamnya. La Pateppa menyuruh gembalanya menyampaikan temuan itu kepada ayahnya, yaitu *matoa* Liburan dan *matoa-matoa* lainnya. Mengetahui tentang temuan itu, lalu para *matoa* berdatangan untuk menyaksikan kebenarannya (Wawancara: I Daya, Libureng, 21 Februari 2017).

Menurut seorang informan menyatakan bahwa setelah semua *matoa* di Marioriwawo menyaksikan keberadaan bayi tersebut, maka mereka serentak menyatakan:” *Iyanae riaseng Tomanurung, nasaba’ tenrisseng amana-inana,tenrisseng apolengenna, iyyanae najello’ Dewata Seuwwae riyala pappuangeng, naiya mangkauke’ki*”. Terjemahannya adalah:” Inilah yang disebut sebagai *Tomanurung* sebab tidak diketahui dari mana asalnya, siapa ayah dan ibunya. Dialah yang ditunjuk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dijadikan sebagai pemimpin bagi kita semua”. Setelah itu, mereka juga sepakat untuk mengangkatnya menjadi sebagai *Datu* Marioriwawo meskipun ia masih dalam keadaan bayi (Wawancara Khaerul di Soppeng, 17 Mei 2017).

Berdasarkan tradisi lisan yang berkembang disebutkan bahwa *Tomanurung* Goarie bernama La Temmapuppu yang ketika ditemukan untuk pertama kali masih dalam keadaan bayi sehingga ia dipelihara oleh *matoa* Libureng. Kenapa *matoa* Libureng yang memelihara *Tomanurung* tersebut, karena ternyata ia hanya mau menyusui pada isteri *matoa* Libureng. Hingga menanjak dewasa ia dipelihara dan dibesarkan oleh *matoa* Libureng bersama isterinya. Ketika telah dewasa ia membuat suatu janji terhadap keluarga *Matoa* Libureng bahwa:” *Naiya mula lolongekka, iyanaritu ama’ku-ina’ku, apa iyamitu nassabari natennasungkengnga bawi, tenna jikkika bukkang, tenna katulungnga bere-bere*”. Artinya: “Siapa yang mula pertama menemukan aku, maka dialah ayah bundaku; sebab dialah sehingga saya tidak disungkur babi, tidak disambar burung elang serta tidak dikerumuni semut” (Wawancara Syarika, Soppeng, 19 Mei 2017).

Jika dicermati dengan baik hasil wawancara tersebut, sangat memungkinkan bahwa *Tomanurung* di Goarie yang bernama La Temmapuppu, lebih dahulu ditemukan oleh masyarakat Soppeng Rilau melalui La Pateppa, dibanding ditemukannya *Tomanurung* La Temmammala di Sekkanyili melalui petunjuk dua ekor burung

kakatua. Ketika La Temmamaala ditemukan untuk pertama kalinya, lalu ia diminta oleh para *matoa* yang ada di Soppeng Riaja untuk menjadi pemimpin mereka, ia tidak bersedia kecuali dengan satu persyaratan. Kecuali ia dinikahkan terlebih dahulu dengan sepupu satu kalinya yang bernama La Temmapuppu, yaitu *Tomanurung* di Goarie, di Soppeng Riaja.

Persyaratan yang diminta oleh *Tomanurung* La Temmamala itu kemudian dilaksanakan oleh para *matoa-matoa* yang mewakili seluruh rakyat Soppeng Riaja. Setelah pernikahan dilaksanakan barulah La Temmamala diangkat sebagai raja pertama di Kerajaan Soppeng Riaja. Begitu juga isterinya tetap menjabat sebagai raja Soppeng Rilau dan *datu* Marioriawa. Sejak itulah mulai berdiri Kerajaan Soppeng yang dikenal dengan nama Kerajaan Soppeng Riaja yang diperintah oleh La Temmamala *Tomanurung* di Sekkanyili dan Kerajaan Soppeng Rilau yang diperintah oleh La Temmapuppu *Tomanurung* di Goarie, Libureng. Pada masa inilah muncul istilah setempat yaitu *Dua Arung na seddi* ata; Artinya dua raja satu rakyat (Patunru, 2004: 96).

Perbedaan waktu ditemukannya antara kedua *Tomanurung* itu sangat jelas, yaitu kalau kita perkirakan umur kedua *Tomanurung* saat dinikahkan adalah 17 tahun, maka itu pulalah perbedaan waktu ditemukan antara keduanya. Namun pertanyaannya, kenapa *Tomanurung* La Temmapuppu jarang diberitakan tentang awal kehadirannya di Goarie, Libureng, baik dalam *lontarak* Soppeng maupun dalam kajian lainnya. Justru ia baru dikenal ketika *Tomanurung* La Temmamala diketemukan atas bantuan burung kakatua. La Temmamala tidak bersedia dijadikan pemimpin atau *datu* di Soppeng Riaja walaupun atas permintaan para *matoa* jika ia tidak dinikahkan terlebih dahulu dengan sepupu satu kalinya yang bernama La Temmapuppu *Tomanurung* Di Goarie. Pertanyaan ini sampai sekarang belum dapat dijelaskan secara detail sebab tidak adanya

(kurang) data pendukung.

Usai dilakukan kontrak atau perjanjian antara *Tomanurung* La Temmamala dengan *para matoa* yang mewakili rakyat banyak, maka didirikanlah sebuah istana untuk beliau. Istana kedatuan Soppeng ini didirikan di daerah Tinco (Makmur dan Hadrawi, 2016: 169), juga dibuatkan sawah sebagai sumber penghidupan bersama keluarganya, dan sawah ini kemudian disebut *galung arajang*. Pembuatan istana dan pembukaan *galung arajang* adalah merupakan kewajiban rakyat Soppeng sebab telah menjadi hak-hak dari raja atau *datu* yang baru diangkat. Sebaliknya raja atau *datu* harus dapat memberikan perlindungan dan keamanan serta harus mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

Daerah Tinco dipilih sebagai tempat didirikannya istana untuk *datu* Soppeng bersama permaisurinya sebab mengingat wilayah ini sangat potensial letaknya. Topografi wilayahnya sangat memungkinkan sebagai tempat pendirian sebuah istana sebab tanahnya datar dan landai, letaknya 120 meter di atas permukaan laut (mdpl). Selain itu, juga terdapat sebuah aliran sungai dari Sungai Lawo yang mengalir pada sebelah selatannya sehingga penduduk yang ingin menggali sumur cukup hanya kedalaman 2—3 meter saja sudah dapatkan air dari dalam tanah. Dengan kondisi tanah yang mengandung air tanah yang cukup dangkal sehingga sangat memungkinkan penduduk melakukan aktifitas di bidang pertanian dan perladangan. Dan di daerah ini pula telah dilakukan penelitian serbuk sari (*pollen*) ditemukan *poaceae* yaitu jenis spesies dari padi atau jagung (Makmur dan Hadrawi, 2016: 169).

Sejak dahulu, pertimbangan untuk pembukaan sebuah kampung atau *wanua* selalu mempertimbangkan sosial-politik, topografi alam yang baik dan potensial serta ketersediaan sumber makanan yang cukup. Dari pengamatan yang dilakukan terhadap wilayah ini, pada

tempat ditemukannya *Tomanurung* di Goarie, Libureng, wilayah ini juga sangat subur sehingga sangat potensial dijadikan sebagai tempat pemukiman. Letaknya berada di atas puncak bukit agak jauh ke selatan dari wilayah Tinco sangat baik dan subur untuk bidang perladangan. Kegiatan perladangan di wilayah ini sampai sekarang masih dilakukan oleh penduduk setempat, selain itu juga terdapat sebagian kecil penduduk yang menggeluti bidang pertanian padi ladang dan padi sawah. Dan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari dapat diperoleh dari aliran air pegunungan yang banyak mengalir serta beberapa mata air.

Meskipun *datu* La Temmamala dan permaisurinya yang bernama La Temmapuppu hidup sebagai suami isteri, namun kedua *Tomanurung* itu tetap menjabat jabatannya yang semula. La Temmamala sebagai *datu* di Kerajaan Soppeng Riaja dan La Temmapuppu sebagai *datu* di Kerajaan Soppeng Rialau. Perubahan status dua raja satu rakyat di Kerajaan Soppeng terjadi setelah beberapa tahun kemudian. Namun demikian, perubahan pasti terjadi pasca dilakukannya perkawinan antara *Tomanurung* La Temmamala dengan *Tomanurung* La Temmapuppu adalah lahirnya kerajaan kembar Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau.

Keunikan dari proses lahirnya kerajaan kembar Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau, terletak pada proses terjadinya. Prosesnya tidak terjadi karena melalui suatu perang antara keduanya, seperti Kerajaan Kembar Gowa-Tallo yang melahirkan Kerajaan Makassar terjadi karena adanya perang. Kerajaan Gowa menyerang Kerajaan Tallo, Tallo kalah sehingga dijadikan sebagai kembaran, bukan sebagai kerajaan taklukan atau *lili*. Bahkan dalam perkembangannya, Kerajaan Tallo dijadikan sebagai sahabat sejati dengan memberikan suatu keistimewaan bahwa siapa yang menjadi raja Tallo, maka secara otomatis ia pula yang berhak menjadi *Mangkubumi* Kerajaan Makassar

secara turun temurun. Di Soppeng dikenal adanya Dua *datu seddi ata* yang artinya dua pemimpin namun satu raja. Ini terjadi setelah dua kerajaan yang pemimpinnya kawin, namun keduanya tetap menjadi raja pada kerajaannya masing-masing, yaitu Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau.

D. Terbentuknya Kerajaan Soppeng Satu Raja Satu Rakyat

Ada beberapa bagian dari sejarah Soppeng yang terpenggal sehingga hilang dalam catatan sejarah, baik dalam *Lontarak Soppeng* maupun dalam sumber-sumber atau kajian setelah itu. Hal ini tidak diketahui dengan pasti penyebab hilangnya sebagian kisah itu. Terutama pada periode *datu-datu* setelah kedua *Tomanurung* itu hilang atau wafat. Ada dugaan bahwa penyebab hilangnya bagian sejarah itu karena disengaja, terutama untuk menghilangkan jejak *Tumanurung* di Goarie. Hal ini sangat jelas terlihat ketika periode Kerajaan Soppeng yang tunggal dan dalam *lontarak* dikenal *seddi datu seddi ata* yang artinya satu pemimpin satu rakyat (Nur,2007:47). Nama *Tomanurung* ini hampir tidak pernah disebutkan keberadaannya, kecuali jika yang berkuasa di daerah ini berasal dari keturunan *Tomanurung* di Goarie, barulah nama *Tomanurung* ini disebut-sebut.

Perkembangan Kerajaan Soppeng Rilau dan Soppeng Riaja pada periode setelah *Tomanurung* menghilang (mairat ke Kayangan), tidak terlalu banyak diketahui oleh masyarakat, terutama Soppeng Rilau. Data dan keterangan, baik berasal dari sumber lokal (*lontarak*) maupun dari kajian lainnya tidak ditemukan penjelasan mengenai pemerintahan yang ada di Kerajaan Soppeng Rilau pada masa pemerintahan *Tomanurung* hingga masa pemerintahan *datu* Soppeng Rilau (*datu* Mario) ke-12. Hanya disebutkan bahwa sebelum terjadinya perang antara Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau, datang *arung* Umpungeng ke Soppeng Riaja untuk meminta agar *datu* Soppeng Riaja

mau menerima wilayahnya masuk ke dalam wilayah pemerintahan Kerajaan Soppeng Riaja.

Maksud *arung* Umpungeng untuk menggabungkan wilayahnya ke dalam wilayah Kerajaan Soppeng Riaja karena ia tidak mau diperintah oleh *datu* Soppeng Rilau, La Makarodda. Arung Umpungeng pun berjanji bahwa ia tidak akan mengkhianati Kerajaan Soppeng Riaja bilamana ia diterima bernaung di bawah bendera Kerajaan Soppeng Riaja. Maksud baik dari *arung* Umpungeng itu, lalu disampaikan kepada *datu* Soppeng Riaja melalui perantara *arung* Bila. *Datu* Soppeng Riaja tidak keberatan atas niat baik itu dan menerimanya sebagai anggota dalam Kerajaan Soppeng Riaja. Sebelum *arung* Umpungeng diterima oleh La Mataesso, terlebih dahulu ia diterima oleh Paccaleppa Tau Tongengnge dan terjadi dialog antara keduanya seperti berikut:

Paccaleppa Tau Tongengnge: “Apa gerakan yang membawa engkau kemari, sehingga engkau datang bersama rakyatmu”.

Arung Umpungeng:”Kedatangan kami ini tidak lain adalah dilandasi oleh pengharapan yang sangat besar terhadap Soppeng Riaja, karena kami tidak sudi bersekutu dengan orang yang berbuat kesalahan (orang yang dimaksud adalah La Makkarodda)”.

Paccaleppa Tau Tongengnge:”Hanya dengan ucapan yang keluar dari hati nuranimu”.

Arung Umpungeng:”Dari ujung rambut sampai ujung kaki, celakalah aku kalau sampai hati bermaksud tidak baik terhadap yang dipertuan baginda raja Puang LipuE”.

Paccaleppa Tau Tongengnge:”Kuulangi sekali lagi hai *Arung* Umpungeng, tidakkah nantinya kamu akan mengkhianati Puang LipuE, karena bagaimana pun juga engkau itu termasuk orang Soppeng Rilau...”.

Arung Umpungeng:”Kubenarkan kehati-hatianmu/

kewaspadaanmu itu, akan tetapi dengarkanlah, bahwa sekiranya aku berkata bohong, maka janganlah ada anak keturunanku beroleh kebaikan dan biarkanlah mereka itu bercerai-berai seperti pecahnya kaca beling atau hancur luluh bagaikan telur, apabila ternyata kemudian aku mempunyai niat jahat terhadap Puang LipuE “.

Setelah usai pertemuan antara Paccaleppa Tau Tongengge dengan *arung* Umpungeng, maka beliau lalu mempertemukan dengan *datu* Soppeng Riaja, La Mataesso dengan *arung* Umpungeng. *Arung* Umpungeng lalu menyampaikan kembali tentang keinginannya bergabung dengan Kerajaan Soppeng Riaja yang disertai beberapa alasan. Setelah mendengarkan keseluruhan alasan-alasan *arung* Umpungeng, maka *datu* Soppeng Riaja menerima dengan senang hati. Karena itu diadakanlah jamuan makan bersama dengan suguhan minuman *tuak* yang dijadikan sebagai dasar bagi *arung* Umpungeng dalam mengucapkan sumpah dan janjinya, yaitu: “Adapun *tuak* (nira) yang saya sudah minum, jangan hendaknya keluar kembali melalui mulut, tidak pula melalui lubang dubur/penis. Akan tetapi biarkanlah keluar ke samping karena usus atau lambung yang robek. Biarkanlah anak keturunanku tidak beroleh kebaikan apa-apa sekiranya aku ternyata kelak melanggar kebijaksanaan baginda raja, kecuali apabila aku teraniaya” (*Lontarak* Soppeng dalam; Hamid, 1991:115).

Bergabungnya wilayah Umpungeng ke dalam payung Kerajaan Soppeng Riaja membawa dampak politik yang luar biasa bagi Kerajaan Soppeng Riaja sebab mengakibatkan posisi politik Kerajaan Soppeng Rilau menjadi lemah. Itulah salah satu sebab sehingga La Makkarodda *datu* Soppeng Rilau mengalami kekalahan ketika berperang melawan Kerajaan Soppeng Riaja. Dugaan penyebab terjadinya perang karena ambisi *datu* Soppeng Rilau La Makkaroda untuk menguasai Kerajaan Soppeng Riaja.

Kekalahan La Makkarodda dalam perang itu, menyebabkan ia harus meninggalkan kerajaannya untuk mencari sekutu guna membalas kekealahannya itu. Tetapi sebelum beliau meninggalkan Kerajaan Soppeng Rilau, utusan dari La Mataesso datang untuk menemui La Makkarodda dengan membawa pesan agar ia tidak meninggalkan kerajaannya, dan tetap menjadi *datu* di Kerajaan Soppeng Rilau. Namun maksud baik La Mataesso itu ditolaknya dan berkata: “*Bessing passuka’, bessing topa parewaka*” artinya: “Saya keluar karena tombak (perang), maka saya pun akan kembali melalui tombak (perang) pula”. Selesai menjawab permintaan utusan dari La Mataesso itu, maka iapun bergegas berangkat dengan tujuan Kerajaan Bone (Makka, 2011:35, diakses dari internet: “*Sejarah Ogi*” pada 27 Agustus 2017).

Tujuannya memlih dan menuju Kerajaan Bone karena berharap raja Bone dapat membantunya untuk membalaskan dendamnya terhadap *datu* Soppeng Riaja, La Mataesso. Setelah tiba di Bone, La Makkarodda lalu menyampaikan maksud kedatangannya. Akan tetapi apa yang menjadi harapannya, ternyata tidak terkabulkan sebab raja Bone tidak bersedia membantunya. Alasan penolakan raja Bone karena hubungannya dengan Soppeng selama ini baik-baik saja sehingga bila Kerajaan Bone memberikan bantuan untuk memerangi Kerajaan Bone, maka dikemudian hari akan menjadi musuh. Meskipun permohonannya untuk mendapat bantuan ditolak, namun ia tetap tinggal di wilayah Kerajaan Bone. Pada akhirnya iapun dapat menikahi salah seorang bangsawan Bone yang bernama We Tenripakkuwa, yaitu saudara perempuan dari raja Bone, Tenrirawe Bongkangnge.

Perkawinan itu akan membawa dampak politik terhadap hubungan Bone dan Soppeng baik terhadap hubungan politik maupun hubungan kekerabatan. Hubungan luar negeri terutama terbukanya suatu kesempatan dalam rangka ikatan persahabatan antara kedua

kerajaan. Juga dikatakan oleh Kajao Laliddong (penasehat kerajaan di Bone) menyatakan seperti berikut: "*Upujinasia Arumpone tane-tanemmu. Alade munaga matti wijanna rewe ri Soppeng. Tapasiajimmuni tanae ri Soppeng na ri Bone*". Artinya: "Saya merasa sangat senang atas kebijaksanaanmu itu menjodohkan adik kandungmu dengan *datu* Mario, La Makkarodda. Apabila nanti ada anak keturunan keduanya kembali ke negeri Soppeng, maka sedapat mungkin diadakan ikatan persaudaraan antara tanah Soppeng dan tanah Bone" (Hamid, 1991:110).

Pasca perkawinan La Makkarodda dengan We Tenripakkuwa, datang lagi utusan dari *datu* Soppeng Riaja kepada La Makkarodda agar ia bersedia kembali untuk memimpin negerinya, yaitu Kerajaan Soppeng Rilau. Ajakan damai yang keduanya ditolaknya dengan alasan jika saya kembali memerintah di Kerajaan Soppeng Rilalu, khawatir terjadi lagi perang seperti yang telah terjadi. Dengan demikian sudah dua kali La Mataesso mengajak saudara sepupunya agar kembali ke daerahnya untuk menjadi pemimpin, namun selalu ditolaknya. Niat baik itu menggambarkan bahwa sebenarnya La Mataesso tidak pernah dendam kepada saudara sepupunya itu, sebab yang memulai peperangan adalah La Makkarodda sendiri.

Kalau dicermati penolakan yang dilakukan oleh La Makkarodda sebenarnya ia malu pada dirinya sendiri yang ingin menguasai wilayah pemerintahan saudara sepupunya. Tetapi niatnya itu tersandung sehingga kalah dalam perang antara keduanya. Meskipun La Mataesso di pihak yang menang, tetapi sebenarnya beliau tidak menginginkan Kerajaan Soppeng Rilau. Hal ini dapat dibuktikan dengan dua kali beliau meminta kepada La Makkarodda agar kembali untuk memerintah kerajaannya. Ini benar-benar suatu sifat kesatria seorang pemimpin yang patut diacungkan jempol untuk ditiru dan diamalkan. Selain itu, La Mataesso tidak menginginkan terjadinya perang yang

kedua, apalagi melibatkan pihak luar.

Kesadaran itu dilakukan La Mataesso sebab kedua kerajaan ini bersaudara dan didirikan oleh leluhur mereka sendiri, yaitu *Tomanurung* di Sekkanyili dan *Tomanurung* di Goarie, Libureng. Mungkin ini pula penyebabnya sehingga La Makkaroda menyadarinya sehingga mau berunding kembali dengan La Mataesso. Maksud baik La Makkarodda itu, diterima dengan senang hati oleh pihak La Mataesso. Kesungguhan hati La Makkarodda untuk berdamai dengan sepupunya, tidak diragukan lagi seperti yang tercermin dalam sumpahnya kelak dalam pertemuan yang akan dilaksanakan dan diikuti oleh wakil masing-masing pihak.

Terjadinya perundingan untuk ketiga kalinya (dua di antaranya gagal) sebab ditolak oleh La Makkarodda, sedang perundingan ketiga justru muncul atas keinginan dari La Makkaroda. Latar belakang keinginan beliau untuk berunding dengan La Mataesso adalah pertama, sebab adanya kenyataan bahwa tidak ada satu kerajaan dalam wilayah tanah Bone yang bersedia membantu dan bersekutu untuk menggempur Kerajaan Soppeng Riaja. Kedua, karena beliau sendiri sudah merasa rindu akan saudara dan keluarganya serta tanah tumpah darahnya yaitu Kerajaan Soppeng Rilau.

Pertemuan awal kemudian dilaksanakan, *datu* Soppeng Riaja, La Mataesso didampingi oleh Paccaleppa Tautongengnge (penasehat kerajaan). Dalam pertemuan itu La Makkarodda mengucapkan sumpah dan berjanji bahwa:

“... Tidak akan mengulangi perbuatannya yang sudah berlalu, dan berniat tidak baik terhadap Kerajaan Soppeng Riaja. Selain itu, beliau juga bermohon kepada seluruh peserta sidang kiranya diperkenankan menetap di wilayah Kerajaan Soppeng Rilau tanpa memegang jabatan dan kedudukan apapun juga. Dan juga berpesan kepada seluruh keturunannya supaya tidak lagi menginginkan untuk menjadi

datu pada kedua kerajaan tersebut”. Setelah mengucapkan janji dan sumpahnya, La Mataesso lalu menjabat tangan La Makkarodda dan berkata:” Kecuali bila terjadi ikatan tali perkawinan di antara anak cucu kita kelak” (*Lontarak Soppeng* dalam: Hamid, 1991:117).

Setelah selesai sumpah dan janji diucapkan oleh La Makkarodda, selanjutnya dilakukan upacara *Mallamung Patue* sebagai simbol ikatan Perjanjian Persahabatan antara La Mataesso sebagai *datu* Kerajaan Soppeng Riaja dan La Makkarodda sebagai *datu* Soppeng Rilau. Mereka berdua lalu menanam batu secara bersama-sama yang dipersaksikan oleh *Dewata Seuwae* (Tuhan Yang Maha Esa) dan keduanya mengucapkan janji:” Barang siapa di antara kita ada yang ingkar janji, maka akan ditindih oleh batu itu, serta tidak akan mendapat kebaikan sampai kepada anak keturunan kita”. Dengan selesainya janji tersebut, maka Kerajaan Soppeng, satu pemimpin satu rakyat telah berdiri, yaitu berintegrasinya dua kerajaan kembar yang disebut Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Soppeng Rilau (Nur,2007:61).

Berdirinya Kerajaan Soppeng satu raja satu rakyat, maka diangkatlah La Mataesso Puang LipuE sebagai *datu* Soppeng yang pertama. Sedangkan La Makkarodda diangkat pula sebagai Perdana Menteri (*pangepa*). Setelah kedua kerajaan itu berintegrasi, maka pusat pemerintahan dipindahkan ke dalam Laleng Benteng (ahmadrisalmbisot@yahoo.co.id, dan <http://www.depdagri.go.id>. diakses pada 2 Maret 2016). Penyatuan itu menjadi kebulatan yang utuh untuk mencapai suatu identitas baru sebagai suatu kerajaan yang bersatu. Ini berarti bahwa integrasi bukanlah merupakan suatu penyatuan dari komponen-komponen yang saling berbeda-beda saja, tetapi juga paling esensial adalah semangat nyata yang dapat dimanifestasikan ke dalam suatu tindakan nyata untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu perdamaian.

E. Asal Usul Penamaan Wilayah

Kerajaan Soppeng yang kita kenal sekarang adalah sebuah kerajaan yang cukup besar dan berpengaruh pada masanya. Nama kerajaan tersebut hingga sekarang masih dipergunakan sebagai nama daerah pada wilayah yang sama, yaitu Kabupaten Soppeng. Kerajaan Soppeng diduga kuat lebih tua usianya dibanding Kerajaan Luwu, Bone dan Gowa. Menurut Ian Caldwell (1996) dalam Abidin: Ia seorang sejarawan Australia menyatakan bahwa bilamana perhitungan kasar dengan menggunakan angka mundur, yaitu 30 tahun yang dimulai dari *datu* atau raja yang dikenal tahun-tahun pemerintahannya, maka *datu* pertama yang bernama La Temmamala tahun pemerintahannya jatuh pada 1191-1221 (1999: 169).

Meskipun tahun-tahun pemerintahan dari para *datu* yang pernah memerintah di Kerajaan Soppeng dapat ditetapkan berdasarkan teori di atas, namun sampai kini yang belum dapat ditetapkan asal muasal kapan nama Soppeng mulai muncul dan dipergunakan. Meskipun ada yang menganggap bahwa nama itu tidak perlu dipersoalkan, yang penting kita akui bahwa dulu pernah eksis yang namanya Kerajaan Soppeng di Sulawesi Selatan. Tapi ingat, persoalan nama bagi orang Sulawesi Selatan, termasuk suku Bugis, nama adalah segala-galanya. Keliru menyebut nama orang, berarti kesalahan telah dimulai. Nama adalah sesuatu yang sakral, dan bermakna yang tak boleh dipertanyakan (Wanua, 2008:3-4).

Toponimi Soppeng sebagai nama kerajaan dan hingga kini menjadi toponimi kabupaten adalah sesuatu yang tidak serta merta lahir begitu saja tanpa ada latar belakang dan sebab akibat. Soppeng yang sudah melegenda dan dikenal sejak masa kerajaan, hingga kini belum jelas kapan mulai muncul dan dipergunakan sebagai nama kerajaan. Dalam berbagai catatan tentang Sejarah Soppeng, belum ditemukan adanya uraian tentang pengertian dan asal muasalnya.

Toponimi Soppeng yang dikenal luas selama ini dan dirujuk dalam berbagai kajian, hanya berdasarkan tradisi lisan dan sumber lokal *lontarak*. Setidaknya toponimi Soppeng hanya dapat ditelusuri dari kedua sumber itu (Muhammad Anshar, M; Diakses dari Internet, 4 April 2016).

Ada dua versi tentang Toponimi Soppeng, pertama; toponimi Soppeng berasal dari unsur flora (berkaitan dengan nama keadaan tumbuhan-tumbuhan), dan kedua dari unsur fauna. Toponimi berdasarkan unsur fauna adalah toponimi berdasarkan keadaan suatu hewan, keadaan alam, penghormatan (karena jasa seseorang), peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut, mata pencaharian atau kelompok ekonomi dan asal penduduk. Toponimi pertama menyatakan bahwa nama Soppeng berasal dari nama sebuah pohon (flora) yang banyak terdapat di daerah ini. Pohon ini dikenal oleh penduduk setempat dengan sebutan "*coppeng*", ada juga menyebutnya "*caloppeng*" yang mempunyai buah mirip dengan buah anggur, tetapi sedikit agak lonjong. Pohon *coppeng* ini banyak tumbuh di daerah Soppeng dan hingga kini masih dapat dijumpai di mana-mana. Pohon ini juga pada masa kerajaan tumbuh besar di seputar istana kerajaan. Perubahan kata *coppeng* atau *caloppeng* menjadi Soppeng, karena pengaruh bahasa Bugis Soppeng. Kata awal "C" oleh orang Soppeng kemudian diubah menjadi "S" sehingga *coppeng* atau *caloppeng* menjadi Soppeng, kemudian dijadikan nama bagi Kerajaan Soppeng (Ibrahim, editor, 2001:8).

Sedang penamaan kedua dari unsur asal penduduk yaitu bahwa toponimi Soppeng berasal dari gabungan dua kata yaitu *so* yang berarti turun dan *lappeng* adalah tempat. Kata *so* artinya turun dan *lappeng* adalah nama sebuah tempat. Ketika itu orang Sewo mulai meninggalkan wilayahnya menuju ke suatu tempat yang dinamakan *lappeng* yaitu tempatnya diketahui terletak di sekitar istana *datu*

Soppeng. Versi yang kedua ini adalah merupakan gabungan dua suku kata tersebut di atas, yaitu *so* dan *lappeng*. Kata pertama diambil kata “so” dari kata *so* dan kata kedua “ppeng” dari kata *lappeng*, kemudian keduanya digabung sehingga menjadi Soppeng, lalu dijadikan nama dari Kerajaan Soppeng (Muhaemina, 2001: 48 dan Rasyid, 1998:9).

Jika dicermati tentang asal usul nama Soppeng, kuat dugaan bahwa nama itu mulai muncul pada fase ketiga pemerintahan di wilayah ini, yaitu ketika orang-orang dari Sewo pindah mencari perkampungan baru yaitu di Lappeng. Orang-orang Sewo inilah yang kemudian dikenal sebagai orang Soppeng Riaja, dikemudian hari berdiri kerajaan yang disebut Kerajaan Soppeng Riaja. Sedang orang-orang yang berasal dari Gattareng disebut Soppeng Rilau, kemudian berdiri pula suatu kerajaan yang disebut Kerajaan Soppeng Rilau. Setelah terjadi perang antara kedua kerajaan ini, mereka lalu mengintegrasikan wilayahnya sehingga menjadi Kerajaan Soppeng.

F. Terbentuknya Persekutuan Tellumpocoe

Sebelum Latenrirawe Bongkangnge memerintah, maka pendahulunya yaitu La Ulio Bote'E sebagai raja Bone ke – 6 (1535-1560) pernah melakukan peperangan dengan raja Gowa. Baginda raja Bone ini seringkali melakukan peperangan untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya sekaligus untuk memperluas pengaruh kekuasaannya. Selain itu, Baginda juga giat melakukan konsolidasi dengan daerah “*lili*” dalam rangka memelihara dan memperkuat kekompakan serta mempertinggi semangat juang dari seluruh laskar Bone. Baginda inilah yang kemudian meninggal dunia dalam peperangan melawan Gowa. La Ulio BoteE pernah bentrok dengan pengikut orang Gowa di sebelah selatan La Cokkong. Bentrokan ini tidaklah berlangsung lama dan tidak menimbulkan dendam diantara mereka, bahkan antara keduanya

terjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Hubungan baik dapat dilihat ketika Bone menyerang Wajo, maka orang-orang Bone dibantu oleh orang-orang Gowa. Beliau jugalah yang mengadakan perjanjian persahabatan dengan Gowa yang disebut “Ulu Ada” (*Ulu Kanaya*) di Tamalate dengan isi perjanjian adalah berdiri sejajar satu dengan yang lainnya. Pada waktu upacara berlangsung, *Latea ri Duni* (kalewang panjang) Kerajaan Bone dan “*Sudanga*” (pusaka Kerajaan Gowa) berdiri tegak berdampingan yang disimbolkan bahwa mereka adalah sama rendah dan sama tinggi tak ada yang melebihi dari yang lainnya (Ali, 1986:16 dan Patunru, 1989: 19).

Ulu Ada (Ulu Kanaya) di Tamalate berbunyi sebagai berikut:

1. *Narekko engka perrinna Bone, maddangi tana na olae Mangkasae, narekko engka perrina Gowa makkum-pellebuluE naola to Bone.*
2. *Tassi nawa-nawa majakki, tassi patingarai kanna Bone Gowa, tessi acinayyangi ulaweng mataseng, patala malampe.*
3. *Iasi somparengi Gowa, iasi mania ada' ri oloe, iasi somparengi Bone, iasi mania ada' ri oloe lettu ri to munri'na*
4. *Nigi-nigi temmarengngarang ri ada' to ri oloe mareppai uri kurinna, loa-loana padai I tello ri adampessanngE ri batue tanana.*

Artinya:

1. Sekiranya orang Bone mengalami kesukaran, maka membenteng luaslah lautan itu diarungi orang Makassar menuju ke Bone untuk membantu. Dan sekiranya orang Makassar mengalami kesukaran, maka ratalah gunung itu yang dilalui orang Bone menuju Makassar untuk membantu.
2. Tak akan saling berprasangka jelek satu dengan yang lain, tak akan saling mendatangkan peperangan antara Bone dengan Gowa tak akan saling menginginkan sesuatu yang tinggi nilainya (bandingnya) bila salah satu sedang memilikinya.

3. siapa yang mengendalikan Gowa, ia lagi mempusakai perkataan (janji) orang dahulu, siapa yang mengendalikan Bone ia lagi memusakai perkataan (janji) orang dahulu.
4. Siapa yang tidak ingat (tidak mengindahkan) akan perkataan (janji) orang dahulu, pecah berantakanlah periuk belangahnya, negerinya mengalami kehancuran bagaikan sebutir telur yang dihempaskan ke atas batu (Patunru, 1989: 19).

Raja Bone inilah yang pertama kali mempunyai seorang penasehat (ahli tata negara) yang bergelar Kajao La Liddong (nama aslinya La Mellong). Ketika Baginda turun tahta, ia menetap di Bone dan Mampu, kedua tempat ini silih berganti didatangi atau dikunjungi. Selama hidup beliau, ada dua orang familinya (keluarganya) yang sangat dibenci yaitu seorang keponakannya yang bernama La Paunru dan seorang lagi sepupunya yang bernama La Mulia. Kedua orang ini berkali-kali berusaha untuk memohon ampun namun tidak pernah berhasil. Suatu ketika Baginda bertemu dengan kedua familinya itu di Itterung dan seketika itu pula Baginda turun dari usungannya dan langsung menghadapi kedua orang itu. Terjadilah perkelahian antara La Mulia dengan Baginda dimana keduanya menemui ajal, sementara La Paunru meninggal karena dipancung oleh pengawal Baginda, itulah sebabnya Baginda digelar MatinroE ri Itterung (Hamid, 2007:76).

Pada masa pemerintahan raja Bone ke – 6, raja Gowa ke-10 I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung mengunjungi daerah ini. Mereka diterima oleh raja Bone dengan lapang dada yang dibuktikan dengan sambutan meriah dengan berbagai acara, seperti permainan rakyat dan tidak kala menariknya adalah permainan sabung ayam. Dalam permainan ini, raja Gowa mengajak raja Bone untuk bertaruh, dan mempertaruhkan seratus kati emas sedang raja Bone mempertaruhkan semua orang-orang Panyula. Ayam petaruh raja

Gowa yang berwarna merah dapat terbunuh oleh ayam petaruh raja Bone yang berwarna merah dan putih (= *manu bakka* bahasa Bugis). Kekalahan raja Gowa oleh raja Bone dalam permainan tersebut, dengan cepat dapat tersiar ke seluruh pelosok pedalaman terutama pada kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar wilayah kekuasaan Kerajaan Bone. Raja-raja kecil tersebut melihat peristiwa kekalahan itu sebagai suatu isyarat akan terjadinya perang besar antara kedua kerajaan besar itu. Dampaknya akan terimbas pada kerajaan-kerajaan kecil lainnya nanti. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka raja-raja kecil itu dengan inisiatif sendiri menggabungkan kerajaannya sebagai bawahan dari Kerajaan Bone. Sedangkan kerajaan lainnya yang belum menggabungkan diri akhirnya diperangi dan dijadikan sebagai daerah lili.

Benih-benih permusuhan yang terjadi antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Gowa atas kedua peristiwa tersebut diatas, tidak dapat lagi dibendung. Oleh karena itulah perjanjian "*Ulu Kanaya ri Tamalate*" tidak bisa lagi dipertahankan. Penyerangan terhadap Bone yang dilakukan oleh raja Gowa dengan cara naik perahu dan kemudian berlabuh di daerah Cellu. Kedatangannya kali ini disertai dengan sejumlah kekuatan laskar yang sangat besar. Beliau datang dengan sikap permusuhan, sehingga diapun disambut oleh orang-orang Bone siap perang. Pertempuran tak dapat dihindari dan masing-masing kerajaan dipimpin oleh rajanya. Pertempuran berlangsung selama lima hari dan raja Gowa yang memimpin pertempuran itu mendapat luka yang cukup serius. Akibat luka yang diderita, memaksa Baginda bersama seluruh pasukannya mengundurkan diri kembali ke negerinya. Dua tahun kemudian, raja Gowa kembali menyerang Kerajaan Bone dengan kekuatan penuh dan sempat membuat benteng di WalannaE. Pertempuran sengit terjadi tujuh hari lamanya yang menelan korban begitu besar pada kedua pihak, pertempuran berakhir setelah raja

Gowa terserang penyakit, yang menyebabkan beliau meninggal dunia pada tahun 1565 (Hamid, 2007:78).

Walaupun Raja Gowa Tunipallangga Ulaweng telah wafat, namun tidaklah berarti posisi Kerajaan Bone aman dari ancaman serangan dari Gowa. Terbukti dengan naiknya I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Data sebagai raja Gowa ke-11, menyerang lagi Bone dengan kekuatan penuh. Di pihak Bone, telah menduga akan terjadi serangan pasca pergantian raja Gowa ke-11 itu, dan telah mempersiapkan diri dengan melakukan konsolidasi dengan daerah-daerah sekutunya. Pasukan Gowa dengan penuh semangat dalam penyerangan itu sehingga dapat menembus pertahanan laskar Bone satu demi satu. Beberapa daerah Bone berhasil dikuasai oleh pasukan Gowa yaitu Ajangale, dan Awangpone. Raja Gowa ini juga berhasil membangun benteng di daerah Pappolo. Serangan ini berhasil menekan laskar Bone sehingga dapat masuk ke wilayah inti yaitu daerah Bukaka dan Takkeaju (Abidin, 1999:149).

Tidak ada data pasti yang menyebutkan berapa lama pertempuran tersebut di atas berlangsung, yang nyata bahwa pasukan Gowa lebih unggul dari laskar Bone. Keunggulan ini ditandai dengan berhasilnya pasukan Gowa menguasai beberapa daerah Kerajaan Bone. Bahkan pasukan Kerajaan Gowa ketika mau pulang ke negerinya, berhasil menghalau binatang ternak hasil rampasan yang jumlahnya besar. Tetapi sial bagi pasukan Gowa karena tanpa disadari, mereka sebenarnya diawasi oleh pasukan Bone. Secara tiba-tiba pasukan Gowa diserang oleh pasukan Bone sehingga dapat mengobrak abrik kekuatan pasukan Gowa, bahkan raja Gowa sendiri dapat dibunuh oleh pasukan Bone. Mayat raja Gowa ditinggalkan oleh pasukannya yang hanya dipimpin oleh Mangkubuminya (Daeng Padulung). Masa pemerintahan I Manriogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung sebagai raja Gowa X, terkenal sangat berani, pintar di dalam berbagai – bagai

lapangan, sehingga Baginda termashur di mana-mana. Baginda bersama Mangkubuminya yang bernama Daeng Padulung, giat melakukan perluasan wilayah dan pengaruhnya. Dalam waktu yang tidak lama, Baginda telah berhasil menaklukkan banyak negeri di Sulawesi Selatan. Bahkan sampai di luarnya, yaitu Bajeng, Lengkese, Lamuru, Cenrana, Salomekko, Bulu-Bulu, Lamatti, Bulukumba, Kajang, Panyikokang, Gantarang, Wero (Hero), Bira, Selayar, Otting, Wajo, Sawitto, Soppeng, Alitta dan beberapa wilayah di daerah Mandar. Kaili, Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Selain itu, beliau juga berhasil menaklukkan Luwu dan membuat perjanjian dengan rajanya (Patunru, 1969:13).

Raja ini pula yang melakukan peperangan dengan Kerajaan Bone selama kurang lebih 7 tahun lamanya pada pertengahan abad XVI. Saat itu, Kerajaan Bone diperintah seorang raja yang bernama La Tenrirawe Bongkangnge MatinroE ri Gucinna. Ketika pertempuran sedang berlangsung, penyakit Baginda raja Gowa bertambah parah sehingga terpaksa meninggalkan Bone dan kembali ke Gowa. Hanya empat puluh delapan hari lamanya setelah kembali dari Bone, maka Baginda mangkat. Setelah meninggal beliau digelari Karaeng Tunipallangga Ulaweng. Bagindalah menyuruh mengangkat semua barang-barang harta benda dan orang-orang yang telah dikalahkan dan mewajibkan raja yang dikalahkan mengakui ikrar yang berbunyi: *makkanamo numammio*, artinya: saya bertitah dan engkau tunduk dan patuh. Baginda juga yang mengadakan berbagai jabatan yang ada di dalam kerajaan dan Baginda jugalah yang menempatkan segala sesuatunya di dalam benteng (Patunru, 1969: 14-15).

Karaeng Tunipalangga Ulaweng kemudian digantikan oleh Taji Barani Daeng Marompa, Karaeng Data Tunibatta (1565) menjadi raja Gowa, beliau meneruskan perjuangan ayahandanya memerangi Kerajaan Bone. Dalam peperangan itu, beliau tewas terbunuh oleh

pasukan Kerajaan Bone, sementara prajurit yang menemaninya melarikan diri dan meninggalkan jasad tuannya tergeletak di medan perang. Berkat usaha dari Kajao Laliddong dan Arung Teko, Arung Biru, Arung Lamoncong dan Arung Sanrego, maka raja Bone Latenrirawe Bongkangnge mengizinkan jasad beliau diantar pulang oleh keempat pejabat kerajaan tersebut ke Kerajaan Gowa. Beberapa hari kemudian sesudah Taji Barani mangkat, maka dilangsungkanlah suatu pertemuan di Kampung Caleppa daerah Bone antara raja Bone bersama Kajao Laliddong di satu pihak dengan Mangkubumi Kerajaan Gowa-Tallo yang bernama Daeng Padulung di lain pihak. Dalam pertemuan itu, Kajao Laliddong memainkan peranan penting, antara lain mengemukakan tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

1. Gowa mengembalikan ke Bone negeri-negeri yang terletak di daerah lembah sungai WalanaE sampai pada batas Barat negeri Ulaweng di sebelah timur.
2. Daerah sebelah utara Sungai Tangka, menjadi daerah kekuasaan Bone, dan daerah sebelah selatan Sungai Tangka tetap di bawah kekuasaan Gowa.
3. Gowa mengembalikan Cenrana kepada Bone (Mattulada, 1999:97; Patunru, 1989:509-510; Patunru, 1968: 15)¹.

¹ Dalam sumber kedua tersebut di atas, dijelaskan bahwa pada mulanya perjanjian itu berjalan kurang lancar, namun akhirnya tercapai juga suatu perjanjian perdamaian dan orang Gowa menyebutnya *Ulukanya ri Caleppa* (= perjanjian di Caleppa). Setelah selesai dibuat perjanjian itu, berangkatlah Mangkubumi Kerajaan Gowa I Mappatakata Daeng Padulung bersama I Manggorai Daeng Mamate Karaeng Bontolangkasa (putera dari Karaeng Tunibatta) ke Gowa. Raja Bone bersama Kajao Laliddo ikut serta ke Gowa. Setiba di Gowa, maka Mangkubumi melantik I Manggorai Daeng Mamate Karaeng Bontolangkasa menjadi raja Gowa yang ke-12 menggantikan ayahandanya almarhum. Setelah pelantikan itu, maka Raja Gowa yang baru itu membuat suatu perjanjian persaudaraan dengan raja Bone La Tenrirawe Bongkangnge. Dalam perjanjian itu dinyatakan antara lain ; bahwa musuh-musuh seorang di antara mereka adalah juga musuh-musuh mereka bersama dan orang-orang Gowa yang berkunjung ke Bone adalah mereka itu seperti datang ke negerinya sendiri dan orang-orang Bone yang berkunjung ke Gowa adalah mereka itu bagaikan datang di negerinya sendiri.

Dengan tercapainya perjanjian seperti yang tersebut pada catatan kaki, maka berakhirlah untuk sementara waktu peperangan yang antara Gowa dan Bone. Apalagi ketika itu, yang diangkat menjadi raja di Gowa adalah pernah mendapat perlindungan dari Raja Bone La Tenrirawe Bongkangnge ketika yang bersangkutan berbuat salah di Gowa. Kesalahan Baginda Raja Gowa ketika itu adalah memelihara seorang perempuan biasa di rumahnya padahal dia telah memperisterikan anak dari pamannya sendiri yaitu Raja Gowa Karaeng Tunipallangga Ulaweng. Karena kesalahan itulah sehingga beliau menyingkir ke Bone dan mendapat perlindungan dari raja Bone Latenrirawe Bongkangnge.

Sepuluh tahun lamanya, Baginda mengendalikan Kerajaan Gowa, dan entah apa sebab, maka Baginda mulai tidak menepati perjanjian-perjanjian yang Baginda sendiri buat pada waktu dulu dengan Raja Bone. Oleh karena itu, maka timbullah kembali permusuhan antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone, sehingga peperangan antara keduanya kembali berkobar dan memakan waktu yang cukup lama. Kerajaan Wajo ketika itu menjadi daerah kekuasaan Gowa, begitu pula Kerajaan Soppeng berada di bawah pengaruhnya (Patunru, 1969: 17).

Sementara Kerajaan Bone mengalami peperangan yang hebat dengan Kerajaan Gowa, maka Kerajaan Luwu juga mencoba untuk melakukan penetrasi dan penyerangan terhadap Kerajaan Bone. Kerajaan Luwu ketika itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Sanggaria. Mungkin sekali orang-orang Luwu mengira bahwa Kerajaan Bone pada saat itu sudah dalam kondisi lemah karena telah tujuh tahun lamanya berperang dengan Kerajaan Gowa sehingga dengan mudah dapat dikalahkan. Orang Luwu mulai menyerang Bone dan berhasil menduduki dan menguasai Cenrana. Tetapi karena pasukan Kerajaan Bone masih kuat dan penuh semangat, sehingga dalam waktu singkat Cenrana dapat dikuasai kembali. Tercatat dalam sejarah

bahwa wilayah Cenrana dua kali menjadi *alabessi* atau negeri hasil pampasan perang (Patunru, 1989:53).

Kalau Kerajaan Bone sedang giat melakukan perluasan wilayah dan pengaruh kekuasaan serta sibuk menghadapi serangan-serangan dari pasukan Gowa, maka Kerajaan Wajo demikian pula adanya. Wajo mengalami nasib yang sama dengan Kerajaan Bone yang menjadi bulan-bulanan serangan dari Kerajaan Gowa. Kerajaan Wajo mulai mengalami peperangan dengan Gowa ketika Kerajaan Wajo diperintah oleh *arung matoa* Wajo La Tadampare Puang Rimaggalatum. Dan masa pemerintahan beliau pula maka daerah Sakkoli dan Gilireng bertengkar dengan Paria, lalu ditaklukkan oleh Wajo dan diberi status *ata*. Akkotengang dan Kera, secara sukarela pula bergabung dengan Wajo dan diberi status *ana'*. Sementara Macanang dan Attata yang pernah ditaklukkan oleh Wajo, kembali mengadakan perlawanan, dan meminta bantuan kepada Lowak, Gilireng serta Anabanua yang ditaklukkan sehingga masing-masing daerah tersebut diberi status *ata*. Lima hari setelah peristiwa itu, datang pula *Arung Palippu To Pakkerek Mattekempessie* bersama *Arung Data La Tammatuppu* serta *arung La Tincoe To Majetta*, mempersembahkan tiga orang, tiga lembar kain panjang dan tiga pasang gelang emas kepada Wajo Riaja (Wajo Barat) dan memohon pula agar diberi status *seajing senraja* (=sanak yang sederajat). Kemudian Wajo sendiri disebut Wajo Rilau' (Wajo Timur) dan permohonan tersebut dikabulkan oleh *arung matoa* Patunru, 1989: 150).

Kendati *arung matoa* Wajo La Tadampara telah mengabulkan permintaan tersebut di atas, namun kedudukan Wajo Riaja dan Wajo Rilau dianggap sebagai *seajing senraja* (famili sederajat) tetapi bukan berarti daerah itu sama derajat dan kedudukannya dengan Wajo Rilau. Hal ini dapat dilihat bahwa Wajo Riaja tidak terwakili dalam *arung Patappuloe*, yang memegang kekuasaan tertinggi di Wajo. Selain

itu, Wajo Riaja harus mengembalikan orang-orang Ana'banua dan Lowak yang menyingkir ke Wajo Riaja, harus dikembalikan ke negeri mereka. Raja-rajanya harus pula mengakui perjanjian Lapa'deppa' dan perjanjian *arung matoa* dan *arung Patappuloe*. Semua hukum yang bertentangan dengan hukum di Wajo Rilau, harus dibuang dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian statusnya sebagai Wajo Rilau harus diturunkan menjadi *ana'* karena telah menyerang daerah Otting, Belawa, Lowak, Tempe, Sengkang, Wage, dan Timpengeng (Patunru, 1989:157).

Arung Matoa Wajo, La Tadampare Puang ri Maggalatung terkenal sebagai raja yang bijaksana, cerdas, adil, serta berani. Keberanian itu dibuktikan ketika *datu* Luwu yang bernama La Busatana meninggal dunia, datanglah utusan Luwu menghadap *Arung Matoa* La Tadampare dengan membawa *lotong* (=bekal) dan 30 buah bakul biasa yang harus diisi oleh Wajo sebagai tanda berkabung. Adat seperti itu memang berlaku di Luwu terhadap daerah-daerah taklukan dan daerah daerah bawahan. Hal ini dilakukan oleh Kerajaan Luwu karena menganggap bahwa Wajo adalah merupakan kerajaan bawahannya. Hal ini membuat La Tadampare Puang ri Maggalatung marah, lalu menyatakan kepada utusan Luwu “bahwa perjanjian Luwu dan Wajo tidak meliputi kewajiban Wajo untuk ikut berkabung kalau Datu Luwu meninggal Dunia” (Abidin, 1999: 152).

Untuk membuktikan bahwa Wajo bukanlah daerah vasal atau daerah bagian dari Kerajaan Luwu, maka La Tadampare Puang ri Maggalatung memimpin pasukannya untuk menyerang *Tanah Sitonrae* (Tempe, Sengkang, Tampareng dan Wajo) yang diwarisi *datu* Luwu dari leluhur Ana Kaji, Datuk Luwu II sebagai hadiah kepada permaisurinya yang bernama *Wetappacina*, putri *Manurunge ri Manjapai*. Serangan Wajo atas daerah *Sitonrae* ini hanya berlangsung satu hari dan akhirnya dikuasai, dan kemudian diberi status sebagai *ata*

(budak). Hanya Tempe sendiri yang belum dikuasai pada serangan itu, dan *datu* Tempe yang bernama La Makkarodda To Pallasek Mattedong Pulaweng memerintahkan pasukannya supaya turun semua ke perahu-perahu mereka dengan bermaksud untuk mengadakan perlawanan di Danau Tempe. Setelah sebulan Tempe diserang, maka *arung matoa* Wajo mengirimkan utusan kepada *datu* Tempe dan menyampaikan bahwa tiga dari empat Tanah Sitonrae telah bergabung dengan Wajo, kini tinggal Tempe sendiri yang belum bergabung. Apakah Tempe lebih memilih menjadi *ata* (=budak) Luwu dari pada mengikuti adat kemerdekaan Tanah Wajo (Abidin, 1999: 152).

Setelah utusan Wajo menyampaikan maksud kedatangannya, maka *arung* Tempe memberikan jawaban “bahwa sekalipun saya bergabung dengan Wajo, maka kebiasaan saya terhadap Luwu tidak akan berubah dan akan tetap melaksanakan kebiasaan dan kewajiban kepada Luwu”. Permintaan *arung* Tempe tersebut disetujui oleh *aung matoa* Wajo. Dengan demikian, Tempe mempunyai kedudukan sangat aneh, sebab ia bergabung dengan Wajo, tetapi tetap melaksanakan kewajibannya terhadap Luwu. Kewajiban negeri Tanah Sitonrae, bebas dari bagian Luwu seperti yang dilukiskan dalam *Lontara' Sukkuna Wajo* sebagai berikut:

“Adapun Wage, Timpangeng dan Singkang telah menjadi abdi Wajo, maka disuruh memikul yang bisa memikul, disuruh mengangkat yang bisa mengangkat, disuruh membawa yang dapat membawa dan disuruh mendayung yang dapat mendayung. Adapun pengabdian Tempe, ialah menyediakan ikan untuk Petta I Wajo (dewan pemerintah eksekutif) dan bila Petta I Wajo berkunjung ke Tempe, maka Tempe harus menyediakan pendayung. Wage dimasukkan kedalam *Limpo Talotenreng*, sedangkan Timpangeng, Singkang dan Tempe dimasukkan kedalam *Limpo Bettempola*” (*Lontarak Sukkuna Wajo*: 127),

Satu bulan setelah penaklukan daerah Sitorae oleh Wajo, maka *datu* Pammana La Tenrijello' datang menemui La Tadampare dan memohon supaya Wajo menyerang Datuk Limpuak Mappalo Ulaweng, karena membiarkan seorang peramal bergelar Puangnge ri Lompik-Lompik telah berbuat tak senonoh di Pammana dan Patila. Sebagai imbalan, Wajo dapat menganeksasi Limpowak, sedang Pammana (*Lontarak* Sukkuna Wajo: 180), dan Patila memohon supaya diterima menjadi warga Wajo. Wajo kemudian mengabulkan permintaan itu dan menjadikan keduanya sebagai *ana'* dan Wajo adalah *inang* yang harus sehidup semati. Dalam serangan ini, Limpuak dapat ditaklukan hanya dengan sehari. Maka Limpuak kemudian dijadikan sebagai *ata*(=budak) oleh Wajo. Dalam penyerangan Lumpuak ini, ternyata *arung* Limpuak dan Puang ri Lompik-Lompik berhasil melarikan diri. Sebulan setelah penaklukan ini dilakukan, maka Timurung bergabung pula dengan Wajo (Abidin, 1999:157). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dua bulan berikutnya, *datu* Bola dipanggil oleh *arung matoa* Wajo, tetapi hal itu ditolak, oleh karena itu *arung matoa* Wajo berniat untuk menakluhkannya lewat perang. Tetapi sebelum penyerangan dilakukan Wajo, *datu* Bola datang menghadap dan menyatakan menyerah. Selanjutnya *datu* Bola memohon supaya daerahnya dijadikan sebagai anak Wajo dan memohon perlindungan oleh *arung* Bettengpola dan memohon pula supaya dimasukkan ke dalam *Limpo* Talotenreng.

Sekalipun La Tadampare Puang ri Maggalatung telah berhasil memperluas wilayah dan pengaruh kekuasaannya di Tanah Bugis, namun beliau tetap melakukan penaklukan-penaklukan terhadap wilayah-wilayah yang ada disekitarnya. Daerah Jampu diserang lalu ditaklukan dan dijadikan sebagai *ata*, namun La Paturusi Tomaddualang atas nama ayahnya memberi status sebagai *ana*. Sejak saat itulah orang-orang Jampu pindah dan membuka perkampungan baru yang dinamakan Canruk. Selanjutnya beberapa daerah datang

menggabungkan dirinya dengan Wajo, antara lain: Sompek, Liu, Ugik, dan Canruk sendiri dimasukkan ke dalam *Limpo Tuwa*. Pada akhir-akhir masa jabatan La Tadampare Puang ri Maggalatung, maka datang utusan dari *datu* Luwu (penasehat *datu* Luwu) yaitu To Ciung, Tau Tongeng MaccaE ri Luwu untuk memperbaharui perjanjian antara Luwu dan Wajo. Dalam kesempatan itu, beliau menawarkan bahwa Luwu, Wajo kini bersaudara. Wajo membalas pernyataan itu dan mengatakan bahwa “Wajo tidak pantas bersaudara dengan Luwu yang wilayahnya sangat luas”. Oleh karena itulah, sehingga Luwu menyerahkan daerah Melluse’saloE didaerah Bone sekarang, Larompong untuk Luwu dan Siwa sepanjang sungai. Dalam perjanjian itu disepakati pula status keduanya yaitu Wajo sebagai *adik* dan Luwu sebagai *kakak*. Selain itu, Luwu juga meminta bantuan kepada *arung matoa* Wajo agar menyerang Sidenreng. Sebagai hadiah, Wajo memperoleh Belawa untuk dijadikan anak. Otting dan Rappang yang dikalahkan pada penyerangan itu dijadikan sebagai milik Wajo, sedang Sidenreng menjadi daerah Luwu yang kemudian diberi status *anak Luwu* (Abidin, 1999:157).

Setelah dua puluh tahun *arung matoa* Wajo memerintah, maka kerajaan-kerajaan ini dapat mencapai puncaknya. Mulanya hanya merupakan kerajaan kecil, wilayahnya hanya meliputi Tosora, kemudian dapat mengembangkan sayapnya ke segala penjuru di Tanah Bugis. Faktor penyebabnya ialah La Tadampare adalah ahli siasat perang yang unggul, pemberani tiada taranya, tetapi raja bijaksana. Beliau pula yang menyempurnakan peraturan hukum adat pemerintahan dan peradilan yang mengajarkan etika pemerintahan yang sangat mengagumkan. Setelah meninggal dunia, beliau tidak langsung diganti dan tiga tahun kemudian, orang-orang Wajo baru mengangkat penggantinya yang bernama Tonampe yang didampingi oleh La Paturusi Tomaddualeng Ranreng Bettempola.

Masa pemerintahan Tonampe sangat sial karena Wajo mengalami peperangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tercatat dua kali Raja Gowa bersama Kerajaan Bone dan Soppeng menyerang Wajo. Itulah sebabnya, sehingga hanya beberapa tahun saja hampir seluruh daerah taklukkan Wajo yang dahulu hanya merupakan anak dan ata sewaktu Puang ri Maggalatung memerintah, hilang dari kekuasaan dan pengaruh Wajo dapat dikuasai. Setelah sekian tahun lamanya mengendalikan pemerintahan di Kerajaan Wajo, maka beliau lalu mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh La Temmassonge (Patunru, 1989: 44).

Masa pemerintahan La Temmassonge juga diwarnai peperangan, baik di dalam maupun di luar negerinya. Hanya tiga tahun lamanya beliau memerintah, lalu beliau terserang penyakit lumpuh sama seperti pendahulunya Tonampe alias Arung Tudangge. Beliau kemudian digantikan oleh Totemmangiang dan baru setahun menduduki tahta kerajaan, tiba-tiba Otting berperang dengan Sidenreng. Otting dibantu oleh Wajo sedangkan Sidenreng dibantu oleh Gowa. Pertempuran terjadi selama sepuluh hari dan setelah itu, orang-orang Wajo mundur ke negerinya. Akibat dari peperangan itu, Wajo akhirnya dijadikan sebagai budak (=ata) oleh Gowa. To Maddualeng sebagai wakil Wajo berkata kepada Raja Gowa Tunipallangga ; “Kasihlanilah kami supaya tuanku terima barangku yang sedikit ini, saya beli kesusahanku, tuanku adalah tuan kami dan kami adalah budak” (Patunru, 1989: 45).

Raja Gowa Tunipallangga berkata: “Aku terima penyerahanmu hai orang Wajo, untuk itu Tuhan Yang Maha Esa menyaksikan bahwa kamu adalah budak dan saya tuan, apa yang kuperintahkan kamu harus menurutinya”. Arung Matoa Wajo, Tomaddualeng menyetujuinya dan berkata: “Ya Karaeng, sepanjang kemampuan kami untuk itu dan baik bagi kami”. Dua tahun kemudian, raja Gowa memerintahkan orang

Wajo pergi ke daerah Semangki, Barru untuk menebang kayu yang akan dipakai mendirikan istana di Gowa. Selama lima bulan orang Wajo tinggal didaerah tersebut untuk menebang kayu, barulah mereka kembali ke negerinya. Selama menduduki jabatan sebagai *Arung Matoa* Wajo La Temmangiang, maka Wajo Barat dan Wajo Timur berperang, sekalipun peperangan itu berlangsung kurang lebih setahun, namun tidak ada yang menang. Pada masa ini pulalah *Arung Matoa* Wajo mangkat. Baginda kemudian digantikan oleh La Mallegeni, namun beliau hanya setahun lamanya memerintah karena tidak tahan menghadapi peperangan tersebut di atas, lalu mengundurkan diri. Ketika beliau mengundurkan diri, maka jabatan *Arung Matoa* Wajo lowong selama dua tahun lamanya. Setelah itu jabatan ini diduduki oleh La Mappapale Toappamadeng Massaoloccie yang sebelumnya merupakan *Ranreng Tua* dan Datu Patila (Patunru, 1989: 45).

Ketika penyerangan atas Batulappa telah usai, maka datang lagi utusan dari Kerajaan Gowa yang meminta *arung matoa* Wajo supaya turut membantu Kerajaan Gowa untuk menyerang Kerajaan Bulu-Bulu. Pimpinan pasukan Wajo pada saat itu adalah La Mungkaca Taudamang, cucu dari Puang ri Maggalatung, bekas *Arung Matoa* Wajo yang kesohor karena keberanian, keahlian, berbudi luhur dan memasyarakat. Setibanya di Kerajaan Bulu-Bulu, maka pada waktu tengah malam pasukan Wajo di bawah pimpinan La Mungkaca Taudamang memasuki ibu kota kerajaan dan melakukan pembakaran dimana-mana. Akibatnya pada pagi hari orang Bulu-Bulu datang menghadap dan mengatakan menyerah kepada Kerajaan Gowa (Hamid, 2002: 125-126).² Atas keberhasilan mengalahkan Kerajaan

² Ketika raja Gowa melakukan perluasan wilayah, maka Kerajaan Gowa dibantu oleh Kerajaan Wajo. Ketika itu yang menjadi *Arung Matoa* Wajo X adalah La Pakoko Topabela dengan panglima perangnya yakni La Mungkaca Taudamang yang menyerang Bulu-Bulu dan Lamatti. Dengan adanya serangan tersebut, raja-raja Tellu Limpoé berusaha menahan serangan Kerajaan Gowa yang dibantu oleh Kerajaan Wajo, namun tidak berhasil dan menyerah pada Kerajaan Wajo pada 1564. dinyatakan pula bahwa

Bulo-Bulo maka raja Gowa mengatakan kepada Wajo, bahwa mulai sekarang Wajo bebas dari penjajahan dan perbudakan Gowa dan Wajo diangkat menjadi anggota sekutu dari Gowa.

Dari peperangan-peperangan yang dialami oleh kedua kerajaan tersebut, membuat mereka berpikir untuk masing-masing mencari dukungan, termasuk melakukan kerja sama sesama kerajaan yang tertindas. Salah satu kerajaan yang sangat merasakan tekanan akibat peperangan adalah Kerajaan Wajo. Wajo pernah diperbudak oleh Kerajaan Gowa pada masa pemerintahan Tunipallangga dan Wajo diperintah oleh *arung matoa* La Temmasonge. Sebagai abdi Kerajaan Gowa, maka apa saja yang diperintahkan oleh Gowa, maka Wajo harus menurutinya. Sebagai contoh penekanan Gowa terhadap Wajo adalah setelah dua tahun diperbudak Gowa, maka Wajo diperintah untuk pergi ke daerah Semangki (daerah Barru) untuk menebang kayu yang akan dipergunakan untuk mendirikan istana di Kerajaan Gowa. Kurang lebih lima bulan lamanya orang-orang Wajo melakukan pekerjaan di daerah Barru untuk menebang kayu. Atas perlakuan itu, sebenarnya *arung matoa* Wajo tidak menyetujui karena menganggap itu sebagai perbuatan yang sewenang-wenang. Peristiwa inilah yang melatarbelakangi lahirnya perjanjian TellumpoccoE.

Oleh karena itu *arung matoa* Wajo merasakan perintah raja Gowa itu terlalu sewenang-wenang, maka beliau mengemukakan hal itu kepada raja Bone. Menanggapi hal itu, raja Bone juga sangat menyesali atas perintah dari raja Gowa tersebut dan beliau mengajak

terbentuknya Persekutuan Tellumpoccoe dimaksudkan untuk mempertahankan diri dari ancaman luar. Pada waktu itu, Kerajaan Gowa sedang giat-giatnya melakukan perluasan wilayah, sehingga Tellum Limpoe merasa terancam kedudukannya. Oleh karena itu, Tellu Limpoe mengadakan persekutuan dengan Kerajaan Bone yang ketika itu diperintah oleh La Tenrirawe Bongkanngge. Persekutuan itu ditandai dengan suatu perjanjian yang dinamakan "*Lamung Patue ri Topekkong*" (perjanjian di Topekkong). Tetapi karena kuatnya hegemoni Gowa, maka akhirnya Persekutuan Tellumpoccoe menjadi kerajaan *Lili* Kerajaan Gowa 1564.

arung matoa Wajo dan *datu* Soppeng bersama berangkat ke Barru untuk menemui raja Gowa di sana. Dalam waktu yang singkat mereka berangkat dengan membawa senjata-senjata perang yang lengkap ke Barru. Setibanya di sana, maka raja Gowa bertanya kepada raja Bone, mengapa mereka bertiga datang ke Barru, sedang yang disuruh hanyalah orang-orang Wajo. Raja Bone menjawab, bahwa ia bersama *Datu* Soppeng membawa orang-orang Wajo ke Barru, karena orang-orang Wajo takut melintasi negeri-negeri yang tidak didiami manusia. Sesudah raja Bone menjawab, maka orang-orang Wajo bersama orang-orang Soppeng pergi mengikat tiang-tiang kayu yang tersedia dan mereka mulailah menariknya. Sementara tiang-tiang itu ditarik, ketiga raja itu berganti-ganti menyanyikan lagu sumpah serapah. Ketika tiba giliran Arung Matoa Wajo menyanyikan lagu-lagu yang bermakna sumpah serapah itu, maka beliau memancang tombaknya tepat di depan mukanya, lalu bernyanyinya seperti berikut:

"Arengka limanakko, sini patuppabatue, torilalengpalue, penrang nakkariya dararinggi giling, penrang nakarakae, makkararia dararing, giling sama giling, tea sama tea." (Patunru, 1983:48).

Artinya:

Dengarkanlah kamu sekalian
Engkau semua raja-raja
Yang berdiam di pedalaman (pegunungan)
Laksana daun manila, daun urosa dan daun rotan
Menderita dan mengeluh
Marilah kita bersama-sama membalik
Marilah kita bersama-sama tidak mau

Merasakan penderitaan yang dialami oleh ketiga kerajaan tersebut di atas, maka mereka sepakat untuk menyelesaikan secara bersama. Untuk itu, mereka merencanakan suatu persekutuan antara ketiganya untuk melawan Kerajaan Gowa yang sangat kuat ketika itu. Setelah ketiga raja kerajaan tersebut setuju, maka mereka lalu

meninggalkan pekerjaannya yang ditugaskan oleh Kerajaan Gowa untuk menebang kayu di daerah Barru untuk dibuat sebuah istana di Gowa. Mereka lalu meninggalkan Barru dan kembali ke negerinya masing-masing. Ketika rombongan ketiga raja ini tiba di Amali, Bone, mereka singgah di sana mengadakan rapat, dan mereka sepakat bahwa tujuh hari kemudian, kita bertemu dan menyerang Cenrana, karena negeri ini adalah milik Kerajaan Gowa.

Usul itu kemudian disetujui semua orang-orang yang hadir, dan sesudah itu mereka kembali ke negerinya masing-masing. Pada hari yang ditentukan, mereka bertiga menyerang Cenrana dan membakarnya. Datu Luwu yang pada waktu itu merupakan sekutu Gowa, berada di tempat itu dan diberi kesempatan oleh ketiga raja itu (Bone, Soppeng, dan Wajo) untuk melarikan diri, sebab kalau tidak, kemungkinan besar dibunuh. Setelah Datu Luwu meninggalkan Cenrana, maka Raja Bone, Soppeng, Wajo mengadakan rapat. Hasil rapat itu memutuskan bahwa beberapa hari yang akan datang, kita sepakat bertemu kembali untuk membicarakan penyatuan negeri kita dalam suatu persekutuan.

Ketika tiba saat yang disepakati oleh mereka, ketiganya berangkat menuju Timurung. Orang Bone di bawah pimpinan Raja Bone (mangkauE) beserta raja-raja Lili dari Kerajaan Bone, orang Wajo di bawah pimpinan Arung Matoa Wajo La Mungkace To Udamang bersama raja-raja bawahan dari Kerajaan Wajo. Demikian pula orang Soppeng di bawah pimpinan Datu Soppeng La Mappaleppe Pong LipuE disertai seluruh raja-raja bawahan dari Kerajaan Soppeng. Mereka mengambil tempat di Bunne daerah Timurung. Ramailah mereka berkumpul bersama-sama menantikan saat baik untuk memulai perundingan. Tepat pada waktu bulan purnama (*tepunna ulangnge*), duduklah ketiga raja Bugis itu dalam perundingan. Yang dirundingkan dan yang disepakati ialah mempersaudarakan ketiga

negeri mereka dalam bentuk *union*. Ketiganya duduk sama rendah berdiri sama tinggi, tak ada yang lebih dari yang lainnya (Patunru, 1989: 54). Dalam pertemuan itu, terjadi dialoh antara ketiganya:

- Bone: “Sebaiknya kita mempersaudarakan antara ketiga negeri kita,bersaudara kandung.”
- Wajo: “Bagaimanakah gerangan kita bersaudara (trio), karena Wajo abdi dari raja Gowa, sedangkan Bone adalah sahabat dari raja Gowa”.
- Bone: “Aku paham akan ucapan itu, namun biarkanlah negeri kita bersaudara tiga, Bone, Wajo, Soppeng dan biarlah Bone yang bersaudara dengan Gowa. Kalaupun Gowa akan memperbudak atau memperhamba Wajo, maka kita bertiga bergabung untuk memerangnya”.
- Wajo: “Mengangguk” sebagai tanda setuju.
- Soppeng: “Benar sekali ucapanmu raja Bone, namun yang saya harapkan, bahwa negeri kita Soppeng menjadi anak, sementara Bone dan Wajo sebagai ibu, sebab persudaraan itu hanyalah bagi orang-orang besar”.
- Bone: “Bagaimana pendapatmu *arung matoa* karena sesungguhnya benar apa yang dikataka saudara kita Soppeng”.
- Wajo: “Menurut saya hal itu merusakkan negeri Gowa untuk menambahkan wilayahnya dan kita menjadi saudara bertiga”.
- Bone: “Benarkah pendapatmu *arung matoa*, maka biarlah negeri kita bertiga dipersaudarakan”.
- Soppeng: “Tidaklah aku menolak karuniamu berdua, maka biarlah negeri kita dipersaudarakan”.
- Bone: “Itulah kita sepakati bertiga, persaudaraan antara ketiga negeri Bone, Wajo, dan Soppeng. Satu anak sulung, satu anak tengah, satu anak bungsu. Kita menjadi tali berpiling

tiga (ibarat tali yang terbuat dari bahan kulit kerbau/sapi). Tiga dalam satu kesatuan yang utuh seja sekata dalam suka dan duka. Ikrar dan janji setia ini hendaknya lestari dan tidak akan menjadi sirna, meskipun bumi dan langit hancur lebur” (Hamid, 1991: 12-13).

Teks asli perjanjian di Timurung (Lampung) dapat disimak di bawah ini:

- *Tanata mattulu parajo, tappettu sirangrengsi, sanre tessi balleangngi, tessi luppe macekoangngi*
- *Makkeda siatepperengngi, malilu sepakainge, sialapakaingikki, tassitajeng alilungeng.*
- *Tessi reddu taneng-tanengngi, tessi atteneng-tenengngi, tessi saringen roppo-roppi, tessi tangeng tollariwi, tessi taneng to pasalai.*
- *Sirekkokang tomatojoi, silasekkeng tedong laiwi.*
- *Tessi tonrong atai, tessi rebba adakki, tessi lawa bicarai, tessi peddeng arajangi.*
- *Pada makkadawang risaliwengngi, temmakkedawang ri laleng.*
- *Tessi bicara musukki, tenna pasisalai to bongngo, tena pangkagakki to kannu, tenna bicara ri saliweng.*
- *Tessi polo tajangi, tessi bola warangparangi riwerengngi anu mallaletta.*
- *Tessi pakkeana tawangngi, tessi ri teata, tessi elli atai, tessiyateppekengngi rekko engka akkeda atangetta nataniya suro ribateng mpawai tomateppe tumate nallai tedong mauni ana' arung muna.*
- *Siatuwo bakke manukki, nange siampaekki, malewa silewangngi.*
- *Padai madeceng, padai maja', pada mate, pada tuwo*
- *Tennanre api tennanre ja'tana tennatiwi tuo asseyajinganna, mauni maruttung langi-E, mawottong paratiwi temmahuka' to asseyajinganna tanata.*
- *Nigi-nigi mpelai ulu ada, mareppak pinceng maressa ittallo, tana tudanngenna, nasabbiwi Dewata Seuwa (Patunru,*

1989: 54-55).

Artinya

- Tanah kita bagaikan tali yang terbuat dari kulit kerbau (*tulu parajo*), takkan putus, berkembar saling menguatkan, takkan saling mengecewakan, takkan saling tipu muslihat di antara kita.
- Berkata saling percaya mempercayai, khilaf saling menginsyafkan, saling mengingatkan (yang menolak bila diperingati oleh yang lain), dan tidak saling mencari kekhilafan.
- Tak saling merusak usaha, takkan saling melanggar hak, tak saling melemparkan kejelekan satu sama yang lain. Tak saling sembunyi-sembunyi (berterus terang) satu sama yang lainnya, takkan saling melindungi pelarian dan takkan saling menahan orang bersalah (bila orang-orang bersalah itu berada/bersembunyi dalam salah satu negeri di antara kita).
- Saling membantu menunjukkan anak buah yang berkepala batu dan saling membantu menundukkan pemberontak (yang mau menentang), bila terdapat di antara negeri kita.
- Takkan menghukum rakyat dari salah satu negeri kita (bila ada orang yang bersalah hendaknya diserahkan kembali ke negeri asalnya), takkan saling melanggar adat kebesaran antara kita, takkan saling menolak bicara yang telah diputuskan antara kita, takkan saling menghina, memusnahkansatu sama lain.
- Saling mengusahakan perluasan negeri kita di luar dari pada negeri kita, dan tidak terhadap negeri kita bertiga.
- Takkan ada persoalan perang antara kita bertiga.
- Kita takkan sampai dipertikaikan orang yang picik pengetahuannya, takkan sampai dipertikaian oleh orang yang bermusuhan, takkan diadili oleh orang luar (segala persoalan yang timbul oleh negeri kita akan diselesaikan sendiri secara ke dalam).
- Takkan saling menghalangi antara kita terhadap permu-

daan sesuatu yang diperlukan, takkan saling menyimpan atau menyembunyikan harta benda antar kita (apa yang menjadi harta milik seseorang di antar kita, hendaknya diserahkan kepada yang berhak), tidak saling merintang (saling memperkenankan hak milik seseorang di antara kita yang sudah terang menuju/menjadi hak seseorang).

- Takkan ada pembagian turunan hamba sahaya di antara kita (anak-anak hamba sahaya tetap jatuh ke pihak ibunya).
- Takkan ada salah satu di antara kita keberatan, tak ada juga yang jual beli hamba sahaya antara kita bertiga, tidak akan segera mempercayai itu akan mati sia-sia, walaupun ia adalah seorang anak bangsawan.
- Kita saling menyelamatkan hidup walaupun negeri kita sudah runtuh (tolong-menolong), kita saling mengulurkan tangan jika kita dalam kesusahan, kita bersedia saling berkorban, bila ada di antara kita terancam bahaya maut.
- Antara kita senasib sepenanggungan, tak akan ada di antara kita yang membiarkan kematian seseorang akan persaudaraan dan perjanjian luhur negeri kita.
- Walaupun andai kata langit akan runtuh/rubuh tertindih pertiwi, tak akan putus juga persaudaraan negeri kita.
- Barang siapa yang ingkar janji, maka hancur bagaikan beling, serta pecah bagaikan sebutir telur negeri kediamannya, ikrar ini di bawah kesaksian Dewata Yang Tunggal. Selesai mengucapkan ikrar tersebut, maka sepakatlah ketiganya menamakan negeri mereka *TellumpoccoE* atau tiga kerajaan puncak/besar) (Patunru, 1986:58).

Apa yang dikemukakan oleh Patunru, dkk. (1986) tentang ikrar dalam *TellumpoccoE* di Timurung, agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Muh. Ali, yaitu;

“Malilu sepakainga nrebba sipatokkong, sipeddi peddi di perri, rinyamang. tellu tessi baicukkeng, tessi accinnaiyang ulaweng

matase' pattola malampe warampareng maega. Naiya teya ri pakainge iya ri duai.

"iyana tallamung patuang idi' tellu masiajing, mappada oroane siana seama tanata tellu Bone-Wajo-Soppeng. Manguru'ja, mangurudeceng, seuwa matowa, seuwa ana' tennge, suwa pacucu.

"Mattullu parajo tellu massijing, tessi belleang, makkadawa ri saliweng temmakadawa ri laleng. Namana eppo tennawa nawa tomate, taro adanna tanae iya tellu masiajing Bone-Wajo-Soppeng. Nasabbiwi Dewata Seuwa, tapasangengngi ana'ta taro adatta tellu masiajing.

"Nakko ramu-ramunna tanata itello, naottongie batu. Iyapa namarusa taro adanna tanae iya tellu Bone-Soppeng Wajo marusappi pertiwi Batarae. Tasengngi tanata TellumpoccoE." (1986:21-22).

Artinya:

- Saling memperingati, rebah ditegakkan, saling membantu dalam kesusahan dan ketenangan, tiga serangkai saling hormat menghormati, harga menghargai milik masing-masing. Siapa yang ingkar dia diduai (dikero yok).
- Kita menanamkan batu sebagai tanda persaudaraan tanah kita bertiga Bone-Wajo-Soppeng. Bersatu dalam kebaikan dan kejahatan, satu yang tua, satu yang tengah dan satu yang bungsu.
- Kita bersatu laksana tali berpilin tiga, bersungguh-sungguh dan berusaha keluar dan berusaha ke dalam. Dipusatkan kepada keturunan tentang kesepakatan kita bertiga, Bone-Soppeng-Wajo. Dan disaksikan oleh Dewata dan dipesankan kepada keturunan tentang kesepakatan kita tiga bersaudara.
- Laksana telur yang ditimpa batu kerapuhan tanah kita. Kesepakatan kita ini baru rusak apabila rusak langit dan bumi. Kita namakan/gelar tanah kita "TellumpoccoE."

Terbentuknya Persekutuan Tellumpoccoe (tiga kerajaan besar atau tiga puncak), bagi Kerajaan Gowa dipandang sebagai suatu penghinaan terhadap kedudukan dan pengaruh kekuasaannya. Oleh karena itu Kerajaan Wajo pada tahun 1583 diserang, tetapi serangan itu berhasil dipukul mundur oleh laskar Kerajaan Wajo yang mendapat bantuan dari laskar Kerajaan Bone dan Soppeng. Atas kegagalan itu, maka Kerajaan Gowa kembali menyusun kekuatan untuk melancarkan penyerangan kepada Kerajaan Bone pada tahun 1585. Serangan kali ini diharapkan akan berhasil menaklukkan Kerajaan Bone, namun yang terjadi sebaliknya yaitu suatu kegagalan untuk kedua kalinya. Kegagalan ini mendorong penguasa Kerajaan Gowa memperkuat dan membangun kekuatan pasukannya untuk menyerang kembali Kerajaan Wajo (Nur, 2010: 86).

Setelah terbentuknya Kerajaan Tellumpocoe, dua tahun kemudian sesudah terciptanya persekutuan itu, maka raja Bone La Tenrirawe BongkangngE menderita sakit yang cukup parah. Setelah terasah oleh baginda raja Bone bahwa mungkin ajalnya sudah dekat, maka beliau memerintahkan agar mengumpulkan seluruh rakyat Bone dalam suatu pertemuan untuk mendengarkan pesan dan amanat beliau. Dalam pertemuan dengan rakyat banyak itu, baginda mengamanatkan bahwa “Kami berpesan kepada rakyat Bone, bahwa besok atau lusa kami wafat, saudara kami yang bernama La Inca menggantikan kami menduduki tahta Kerajaan Bone”. Setelah mengucapkan amanatnya itu, beliau memegang tangan adiknya lalu bertitah “adindaku, kakanda ini sakit keras, kalau kami meninggal dunia karena penyakit kami, adindalah kami tetapkan menggantikan kami. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, adinda harus perbaiki perangai dan tingkah laku untuk bersedia memangku pertanggungjawaban yang mulia tetapi sangat berat (Patrunru, 1968: 59).³

³ Selain itu, beliau juga berpesan kepada adiknya bahwa bila adinda telah dilantik

Begitulah pesan Baginda Latenrirawe BongkangngE kepada adiknya La Inca dan setelah itu Baginda pun wafat setelah memerintah Kerajaan Bone kurang 30 tahun lamanya. Setelah mangkatnya, beliau kemudian digelar "*matinroE ri Gucinna*" artinya yang meninggal di Gucinya. Setelah berlalunya hari berkabung atas meninggalnya beliau, maka dilantiklah La Inca menggantikan kakaknya sebagai raja Bone ke-8. Pertama-tama yang dilakukan Arumpone La Inca setelah dilantik adalah mengikuti pesan kakanya untuk mengawini iparnya dan menjadikannya sebagai permaisuri. Benar juga pesan BongkangngE yang mengharapkan adiknya kelak memperoleh keturunan dari beliau setelah kawin. Dari perkawinan tersebut, La Inca memang mempunyai tiga orang anak dari We Tenri Pakiu Arung Timurung yaitu; 1) La Tenripale Toakkepeang, 2) I Tenri Jallo atau biasa disebut MakkalaruE, 3) Seorang perempuan yang meninggal sewaktu masih kecil (Patunru, 1986:60).⁴

Amanat untuk memperbaiki perangai sebagai Arumpone yang berwibawa dan penuh rasa pengabdian serta dicintai dan dihormati oleh rakyat tidak terpenuhi. Bahkan La Inca setelah naik tahta kerajaan (sebagai Arumpone) mengingkari amanat kakaknya atau tidak memenuhi pesan-pesan yang dimanatkan kepadanya. Bahkan baru saja La Inca naik tahta, kegelisahan dalam kalangan para pembesar Kerajaan Bone sudah mulai terasa, keadaan menjadi rapuh

menjadi Arunpone, harapan kami agar adinda sudah mengawini iparmu *arung* Timurung yang sebentar lagi akan menjadi janda setelah kami meninggal dunia. Angkatlah dia menjadi permaisurimu nanti, semoga adinda mendapatkan keturunan darinya. Kami menganjurkan demikian itu, karena dia itu jarang tandingannya dan sukralah akan mendapatkan seorang perempuan bangsawan seperti dia. Kiranya dengan dia nantinya adinda dapat menjalankan pemerintahan dengan baik di Kerajaan Bone.

⁴ Dalam perkembangan selanjutnya, anak-anak dari La Inca bukanlah yang menggantikan ayahnya ketika ayahnya diturunkan dengan jalan dibunuh terlebih dahulu oleh neneknya karena mengamuk sewaktu dewan kerajaan menurunkannya dari tahtanya. Ternyata beliau semasa memerintah Kerajaan Bone, perangainya tidak berubah sehingga sangat bertolak belakang dengan perilaku kakaknya yang sangat dihormati oleh seluruh rakyat Bone.

dan labil. Kondisi ini dimanfaatkan oleh raja Gowa-Tallo untuk memulai serangan baru terhadap Bone. Serangan itu ditujukan hanya ke daerah-daerah dan tidak ditujukan ke pusat Tana Bone (Watampone). Rupa-rupanya serangan Butta Gowa itu hanya dimaksudkan sebagai peringatan dan uji coba kekuatan dan kesiapan Tanah Bone, setelah ditinggalkan oleh La Tenrirawe BongkangngE (Mattulada,1999:59).

Benar adanya, bahwa Tana Bone sudah mulai mengalami kekacauan dari dalam. Perangai La Inca Arumpone yang tidak terpuji itu, semakin menjadi-jadi. Berbagai orang besar terkemuka Tana Bone yang mencela perangnya itu disingkarkannya. Pelampiasan kemurkaan itu pertama-tama ditujukan kepada Arung Palenna yang bernama La Panaungi Topawawoi. Beliau dihukum pengasingan ke Sidenreng dan berkali-kali memohon pengampunan dari beliau namun tidak pernah dikabulkan. Itulah sebabnya beliau pindah ke BukiE dan di tempat inilah beliau dibunuh atas suruhan Raja Bone La Inca. Bukan hanya beliau yang mengalami nasib seperti itu yang dibunuh atas suruhan Raja Bone La Inca, tetapi masih terdapat sederet nama seperti; Arung Pacing; Arung Awampone; Maddanreng Palakka dan lain sebagainya. Kegelisahan rakyatpun semakin keras dan banyak pejabat berusaha meninggalkan Tanah Bone. Tabiat kekuasaan Arumpone La Inca itu dinyatakan seperti berikut: *Salossotoni tau tessalosse-rennae, batettoni tau teppatte'rennaE*, artinya: direndahkannya derajat orang di atas, dan ditinggikannya derajat orang yang di bawah (Mattulada,1999: 98).

Atas perbuatan La Inca, maka para pembesar Kerajaan Bone dan *Dewan Adat PituE* Tana Bone memutuskan untuk melakukan musyawarah dengan menghadirkan orang-orang terkemuka dan keluarga dekat Arumpone seperti Dammalaka dari Matajang,

kemanakan *arung* Matajang, nenek La Inca sendiri. Pertemuan itu dimaksudkan untuk membahas mengenai situasi genting yang terjadi di Tana Bone akibat perbuatan Arumpone La Inca yang sewenang-wenang dan bahkan melanggar adat kesopanan Tana Bone. Dalam pertemuan itu mengemukakan pendapat yang mengatakan bahwa hanya *arung* Majang yang diperkirakan dapat mengatasi dan menghentikan perbuatan terkutuk Arumpone, karena Arung Majang adalah nenek beliau yang sangat dihormatinya. Hasil musyawarah itu memutuskan untuk menurunkan La Inca dari tahta Kerajaan Bone dan memberikan amanat dan kepercayaan kepada Dammalaka untuk menyampaikan pemashulan itu kepada La Inca Arumpone. Dammalaka akhirnya mengutus orang kepercayaannya untuk menemui La Inca dan menyampaikan berita pemashulan itu. Belum semua berita pemashulan itu selesai disampaikan oleh orang kepercayaan Dammalaka itu, murkalah Baginda La Inca. Dibunuhnya utusan itu, dan dibakar musnah bangunan-bangunan dan rumah-rumah yang terdapat di dalam Lalebata atau Kotaraja yang dikelilingi tembok dari batu bata (Patunru, 1986: 60-61).

Pembakaran kotaraja (Lalebata) yang dilakukan oleh Arumpone La Inca, tinggal menyisahkan tiga buah rumah. Mendengar berita yang menyedihkan itu, maka *arung* Majang menyuruh orang-orangnya untuk mengusungnya menuju Kotaraja atau Lalebata sambil berkata “biarlah saya bertikam dengan La Inca itu” atau dalam bahasa Bugis kurang lebih seperti ini “*naiyapa siuno La Inca ritu* “. Setelah *arung* Majang (nenek La Inca) tiba di Kotaraja, ia melihat La Inca sedang mengamuk ke sana kemari menghadapi orang banyak. Setelah orang-orang melihat kedatangan *arung* Majang, mereka lalu mundur dan memberikan jalan kepada beliau. Arung Majang pun menyadari bahwa untuk membunuh La Inca harus dengan jalan tidak menumpahkan darahnya karena menurut adat, terlarang

bagi siapa saja untuk mengalirkan darah seorang Arumpone. Maka *arung* Majang menyuruh para pemberani melawan La Inca dengan menggunakan kayu bertangkai yang dalam kalangan pesilat disebut cabang karena ujungnya bercabang yang digunakan untuk menangkis senjata genggam lawan. Menghadapi para pesilat tangguh tersebut, maka La Inca akhirnya kelelahan karena mengamuk kesana kemari, karena terlalu lelah akhirnya beliau berhenti dan pergi bersandar di tangga istananya. Dalam kondisi kelelahan, bahkan sudah susah untuk menarik napas, maka *arung* Majang pun turun dari usungannya, dan menghabiskan hidup La Inca yang telah diturunkan dari tahtanya itu. Itulah sebabnya La Inca setelah meninggal digelar "*MatinroE ri addenenna*". Artinya, raja yang meninggal di tangga istananya (Mattulada,1999: 100-101 dan Patunru,1968:18).⁵

Pada pihak Kerajaan Gowa-Tallo pasca penyerangan 1590 ke Bone, juga mengalami nasib yang kurang menguntungkan untuk perkembangannya karena raja-raja yang memerintah tidak becus mengurus kerajaan. Ketika Karaeng Tunijallo meninggal dunia, maka baginda digantikan oleh putranya yang bernama I Tepu Karaeng Daeng Parebbung sebagai raja Gowa-Tallo ke- 13. Baginda masih berusia lima belas tahun waktu menaiki tahta Kerajaan Gowa-Tallo. Raja ini banyak melakukan perbuatan yang tercelah dan sewenang-

⁵ Dalam sumber yang sama dijelaskan bahwa "setelah Arungpone La Inca meninggal dunia, segera berkumpul kembali rakyat Bone dan Adat Tana Bone untuk menghadap Arung Majang untuk menanyakan perihal pengganti raja selanjutnya. Arung Majangpun menyatakan pendapatnya: "adapun yang kami kehendaki, sebaiknya cucuku La Pattawe yaitu anak Arung Palenna yang sekarang ini menjadi Arung Kaju yang kita angkat menjadi Arumpone". Oleh karena itulah sehingga orang banyak menyetujui hal itu sehingga La Pattawe diangkatlah menjadi Arumpone menggantikan La Inca. La Pattawe Arumpone ini kemudian kawin dengan Arung Mampu dan mendapat seorang anak yang bernama La Tenrituppu. Anak ini kemudian dikawinkan dengan sepupu sekalinnya yang bernama We Dangking dan lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama We Tenrisui. La Pattawe ini hanya memerintah Kerajaan Bone kurang lebih tujuh tahun lamanya dan meninggal dunia pada saat Baginda mengunjungi daerah Bulukumba. Setelah Baginda meninggal dunia, ia digelar "*matinroE ri Bettung* atau yang meninggal di Bettung.

wenang, sehingga timbul kekacauan di dalam negeri. Baginda memecat pembesar-pembesar kerajaan, di antaranya Tumailalang I Daeng Tamacinna, membagi-bagi hamba raja dan menetapkan *Bate Salapang* menjadi *Sipue bate*. Melarang rakyat untuk berbakti kepada kedua kakaknya, membunuh orang-orang walaupun tidak mempunyai suatu kesalahan. Oleh karena itulah banyak orang-orang pedagang yang meninggalkan ibukota Kerajaan Gowa-Tallo. Selain itu, banyak pula anak-anak raja atau bangsawan yang pergi meninggalkan Gowa. Pembesar yang tinggal ketika itu adalah raja Tallo (Mangkubumi Kerajaan Gowa-Tallo), Karaeng Barombong, Karaeng Data dan Karaeng Allu dan lain-lain (Patunru, 1969:18).

Pada masa pemerintahan beliau, agama Islam telah menjadi agama resmi kerajaan dan beliau pula yang melakukan penyebaran agama Islam ke seluruh pelosok Sulawesi Selatan karena kerajaan inilah yang menjadi pusatnya. Sesuai dengan tuntutan syariat Islam, maka Kerajaan Gowa-Tallo menyerukan kepada kerajaan-kerajaan Bugis agar manerima agama ini sebagai agama resmi kerajaan. Seruan Kerajaan Gowa-Tallo ditolak oleh beberapa kerajaan besar di Tana Bugis, terutama yang tergabung dalam kerajaan Persekutuan TellumpoccoE (Bone, Soppeng dan Wajo), sementara beberapa kerajaan kecil lainnya menerima seruan itu dengan baik. Penolakan kerajaan TellumpoccoE atas seruan raja Gowa-Tallo untuk menerima agama Islam membuat murka raja Gowa-Tallo harus mengangkat senjata. Perang antara dua kerajaan besar, yang satu terletak di daerah Bugis dan satunya lagi berada di daerah Makassar. Perang ini terjadi selama empat tahun dan empat kali pula Kerajaan Gowa mengirim utusan ke tanah Bugis (Mappangara, dkk. 2003: 92-93).

Memasuki awal abad ke-18, Perjanjian Tellumpoccoe tiga kali mengalami pembaharuan. Pembaharuan pertama terjadi pada 1708 Masehi. Pembaharuan perjanjian ini tidak diketahui dengan

pasti waktu diadakannya dan dalam rangka apa sehingga dilakukan pembaharuan. Dalam *Lontarak Bone* hanya disebutkan bahwa:

[Di tahun seribu seratus duapuluh Hijriah, seribu tujuh ratus delapan tahun Era, empat malam turunnya Mesek, Mei, di hari Sabtu, empat belas hari terbitnya bulan Safar, duduk bersama tiga negeri sekerabat, Bone, Wajo, Soppeng. Adapun yang disepakati bertiga (untuk) dijadikan pematang, peninggalannya *Matinroe ri Bontoala*, yaitu jika perkaranya terjadi di Bone, di Bone diputuskan, di Wajo perkaranya terjadi, di Wajo diputuskan, di Soppeng perkaranya terjadi, di Soppeng diputuskan. Jangan putusan itu simpang siur. Demikian pula jika orang Bone berselisih dengan orang Wajo, duduk bersamalah *Pabbicara* (=hakim)nya orang Bone dan Wajo memutuskan persengketaan kedua pihak. Ataukah orang Wajo berselisih dengan orang Soppeng, duduklah bersamalah *pabbicaranya* Wajo dan Soppeng keduanya, memutuskan persengketaan kedua pihak. Ataukah orang berselisih dengan orang Bone, maka duduk bersama *pabbicaranya masing-masing* untuk memutuskan persoalan kedua pihak. Dan apabila telah ada putusan yang ditetapkan, cepatlah menyampaikan sebagai pegangan bagi kerabatmu (=pihak-pihak yang bersengketa).

Inilah pembicaraan yang disepakati mereka bertiga, Bone, Wajo, Soppeng, apalagi karena (ketetapan) yang ditinggalkan oleh *Matinroe ri Bontoala*, lagi pula karena kesepakatan ketiga (negeri) sekerabat telah meneguhkannya. Barang siapa yang tidak mengikuti perjanjian ini, ia tidak akan menemukan kebaikan dunia akhirat, dia pula yang bersama-sama kita hadapi dengan ...(!) terj.] (Syarifuddin, 1989: 357 dan *Lontarak Bone*:83).

Pembaharuan kedua adalah terjadi pada 1121 Hijriah, dalam perjanjian ini ikut serta Cenrana dan diadakan di istana Latimojong. Sebenarnya perjanjian ini diadakan di istana Latimojong, kalau disimak dengan baik isi perjanjian pembaharuan Tellumpocoe

ini, maka maksud dan tujuannya hampir sama dengan perjanjian Latimojong, berikut redaksional perjanjian tersebut adalah:

[Pasal yang menjelaskan pada 1121 Hijriah Nabi kita Muhammad SAW, tahun ha 9 hari bulan Juni satu malam bulan Rabiulakhir pada hari senin, maka duduk bersamalah kembali Tellumpocoe di Cenrana di rumah bernama Latimojong. Diteguhkan kembali persetujuan di Timurung, yang juga disepakati Tellumpocoe adalah menyekerabatkan negeri di Luwu dengan negeri Tellumpocoe. Maka sekerabatlah negeri mereka maupun penguasanya. Dan masih itu juga perjanjian di Timurung yang disepakati oleh empat sekerabat, Bone, Wajo, Soppeng dan Luwu. Adapun yang diputuskan untuk dijadikan pematang, peninggalan *Matinroe ri Bontoala*, yaitu, jika perkaranya muncul di Bone, di Bonelah diputuskan. Jika perkaranya muncul di Wajo, maka di Wajo-lah diputuskan, di Soppeng perkaranya muncul, maka di Soppenglah diputuskan, di Luwu perkaranya muncul, maka di Luwulah diputuskan. Janganlah putusan itu simpang-siur, apakah itu orang Bone, apakah orang Wajo, apakah orang Soppeng, apakah orang Luwu, salah satunya yang berperkara mereka empat sekerabat. Masih tetap seperti perjanjian di Timurung, yaitu dengan mendudukkan bersama *pa'bicara* (=hakim), masing-masing pihak yang berperkara, agar mereka dapat mempertimbangkan keterangan kedua pihak. Dan, mereka yang berperkara itu jugalah diputuskan persengketaannya kedua pihak. Dan jika perkara yang telah diputuskan, maka saling dijalankanlah oleh mereka (=hakim) sekerabat apa yang telah diputus. Inilah perjanjian yang dikukuhkan oleh keempat negeri sekerabat, Bone, Wajo, Soppeng, Luwu. Lagi pula diteguhkannya peninggalan *Matinroe ri Bontoala*. Inilah perjanjian yang tidak terbawa oleh orang mati, tidak terbawa oleh orang keluar, sampai ke akhirat kesekerabatan keempat negeri(terj.)] (Syarifuddin, 1989:359).

Kelihatannya bahwa pembaharuan Perjanjian Tellumpocoe

tersebut di atas, adalah untuk menjalin kembali hubungan baik dengan Kerajaan Luwu yang pada masa lampau sering terjadi perang di antara mereka. Nampak bahwa isi perjanjian itu adalah pembaharuan perjanjian untuk memasukkan Luwu sebagai anggota kerabat kerajaan Tellumpocoe. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa pembaharuan perjanjian itu adalah perjanjian perdamaian antara mereka. Sementara itu, pembaharuan Perjanjian Tellumpocoe yang berikut adalah dibuat ketika La Maddukelleng membuat onar dalam suatu pertandingan sabung ayam. Dalam acara itu La Maddukelleng menikam seseorang yang berasal dari Kerajaan Bone sehingga menyebabkan terjadinya perkelahian massal dan menewaskan beberapa orang di antara kedua belah pihak. Orang Bone yang meninggal dunia dalam peristiwa itu ada sembilan belas orang, sedangkan pihak Wajo yang meninggal sebanyak lima belas orang. Perkelahian itu tidak seimbang oleh karena orang Wajo hanya sedikit sedangkan orang Bone banyak sekali sehingga orang-orang Wajo melarikan diri dan berenang menyeberangi Sungai Walanae (Jemma dan Sudirman Sabang, 2010: 30).

Akibat peristiwa itu, raja Bone mengirim utusan untuk menemui *arung matoa* Wajo La Salewangeng dan meminta agar *arung matoa* Wajo mau menyerahkan rang yang telah membuat onar di wilayah Bone, yaitu La Maddukelleng. Permintaan itu tentu saja dijawab halus oleh *arung matoa* Wajo dan berkata: Bahwa La Maddukelleng tidak pernah kembali ke Wajo setelah peristiwa itu. Jawaban itupun disampaikan oleh utusan Bone kepada rajanya, karena tidak puas atas jawaban itu, maka Arumpone mengirim lagi utusannya untuk menemui *arung* Singkang untuk menanyakan perihal keberadaan La Maddukelleng. Setelah mendengar ucapan utusan raja Bone, maka *arung* Singkang menjawabnya: Bahwa menurut Perjanjian Tellumpocoe di Bunne (Timurung) yang dibuat 1582 bahwa ketiga raja di Bone, Soppeng dan

Wajo harus saling mempercayai dan tak boleh saling membuka rahasia (Jemma dan Sudirman Sabang, 2010:30).

Mungkin peristiwa itulah sehingga Tellumpocoe kembali memperbaharui perjanjiannya agar tidak saling mencelakai. Pembaharuan Perjanjian Tellumpocoe yang ketiga ini adalah untuk menghukum *arung* Peneki La Maddukelleng yang telah membuat onar di Cenrana, Kerajaan Bone. Rumusan perjanjian itu selengkapnya adalah sebagai berikut:

[Duduk bersamalah di Timurung jurubicara Tellumpocoe, *Arumpone*, *Arummatoa*, *Datue ri Soppeng* tidak duduk (tidak hadir) berkata Bone: Baiklah kita menyatakan bahwa Arung Peneki bersalah karena telah banyak menimbulkan petaka terhadap Tellumpocoe.

Berkata Wajo: kami belum mengetahui petaka apa yang telah ditimbulkan (oleh) *arung* Peneki. Baiklah kita mempertemukan (membandingkan) peninggalan leluhur kita yang telah bertanam batu di Timurung, dan kita rentangkan tali pelurus (=hukum), agar berada di barat yang di barat, berada di timur yang di timur. Bertanyalah Arung Ta' La Mallak To Alleoang: Adapun yang kutanyakan kepada kita bertiga sekerabat, apakah pertemuan kita bertiga ini karena telah ingin mengikuti peninggalan *puang* leluhur kita yang bertanam batu di Timurung?.

Berkata *Sulle datu* dari Soppeng: Apakah pertanyaanmu itu adalah pertanyaan *arung* Ta', padahal ia hanya *pabbicara* ?

Berkata *Arung Betteng* La Sangaji (dan) *Pillak* La Gau: Kami menyetujui itu. Berkata orang Bone (dan) orang Soppeng: Ada pun pertemuan kita bertiga sekerabat, oleh karena ingin mengikuti penanaman batu di Timurung. Dan pertemuan itu diulang tiga kali oleh *arung* Ta'. Maka mengangguklah orang Bone dan orang Soppeng. Maka berkatalah Arung Ta': Saya simpulkan pada kain pengikat kepalaku. Sepakatlh. Dan disimpulkanlah. Ada pun yang disepakati sekerabat

untuk pulang (ke negeri) masing-masing mencari kebaikan. Barang siapa yang menemukan kebaikan tetapi tidak saling menyampaikan, sobek payung, patahlah tongkat, kehancuranlah yang menjadi kebaikan kita sekerabat] (Syarifuddin, 1989: 360).

Sebenarnya kalau diperhatikan isi dari tiga kali pembaharuan Perjanjian Tellumpocoe, hanyalah saling mengingatkan saja tentang apa yang telah disepakati oleh leluhur mereka pada waktu yang lalu. Setiap kali pembaharuan perjanjian itu dilakukan biasanya karena terjadi kesalahpahaman di antara mereka (Tellumpocoe), sehingga untuk mengatasinya agar tidak berlarut-larut maka mereka saling mengingatkan untuk kembali kepada perjanjian Tellumpocoe, meskipun pembaharuan perjanjian itu terjadi dengan jarak waktu yang panjang.

G. Masuknya Agama Islam di Kerajaan Soppeng

Agama Islam masuk dan berkembang pada awal abad ke-17 di Sulawesi Selatan yang di bawah oleh tiga orang ulama besar berasal dari kota Tengah, Minangkabau, Sumatera. Beliau bertiga kemudian membagi diri pada tiga daerah utama yang akan dijadikan sebagai pusat penyebaran Islam yaitu; Kerajaan Gowa oleh Datu Ri Bandang (Khatib Tunggal), yang menyebarkan agama Islam dengan penekanan pada bidang syariat. Di daerah Bulukumba (Tiro) oleh Datu di Tiro (Khatib Bungsu) yang menyebarkan agama Islam dengan jalan tasauf. Di Kerajaan Luwu oleh Datu Patimang. Datuk Pattimang atau Khatib Sulaiman, mengajarkan dan menyebarkan agama Islam di Kerajaan Luwu dan berhasil meng-Islam-kan *Payungnge ri Luwu* yang bernama La Pattiware Daeng Parabbung, dengan gelar Arabnya Sultan Muhammad. Setelah baginda wafat digelar “MatinroE ri Ware “.

Islamisasi dalam sub bab ini diartikan sebagai suatu proses yang tidak pernah berhenti, yaitu sejak datangnya agama Islam, penerimaan dan penyebarannya. Islamisasi itu menyangkut 3 hal yaitu: pertama; datangnya agama Islam, yaitu dengan datangnya orang-orang Islam untuk pertama kalinya di suatu daerah. Kedua, masuknya agama Islam yang berarti penduduk setempat telah memeluk agama Islam. Ketiga, penyebaran agama Islam, yaitu setelah agama Islam mulai disebarkan ke dalam masyarakat atau disebarkan keluar daerah dimana agama Islam pertama kali diterima (Sewang,2005:6).

Islamisasi dalam pengertian penerimaan agama Islam, dapat berarti konversi dan juga bisa berarti perpindahan agama atau kepercayaan yang dianut sebelumnya kepada agama Islam. Sedangkan Islamisasi dalam bentuk perubahan sosial-budaya, yaitu perubahan yang terjadi secara adopsi atau penyesuaian secara bertahap dari budaya Pra Sejarah kepada budaya Islam. Tetapi pengertian yang kedua ini tidak termasuk dalam kajian ini. Oleh karena itu, sub bagian ini bertolak dari suatu teori yang menyatakan: “jika raja atau para bangsawan menerima agama baru, maka rakyat akan siap mengikutinya, oleh karena dalam adat mereka, pada tingkat yang berbeda-beda, para raja atau sultan, mereka dipandang sebagai wakil dari Tuhan di dunia” (Tjandrasmita, 1986:24).

Teori tersebut di atas, memberikan penekanan bahwa posisi raja atau bangsawan atau sultan dalam Islamisasi, khususnya di Sulawesi Selatan menempati peranan yang sangat penting dalam penerimaan Islam. Raja memiliki kedudukan yang diberikan oleh adat sebagai wakil Tuhan di Bumi (Mattulada,1985:143). Itulah sebabnya sehingga penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan dapat berhasil dengan baik oleh karena yang pertama-tama di Islamkan oleh para penyiar Islam, dimulai pada kalangan raja, atau bangsawan dan keluarga istana.

Terkait dengan islamisasi itu, dikatakan bahwa agama Islam di Sulawesi Selatan, khusus di Kerajaan Gowa, setidaknya telah masuk pada masa pemerintahan Raja Gowa X Tunipallangga yang memerintah antara tahun 1546-1565. Faktanya dapat diketahui bahwa raja Gowa ketika itu telah memberikan izin kepada para pedagang Melayu dengan perantaraan Anakoda Bonang untuk menetap di Mangalekkana dan bahkan telah mendirikan masjid pada masa itu. Masjid inilah yang disebutkan sebagai masjid pertama di Sulawesi Selatan (Mappangara,2003:8).

Melihat kenyataan itu, bahwa ada jarak waktu yang sangat panjang antara kehadiran pedagang orang-orang Melayu yang berdiam di Mangalekkana dengan diterimanya agama Islam sebagai agama resmi Kerajaan Gowa, justru terjadi pada awal abad XVII (1603). Angka tahun ini diambil dari *Lontarak Bilang Gowa-Tallo* (buku diary Kerajaan Gowa-Tallo) yang menyatakan bahwa: “pada tanggal 22 September 1603, atau bertepatan pada tanggal 9 Jumadil Awal 1015 Hijriah, malam Jum’at, kedua raja bersaudara itu memeluk agama Islam (Kamaruddin, dkk.:9). Pendapat ini dibantah oleh Noorduyn dan menyatakan bahwa apa yang ditulis dalam *Lontarak Bilang Gowa-Tallo* itu, adalah kesalahan penulisan karena yang benar adalah: Hari Kamis 22 September 1605, bertepatan pada tanggal 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah” (Noorduyn,1972:3).

Raja yang memeluk agama Islam pada tanggal itu adalah raja Tallo yang juga merupakan Mangkubumi Kerajaan Gowa yaitu I Malingkaang Daeng Manyonri dan setelah memeluk agama Islam, beliau digelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Setelah beliau masuk Islam, maka diikuti pula oleh raja Gowa I Mangngarangi Daeng Manrabbia yang kemudian memakai nama Islam Sultan Alauddin. Dua tahun kemudian seluruh rakyat Gowa-Tallo dinyatakan telah menerima agama Islam yang dibuktikan dengan melakukan shalat

Jumat untuk pertama kalinya di Tallo pada 9 November 1607 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1016 Hijriah (Limpo,dkk.: 51). Yang mengislamkan kedua raja tersebut, adalah Khatib Tunggal Abdul Makmur yang kemudian lazim dikenal sebagai Datu Ri Bandang.

Penyebaran agama Islam yang dilakukan Kerajaan Gowa, oleh beberapa kerajaan kecil di Sulawesi Selatan dapat diterima dengan baik karena jauh sebelum itu telah ada perjanjian yang mengikat di antara mereka, yaitu perjanjian *Ulu Ada* yang antara lain isinya menyatakan bahwa; apabila ada di antara kita (para raja-raja yang berjanji) menemukan suatu jalan yang lebih baik, maka yang menemukan jalan itu, berkewajiban memberitahukan kepada raja yang lainnya tentang jalan yang dianggap baik itu (Hamid, 1982:74).

Meskipun kerajaan-kerajaan kecil yang dimaksud di atas telah menerima agama Islam dengan damai (tanpa perlawanan), tidak demikian halnya dengan kerajaan-kerajaan yang lebih besar dan kuat serta merasa sederajat dengan Kerajaan Gowa, mereka menolak seruan itu. Itulah sebabnya, tiga tahun kemudian ketika Persekutuan Tellumpocoe diajak masuk Islam secara damai, namun mereka menolaknya, kendatipun mereka termasuk di dalam perjanjian *Ulu Ada*. Penolakan Persekutuan TelumpoccoE berimplikasi terhadap hubungan antara keduanya, bahkan Kerajaan Gowa kemudian mengumumkan perang terhadap TellumpoccoE. Perang inilah kemudian yang dikenal dengan nama *Musu Selleng* (perang peng-Islam-an). Berturut-turut dapat di Islam-kan melalui peperangan ini adalah Kerajaan Soppeng 1609, Kerajaan Wajo 1610 dan Kerajaan Bone pada tahun 1611⁶.

⁶ Kerajaan TellumpoccoE adalah gabungan dari tiga kerajaan besar yaitu Kerajaan Bone, Kerajaan Soppeng dan Kerajaan Wajo. Mereka bertiga membentuk persekutuan pada tahun 1582 dengan nama MattelumpoccoE. Persekutuan ini dibentuk untuk menghadang kekuatan Kerajaan Gowa yang pada waktu itu sedang giat-giatnya

Walaupun agama Islam telah menjadi agama resmi di Kerajaan Luwu (1603), atau lebih dahulu daripada Kerajaan Gowa dan Tallo menjadi kerajaan Islam (1605), namun kerajaan ini jugalah yang menjadi pusat penyebaran agama Islam untuk seluruh jazirah Sulawesi Selatan. Jadi, tidak mengherankan jika politik peng-Islam-an seluruh Sulawesi Selatan dijalankan oleh raja Gowa dan Tallo dengan sangat kuatnya. Keadaan itu dilandaskan pada satu perjanjian yang pernah disepakati terdahulu antara Kerajaan Gowa dan beberapa kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Isi perjanjian itu antara lain berbunyi: "... Bahwa barang siapa menemukan jalan yang lebih baik, maka ia berjanji akan memberitahukan tentang jalan yang lebih baik itu kepada raja-raja sekutunya" (Mattulada,1976:17).

Seruan peng-Islam-an yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa, ditanggapi baik oleh kerajaan-kerajaan kecil di daerah Bugis dan mau menerima agama Islam dengan damai. Lain halnya dengan kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam Persekutuan TellumpoccoE, menolak ajakan Kerajaan Gowa tersebut dengan keras. Penolakan ini oleh Kerajaan Gowa dianggap sebagai suatu bentuk perlawanan, sehingga Kerajaan Gowa memaklumkan perang terhadap mereka karena dianggap telah mengingkari isi perjanjian yang telah dibuat jauh sebelumnya.

TellumpoccoE menolak ajakan Kerajaan Gowa untuk menerima agama Islam karena pihak TellumpoccoE menganggap ajakan itu hanyalah sebagai alasan pembenaran untuk menguasai kerajaan - kerajaan di Tanah Bugis. Alasan mengajak kerajaan-kerajaan lain untuk menerima agama Islam hanyalah siasat semata untuk menguasai kerajaan lainnya di bidang politik dan ekonomi, terutama

melakukan perluasan wilayah kekuasaannya di Sulawesi Selatan. Persekutuan ini diikrarkan oleh ketiga raja kerajaan tersebut di daerah Timurung dan hingga kini tempat perjanjian ini masih terpelihara dengan baik.

wilayah TellumpoccoE. Seruan yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa, sebenarnya bukanlah didasarkan atas ketulusan sebagaimana yang telah diikrarkan pada perjanjian terdahulu (Sewang, 2005: 113-114). selain itu, penolakan juga dikaitkan dengan alasan kesejarahan, dikatakan bahwa sejak abad XVI telah terjadi berbagai kegiatan politik yang seringkali meningkat menjadi bentuk kekerasan perang antara kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar dengan tujuan untuk memperebutkan kedudukan kepemimpinan di Sulawesi Selatan.

Kekhawatiran TellumpoccoE dianggap sesuatu yang wajar karena melihat kebesaran dan kemajuan yang dialami oleh Kerajaan Gowa ketika itu. Selain itu, karena adanya ketidaktahuan mereka tentang ajaran agama Islam itu sendiri yang dikhawatirkan akan mengganggu tatanan sosial yang sudah ada. Juga, dikhawatirkan tentang potensi ekonomi yang dimiliki TellumpoccoE akan didominasi oleh Kerajaan Gowa. Sikap khawatir itu ditunjukkan dengan cara menolak ajakan untuk menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Alasan lain penolakan itu, juga karena TellumpoccoE menganggap bahwa Kerajaan Gowa tidak mungkin akan melakukan penyerangan untuk memaksakan kehendaknya mengingat kekuatan TellumpoccoE juga cukup kuat dan besar waktu itu (Mappangara,2003: 92).

Alasan – alasan penolakan dari pihak TellumpoccoE cukup beralasan karena pada waktu yang hampir bersamaan, Kerajaan Gowa berupaya untuk membangun pusat perdagangan di Somba Opu. Kegiatan itu dilakukan dengan cara mematikan beberapa pusat-pusat perdagangan yang ada di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, TellumpoccoE melihatnya bahwa ajakan untuk mau menerima agama Islam hanyalah sebagai alasan untuk mencapai kepentingan politiknya, untuk itu, TellumpoccoE sepatutnya untuk menolak ajakan tersebut. Tetapi sebaliknya, penolakan itu menjadi senjata ampuh bagi Kerajaan Gowa untuk memerangi TellumpoccoE yang berada di Tanah Bugis.

Pengerahan pasukan oleh Kerajaan Gowa untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam Persekutuan TellumpoccoE, dikenal dengan istilah *musu selleng* (perang peng-Islam-an). Musu Selleng ini oleh orang-orang TellumpoccoE dapat diartikan sebagai suatu politik ekonomi, terutama jika dihubungkan dengan posisi Kerajaan Gowa sebagai sebuah kerajaan maritim yang menuntutnya untuk mencari daerah-daerah penghasil komoditi. Dengan alasan itu, dapat dipahami bahwa pengucapan *Dua Kalimat Syahadat* bagi raja-raja yang ditaklukkan oleh Kerajaan Gowa, bisa juga berarti ganda. Pertama, sebagai pernyataan simbolis tentang penerimaan agama Islam. Kedua, sebagai pernyataan politis atas sebuah pengakuan pada kekuasaan politik Kerajaan Gowa (Sewang, 2005: 121). Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa terjadinya *Musu Selleng* antara Kerajaan Gowa dengan TellumpoccoE adalah sesungguhnya dilatari oleh keinginan Raja Gowa Sultan Alauddin untuk menjadikan Kerajaan Gowa sebagai satu kerajaan yang kuat dari segi politik dan ekonomi.

Jika mencermati pernyataan-pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa *Musu Selleng* lahir karena penolakan Persekutuan TellumpoccoE untuk menerimanya sebagai agama kerajaan seperti yang diseruhkan oleh Kerajaan Gowa. Sebaliknya, pihak Kerajaan Gowa menganggap penolakan itu sebagai suatu bentuk perlawanan yang harus direspon. Kerajaan Gowa merasa dipermalukan atas penolakan yang dilakukan oleh pihak TellumpoccoE. Hal itu dipandang sebagai ancaman dalam perkembangan Kerajaan Gowa ke depan. Juga kekhawatiran Kerajaan Gowa bahwa ajaran agama Keristen akan dapat dengan leluasa masuk ke daerah-daerah pedalaman Sulawesi Selatan. Jika hal ini terjadi, secara pelan tapi pasti pada gilirannya akan mengganggu perkembangan Kerajaan Gowa. Sebagai suatu kerajaan yang besar dan kuat ketika itu, tidak ada jalan lain kecuali tindakan kekerasan yang

harus diambil secepat mungkin. Kerajaan Gowa terpaksa mengambil jalan melalui peperangan atau angkat senjata. Perang tidak dapat dihindari sehingga terjadilah perang yang cukup besar.

Sekalipun perang yang ditempuh oleh pihak Kerajaan Gowa untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Sulawesi Selatan, tetapi dampak dari perang itu sendiri sangat menguntungkan dalam Islamisasi di Sulawesi Selatan, sebab ia diiringi dengan peng-Islaman terhadap raja-raja yang telah ditaklukkan. Peng-Islaman terhadap beberapa daerah yang dilakukan oleh pihak Kerajaan Gowa, dapat disimak dalam *lontara'*Tallo sebagai berikut:

112,...*Tunabetaya iangaseng napantamai Isilang tonanyombaya napalilikangngi; napantamai Isilang tunabetaya napalilikangngi; ammaradekangngi Tempe sipue, Bulucenrana, Wawonio, Belokka, Lemo, Cempaga, Pattiongi, dan Pekanglabbu; Nabetana Bugisika ri Tallu Bocco-Boccoa, tamarappui, tammangallei sabukati, tammapalakkaira'ba Gae, teami natea* (Rahim dan Ridwan Borahima, 1975: 16).

Artinya:

112,...Semua orang yang dikalahkan dimasukkan Islam, orang-orang yang menyembah (kepadanya), dimasukkannya Islam, yang dikalahkan dijadikan daerah takluknya, ia memerdekakan sebagian Tempe, Bulu Cenrana, Wawonio, Bilokka, Lemo, Cempaga, Pattiongi dan Pekang Labbu; Pada waktu mengalahkan Kerajaan-kerajaan Bugis yang tergabung dalam aliansi TellumpoccoE, ia tidak merampas atau mengambil pampasan perang, dan tidak mengambil ganti rugi.

Dari uraian isi lontara di atas, nampak bahwa sebenarnya Kerajaan Gowa tidak ingin menguasai secara langsung dari TellumpoccoE yang telah dikalahkan dalam perang itu. Juga bahwa perluasan wilayah tidak terlihat di dalam isi *lontara'*tersebut, tetapi yang pasti bahwa

dengan di Islam-kannya beberapa kerajaan-kerajaan Bugis, termasuk TellumpoccoE, menandakan bahwa Kerajaan Gowa pada masa Islam mulai dikembangkan di Sulawesi Selatan, sehingga menjadi suatu kerajaan besar dan mempunyai pengaruh yang kuat.

Penolakan Persekutuan TellumpoccoE yang tidak mau menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaan, Zainal Abidin menilainya dalam dua faktor utama, yaitu karena:

1. Mereka sukar meninggalkan kegemaran makan babi, minum *tuak*, sabung ayam dengan judi, beristeri banyak dan lain-lain.
2. Mereka khawatir bahwa akan dijajah oleh Kerajaan Gowa. Mereka masih teringat akan perang yang pernah dilancarkan oleh raja-raja Gowa sebelumnya, seperti ; I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng dan Itadji Barani Daeng Marompa serta Tunibatta pada abad XVI (Abidin,1999:231-232).

Penolakan Kerajaan Soppeng atas seruan Kerajaan Gowa agar mau menerima agama Islam membawa dampak yang fatal. Kerajaan Gowa memutuskan untuk melakukan serangkaian penyerangan atas aliansi Persekutuan TellumpoccoE yang berada di Tanah Bugis. Serangan pertama diarahkan kepada Kerajaan Soppeng melalui wilayah Kerajaan Sawitto pada 1608⁷. Serangan yang dilancarkan pasukan Gowa di daerah Pakenya dapat dipukul mundur dan dihalangi oleh pasukan Kerajaan Soppeng karena mendapat bantuan dari sekutunya, yaitu Wajo dan Bone. Bahkan Karaeng Matoaya yang memimpin pertempuran itu hampir terbunuh sehingga pasukan Gowa memutuskan kembali ke Gowa.

⁷ Dijelaskan bahwa Kerajaan Sawitto, tidak diperangi oleh Kerajaan Gowa untuk meng-Islam-kan kerajaan itu, karena saat pasukan Kerajaan Gowa berada di daerah tersebut, Addatuang Sawitto I Tenri Sule Daeng Bulaeng Datu BissuE bersama putra La Sappo Cacca (La Tenri Pau) menyatakan menerima agama Islam yang bertepatan tahun 1017 Hijriah atau 1607 Masehi dan langsung mengucapkan *Dua Kalimat Syahadat* sehingga terhindar dari serangan pasukan Kerajaan Gowa. Dalam tahun itu juga Islam telah sampai ke Suppa, Bacukiki dan Mandar.

Meskipun serangan pertama ini mengalami kegagalan sehingga tidak dapat menaklukkan Kerajaan Soppeng dengan sekutu-sekutunya, namun serangan itu sendiri jauh lebih besar pengaruhnya pada orang-orang Gowa dibandingkan dengan orang-orang Bugis, karena Gowa telah berhasil meng-Islamkan Kerajaan Sawitto bersama rajanya. Sementara pada pihak aliansi TellumpoccoE mulai mendapat cobaan besar karena tiga bulan kemudian, aliansi itu sudah memperlihatkan keruntuhannya.

Tiga bulan kemudian, Kerajaan Gowa mendaratkan pasukannya pada tiga tempat, yaitu di daerah Akkotengang, Maroanging dan Padaelo, Wajo. Pendaratan yang kedua ini berhasil mempengaruhi masyarakat Akkotengang untuk memihak kepada Gowa. Dengan demikian, dapat dipahami penolakan masyarakat Akkotengang terhadap permintaan bantuan *Arung Matoa Wajo Sangkurru Mulajaji*, dalam menghadapi Kerajaan Gowa. Sebenarnya *arung matoa Wajo* telah berusaha agar masyarakat Akkotengang tetap memihak kepadanya dengan mengingatkan kepada mereka tentang kesepakatan yang pernah mereka buat. Kesepakatan berbunyi, "baik kebaikan maupun keburukan akan sama-sama dipikul" (Sewang, 2005:116-117). Tetapi, masyarakat Akkotengang dan Kera menjawab dengan tegas "Kebaikan telah datang, *arung matoa* sendiri tidak mau menerima kebaikan itu".

Keberpihakan masyarakat Akkotengang dan Kera untuk mendukung Gowa, sangat merugikan Persekutuan TellumpoccoE. Sebab dalam perkembangan selanjutnya, persekutuan ini sudah tidak dapat dipertahankan karena satu persatu daerahnya telah jatuh ke tangan kekuasaan Kerajaan Gowa. Pada tahun 1608, Rappang, Bulu Cenrana, Otting, dan Maiwa berpihak pada Gowa. Jatuhnya daerah-daerah tersebut, memberikan kesempatan bagi Gowa untuk menghimpun kekuatan dengan mendirikan benteng pertahanan di

Rappang. Itulah sebabnya sehingga setiap serangan dari TellumpoccoE selalu dapat dihalau pasukan Kerajaan Gowa. Kekalahan yang dialami TellumpoccoE berpengaruh kepada masyarakat dalam wilayah kekuasaan mereka. Pada tahun itu juga, banyak orang Wajo datang menghadap kepada raja Gowa di Rappang untuk memeluk agama Islam (Sewang,2005:116).

Setelah Rappang menyatakan dukungannya kepada Kerajaan Gowa, maka terbukalah pintu untuk menyerang Soppeng dan Wajo. Penaklukan atas Soppeng terjadi setelah keduanya melakukan peperangan selama satu bulan lebih di daerah Tanete yang berakhir dengan kekalahan pihak Soppeng. Sejak kekalahan Soppeng, maka praktis seluruh wilayah kekuasaan Soppeng, berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Gowa. Dengan demikian, terbuka peluang bagi Kerajaan Gowa untuk menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Soppeng. Menurut Mattulada “Peristiwa peng-Islam-an raja Soppeng ke-14 terjadi kira-kira tahun 1609”. Dalam *Lontarak Bilang Gowa-Tallo* (naskah bahasa Makassar) disebutkan bahwa “namantama Islam Tu Soppeng, Bundu ri Pakenya”. Artinya “orang-orang Soppeng memeluk agama Islam, setelah selesai perang di Pakenya (Kamaruddin,dkk.1985-1986: 9).

Kalau disimak isi *lontarak Bilang Gowa Tallo* tersebut, ada kemungkinan bahwa penyerangan itu bukanlah dalam rangka peng-Islam-an raja Soppeng ke-14 BeoE yang memerintah antara tahun 1601-1620, dan beliau menerima Islam pada 1609. Dari beberapa sumber lain yang membahas tentang tahun peng-Islam-an Kerajaan Soppeng, di masa pemerintahan *Datu* Soppeng ke-14 BeoE, hampir semua menyebutkan terjadi pada tahun 1609, seperti: H.D. Mangemba menyatakan “Sidenreng dan sekitarnya masuk Islam pada tahun 1610 dan Bone dengan resmi memeluk agama Islam pada tahun 1611 (1956: 9). Dengan data seperti itu, membuktikan bahwa peng-Islam-an Datu

Soppeng ke-14, BeoE terjadi setelah berakhirnya perang di Pakenya.

Sementara itu, dari pihak yang menyebutkan bahwa sebelum *datu* Soppeng menganut agama Islam, sudah ada orang-orang Soppeng yang telah mengenal agama Islam. Kondisi ini dimungkinkan oleh karena orang-orang Soppeng banyak yang melakukan perdagangan antar pulau pada saat itu, dan mendatangi berbagai tempat di nusantara ini. Dalam perjalanan itu, tentu mereka telah melakukan kontak dengan orang-orang yang telah bergama Islam. Bahkan telah tercipta ceritera-ceritera yang menyatakan bahwa tiga tahun sebelum *datu* Soppeng menerima agama Islam, telah datang ke daerah ini seorang ulama yang bernama Syeh Abdul Madjid. Ulama ini tidak diketahui asal usulnya dan bagaimana awalnya sehingga tiba di daerah Soppeng pada 1606. Ulama ini bersuku bangsa Arab Yunani dan beliau melihat bahwa orang-orang Bugis di Soppeng belum menganut agama Islam sehingga ia berkeinginan untuk menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat (Rasyid, 1988:34-35).

Tetapi tidak mudah untuk menentukan kepastian ceritera tersebut, karena sampai sekarang data yang mendukung keterangan dalam ceritera itu, belum ditemukan. Sebaliknya, bila keterangan itu benar adanya, maka berarti agama Islam telah dikenal oleh orang-orang Soppeng jauh sebelum Islam itu diterima oleh *Datu* Soppeng BeoE pada 1609, bahkan mungkin ada di antara masyarakat yang telah memeluknya. Keterangan pasti tentang masuk dan diterimanya agama Islam oleh Kerajaan Soppeng adalah setelah kerajaan ini kalah dalam perang melawan Kerajaan Gowa. Kekalahan itu menyebabkan mudahnya agama Islam diterima di wilayah kerajaan ini. Kekalahan Kerajaan Soppeng juga membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kedua kerajaan sekutunya yaitu Bone dan Wajo.

Kurang lebih sebulan setelah Kerajaan Soppeng dikalahkan,

Kerajaan Gowa menyerang Kerajaan Wajo. Kondisi ini berlangsung dengan cepat oleh karena kekuatan Kerajaan Gowa berlipat ganda karena mendapat tambahan kekuatan dari Kerajaan LimaE Ajatappareng dan Kerajaan Soppeng yang baru saja dikalahkan. Dalam peperangan ini, pihak Wajo harus mengakui keunggulan Gowa, dan *arung matoa* Wajo mengirim utusan untuk menemui pimpinan pasukan Gowa untuk meminta gencatan senjata. Permintaan itu diterima oleh pihak Gowa dalam batas waktu lima malam saja. Tetapi baru semalam gencatan senjata berlangsung. *Arung matoa* Wajo kembali mengirim utusannya untuk menemui raja Gowa. Mungkin karena syarat-syarat lunak yang ditawarkan Karaeng Matoaya setelah beberapa kali kalah, sehingga orang-orang Wajo meminta perdamaian. Pada 1610, Wajo menerima Islam (Poelinggomang, dkk..2004:91).

Begitu besar arti kemenangan Gowa, sehingga kekalahan yang diderita pihak lawannya, tidak lagi memberikan kemungkinan kerajaan-kerajaan Bone, Soppeng, Wajo dapat bersatu dalam waktu singkat. Karena itulah *arung matoa* Wajo lalu mengirim utusannya untuk menemui Raja Gowa Sultan Alauddin yang saat itu berada di Cenrana, Bone. Kurir itu menyampaikan maksudnya pada raja Gowa bahwa; Wajo sudah bersedia menerima Islam, dengan syarat: "*Tennareddumui wasseku, tenatimpa ewoku, tennasese'balaoritam pukku*" artinya: Asalkan raja Gowa tidak merampas kerajaanku, tidak mengambil barang-barang kepunyaan rakyatku dan kepunyaanku (Poelinggomang, dkk. 2004:91).

Permintaan *arung matoa* Wajo diterima oleh raja Gowa, lalu pergi ke Wajo memenuhi undangan *arung matoa* Wajo *La Sangkuru Patau* bersama dengan rakyatnya di Topacceddo (sebelah barat Tosora). Di sinilah *Arung Matoa* Wajo *La Sangkuru Patau* bersama rakyat menerima agama Islam yang bertepatan pada hari Selasa 15 Syawal 1020 Hijriah atau tanggal 6 Mei 1610 dengan mengucapkan

dua kalimat syahadat. Setelah peng-islam-an itu. Raja Gowa I Mangerangi Daeng Manra'bia Sultan Alauddin kembali ke negerinya (Sewang,2005:1180.).

Setelah *Arung Matoa Wajo La Sangkuru Patau* (1607 – 1610) menerima agama Islam. Maka *arung matoa* Wajo itu, selaku simbol bahwa mereka hanya beriman kepada Allah SWT, yang tidak berserikat, tidak dilahirkan, tidak ada samanya, tidak ada yang disembah selain Dia. Dialah yang menghidupkan dan Dia pula yang mematikan. Dia yang berkuasa di langit dan di bumi, berkuasa dan menguasai segala-galanya, serta menjauhi segala larangan-Nya, maka merekapun beramai-ramai turun ke sungai untuk mandi sebagai pertanda mensucikan diri karena telah memeluk agama Islam. Setelah sekalian dasar-dasar menyangkut agama Islam telah tersebar di kalangan rakyat Wajo, maka *arung matoa* mempercayakan kepada Dato Sulaiman untuk menangani dan mengorganisasi urusan sara' di Tanah Wajo. Pejabat-pejabat sara' ditetapkan oleh Dato Sulaiman dengan menjabarkannya kepada pejabat-pejabat pemerintahan kerajaan dan daerah-daerahnya.

Arung Matoa Wajo La Sangkuru Patau adalah raja Wajo yang mula pertama menerima agama Islam dalam 1610. Tidak lama beliau memerintah negeri Wajo karena pada tahun masuknya beliau ke dalam Islam, ia lalu meninggal dunia. Hanya kira-kira 3 tahun lamanya beliau duduk di atas singgasana Kerajaan Wajo lalu beliau wafat. Beliau adalah *arung matoa* yang mula-mula dikuburkan jenazahnya karena beliau sudah beragama Islam, sedangkan jenazah *arung matoa-arung matoa* yang terdahulu dibakar dan abunya disimpan dalam *balubu* dan kemudian ditanam (Patunru,1983: 52).

Pada saat peng-Islam-an penguasa Wajo, terjadi dialog antara Karaeng Matoaya dan penguasa setempat. Seperti yang disampaikan Hikayat Wajo, Karaeng Matoaya bertanya kepada pemimpin Wajo:

... Aku berkenan menerima sebuah tongkat kecil dariku, agar kalian mengikuti Gowa masuk Islam dan kalian semua menyembah kepada satu Tuhan ... To Appamole (pemimpin Wajo) menjawab kepada Karaeng Matoaya, "Kita telah bersumpah syahadat. Paduka dan kami semua akan menyembah satu Tuhan. Aku meminta agar rakyat kami semua akan menyembah satu Tuhan. Aku meminta agar beras kami jangan dirampas, tikar kami jangan digelar dan tikus kami jangan dilepaskan dari sarungnya. Maka kami akan mengikuti Gowa; ketika Gowa berperang kami akan mengikut Gowa dan aku akan menyingsingkan lengan baju, yang satu bagi perjalanan pergi dan yang lain bagi perjalanan pulang. Ketika Gowa menang dalam perang begitu juga Wajo menjadi pemenangnya. Jika engkau pergi dengan kapal maka kami tidak akan mengikuti, karena saya tidak bisa berlayar. Aku akan duduk di rumah dengan harapan engkau akan menang, dan jika Gowa menang maka Wajo juga akan menang. Baru kemudian Gowa dan Wajo akan dipisahkan karena Tuhan memisahkannya. "Karaeng berkata, "Aku sependapat dengan apa yang kau katakan, Bangsa Wajo, aku memberikan apa yang kalian minta, ketika anda berusaha menghormati Allah Ta'ala dan mengikuti Nabi Muhammad SAW" (Mappangara, 2003: 100).

Karaeng Matoaya kemudian memberikan pakaian yang layak kepada para pemimpin Wajo untuk melakukan sembahyang seperti yang dituntunkan dalam syariat Islam dan menurut sumber Wajo, dia menerima keinginan mereka (orang Wajo) untuk mengadakan pesta besar terakhir dengan memotong babi. Arung Matoa XV La Sangkuru Patau (1607-1610) setelah memeluk agama Islam bergelar Sultan Abdurrahman (Patunru, 1983: 53)..

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan studi ini, maka dapat disimpulkan:

1. Sebelum berdirinya Kerajaan Soppeng, di daerah ini telah ditemukan adanya kehidupan prasejarah yang dibuktikan dengan banyaknya temuan-temuan dari peninggalan tersebut. Setelah berakhirnya masa prasejarah, Kerajaan Soppeng juga mengenal kehidupan masyarakat yang hidup berkelompok yang dipimpin oleh pemimpin yang bergelar *matoa* yang jumlahnya 60 kelompok. Pada masa inilah kehidupan masyarakat menjadi kacau balau sebab di antara kelompok itu selalu berperang di antara mereka. Pada masa itulah disebut sebagai masa *sianre bale taue* artinya yang kuat menguasai yang lemah. Pada masa inilah ditemukan *tomanurung* untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat dan kemudian mendirikan kerajaan.
2. Dalam perkembangannya, Kerajaan Soppeng banyak mengalami gangguan dari kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Itulah sebabnya ia berusaha menjalin kerjasama dengan dua kerajaan lokal lainnya untuk membuat suatu persekutuan yang bertujuan untuk membendung gangguan-gangguan dari luar. Lahirlah apa yang kemudian disebut Persekutuan Tellumpoccoe yang beranggotakan 3 buah kerajaan yang bertetangga yaitu; Kerajaan Bone, Kerajaan Soppeng dan Kerajaan Wajo.
3. Islamisasi Kerajaan Tellumpoccoe melalui suatu peperangan yang begitu hebat (*Musu Selleng*) dan Persekutuan Tellumpoccoe tidak dapat menahan serangan-serangan Kerajaan Gowa sehingga harus menyerah kalah dan akhirnya menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Alasan penolakan Kerajaan Tellumpoccoe tidak mau menerima agama Islam yang diserukan oleh Kerajaan Gowa karena hanya ingin memperluas wilayah kekuasaan dan

sumber ekonominya. Tapi tuduhan Tellumpocoe tidak terbukti. Hal ini terlihat ketika sudah ditaklukkan oleh Kerajaan Gowa, raja Gowa dan Tallo melarang pasukannya untuk mengambil harta benda rakyat sebagai rampasan perang, tidak memungut upeti dan tidak memungut ganti rugi perang, bahkan sehelai daun pohon pun dilarang untuk diambil. Malahan raja Gowa sendiri membagi-bagikan pakaian dan harta benda lainnya untuk dihadiahkan kepada rakyat Tellumpocoe sebagai tanda terima kasihnya karena telah menganut agama Islam.

Saran-Saran:

1. Pemerintah kabupaten seharusnya menjadikan buku-buku sejarah dan kebudayaan dijadikan untuk muatan lokal pada sekolah-sekolah tingkat Sekolah Dasar Hingga Sekolah Tingkat Menengah. Ada kecenderungan generasi muda kurang mengenal lagi sejarah daerahnya sendiri.
2. Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Soppeng seharusnya mendata karya-karya sejarah dan budaya Kabupaten Soppeng yang sudah banyak diteliti oleh para peneliti sejarah dan budaya. Buku-buku lokal Sulawesi Selatan cukup banyak tersedia di Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, Kantor Balai Bahasa Makassar dan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar serta Balai Arkeologi Makassar. Buku-buku hasil kajian pada kantor-kantor tersebut dapat diperoleh secara gratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Zainal. 1999. *Kapita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Abdu Latif. 2012. "Konfederasi Ajatappareng 1812-1906: Sejarah Sosiopolitik Orang Bugis di Sulawesi Selatan". Bangi: Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universitas Kebangsaan Malaysia.
- Ali, Muhammad. 1986. *Sejarah Bone*. Bone: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Andaya, L. 2013. *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17*. Makassar: Innawa.
- Asbah, Rasyid, dkk. 2018. *Silsilah Kekerabatan Raja-Raja Sulawesi Selatan – Barat*. Jakarta: PT. Buku Pintar Indonesia.
- Cinnong, Ahmad Ambo. TT. *Massenrempulu Dalam Perspektif Sejarah*. Enrekang: Makalah Seminar menyambut HUT Kabupaten Enrekang di Gedung Natiro Mata.
- Fahri. 2016. "Paleometalurgi Soppengi", dalam *Lembah Walannae; Lingkungan Purba dan Jejak Arkeologi Peradaban Soppeng*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hasanuddin, dkk. 2016. "Kebudayaan dan Tradisi Megalitik Soppeng", dalam *Lembah Walannae; Lingkungan Purba dan Jejak Arkeologi Peradaban Soppeng*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hadrawi, Mukhlis. 2016. "Jejak Awal Wanua-Wanua Soppeng Dan Pertumbuhannya: Kajian Berdasarkan Manuskrip", dalam *Lembah Walannae; Lingkungan Purba dan Jejak Arkeologi Peradaban Soppeng*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hadimuljono dan Abd. Muttalib. 1979. *Sejarah Kuno Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Suaka dan Peninggalan Sejarah Sulawesi Selatan.
- Hamid, Abu. 1974. "Selayang Pandang Uraian Tentang Islam dan Kebudayaan Orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan", dalam *Bugis—Makassar dalam Peta Islamisasi*. Ujung Pandang: IAIN Alauddin.

- Hamid, A. Mansur. 1988. *Musu Selleng ri Tana Ugi dan Awal Keberadaan Agama Islam di Tanah Wajo*. Dalam Bingkisan Bunga Rampai Budaya, No. 1. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulsel.
- Hamid, Pananrangi. 1991. *Sejarah Soppeng*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Kamaruddin, dkk. 1986. *Lontarak Bilang Gowa Tallo* (Transliterasi dan Terjemahan), Ujung Pandang: Depdikbud.
- Kila, Syahrir. 2011. *Integrasi Kerajaan Binuang Dalam Pitu Babana Binanga*. Makassar: Dian Istana.
- Makkulasse. 1986. "Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kabupaten Enrekang". Ujung Pandang: Suaka dan Peninggalan Sejarah Sulawesi Selatan.
- Makmur dan Mukhlis Hadrawi. 2016. "Otoritas Wanuwa: Kedudukan Sosial-Politik Wanuwa-Wanuwa Hingga Terbentuknya Kerajaan Soppeng", dalam *Lembah Walannae; Lingkungan Purba dan Jejak Arkeologi Peradaban Soppeng*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mangemba, H.D. 1956. *Kenallah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Timun Mas.
- Mappangara, Suriadi, dkk. 2003. *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan*. Makassar: Biro KAPP Setda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mattulada. 1985. *Lontarak Latoa, Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mattulada. 1988. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*. Ujung Pandang; Hasanuddin University Press.
- Mattulada. 1999. *Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Mone, Abd. Rahim dan Borahima, Ridwan. 1988. *Penelitian dan Pengkajian Naskah Kuno Sejarah Tallo*. Jakarta: Depdikbud PPPNK.
- Notosusanto, Nugroho. 1986. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu.

- Noorduyn. 1972. *Islamisasi Makassar*. (terjemahan), Jakarta: LIPI
- Patunru, Abd. Razak Daeng. 1969. *Sejarah Gowa*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
- Patunru, Abd. Razak Daeng. 1983. *Sejarah Wajo*. Makassar ; Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara..
- Patunru, Abd. Razak Daeng. 1985. *Sejarah Bone*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara..
- Patunru, Abd. Razak Daeng. 2004. *Bingkisan Patunru: Sejarah lokal Sulawesi Selatan*. Makassar: Pusat Kajian Indonesia Timur kerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Pelras, Cristian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Forum Jakarta-Paris
- Putuhena, Saleh. 2007. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Poelingomang, Edward.L.dkk. 2004. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid II*. Makassar: Biro KAPP Setda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Rasyid, Darwas. 1998. *Sejarah Islam di Daerah Soppeng*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Rahim, Abduh dan Borahima, Ridwan. 1975. *Sejarah Kerajaan Tallo (Suatu Transkripsi Lontarak)*. Ujung Pandang: Lembaga Sejarah dan Antropologi.
- Siardiang, A. Jemma dan Sudirman Sabang. 2010. *La maddukelleng*. Wajo: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
- Sitonda, Muhammad Nasir. 2015. *Sejarah Massenrempulu*. Makassar: Yayasan Pendidikan Muhammad Natsir.
- Sitonda, Muhammad Natsir. 2013. *Pancaitana Bungawalie: Perjuangan Rakyat Maiwa, Enrekang, Duri melawan Kolonialisme Belanda*. Makassar: Yayasan Pendidikan Muhammad Natsir.
- Sewang, Ahmad, M. 2005. *Islamisasi Kerajaan Gowa (Dari Abad XV sampai Abad XVII)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

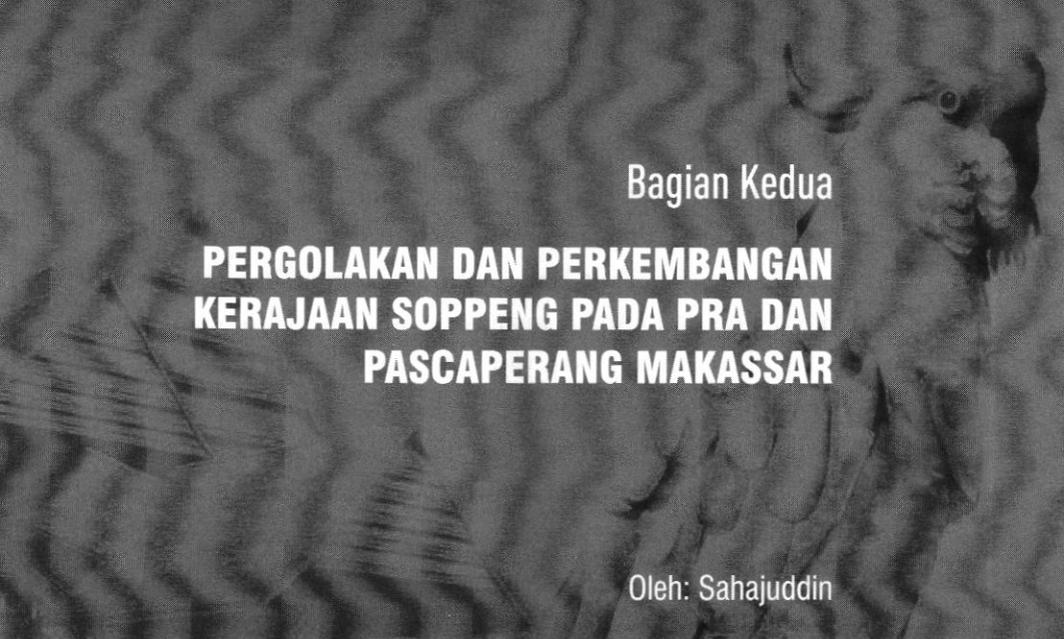
- Sritimuryati. 2013. *Sejarah Enrekang*. Makassar: De La Macca.
- Syarifuddin, Amir. 1989. "Perjanjian Antarkerajaan Menurut *Lontara*". Ujung Pandang: Disertasi belum terbit, Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Sumange. 2013. *Sejarah Arajang Soppeng Jilid I*. Soppeng: Yayasan Bina Budaya.
- Suriatman, dkk. 2016. "Industri Alat Batu Cabenge di Lembah Walannae.", dalam *Lembah Walannae; Lingkungan Purba dan Jejak Arkeologi Peradaban Soppeng*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tim Penulis. 2005. *Sejarah Kerajaan-Kerajaan Lokal di Massenrempulu*. Enrekang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Yasin Limpo, Syahrul dkk., 1995. *Propil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa*. Sungguminasa: Pemda Kabupaten Gowa.

Internet dan Lontarak:

- Makmur Makka, 2011. *Sejarah Ogi*.
- ahmadrisalbisot@yahoo.co.id.
- <http://www.depdagri.go.id>.
- *Lontarak Sukkuna*

INFORMAN:

1. Nama: Syarika
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil
Umur: 46 tahun
Alamat: Kabupaten Soppeng
2. Nama: Khaerul
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil
Umur: 48 tahun
Alamat: Kabupaten Soppeng
3. Nama: I Daya
Pekerjaan: Penjaga Situs *Manurung* di Goarie
Umur: 42 tahun
Alamat: Kabupaten Soppeng
4. Nama: Cece
Pekerjaan: Penjaga Bola Ridie Soppeng (bissu)
Umur: 60 tahun
Alamat: Kabupaten Soppeng



Bagian Kedua

PERGOLAKAN DAN PERKEMBANGAN KERAJAAN SOPPENG PADA PRA DAN PASCAPERANG MAKASSAR

Oleh: Sahajuddin

Pendahuluan

Sejarah panjang Sulawesi Selatan, sering kali terjadi pergolakan politik. Bahkan pergolakan politik itu ada yang berhasil merubah tatanan politik, sosial dan budaya. Pergolakan politik yang mampu merubah tatanan itu adalah pergolakan politik pada saat proses integrasi awal kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan yang memunculkan tokoh mitologis *To Manurung*. Pergolakan politik selanjutnya yang mampu merubah tatanan politik, sosial dan budaya adalah “Perang Makassar” (1666-1669). Setelah Perang Makassar masih banyak lagi terjadi pergolakan politik, seperti pada masa ekspedisi militer Belanda di Sulawesi Selatan pada abad XIX, pada masa pergerakan nasional, pada masa pendudukan Jepang, pada masa menjelang dan pascaawal kemerdekaan, peristiwa korban 40.000 jiwa, peristiwa Andi Asis, peristiwa Abdul Kahar Muzakkar, serta pergolakan politik lainnya. Namun dalam kajian ini hanya membahas pergolakan politik pra dan Pascaperang Makassar, khusus kaitannya dengan Kerajaan Soppeng.

Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang memiliki banyak kerajaan yang tersebar dari berbagai daerah. Kerajaan-kerajaan lokal itu dalam perkembangannya, memunculkan kerajaan yang berkembang secara cepat dan besar. Ada juga kerajaan yang perkembangannya lambat, termasuk ada kerajaan kecil lalu meleburkan diri pada kerajaan yang besar, di samping ada kerajaan yang bergabung dengan kerajaan lain karena taklukan. Memasuki abad XVII, ada beberapa kerajaan yang semakin nampak perannya dan ambisinya untuk mengembangkan dan memajukan kerajaannya seperti Kerajaan Tellu BoccoE, yaitu kerajaan yang dianggap besar dan utama seperti Kerajaan Luwu, Gowa dan Bone (Depdikbud, 1981: 2). Selain kerajaan yang dikenal dengan Tellu BoccoE itu, masih banyak lagi kerajaan lain, seperti Kerajaan Tanete, Soppeng, Bantaeng, kerajaan konfederasi Lima Ajatappareng, kerajaan konfederasi Turatea, Tellu LimpoE dan banyak lagi kerajaan-kerajaan lainnya. Banyak diantara kerajaan-kerajaan itu dalam proses berdirinya sebagai kerajaan yang utuh dan terintegrasi sebagai satu kesatuan. Namun kerajaan-kerajaan itu selalu dihubungkan dengan seorang tokoh mitologis. Tokoh mitologis ini merupakan tokoh yang dianggap hebat dan memiliki kekuatan dan kekuasaan di luar batas kemampuan manusia biasa. Tetapi karena tokoh tersebut tidak diketahui asal usul geneologis dan asal-usul daerahnya, sehingga banyak orang maupun para sejarawan menyebutnya dengan istilah *To Manurung*.

Berdasarkan pada gambaran di atas mengindikasikan bahwa keberadaan kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Sulawesi Selatan, pada umumnya selalu dihubungkan dengan *To Manurung*. *To Manurung* dalam banyak kajian sosial, banyak yang menganggap sebagai mitos, tetapi tidak sedikit juga yang mempercayainya sebagai sejarah. Namun yang menarik dari proses kehadirannya, Ia muncul pada momen yang tepat, yaitu terjadi di saat kerajaan dalam suasana

konflik internal. Sehingga kerajaan itu membutuhkan pemimpin yang mampu menciptakan suasana aman dan damai. Di saat itulah muncul *To Manurung* sebagai bentuk pengesahan dan legalitas kerajaan sebagai kerajaan yang aman dan damai. Sosok *To Manurung* ini yang mewarisi raja-raja berikutnya karena tokoh ini dipercaya sebagai juru selamat yang membawa keamanan, keselamatan, ketentraman dan kemakmuran bagi kerajaan. Demikian juga Kerajaan Soppeng dalam proses integrasi internalnya sebagai kerajaan yang utuh, juga mengenal *To Manurung* sekitar abad XIV.

Pergolakan politik yang kedua sebagaimana disinggung sebelumnya adalah Perang Makassar (1666-1669). Pergolakan politik di Sulawesi Selatan pada pra dan Pascaperang Makassar merupakan pergolakan yang sangat fundamental karena dapat merubah sebagian besar tatanan sosial dan politik di daerah ini. Perubahan yang paling mencolok pada masa itu adalah supremasi Kerajaan Gowa-Tallo diambil alih oleh Kerajaan Bone. Begitupun masalah tatanan sosial budaya Pascaperang Makassar banyak dimotori oleh Kerajaan Bone. Namun supremasi Kerajaan Bone itu jangan hanya dilihat dari satu sisi saja, tetapi harus dilihat dan dipahami secara menyeluruh dari periode waktu ke waktu. Kalau kita melihat keberhasilan Kerajaan Bone Pascaperang Makassar, mestinya kita harus melihat faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi keberhasilan itu.

Jika latar belakang yang dimaksud adalah keadaan dan kondisi Sulawesi Selatan pada pra Perang Makassar, maka keberhasilan Kerajaan Bone tidak dapat mengabaikan peran penting Kerajaan Soppeng. Kerajaan Soppeng memiliki andil besar pada pra dan Pascaperang Makassar. Sebelum Perang Makassar Kerajaan Soppenglah yang berjuang mati-matian, sebab para bangsawannya banyak yang menjadi korban pengerahan tenaga kerja ke Kerajaan Gowa-Tallo untuk mengerjakan parit-parit pertahanan. Bangsawan-bangsawan

dari Soppeng-lah yang merancang dan menjadi dalang serta pelaku pelarian untuk mencari bantuan ke VOC di Batavia melalui Tanjung Palette menuju Buton baru ke Batavia. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah Arung Palakka sebagai Datu Marioriwawo dan tiga orang tokoh utama Kerajaan Soppeng lainnya, yaitu *Arung Bila*, *arung Appanang* dan *Arung Citta* (Pananrangi, 1991:171). Empat tokoh Kerajaan Soppeng inilah sebagai pemegang peran penting untuk menentukan keberhasilannya mengalahkan supremasi Kerajaan Gowa-Tallo dalam Perang Makassar. Demikian juga dalam berbagai medan perang yang terjadi di Sulawesi Selatan yang mengatasnamakan Kerajaan Bone pada pra dan Pascaperang Makassar. Sesungguhnya di dalamnya adalah Kerajaan Soppeng yang menjadi satu kesatuan dengan Kerajaan Bone, bahkan Kerajaan Soppeng sebagai aktor utamanya. Sehingga membicarakan Kerajaan Bone pada pra dan Pascaperang Makassar sesungguhnya juga membicarakan Kerajaan Soppeng.

Pascaperang Makassar menghasilkan dua kekuasaan dan kekuatan besar di Sulawesi Selatan sebagai pemenang dalam Perang Makassar, yaitu VOC dan Kerajaan Bone. Dua kekuasaan dan kekuatan besar itu sudah nampak pada masa menjelang Perang Makassar. VOC sudah sering melakukan penetrasi terhadap Kerajaan Gowa-Tallo, sementara Kerajaan Bone memang kerajaan yang selalu menandingi kekuatan dan kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo. Tetapi pra, dan Pascaperang Makassar, sesungguhnya Soppeng sangat menentukan dan menunjukkan kesudahan perang. Kalau pada satu pihak kekuatan Kerajaan Gowa-Tallo tergantung pada aliansi-aliansinya, maka VOC sangat ditentukan juga oleh aliansinya dengan Kerajaan Soppeng dan Kerajaan Bone. Dua kerajaan ini menjadi panggung politik kekuasaan di Sulawesi Selatan pada abad XVII.

Namun setelah Perang Makassar, diantara dua kerajaan itu, Kerajaan Bone-lah yang sangat populer dan memegang supremasi

kekuasaan politik di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia timur pada umumnya. Sementara Kerajaan Soppeng tidak banyak terlihat dalam pergolakan politik di Sulawesi Selatan. Padahal andil dua kerajaan dan andil dari tokoh-tokoh Kerajaan Soppeng menjadi pemeran utama dalam pergolakan politik sebelum Perang Makassar. Sehingga masa-masa ini menarik dibahas dan dikaji pada masa pra dan Pascaperang Makassar. Selama ini, Perang Makassar selalu dipahami bahwa perang tersebut adalah perang etnis antara Bugis dengan Makassar. Juga perang tersebut selalu membesar-besarkan andil salah satu kerajaan atau salah satu tokoh, padahal banyak fakta yang menyebutkan bahwa kerajaan atau tokoh yang memegang perang penting tidak dapat berdiri sendiri tanpa andil dan peran dari kerajaan lain atau tokoh lain. Kalau kita menyimak tokoh-tokoh dan pasukannya dalam Perang Makassar, maka banyak fakta yang dapat kita temukan, bagaimana kerajaan atau tokoh itu berandil atau berperan, baik sebelum maupun sesudah Perang Makassar.

Sebelum Perang Makassar kita dapat melihat seperti apa dan bagaimana peran tokoh-tokoh dari Kerajaan Soppeng. Kemudian kita bandingkan dengan sasaran dari serangan pasukan VOC bersama sekutunya, yaitu diarahkan untuk merebut benteng-benteng Makassar yang ada dalam wilayah Kerajaan Gowa-Tallo. VOC sepertinya hanya fokus pada benteng-benteng tersebut, padahal banyak wilayah atau kerajaan yang ada di sekitarnya sebagai pendukung dan sekutu Kerajaan Gowa-Tallo yang membahayakan penyerangan. Namun sebelum perang dan merebut benteng-benteng tersebut, ada beberapa tokoh yang sangat militan dan melakukan pembersihan terhadap pendukung Kerajaan Gowa-Tallo. Tindakan yang sangat militan dari tokoh-tokoh itu, mungkin di luar perencanaan VOC tetapi atas inisiatif dari tokoh-tokoh itu karena mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman secara kultural-emosional Sulawesi Selatan.

Serangan dan penguasaan kerajaan pendukung Kerajaan Gowa-Tallo merupakan langkah yang dianggap paling tepat untuk mempermudah pasukan sekutu VOC masuk ke jantung pertanahan Kerajaan Gowa-Tallo. Sebab yang paling membahayakan jika pasukan VOC bersama sekutunya menyerang, tiba-tiba kerajaan pendukung dari Kerajaan Gowa-Tallo tiba-tiba juga menyerang mereka. Tetapi karena strategi dan perencanaan yang matang dari tokoh-tokoh Kerajaan Soppeng tersebut, sehingga strategi itu mempermudah penyerangan dan penguasaan Kerajaan Gowa-Tallo.

Tokoh-tokoh Kerajaan Soppeng yang dimaksud adalah *Arung Palakka*, *Arung Bila*, *Arung Appanang*, *Arung Citta* dan tokoh-tokoh lainnya. Tokoh-tokoh ini yang membuat kesepakatan untuk membagi front penyerangan, yaitu arah utara Makassar dan arah selatan Makassar. Dari arah utara, maka dimulailah penyerangan dan penguasaan terutama kepada Kerajaan Sawitto, yang mana Kerajaan Sawitto sengaja datang ke Kerajaan Soppeng memporak-porandakan, tetapi pasukan dari Kerajaan Sawitto tidak tahu dan tidak sadar bahwa para tokoh dari Kerajaan Soppeng yang pergi meminta bantuan VOC sudah tiba dari Batavia. Setelah pasukan Kerajaan Soppeng menaklukan pasukan Kerajaan Sawitto; Pasukan Kerajaan Soppeng meneruskan penyerangan ke kerajaan lain setelah melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh lainnya, termasuk *Arung Palakka*.

Salah satu target utama pasukan Kerajaan Soppeng adalah Tanete Barru, Sidrap sampai ke Pangkep. Di sana, pasukan Soppeng mendesak kerajaan yang dikuasainya untuk berjanji dan bersumpah setia kepada perjuangan *Arung Palakka* dan kawan-kawannya. Bahkan mereka disuruh ikut bergabung dengan pihak koalisi pasukan VOC di Binamu. Jejak-jejak itulah yang sangat menentukan kemenangan sekutu VOC pada akhir Agustus 1667 yang dapat merebut Benteng Galesong (Kartodirdjo, 1988: 103). Kemudian pada bulan-bulan berikutnya

berhasil merebut benteng-benteng Makassar lainnya, termasuk Benteng Sombaopu. Kemenangan ini pula yang memaksa Kerajaan Gowa-Tallo mengakui kemenangan VOC dan sekutunya. Sebagai bukti kekalahan Kerajaan Gowa-Tallo, maka ditandatangani Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667.

Perang Makassar merupakan perang yang sangat besar dan paling dahsyat yang pernah dialami VOC. Hal itu, disampaikan oleh salah seorang pembesar VOC. Akibat besar dan dahsyatnya Perang Makassar, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Pascaperang Makassar, telah banyak merubah tatanan kehidupan dan pemerintahan di Sulawesi Selatan, termasuk Soppeng. Kemenangan VOC bersama sekutunya dalam Perang Makassar (1666-1669) dibuktikan melalui Perjanjian Bungaya. Hasil dari perang itu pula yang telah merubah peta politik di Sulawesi Selatan, termasuk pengaturan wilayah kekuasaan dan wilayah pengaruh Kerajaan Gowa-Tallo. Berdasarkan Perjanjian Bungaya, daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan VOC pada waktu Perang Makassar dinyatakan berada di bawah kekuasaannya. Dengan demikian Kerajaan Gowa-Tallo (Makassar) kehilangan sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya, daerah yang pernah mengakui dan berada di bawah kekuasaannya (Poelinggomang, 2004: 37).

Setelah Perang Makassar, VOC lebih banyak mengambil inisiatif dan mengatur Sulawesi Selatan, sehingga VOC memetakan wilayah Sulawesi Selatan dalam beberapa istilah wilayah. Makanya ada yang dikenal dengan kerajaan sekutu VOC, ada yang disebut kerajaan pinjaman dari VOC dan ada juga kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan penguasaan secara langsung oleh VOC. Selain itu, ada beberapa konfederasi yang sebelum Perang Makassar tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo, dinyatakan kembali berdiri sendiri, bebas dan berdaulat, tetapi berkedudukan sebagai kerajaan

pinjaman setelah Perjanjian Bungaya. Sementara penguasaan langsung kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan oleh VOC atau Kompeni Belanda merupakan target Belanda untuk memegang monopoli politik pemerintahan dan monopoli perdagangan di kawasan timur Indonesia. Penguasaan langsung Kompeni Belanda terhadap Kerajaan Gowa-Tallo (Sulawesi pada umumnya) merupakan target yang telah lama direncanakan oleh Belanda, bahkan sebelum Perang Makassar. Namun sampai Perang Makassar selesai, penguasaan secara keseluruhan Sulawesi Selatan tidak dapat diwujudkan oleh Kompeni Belanda. Penguasaan secara langsung yang berhasil dilakukan oleh Belanda hanya wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo, sementara wilayah yang berada di bawah pengaruh Kerajaan Gowa-Tallo ada yang berstatus kerajaan pinjaman (Poelinggomang, 2004: 37-39).

Rencana Kompeni Belanda untuk menguasai secara langsung kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan pasca awal Perang Makassar sangat sulit dilakukan karena kekalahan Kerajaan Gowa-Tallo bukan hanya pasukan VOC yang berperan tetapi pasukan Arung Palakka yang juga syarat kepentingan terhadap Kerajaan Gowa-Tallo. Kepentingan itu sebagai permasalahan besar untuk menguasai wilayah Kerajaan Gowa-Tallo. Artinya bahwa Kompeni Belanda harus baik hitungannya untuk melakukan penguasaan langsung itu. Sebab Kerajaan sekutu VOC di wilayah ini, juga berkentingan, sehingga jalan satu-satunya untuk menguasai secara keseluruhan Sulawesi Selatan, VOC terlebih dahulu menaklukan dan menguasai kerajaan sekutunya. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah Kompeni Belanda mau dan manpu melakukan itu. Tetapi Kompeni Belanda sebenarnya tidak terlalu mempermasalahakan penguasaan langsungnya. Penguasaan langsung wilayah ini bagi Kompeni Belanda, bukan terletak pada penguasaan langsungnya tetapi lebih kepada otoritas kekuasaan politik dan monopoli perdagangan.

Walaupun Kompeni Belanda melakukan pengaturan dan pembagian wilayah sebagaimana disebutkan di atas, namun tidak terlalu ditekankan dalam pelaksanaannya. Jangankan wilayah kerajaan sekutu dan wilayah kerajaan pinjaman yang diintervensi dan diatur oleh VOC, kerajaan penguasaan langsung saja yang dalam prakteknya, VOC tidak melakukannya atau tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya. Daerah-daerah yang dinyatakan sebagai daerah kekuasaan langsung hanya sekedar mendapatkan pengakuan keunggulan dan kekuasaan VOC. Keterlibatan Kompeni Belanda kepada kerajaan-kerajaan yang dikuasai secara langsung tidak pernah terlaksana secara tegas kepada semua kerajaan penguasaan langsung. Intervensi dan campur tangan VOC hanya pada kerajaan-kerajaan yang dicurigai, sehingga pergantian raja-raja atau penguasanya selalu diintervensi oleh VOC. Campur tangan dalam urusan inilah yang sering dilakukan oleh VOC, tetapi hal ini pula yang merupakan sebab munculnya sikap perlawanan penguasa lokal (Poelingomang, 2004: 35-39).

Pengaturan wilayah Sulawesi Selatan, mulai pada masa kekuasaan VOC sampai kepada masa pemerintahan Hindia Belanda tidak banyak mengalami perubahan. Walaupun mengalami perubahan, itu bukan kepentingan kerajaan, tetapi atas pertimbangan dan kepentingan Kompeni Belanda. Khusus kekuasaan VOC terhadap wilayah Sulawesi Selatan, Belanda memfokuskan pada penanganan pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo yang dianggap berbahaya dan mengancam kedudukan Belanda. Untuk menangani kerajaan ini, maka kekuasaannya dibagi-bagi dalam beberapa provinsi serta beberapa distrik yang ada di dalamnya. Sementara pada masa pemerintahan Hindia Belanda bukan lagi Kerajaan Gowa-Tallo yang dianggap sangat berbahaya tetapi Kerajaan Bone yang dianggap mengancam eksistensi Belanda di Sulawesi Selatan. Apa lagi Bone menguasai beberapa wilayah, yaitu *Oostder Provincie* (Provinsi wilayah Timur).

Penguasaan wilayah utara dan timur Makassar oleh Kerajaan Bone dilakukan melalui perkawinan. Perkawinan merupakan strategi yang dianggap tepat untuk menunjukkan kesetiaan kepada Kerajaan Bone. Sebenarnya strategi Kerajaan Bone itu, bukanlah strategi baru tetapi strategi yang sudah klasik, yaitu politik penjinakan kekerabatan melalui perkawinan. Situasi ini berlangsung terus dan semakin hari semakin besar pengaruhnya di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga membuat Belanda sangat kuatir dan gusar. Tetapi Kompeni Belanda tidak mau juga mengambil tindakan berisiko, apa lagi tidak menguntungkan. Kompeni Belanda sepertinya bermasa bodoh dan tidak mau mengambil tindakan terlalu jauh, sementara Kerajaan Bone memanfaatkan kesempatan yang sangat menguntungkan itu.

Situasi berlanjut sampai masa-masa berikutnya, sehingga kekuasaan Kompeni Belanda di Sulawesi Selatan mengalami pasang surut dan berlangsung berkepanjangan sampai memasuki abad XIX. Khusus berkaitan dengan masalah politik pemerintahan di Sulawesi Selatan pada masa VOC, Belanda tidak banyak berbuat apa-apa untuk menguasai secara langsung daerah ini karena harus berbagi dengan Kerajaan Bone sebagai sekutu dalam Perang Makassar. Hubungan Kerajaan Bone dengan Belanda awal-awalnya dianggap berjalan baik Pascaperang Makassar (1666-1669). Sehingga setiap tanduk Belanda terhadap wilayah ini yang sifatnya memonopoli dalam perdagangan dan politik dianggap menyalahi isi Perjanjian Bungaya oleh Kerajaan Bone bersama sekutunya. Sebaliknya, jika Kerajaan Bone banyak terlibat dalam berbagai kebijakan kerajaan lain di wilayah ini juga dianggap melanggar perjanjian Bungaya oleh Belanda. Ketegangan dan saling curiga mencurigai antara Kerajaan Bone dengan Belanda berlangsung sepanjang dekade pertama abad XIX sampai masuknya pemerintahan Inggris di Sulawesi Selatan pada tahun 1811.

Berdasarkan uraian singkat di atas memperlihatkan bahwa pemerintahan Kerajaan Soppeng dalam sejarah pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan bukanlah kerajaan kecil yang dapat disepelekan. Tetapi Kerajaan Soppeng sebagai salah satu kerajaan yang memiliki andil besar pada masa itu, bukan hanya pada pra dan Pascaperang Makassar, tetapi jauh sebelumnya, Kerajaan Soppeng menunjukkan kebesaran dan kekuatan kerajaannya. Perkembangan Kerajaan Soppeng dilihat dari masa awal muncul dan perjalanan sejarahnya mengalami proses yang sangat dinamis. Walaupun demikian, tetap berpegang teguh pada sistem adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya. Kemudian perkembangan itu terus berlanjut seiring dengan perjalanan waktu dan zaman.

Perkembangan Kerajaan Soppeng dari masa ke masa memperlihatkan adanya perkembangan sebagai wujud kemajuan kerajaan. Banyak hal-hal baru yang masuk ke Kerajaan Soppeng, dan itu dapat diterima dengan baik tanpa harus merubah tatanan dasar Kerajaan Soppeng. Banyak hal yang saling bersinggungan dan saling mempengaruhi kehidupan manusia pada masa itu, tetapi tidak serta merta menyatu menjadi satu akulturasi dalam masyarakat. Tetapi berproses secara dinamis. Sehingga hubungan atau kontak-kontak yang terjadi dapat terseleksi secara alam dalam bentuk kearifan lokal. Sehingga kajian ini dianggap penting untuk melihat perjalanan sejarah Kerajaan Soppeng dari waktu ke waktu, khususnya pra dan Pascaperang Makassar.

Persekutuan dan Pergolakan Sebelum Perang Makassar

Rasanya sangat indah jika kita menelusuri jejak-jejak sejarah budaya Sulawesi Selatan, khususnya masa-masa sebelum pengaruh asing masuk di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada

khususnya. Masa-masa indah itu dapat dibayangkan seakan-akan kita bertamasa dan menelusuri jejak-jejak sejarah pada masa itu. Tulisan James C. Scott tentang “Moral Ekonomi Petani”. Tulisan itu sebagai salah satu tulisan yang bercerita tentang perbedaan sebelum dan sesudah pengaruh asing masuk di Asia Tenggara. Dimana pada bagian tertentu menyebutkan secara tersirat masa-masa indah sebelum kedatangan atau sebelum pengaruh bangsa asing masuk di Asia Tenggara, sehingga kehidupan pada masa itu digambarkan oleh Scott sebagai kehidupan yang alami. Kehidupan masyarakat pada masa itu dalam suasana tenang dan menyenangkan, bahwa betapa indahnnya pada masa itu karena tidak susah mencari nafkah, di sekitar lingkungannya serba ada, mau makan sayur dan buah-buah tinggal memetik, dan seterusnya. Tetapi setelah pengaruh asing masuk dengan sistem kapitalismenya yang mampu membius negeri-negeri Asia Tenggara. Termasuk di Sulawesi Selatan, maka di situlah terjadi perubahan yang cukup fundamental karena mempengaruhi berbagai macam segmen kehidupan umat manusia, seperti masalah sosial-budaya, politik, ekonomi dan lain-lain (James C. Scott, 1989)

Jejak sejarah Sulawesi Selatan juga mengalami masa-masa indah itu, dan itu sudah berlangsung lama sekali, tetapi jejaknya baru dapat dirasakan pada abad XVI. Jejak sejarah budaya Sulawesi Selatan pada masa itu (abad XVI) menyebutkan bahwa kehidupan sosial budaya, maupun politik dibangun dengan asas kekeluargaan tanpa adanya batasan etnisitas. Hebatnya lagi karena asas kekeluargaan juga merasut dalam sistem politik dan pemerintahan di kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan, bahkan tidak jarang diantara mereka saling kawin-mawin antarkerajaan, seperti perkawinan antara Datu La Makarodda raja Kerajaan Soppeng Rilau menikah dengan salah satu saudara kandung raja Kerajaan Bone yang bernama La Tenrirawe Bongkange; Karaeng Bontomarannu menikah dengan puteri raja Soppeng La

Tenribali Matinroe ri Datunna. Tetapi perkawinan itu, akhirnya bercerai ketika bapaknya, raja Soppeng La Tenribali Matinroe ri Datunna mengadakan persekutuan dengan Tobala' dan Arung Palakka. Namun menjelang Perang Makassar, puteri raja Soppeng ini menikah lagi dengan Karaeng Bontomajannang (tahun 1666), beliau adalah saudara lain ibu Sultan Hasanuddin. Puteri raja Soppeng ini bernama *Macallaka Kanukunna* (yang merah kukunya). Namun menurut Speelman, puteri ini bernama asli Dassou (Kamaruddin, dkk., 1986: 123-124).

Selain perkawinan, juga ada kerajaan yang menjalin hubungan dengan sistem persekutuan atau konfederasi sebagai wujud harmonisasi kehidupan. Sehingga kehidupan sosial politik pada masa itu digambarkan sebagai kehidupan dengan penuh keseimbangan sosial-kultural dan politik. Bahkan budaya politik kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan merasa hajatannya tidak sempurna jika ada kerajaan kerabat, atau anggota persekutuan kerajaannya tidak hadir pada saat hajatan itu. Selain itu ada semacam konvensi antarkerajaan bahwa apa bila salah seorang penduduk dari satu kerajaan mengunjungi kerajaan lain dan bermalam, maka dia dipandang sebagai penduduk dari kerajaan yang dikunjungi itu. Pandangan itu menyebutkan bahwa jika ada seorang rakyat Kerajaan Bone yang berkunjung ke Kerajaan Luwu dan bermalam, maka ia telah menjadi rakyat Kerajaan Luwu, demikian pula sebaliknya. Hal ini berlaku pula bagi kerajaan lain, seperti rakyat Bone ke Kerajaan Gowa-Tallo, atau rakyat Kerajaan Gowa-Tallo ke Kerajaan Bone atau kerajaan-kerajaan lain, dan sebaliknya, dia menjadi rakyat dari kerajaan yang dikunjunginya (Poelinggomang, dkk., 2004: 104-105).

Kehidupan sosial politik seperti itulah yang terlihat dan dapat dirasakan diberbagai kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Sehingga proses pembangunan kehidupan kultural masyarakat

Sulawesi Selatan, selalu berpandangan dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan hanya dalam persoalan sosial politik, tetapi juga dalam penegakan hukum dalam masyarakat dengan berpedoman, bahwa bila mereka melakukan kesalahan di negeri yang dikunjungi, baik terhadap penduduk negeri yang dikunjungi maupun di antara mereka sendiri, mereka disarankan untuk menyelesaikan persoalannya di negeri itu dan menerima sepenuhnya hukum yang berlaku di negeri itu (Poelinggomang, dkk., 2004: 105).

Setiap zaman tentu mengalami dinamika dan pasang surut kehidupan sosial politiknya. Cuma mengukur perasaan emosional setiap zaman sangat sulit menentukan batasannya, terkecuali melalui jejak-jejak sejarahnya. Dimana setiap zaman atau periode sejarah selalu memperlihatkan tabir yang syarat dengan interpretasi. Namun periode abad XVI memang selalu digambarkan sebagai zaman dengan pola budaya politik yang berbasis atau berasas kekeluargaan. Namun asas ini mulai terusik pada akhir-akhir abad XVI, sehingga asas itu hanya tinggal asas dan menjadi jimat yang tidak berkesudahan setelah pengaruh asing masuk di Sulawesi Selatan melalui perdagangan maritim dan sistem kapatilisme. Pada masa itu mulai terjadi konflik-konflik. konflik yang terjadi itu, bermula ketika kerajaan-kerajaan mulai terlibat dalam dunia perdagangan maritim. Namun tidak berarti bahwa perdagangan maritim sebagai alasan utama terjadinya konflik antarkerajaan di Sulawesi Selatan. Perdagangan maritim itu pula yang membuat beberapa kerajaan maritim di Nusantara mencapai puncak keemasan dan terukir dalam sejarah dunia karena perdagangan rempah-rempahnya, misalnya Kerajaan Gowa-Tallo. Kerajaan Gowa-Tallo setelah membangun Bandar Somba Opu dan membangun persekutuan dengan Kerajaan Tallo (kemudian menjadi kesatuan kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Gowa-Tallo) bergiat membangun kerajaannya.

Kerajaan Gowa-Tallo yang dijadikan sebagai ilustrasi dalam kajian ini karena Kerajaan Gowa-Tallo yang memegang supremasi dan hegemoni di Sulawesi Selatan. Kekuasaan dan hegemoni inilah yang menyebabkan kerajaan lain terusik ketenangan dan keamanan kerajaannya, termasuk Kerajaan Soppeng. Walaupun Kerajaan Soppeng pada masa itu masih tenang-tenang saja tanpa adanya gejolak yang sangat membahayakan. Namun setelah terusik dari dua kekuatan kekuasaan yang besar (Kerajaan Gowa-Tallo dengan Kerajaan Bone) mengharuskan Kerajaan Soppeng bersikap. Sehingga dalam menjelaskan dan menganalisa sejarah pada akhir abad XVI sampai abad XVIII di Sulawesi Selatan, sulit rasanya tanpa harus menyinggung Kerajaan Gowa-Tallo, Bone, Soppeng, dan Luwu. Sebab segala kebijakan Kerajaan Gowa-Tallo pada masa itu, terkadang ada kaitannya dengan kerajaan lain yang disebutkan di atas. Termasuk dalam kajian ini yang akan membahas gejolak dan perkembangan Kerajaan Soppeng pra dan Pascaperang Makassar. Namun sebelum sampai pada pembahasan Kerajaan Soppeng, khusus menjelang Perang Makassar, mau tidak mau harus menguraikan Kerajaan Gowa-Tallo sebagai kerajaan yang mengambil andil besar dalam geopolitik zaman itu. Sebab Kerajaan Gowa-Tallo yang membangun perdagangan maritim internasional tidak dapat berkembang tanpa adanya dukungan kerajaan-kerajaan lain yang ada di sekitar, termasuk kerajaan yang tergabung dalam Perjanjian Tellumpocoe.

Kerajaan Gowa-Tallo dalam rangka membangun Somba Opu sebagai pusat perdagangan maritim, tentu tidak gampang karena tidak cukup hanya atas ketersediaan sarannya atau infrastrukturnya. Tetapi juga harus didukung atas ketersediaan sumber daya alamnya (komoditinya) dan sumber daya manusianya (pengelola/menejerialnya). Secara realis lokalitas, wilayah Kerajaan Gowa-Tallo masih membutuhkan sumber daya itu. Untuk mendapatkan sumber

daya itu, Kerajaan Gowa-Tallo meminta dan atau mengambilnya dari kerajaan-kerajaan lain. Itulah sebab Kerajaan Gowa-Tallo merencanakan ekspansi ke kerajaan lain, seperti menaklukkan kerajaan Garassi, Katingang, Parigi, Siang, Suppa, Sidenreng, Lembangang, Bulukumba, dan Selayar. Selain itu menjalin perjanjian persahabatan dengan beberapa kerajaan seperti Maros, Polongbangkeng, Salumeko, Bone dan Luwu. Usaha penyerangan dan penaklukan itu berlangsung pada periode pemerintahan Raja Gowa Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tumaparissi Kolonna (1510-1546). Para saudagar dan barang-barang dagangan kerajaan yang telah ditaklukkan tersebut diangkut dan di tempatkan di bandar Somba Opu sebagai pelaku usaha yang diharapkan membangun dan mengambil andil dalam pemajuan perdagangan di Somba Opu (Poelinggomang, dkk., 2004: 106-107).

Penerus Tumaparissi Kalonna adalah I Mariogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng (1546-1565) juga melanjutkan usaha perluasan kekuasaan demi memajukan perdagangan maritim dan membangun Somba Opu sebagai pelabuhan besar, yang memang dikemudian hari (sebut abad XVII) menjadi kenyataan sebagai bandar niaga internasional. Kebesaran Kerajaan Gowa-Tallo sepanjang abad XVI dan XVII dengan politik sistem terbuka berdasarkan teori "laut bebas" (*mare liberum*). Dengan kekuasaan politik yang ada pada Kerajaan Gowa-Tallo, yaitu kebebasan berdagang di wilayahnya dan mencakup kerajaan-kerajaan sekutunya. Hubungan-hubungan ini lebih menguntungkan daripada merugikan. Apa lagi disertai dengan kebijakan untuk pedagang asing dengan perlakuan yang sama dan penempatan pedagang asing secara teratur. Sehingga perdagangan internasional ini dapat menghidupi Makassar dengan segala keuntungannya. Sementara kebijakan dalam wilayah Sulawesi Selatan, khususnya yang masuk dalam sekutu Gowa, awalnya

tidak merasa memberatkan kerajaan-kerajaan sekutu yang dimaksud. Tetapi karena perlakuan yang beda antara kerajaan sekutu yang satu dengan kerajaan sekutu yang lain menyebabkan munculnya konflik baru. Kerajaan Gowa-Tallo dari awal hingga mencapai perkembangan yang sangat pesat karena memanfaatkan keberhasilan orang-orang dari Siang, Suppa, Bacokiki, Sawitto; Sidenreng dan Wajo. Kemudian belakangan, juga memanfaatkan kepintaran orang-orang Melayu untuk menata pelabuhan dan perdagangan (Andaya, 2013: 29-35)

Walaupun memang dalam beberapa sumber menyebutkan, seperti Sartono Kartodirdjo dalam bukannya "Pengantar Sejarah Indonesia dari Emporium Sampai Imperium jilid I" bahwa penaklukan dan hegemoni Kerajaan Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan adalah suatu realita. Tetapi penguasaan itu tidak mengurangi otonomi kerajaan masing-masing yang ditaklukan, apa lagi menghapus eksistensinya. Kerajaan yang diekspansi dan dikuasai tetap otonom, kecuali penguasaan sebagai pengakuan dibanding penguasaan secara politik pemerintahan. Hal itu dimungkinkan oleh adat yang dijunjung tinggi oleh semua pihak untuk tidak saling mencampuri urusan pemerintahan kerajaan masing-masing. Selain itu, ada semacam konsensus diantara kerajaan-kerajaan tersebut sebagaimana disebutkan sebelumnya. Namun ada satu sumber konflik, ketika ambisi Kerajaan Gowa-Tallo memegang hegemoni di wilayah tersebut (Kartodirdjo, 1988: 91-92). Dimana kerajaan-kerajaan yang dulu dijalin perjanjian persahabatan oleh raja Tumaparissi Kalonna, juga diserang, seperti Kerajaan Bone, yang merupakan salah satu kerajaan terkuat yang berada pada pesisir timur jazirah Selatan Pulau Sulawesi. Perang-perang yang terjadi ketika itu dianggap sebagai pertanda awal keruntuhan persekutuan antarkerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Para penguasa Kerajaan Gowa-Tallo, sejak Tumaparissi Kalonna sampai I Tajibarani adalah penguasa yang bergiat memperluas pengaruh kekuasaan dan bergiat

memudahkan bandar-bandar niaga di pesisir barat Sulawesi. Itulah sebabnya kerajaan-kerajaan kecil ditaklukan, tidak hanya dipaksa tunduk dan patuh kepadanya, tetapi juga diangkut orang dan hartanya ke bandar niaga kerajaan (Somba Opu dan Tallo). Menurut Mattulada, semua kerajaan-kerajaan pada pesisir barat Sulawesi berhasil dikuasai hingga ke Kaili (Donggala) dan Tolitoli di Sulawesi Tengah. Tindakannya itu memaksa pedagang-pedagang Melayu yang telah menetap pada bandar-bandar itu juga berpindah ke Somba Opu dan memohon kepadanya untuk menetap dan berniaga. Juga pedagang-pedagang Portugis yang dahulu berniaga ke Suppa dan Siang juga pindah berniaga di Somba Opu (Poelinggomang, dkk., 2004: 106-107).

Terhitung ada tiga masa pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo yang giat memperluas wilayah pengaruh kekuasaannya sebagaimana disebut di atas, termasuk penyerangan ke Kerajaan Bone. Namun tiga-tiganya mengalami kekalahan, bahkan dua di antaranya menemui ajalnya di medan perang melawan Kerajaan Bone dan Soppeng. Ambisi Kerajaan Gowa-Tallo untuk menguasai Kerajaan Bone selalu besar karena satu-satunya kerajaan yang dianggap penghalang besar, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, laskar Makassar dapat menduduki sejumlah daerah Kerajaan Bone. Namun ambisi itu yang menyebabkan I Tajibarani Daeng Marumpa Karaeng Data tidak dapat meloloskan diri dari maut yang dipancarkan oleh seorang prajurit Bone bernama La Tunru (1565). Itulah sebabnya ia mendapat gelar kematiannya "*Tunibatta*", artinya "orang yang terpancung". Penerus beliau tidak memiliki ambisi untuk menaklukan Kerajaan Bone tetapi malahan diajak bersaudara. Itulah sebabnya Beberapa hari kemudian setelah selesai masa perkabungan, datang mangkubumi Kerajaan Gowa-Tallo, I Mappatakkatana Daeng Padulung (Raja

Tallo) ke Bone dengan maksud menyampaikan sikap Kerajaan Gowa-Tallo (Poelinggomang,dkk., 2004: 107) terhadap situasi konflik yang dihadapi dua kerajaan itu.

Utusan itu menyampaikan bahwa Kerajaan Gowa-Tallo hanya menginginkan kebaikan dan bukan kejahatan atau permusuhan. Sikap itu diterima baik oleh raja Bone, dalam hal ini diwakili oleh Kajao Laliddong. Kemudian kedua belah pihak mengadakan perundingan yang menghasilkan tiga ketetapan, yaitu: Daerah-daerah yang membentang sampai ke Sungai Walanae di sebelah barat dan daerah-daerah yang membentang sampai ke Ulaweng di sebelah utara masuk ke dalam wilayah Kerajaan Bone; Sungai Tangka dijadikan perbatasan daerah kekuasaan Bone dan Gowa. Di sebelah utara masuk dalam kekuasaan Kerajaan Bone dan di sebelah Selatan masuk kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo; dan ketiga adalah Cenrana masuk dalam kekuasaan Kerajaan Bone. Kesepakatan itu lazim disebut Perjanjian Caleppa pada tahun 1565. Pengganti I Tajibarani Karaeng Data adalah puteranya sendiri yang bernama I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bonto Langkasa (1565-1590). Raja ini beberapa waktu setelah pelantikan, mencapai kesepakatan (membuat perjanjian persaudaraan) dengan raja Bone La Tenrirawe Bangkange. Inti dari perjanjian persaudaraan itu adalah kesepakatan bersama untuk memandang musuh-musuh mereka bersama: “bahwa orang Gowa masuk ke Bone seperti datang ke negerinya sendiri dan orang Bone yang datang ke Gowa seperti ke negerinya sendiri”. Dengan perjanjian tersebut, kedua belah pihak menganggap bahwa telah berakhir konflik antara Bone dan Gowa, tetapi dua kerajaan itu adalah kerajaan bersaudara (Poelinggomang,dkk., 2004: 110-114).

Persaudaraan dan persahabatan yang telah dibina itu ternyata tidak dapat dipertahankan terus. Keretakan hubungan mulai terjadi pada saat Kerajaan Bone melakukan mobilisasi kekuatan laskar di

wilayah perbatasan kerajaannya pada 1575. Mobilisasi kekuatan laskar Kerajaan Bone itu dipandang sebagai usaha untuk memikat Kerajaan Soppeng dan Wajo, juga dianggap mengalihkan kesetiaan dua kerajaan itu kepada penguasa Kerajaan Bone. Dimana sebelumnya, dua kerajaan (Wajo dan Soppeng) telah menjalin persaudaraan dengan Kerajaan Gowa-Tallo. Atas usaha Kerajaan Bone itu untuk mendekati Kerajaan Wajo dan Soppeng dianggap sangat berhasil karena berencana melakukan perjanjian persaudaraan. Sebaliknya Kerajaan Gowa-Tallo berusaha agar tetap menunjukkan kesetiaan mereka (Wajo dan Soppeng) kepada Kerajaan Gowa-Tallo, Kerajaan Gowa-Tallo melakukan tekanan yang terus menerus dilancarkan oleh penguasa Makassar (Poelinggomang, dkk., 2004: 108-109).

Keberhasilan penguasa Bone itu dibuktikan dengan dicapainya perjanjian persahabatan antara Bone, Soppeng, dan Wajo pada 1582 di Kampung Bunne, daerah Timurung (Bone utara). Perjanjian persahabatan dan persekutuan itu dikenal dengan nama *Tellumpoccoe* atau *Matellumpoccoe* (persekutuan tiga kerajaan besar), dan juga sering disebut "*Mallamumpatue ri Timurung*". (Penanaman Batu di Timurung). Pada pertemuan itu, hadir pemegang kendali kekuasaan dari tiga kerajaan itu, yaitu La Tenrirawe Bongkange (Raja Bone), La Mungkace Toundamang (*Arung Matoa* Wajo), dan La Mappaleppe' Patolae (Datu Soppeng). Tujuan utama pembentukan persekutuan ini untuk saling membantu jika mendapat serangan dari pihak Kerajaan Gowa-Tallo. Tujuan itu menjadi pertanda bahwa memang Kerajaan Gowa-Tallo sebagai alasan terbentuknya persekutuan *Tellumpoccoe* (Pananrangi, 1991: 121).

Alasan itu pulalah yang menyebabkan Kerajaan Gowa-Tallo mulai terusik kembali untuk merancang penyerangan ke *Tellumpoccoe*. Namun rencana penyerangan itu baru terealisasi satu tahun kemudian dengan pertimbangan kesiapan laskar pasukan Kerajaan Gowa-

Tallo. demikian juga antara Kerajaan Gowa-Tallo dengan Kerajaan Bone telah melakukan perjanjian persaudaraan yang diwakili oleh penasehat Kerajaan Bone, yaitu Kajao Laliddong dengan Mangkubumi Kerajaan Gowa-Tallo, yaitu I Mappatakkatana Daeng Padulung (Raja Tallo). Namun penyerangan itu baru tiba di Bacokiki (parepare), raja Kerajaan Gowa-Tallo diamuk oleh pengikutnya sendiri, kemudian digelar *Tunijallo*. Sejak meninggalnya I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bonto Langkasa atau Tunijallo. Penggantinya tidak begitu tertarik dan menaruh perhatian pada perdagangan maritim, lebih-lebih tidak bernafsu perang. Sehingga keadaan di Sulawesi Selatan dalam pergolakan politik, sedikit lebih tenang. Namun memasuki abad XVII pada saat dijadikannya agama Islam menjadi agama resmi Kerajaan Gowa-Tallo, situasi politik mulai lagi terusik (Poelinggomang, dkk., 2004: 110-114).

Raja Gowa I Mangangarangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin (1593-1639) melakukan syiar Islam kepada kerajaan-kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk ke *Tellumpoccoe*. Alasan Kerajaan Gowa-Tallo melakukan syiar Islam karena ada perjanjian sebelumnya bahwa barang siapa yang menemukan suatu kebaikan, maka wajib memberitahukan kepada kerajaan lain (Patunru, 1969;20). Syiar Islam tersebut diterima baik oleh kerajaan-kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan, kecuali *Tellumpoccoe* tidak mau menerima karena dianggap hal itu sebagai konspirasi politik Kerajaan Gowa-Tallo untuk menyerang dan menguasai *Tellumpoccoe* (Nur, 2007: 83-90). Setelah kerajaan *Tellumpoccoe* menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaannya (1609-1611), kehidupan sosial-budaya dan politik di Sulawesi Selatan kembali tenang tanpa adanya gejolak lagi, sementara syiar Islam diteruskan pada masa pemerintahan Sultan Malikussaid Kerajaan Gowa-Tallo.

Kerajaan yang tergabung dalam Tellumpoccoe juga berada dalam keadaan yang tenang, namun pada masa pemerintahan Arumpone La Maddaremmeng (1630-1642) mengeluarkan kebijakan yang tidak lazim, yaitu pembebasan budak. Arumpone La Maddaremmeng yang naik tahta menggantikan Tenripale pada 1630. Pada 1640, La Maddaremmeng membuat kebijakan tentang perbudakan. Dimana ia memerintahkan untuk membebaskan budak, kemudian orang yang diperbudak tetapi orang tuanya dulu bukan budak, maka harus dipekerjakan dan digaji. Kebijakan ini banyak menuai protes dari pembesar Kerajaan Bone, termasuk ibunya sendiri. Kemudian mereka meminta bantuan Kerajaan Gowa-Tallo, tetapi tidak digubris karena persoalan internal kerajaan lain. Tetapi karena La Maddaremmeng memaksa Kerajaan Wajo, Soppeng, Massepe, Sawitto dan Bacokiki, kemudian membakar kerajaan-kerajaan itu, sehingga Kerajaan Gowa-Tallo menganggap bahwa ini bukan hanya masalah keagamaan tetapi juga masalah hegemoni politik di Sulawesi Selatan (Andaya, 2013: 49-50)

Raja Gowa mengirim surat kepada La Maddaremmeng. Dalam surat itu La Maddaremmeng diminta untuk menjelaskan, apakah tindakannya itu berlandaskan perintah Nabi Muhammad, atau berdasarkan pada adat lama, atau kemauan sendiri. Jika tindakannya didasarkan pada dua alasan pertama, maka Gowa senang. Namun jika dia hanya menuruti kehendaknya, maka itu tidak dapat diterima. La Maddaremmeng tidak dapat menjelaskan, sehingga Gowa pun bersiap perang. 8 Oktober 1643, Gowa dibantu oleh Wajo dan Soppeng menyerang Bone di Passempe dan memaksa La Maddaremmeng bersama saudaranya La Tenriaji Tosenrima mundur ke Larompong, Luwu. Kemudian, Karaeng Pattingaloang meminta Arung Pitue memilih seorang penguasa untuk menggantikan La Maddaremmeng.

Arung Pitue setelah lima hari menimbang-nimbang, Arungpitu pun

melaporkan bahwa “kami telah mencari seorang di antara keturunan penguasa Bone yang kami anggap mampu mempertahankan Tanah Bone, namun ternyata tidak ada. Karena itu, kami akan berterima kasih (*kiparapa'maiki*) jika kami dapat menjadikan karaeng (Gowa) sebagai pemimpin Bone. Karaeng Gowa dan Karaeng Pattingaloang menolak tawaran *Arung Pitue* untuk menjadi Arumpone. Karaeng Pattingaloang juga menjelaskan “adat adalah ketika kami memilih seorang penguasa, orang Bone tidak boleh ikut campur. Sebaliknya, jika orang Bone memilih seorang pemimpin, kami juga tidak boleh ikut campur...”. itulah sebabnya Tobala' (Andaya, 2013: 49-51; (Poelinggomang, dkk., 2004:111-112; bandingkan Nur, 2007: 83-90) diangkat menjadi pemimpin Bone dengan gelar “*Jannang*” (Makassar) atau “*Jennang*” (Bugis), mewakili raja Gowa sejak bulan November 1643 yang bertanggungjawab kepada seorang petinggi Makassar sebelum ada Arumpone baru yang terpilih.

Pada masa pemerintahan Tobala' ada permintaan tenaga kerja untuk mengerjakan parit-parit di sekitar Benteng Somba Opu dan Panakkukang. Sartono menyebutkan bahwa Kerajaan Gowa-Tallo melakukan mobilisasi tenaga kerja, yaitu 3200 orang Turatea, 700 orang dari Bone, 150 orang dari Wajo dan 200 dari Luwu untuk mengerjakan parit-parit (Kartodirdjo, 1989: 94), kemudian sumber lain menyebutkan 10.000 orang dari Bone yang ikut dipekerjakan (Nur, 2007: 91). Ribuan orang yang mengerjakan parit-parit di Kerajaan Gowa-Tallo itulah yang dianggap dan dikategorikan sebagai bentuk penindasan dan penjajahan. Sejak kekalahan Kerajaan Bone dari Kerajaan Gowa-Tallo pada masa proses islamisasi merubah status Kerajaan Bone dari sekutu menjadi kerajaan palili. Kemudian kekalahan dan pengasingan Arumpone XIII La Maddarammeng, akan merubah status Kerajaan Bone dari kerajaan palili ke kerajaan terjajah (Nur, 2007: 88). Dengan status itulah yang mempengaruhi

cara berpikir orang-orang Bone dan Soppeng dalam memahami sosial kultural pada satu sisi dan memandang sosial kultural Makassar pada sisi lain.

Persoalan itu pulalah yang mempegaruhi cara berpikir dan bersikap para sejarawan, karena sejarawan juga tidak terlepas dari subyektifitas. Sehingga di sini sejarawan harus berhati-hati, harus mempertarukan moralitas dan integritasnya. Sebab sejarawan telah dianggap faham akan kaidah-kaidah Ilmu Sejarah dengan nilai-nilai subyektifitasnya. Maka mestinya sekarang, ilmu sejarah berada pada titik ilmu yang tengah berusaha mendekati sejarah obyektif, bukan menggiring fakta-fakta sejarah ke hal yang subyektif belaka demi kepentingan pihak atau golongan tertentu. Demikian juga masalah sosial politik ke-Indonesia-an kita, mestinya tokoh-tokoh politik, aparatur pemerintah dan semua komponen bangsa Indonesia kerja bersama sesuai bidang kita masing-masing. Kemudian berlaku jujur pada diri sendiri kalau belum bisa berlaku jujur pada pihak lain, tanpa harus menyalahkan sejarah.

Soppeng pada Masa Perang Makassar

Pemahaman tentang Perang Makassar yang banyak kita temukan dalam tulisan para sejarawan mengacu pada batasan waktu antara 1666 sampai 1669. Sementara batasan spasialnya selalu mengacu pada wilayah Makassar, khususnya dari Benteng Galesong sampai benteng-benteng sekitar Kerajaan Gowa-Tallo yang ada pada masa itu. Batasan itu secara faktual memang susah terbantahkan, termasuk dalam kajian ini. Namun dalam kajian ini dan demi kepentingan pembahasan sub tema di atas, dimana kajian ini ingin memperluas latar belakang Perang Makassar, baik secara temporal maupun spasialnya. Pertimbangannya tidak lain karena sub tema di atas dianggap sangat penting, yaitu Soppeng pada Masa Perang Makassar. Setelah mendalami data-data

sebatas yang diperoleh dan diketahui, kita mendapat suatu pernyataan penting bahwa Soppeng atau Kerajaan Soppeng tidak bisa dilepaskan pembahasannya jika mengkaji Perang Makassar, bahkan andil dan peran Kerajaan Soppeng lebih besar dari Kerajaan Bone dalam Perang Makassar. Sehingga pemahaman kita tentang Perang Makassar untuk kepentingan kajian pada sub tema ini menjadi penting melihat andil dan peran Kerajaan Soppeng.

Perang tersebut tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada latar belakang yang mendorong atau jejak-jejak peristiwa yang mendahuluinya. Buntut awal dari perang tersebut selalu mengacu pada pengerahan tenaga kerja yang dikirim oleh Tobala' (penguasa/Jennang Kerajaan Bone) ke Kerajaan Gowa-Tallo untuk mengerjakan parit-parit benteng pertahanan Kerajaan Gowa-Tallo. Dimana pada pertengahan tahun 1660 Jennang Tobala' mendapat perintah dari Karaeng Karunrung mengumpulkan dan mengirim 10.000 orang laki-laki untuk dipekerjakan sebagai penggali parit pertahanan (Saifuddin Nur, 2007: 100). Sementara Sartono menyebutkan bahwa Kerajaan Gowa-Tallo melakukan mobilisasi tenaga kerja, yaitu 3200 orang Turatea, 700 orang dari Bone, 150 orang dari Wajo dan 200 dari Luwu untuk mengerjakan parit-parit (Kartodirdjo, 1992;94).

Mobilisasi tenaga kerja itu dianggap sebagai perintah yang sangat mendadak yang membuat Tobala' tidak mempunyai waktu untuk memilih dan memilah orang-orang yang akan dibawanya ke Gowa. Untuk mengumpulkan orang sebanyak itu, Tobala' mengirim orang dari berbagai golongan dan kelas sosial. Di antara mereka itu terdapat orang-orang dari golongan bangsawan (*anak Arung*), orang kebanyakan (*tau-sama*), budak (*ata*), bahkan ada orang lanjut usia, orang sakit, termasuk ada yang masih tergolong kanak-kanak. Di antara mereka-mereka itu terdapat La Tenritatta Daeng Serang Arung Palakka Datu Marioriwawo XV, To Saddeng Arung Belo, La Palancoi

Daeng Mabela Arung Bila, Arung Appanang dan lain-lain (Saifuddin Nur, 2007: 100-101). Jika hanya mengacu pada Nur (2007) maka semestinya 4 bangsawan yang baru saja disebutkan di atas tidak masuk dalam rombongan tenaga kerja yang 10.000 orang dari Kerajaan Bone. Sebab 4 tokoh itu, sejatinya bukanlah bangsawan yang berasal dari Kerajaan Bone tetapi Kerajaan Soppeng.

Kajian pada sub tema ini selalu menarik untuk dibahas, sebab Perang Makassar menampilkan dua tokoh yang selalu dikontraskan (Sultan Hasanuddin dan Arung Palakka), bahkan di media sosial masih ramai diperbincangkan sampai saat ini. Oleh Sebab itu, kajian ini dianggap perlu memberikan penekanan pada hal-hal tertentu, khususnya persoalan bangsawan, persoalan suku dan persoalan kematian orang tua dan kakek Arung Palakka. Khusus mengenai pengerahan tenaga kerja dari Bone ke Gowa sebanyak 10.000 itu yang melibatkan golongan bangsawan menjadi persoalan besar dalam mempekerjakannya dan persoalan asal kerajaannya. Jika mengacu pada 4 bangsawan di atas sebagai bangsawan yang berasal dari Kerajaan Soppeng, maka di sinilah pentingnya membahas Kerajaan Soppeng pada masa Perang Makassar. Sebab 4 tokoh ini yang sangat berperan dan menentukan dalam Perang Makassar, baik sebelum perang maupun sesudahnya.

Namun sebelum jauh mengomentari 4 tokoh tersebut, di sini perlu dinyatakan bahwa golongan bangsawan seperti 4 tokoh tersebut dengan golongan lain (*tosamara dan ata'*) memiliki batasan dalam sosial-kultural jika mengacu pada konsep *siri'* di Sulawesi Selatan. Salah satu batasan kultural yang dimaksud adalah masalah mempekerjakan orang, dimana mempekerjakan para bangsawan tinggi sama seperti pekerja-pekerja lainnya (*tosamara dan ata'*), adalah merupakan suatu "pelecehan" terhadap *pangadereng* (Bugis), *pangadakkang* (Makassar). Karena dalam *pangadereng/pangadakkang*

terdapat unsur wari dimana nilai-nilai *mappasitinaja* (kepatutan) dan *mappallaiseng* (pembedaan) harus tetap dipertahankan (Nur, 2007: 100-101). Dari pelecehan terhadap *pangadereng/pangadakkang* inilah, rupanya yang kemudian membawa malapetaka dalam Perang Makassar. Sebab memperlakukan anak bangsawan dengan anak pada umumnya dalam konsep budaya Bugis Makassar dianggap sesuatu yang tidak etis.

Persoalan kedua dalam tema ini yang harus mendapatkan penekanan utama adalah persoalan persepsi tentang etnisitas dalam Perang Makassar yang selalu dikontraskan antara etnis Bugis dengan etnis Makassar. Sehingga Perang Makassar selalu salah dipahami dan salah dimaknai, bahwa Perang Makassar adalah perang etnis (suku) Bugis dengan suku Makassar. Pada hal pandangan itu sangat salah. Tetapi jika Perang Makassar dimaknai perang suku sebagai realita perang pada masa itu, maka akan menjadi berbahaya dan itu dianggap keluar dalam kaidah-kaidah rekonstruksi dalam ilmu Sejarah karena menggiring fakta-fakta yang bukan pada tempatnya. Untuk menyegarkan ingatan kita tentang suku Bugis dan suku Makassar pada masa kekinian maka dalam Perang Makassar semakin membuka mata kita bahwa itu bukan perang antarsuku Bugis dengan suku Makassar.

Realitas dalam Perang Makassar dapat terlihat jelas bahwa yang berada di barisan Arung Palakka adalah Soppeng, Bone, Binamu, Bangkala, Ambon, Buton, Ternate, VOC (Belanda) dan lain-lain; sementara yang ada di barisan Sultan Hasanuddin adalah Gowa, Tallo, Wajo, Luwu, Mandar, Melayu, Bima dan lain-lain. Kalau kenyataannya seperti itu, apakah kedua kelompok itu mencerminkan dua kelompok suku, atau masih ada yang mau mengatakan bahwa Perang Makassar adalah perang antara suku Bugis dengan suku Makassar?. Dalam buku "Warisan Arung Palakka" dijelaskan mengatakan bahwa Perang Makassar bukanlah perang antara suku Bugis dengan suku Makassar,

tetapi Perang Makassar adalah perang kelompok persekutuan (Andaya, 2013: 12). Dimana kelompok yang tergabung dalam barisan Arung Palakka adalah salah satu kelompok persekutuan yang terdiri dari beberapa etnis, demikian juga pada barisan Sultan Hasanuddin juga merupakan salah satu kelompok persekutuan yang juga terdiri dari beberapa etnis.

Persoalan ketiga dalam tema ini yang harus mendapatkan penekanan pula adalah persoalan balas dendam atau persoalan *siri'* tentang meninggalnya orang tua dan kakek Arung Palakka. Perlu disampaikan bahwa kakek dan bapak Arung Palakka adalah seorang arung di Soppeng, dan mendapat kepercayaan sebagai penasehat Mangkubumi Kerajaan Gowa-Tallo. Jadi beliau (kakek dan orang tua Arung Palakka) merupakan orang kepercayaan Karaeng Matoya dan Karaeng Pattingaloang raja dari Kerajaan Tallo. Namun sepeninggal ayah Arung Palakka, La Pottobune Datu Lompulle Arung Tanatengnga, Arung Palakka mendapat kabar bahwa sebenarnya orang tuamu itu meninggal karena dibunuh oleh orang-orang Gowa dengan dalih bahwa ia mengamuk (*majallo*) di hadapan raja Gowa. Hal yang sama terjadi pula beberapa tahun sebelumnya, yaitu kakeknya yang bernama La Wawo Datu Lompulle pun dibunuh secara sadis oleh orang-orang Gowa karena mengamuk di hadapan pembesar-pembesar Kerajaan Gowa-Tallo (Nur, 2007: 100)

Namun data tersebut dalam kajian ini tidak begitu banyak yang dapat diperbandingkan dengan data-data lain terkait kematian beliau, yang juga karena keterbatasan temuan data mengenai kematian itu. Tetapi hal ini penting diuraikan untuk memahami sikap psikologi dan kultural Arung Palakka memandang keluarganya dan kerajaannya (Soppeng dan belakangan Bone). Menyimak penjelasan Nur itu, yang menyebutkan bahwa pengalaman pahit yang dialami secara bertubi-tubi oleh La Tenritatta Daeng Serang Arung Palakka inilah yang

membuat tekad dan bersumpah akan menuntut balas kepada Kerajaan Gowa-Tallo. jika betul, hal itu yang mempengaruhi sikap kebatinan Arung Palakka, maka tentu cara memandang geneologis keluarganya dan caranya memandang orang Gowa menjadi berdikotomi bagaikan air dengan minyak.

Secara psikologi, dendam itu selalu terngiang dibenak seseorang yang merasa dilecehkan, seperti yang dialami oleh Arung Palakka. Itulah sebabnya Arung Palakka mengajak keluarganya dari Soppeng dan Bone untuk merencanakan pelarian karena dalam pengerahan tenaga kerja itu, juga ada tiga bangsawan lainnya dari Soppeng. Sehingga muncullah 4 bangsawan dari Soppeng menyusun rencana dan siasat untuk melepas para pekerja dan melarikan diri. 4 orang bangsawan Soppeng itu adalah La Tenritatta Datu Marioriwawo Arung Palakka, La Palancoi Daeng Mabela Arung Bila, Arung Appanang dan To Saddeng Arung Belo, termasuk Tobala' Jennang Kerajaan Bone. Mereka-mereka ini dengan sangat hati-hati dan rahasia, merencanakan secara mantap untuk memimpin pelarian besar-besaran para pekerja dan tawanan perang yang berasal dari Kerajaan Soppeng dan Kerajaan Bone. Rencana itu dilakukan tepat pada tanggal 7 Agustus 1660, disaat Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI bersama para pembesar Kerajaan Gowa-Tallo sedang berpestapora di Tallo (Saifuddin Nur, 2007: 95). Pelarian ini berjalan sesuai rencana dan selalu lepas dalam kejaran pasukan Kerajaan Gowa-Tallo-Tallo, termasuk pada saat mereka sudah terdesak dan hampir tertangkap di Tanete Baru, tetapi berhasil diselamatkan oleh salah seorang pembesar Kerajaan Tanete. Kemudian dari Barru, Lisu, Arung Palakka melanjutkan pelariannya sampai di Wumpungeng di atas puncak *Sokkangeng TedongE* tetapi arung Wumpungeng memberikan kesaksian penyelamatan terhadap Arung Palakka kepada Kerajaan Gowa-Tallo dihadapan Datu Soppeng (Pananrangi, 1991:161-163)

Setelah 4 sekawan ini sampai di di Lamuru, mereka mengirim kurir kilat untuk menemui La Tenribali Datu Soppeng IV dan kurir kilat untuk menemui Jennang Tobala' Arung Tanete Riawang. Para kurir ini diminta agar melaporkan peristiwa besar itu dan memohon kesedihan beliau-beliau untuk bertemu di Attapang dekat Mampu. Sesuai waktu yang ditentukan, terjadilah suatu perundingan dan kesepakatan yang kemudian dinamai *pincara lophie ri Attapang* karena perundingan dilakukan di atas perahu, di tengah-tengah Sungai Attapang sebagai daerah yang dianggap aman. Dalam perundingan ini dihadiri oleh La Tenritatta Datu Marioriwawo, La Palancoi Arung Bila, Arung Appanang dan To Saddeng Arung Belo, La Tenribali Datu Soppeng IV bersama ayahnya La Maddussila Arung Mampu dan Arung Bila (ayah La Palancoi) dari pihak Kerajaan Soppeng. Sedang dari Bone dihadiri oleh Jennang Tobala' arung Tanete-riawang, arung Tibojong, arung Ujung bersama sejumlah pembesar bangsawan Bone dari pihak Kerajaan Bone (Nur, 2007:96)

Pertemuan itu memperoleh kata sepakat untuk menyatukan Bone dan Soppeng melawan Gowa. namun sebelum persetujuan itu tercapai, La Tenribali mendapat nasehat dari ayahnya La Maddussila Arung Mampu dengan mengingatkan bahwa antara Soppeng dengan Gowa tidak ada permusuhan. Lagi pula selama ini Gowa tetap mematuhi perjanjian yang pernah dibuat. Namun demikian, La Tenribali tetap bertahan pada pendiriannya dengan alasan bahwa Kerajaan Soppeng masih terikat dengan perjanjian *Lamumpatu-e ri Timurung* yang dibuat lebih dahulu dari pada perjanjian di Lamogo. Pertemuan itu pula dianggap sebagai perjanjian persahabatan antara Bone (Tobala') dengan Soppeng (Latenribali) yang disebut *Ceppana Bone Soppeng ri AtapangE* (Pananrangi, 1991:154-157; Nur, 2007: 96-97)

Lebih lanjut dalam tulisan Nur itu, disebutkan bahwa setelah tiga hari pasca perjanjian itu, tibalah laskar Kerajaan Gowa-Tallo

di Lamuru, dan dalam waktu yang hampir bersamaan, tiba pulalah pasukan Kerajaan Soppeng bersamaan dengan tibanya pasukan Kerajaan Bone. Sehingga bersatulah pasukan Kerajaan Soppeng dan Kerajaan Bone menghadapi laskar Kerajaan Gowa-Tallo. sebelum berperang, raja Gowa ingin memisahkan Kerajaan Soppeng dari Kerajaan Bone dengan cara mengirim utusan kepada La Tenribali Datu Soppeng IV dengan pesan bahwa antara Kerajaan Soppeng dan Kerajaan Gowa-Tallo tidak ada perselisihan. Jadi janganlah hendaknya orang Soppeng mau diseret oleh orang Bone ke liang lahat. Dalam suatu surat itu isinya menyebutkan “kembalilah ke negerimu; Makanlah makananmu yang enak dan minumlah air yang melepaskan dahaga; Kau sedang berdiri di puncak; Biarlah hanya lintah yang meminum darahmu dan Tuhan yang mengambil jiwamu jika waktunya telah tiba; karena tidak ada pertengkaran di antara kita; Saya hanya mengejar Tobala’ dan teman-temannya yang melarikan diri” (Saifuddin Nur, 2007: 97-98).

Pesan raja Gowa ini ditolak oleh La Tenribali Datu Soppeng bersama Arung Bila (ayah La Palancoi Daeng Mabela) karena beliau tetap berpegang teguh pada perjanjian *Tellmpoccoe*. Sehingga terjadilah Peperangan di Lamuru antara Kerajaan Gowa-Tallo yang dibantu oleh Wajo dengan Kerajaan Soppeng bersama Bone. Peperangan itu dimenangkan oleh Kerajaan Gowa-Tallo bersama Wajo yang berhasil merebut Arajang bendera atau panji-panji Soppeng yang disebut *BakkaE* dan *Lapanyannya*, dan juga menyebabkan Tobala’ meninggal (Pananrangi, 1991:157-160; Nur, 2007: 98). Sebenarnya dalam perang itu, laskar-laskar Kerajaan Gowa-Tallo mulai terdesak mundur, namun tiba-tiba pasukan dari Kerajaan Wajo sebagai sekutu Kerajaan Gowa-Tallo menyerang Kerajaan Soppeng di Watang Soppeng ibukota Kerajaan Soppeng. Dari berita inilah sehingga La Tenribali Datu Soppeng terpaksa memerintahkan pasukannya supaya

segera meninggalkan medan pertempuran di Lamuru dan berbalik ke Soppeng untuk berperang melawan pasukan Wajo.

Sementara pasukan Kerajaan Bone tetap bertahan di Lamuru berperang melawan pasukan Kerajaan Gowa-Tallo. Dalam pertempuran yang terjadi pada 11 Oktober 1660 itu, ternyata pasukan Kerajaan Gowa-Tallo berhasil mengejar Tobala'. Pasukan Kerajaan Bone berusaha mati-matian menjaga Tobala' sehingga terjadi perang sengit, sehingga berjatuh korban antara kedua belah pihak. Namun tiba-tiba tombak pasukan Kerajaan Gowa-Tallo berhasil menembus dada Tobala' yang mengakibatkan kematiannya. Setelah Tobala' terbunuh, maka semangat perang dari pasukan Bone menjadi mengendor secara dratis (Kamaruddin, dkk., 1986:123-124; Nur, 2007: 99-100). Pasukan-pasukan Kerajaan Bone kembali ke Bone dan tidak lagi melakukan perlawanan. Sebaliknya diteruskan pengejaran kepada Arung Palakka dan kawan-kawannya. Kemudian mengangkat Arung Amali sebagai Jennang pengganti Tobala'.

Pengejaran Arung Palakka dan kawan-kawannya terus dilakukan oleh pasukan Kerajaan Gowa-Tallo. Pada kesempatan tertentu, pasukan Kerajaan Gowa-Tallo semakin dekat pada rombongan Arung Palakka, maka salah seorang *sala'susunna* (saudara sesusuaannya) yang bernama La Baba' mengusulkan agar La Tenritatta Arung Palakka segera melanjutkan perjalanannya ke Umpungeng. Sementara ia sendiri bersama para pengawal lainnya yang berasal dari Marioriwawo akan menghadang gerak maju pasukan Gowa. Mereka bersumpah akan mengamuk (*majallo'*) hingga tetes darah penghabisan sampai akhirnya menemui ajalnya, sementara Arung Palakka berhasil meloloskan diri dan semakin tidak dapat terkejar (Nur, 2007:102-103).

La Tenritatta Arung Palakka Ke Marioriwawo melakukan pertemuan rahasia dengan teman-temannya untuk saling berjanji setia. Teman-teman Arung Palakka yang dimaksud adalah La Palancoi

Daeng Mabela Arung Bila, To Saddeng Arung Belo, To Dani Datu Citta dan arung Appanang (Pananrangi, 1991: 164-167; Saifuddin Nur, 2007: 103-104). Dalam pertemuan ini, mereka berikrar akan bahu-membahu dan akan sehidup-semati dalam meneruskan perjuangan melawan penjajahan Kerajaan Gowa-Tallo atas negerinya Soppeng dan Bone. Mereka harus segera meninggalkan Sulawesi Selatan, karena untuk sementara ini, mereka merasa tidak ada lagi tempat berpijak di bumi Sulawesi Selatan ini. Dan sebagai tujuan utamanya adalah ke Batavia karena diketahuinya bahwa satu-satunya kekuatan yang dapat menandingi kekuatan Kerajaan Gowa-Tallo hanyalah VOC (*Vereenigde oost-Indische Compagnie*) atau Komponi Belanda.

Arung Palakka dan teman-temannya menemui pula La Tenribali Datu Soppeng untuk menyampaikan rencana keberangkatannya ke Pulau Jawa itu dan memohon doa restu serta berpamitan. Mereka diresdai dan memberikan emas sebanyak 100 kati (60 kg) sebagai bekal. Sementara Kerajaan Bone dalam beberapa sumber tidak banyak disebutkan, kecuali dalam tulisan Nur menyebut bahwa Kerajaan Bone tidak memberi bekal karena dijajah oleh Kerajaan Gowa-Tallo. Dari Kerajaan Marioriwawo La Tenritatta memperoleh emas sebanyak 20 kati (12 kg). Merekapun diberi bekal dan pesan bahwa: “janganlah kalian berpisah meskipun seandainya muka kalian tertumbuk ditepi langit, janganlah kalian pulang ke Sulawesi ini sebelum sanggup mengalahkan Gowa” (Nur, 2007: 105).

Kemudian Arung Palakka bersama teman-teman langsung menuju Tanjung Palette, Bone untuk meneruskan perjalanan (penyeberangan) menuju Buton. Beruntung, Arung Palakka bersama teman-temannya berhasil pergi sebelum pasukan Kerajaan Gowa-Tallo sampai di Palette. Pada pengejaran itu, orang-orang Bone pun disebutkan ikut mengejar Arung Palakka ke Palette. Tetapi ada orang yang menyelamatkan

Arung Palakka dan teman-temannya. Orang itu adalah suami Inang pengasuh Arung Palakka bersama seorang lainnya dari Marioriwawo, yang mengamuk (*majjallo*) untuk membendung gerak maju dari gabungan lasykar Kerajaan Gowa-Tallo sampai akhirnya perahu Arung Palakka melaju menuju pulau Buton (Nur, 2007: 107).

Strategi Soppeng Dalam Perang Makassar

Sulit rasanya jika Kerajaan Soppeng luput dari pembahasan atau interpretasi dari para penulis sejarah jika mengkaji abad XVII di Sulawesi Selatan. Apalagi jika secara khusus membahas tentang Perang Makassar tanpa menjadikan Kerajaan Soppeng sebagai obyek dan sekaligus sebagai subyek kajian. Sebab sepanjang abad itu, Kerajaan Soppeng sangat berperan penting, bahkan kerajaan ini dianggap sebagai perancang kemenangan pasukan gabungan sekutu VOC. Kehebatan dan kesuksesan Kerajaan Soppeng dalam merancang strategi Perang Makassar karena tokoh-tokoh Kerajaan Soppeng secara emosional merasakan betapa pahit getirnya proses itu selama kurang lebih 7 tahun. Lalu siapa tokoh-tokoh yang dimaksud?, tokoh-tokoh yang dimaksud tidak lain adalah La Tenritatta Arung Palakka, La Palancoi Daeng Mabela Arung Bila, To Saddeng Arung Belo, arung Appanang, dan bahkan ada yang menyebutnya 5 orang dengan memasukan To Dani Datu Citta. Keempatnya adalah tokoh dan bangsawan tinggi dari Kerajaan Soppeng. Empat tokoh ini yang betul-betul merasakan yang namanya penderitaan dan perjuangan selama bertahun-tahun.

Tokoh-tokoh dan bangsawan tinggi Kerajaan Soppeng itulah yang menentukan berhasil tidaknya perjuangan dan balas dendamnya terhadap kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo. Paling tidak ada beberapa hal yang menjadi motor atau faktor penggerakannya yang dapat kita

utarakan terhadap 4 tokoh tersebut. Pertama adalah merekalah yang menjadi korban tenaga kerja yang dikirim oleh Tobala' (Jennang Kerajaan Bone) ke Kerajaan Gowa-Tallo untuk menggali parit-parit pertahanan; Kedua adalah merekalah yang menggadaikan nyawanya ketika memberanikan diri untuk melepaskan para pekerja yang menggali parit-parit pertahanan di Kerajaan Gowa-Tallo, termasuk dirinya; Ketiga adalah merekalah yang mengurus otaknya untuk mencari solusi agar dapat mengalahkan Kerajaan Gowa-Tallo dengan cara mencari bantuan. Bantuan yang dapat menandingi kekuasaan dan kekuatan Kerajaan Gowa-Tallo pada masa itu hanyalah VOC atau Kompeni Belanda.

Arung Palakka mengetahui kekuatan VOC karena beberapa kali mendengar pembicaraan Mangkubumi Kerajaan Gowa-Tallo dengan para bangsawan lainnya di dalam istana Kerajaan Gowa-Tallo sewaktu ia sering berada di dekat pembesar kerajaan itu (Nur, 2007: 105). Itulah sebabnya Arung Palakka bersama teman-temannya meminta bantuan dan bekerja sama dengan VOC atau Kompeni Belanda, yang juga berkepentingan untuk mengalahkan Kerajaan Gowa-Tallo. Sebab VOC menganggap bahwa satu-satu penghalang untuk menguasai dan memonopoli perdagangan di Indonesia bagian timur adalah Kerajaan Gowa-Tallo. Sehingga kehadiran tokoh-tokoh dan bangsawan tinggi Kerajaan Soppeng itu merupakan keberuntungan yang tidak disangka-sangka oleh VOC. Walaupun untuk mempercayai Arung Palakka dan teman-temannya tidak muda, dan melalui proses yang cukup berliku. Setelah mereka dipercaya dan dianggap betul bahwa permintaannya itu murni, baru mereka saling terbuka untuk merencanakan penaklukan Kerajaan Gowa-Tallo. Apa lagi sikap dan pribadi Arung Palakka diketahui betul memiliki karisma yang kuat untuk memenangkan perang;

Keempat adalah mereka yang betul-betul secara gigih dan bahu membahu melakukan komunikasi, penyerangan dan penaklukan beberapa kerajaan sekutu Kerajaan Gowa-Tallo yang ada di Sulawesi Selatan. Sebab tanpa rancangan itu, agaknya sangat sulit mengalahkan Kerajaan Gowa-Tallo karena Sulawesi Selatan berada di bawah pengaruh Kerajaan Gowa-Tallo dan sulit untuk tidak setia. Kerajaan Bone saja di bawah kekuasaan La Maddarammeng sempat berpihak ke Gowa setelah utusan Arung Palakka di bawah pimpinan La Palancoi Arung Bila dan arung Kaju ke Bone menhadap. Tetapi Kerajaan Bone berbalik arah setelah La Maddarammeng mengetahui kedatangan Arung Palakka bersama VOC untuk menaklukan Kerajaan Gowa-Tallo. Jadi andil 4 tokoh itu melakukan komunikasi, penyerangan dan penaklukan terhadap sekutu-sekutu Kerajaan Gowa-Tallo yang melapangkan jalan menuju kemenangan pasukan gabungan sekutu VOC terhadap Kerajaan Gowa-Tallo yang juga bersama sekutunya.

Khusus yang keempat ini, kita dapat melihat sepak terjang 4 tokoh tersebut pada uraian-uraian berikut. Bukan hanya 4 tokoh bangsawan Soppeng itu tetapi tokoh-tokoh lain juga terlibat, termasuk golongan masyarakat yang sempat membantu Arung Palakka, semuanya memiliki andil dalam Perang Makassar, mulai pada saat menyeberang dari Tanjung Palette ke Pulau Buton. Dimana setelah Arung Palakka bersama teman-temannya sampai di Buton, Arung Palakka langsung ditemui oleh pangeran dari Kerajaan Soppeng, yaitu datu Pattojo. Datu Pattojo inilah yang kemudian menjadi perantara antara Arung Palakka untuk bertemu dan berunding dengan pimpinan tertinggi Komopeni Belanda di Batavia. Kemudian mereka berangkat ke Batavia pada tahun 1663 bersama seorang pembesar Kompeni Belanda yang bernama Nieuland. Kemudian rombongan Arung Palakka diterima dengan baik di Batavia. Pada kesempatan itu pula yang dijadikan kesempatan bagi Komponi Belanda untuk membalaskan dendamnya

atas peristiwa Enkhuysen 28 April 1615, dan peristiwa di pulau Doang-Doanga terus berlanjut (Nur, 2007: 107-108).

Perseteruhan antara Makassar dengan VOC berlangsung terus karena larangan VOC buat orang Makassar ke Maluku tidak diindahkan oleh para pedagang Makassar, sehingga keduanya (VOC dan Pedagang Makassar) mengambil sikap bahwa “menang atau kalah, engkau atau saya” (Poelinggomang, dkk., 2004: 116). Sikap dan tindakan dari kedua kelompok (VOC dan Arung Palakka, dkk.) ini yang mempresur percepatan penyerangan ke Kerajaan Gowa-Tallo. setelah Arung Palakka bersama teman-temannya atau pasukannya berada di Batavia selama kurang lebih 5 tahun yang dilatih oleh tentara VOC tentang perang dan strategi perang, mereka pun dipersiapkan untuk menyerang dan membalas perlakuan Kerajaan Gowa-Tallo kepada Kompeni Belanda dan Soppeng-Bone. Namun sebelum dikirim ke Sulawesi, pasukan Arung Palakka dikirim ke Sumatera Utara untuk melaksanakan tugas yang sama, yaitu menaklukan kekuasaan Pariaman (Kamaruddin, dkk., 1986:131-132)

Kemudian hasil rapat pimpinan VOC di Batavia pada 5 Oktober 1666 memutuskan untuk memerangi Kerajaan Gowa-Tallo yang dipimpin oleh Mr. Johan Van Dam tetapi menolak sehingga diserahkan kepada Admiral Cornelis Janszoon Speelman. Armada perang mulai diberangkatkan pada tanggal 24 November 1666 dengan 1.870 tentara (818 pelaut Belanda, 578 tentara Belanda, 395 tentara Bumiputera yang dipimpin oleh Arung Palakka dan Arung Belo Tosaddeng khusus pasukan dari Soppeng dan Bone, dan Kapten Joncker untuk pasukan dari Maluku (Poelinggomang, dkk., 2004:116). Pasukan gabungan sekutu VOC untuk menyerang Kerajaan Gowa-Tallo tiba di perairan Makassar pada 19 Desember 1666, 20 Desember VOC menyurat kepada Sultan Hasanuddin berisi tuntutan untuk menyerahkan pembunuh orang Belanda di Pulau Doang-doangan dan penjarahan

terhadap kapal Leeuwin yang kandas di pulau itu (Poelinggomang, dkk., 2004:116-210; Nur, 2007: 114).

Tuntutan VOC itu ditolak karena Kerajaan Gowa-Tallo hanya mau membayar pakai uang dan emas, serta barang-barang muatan kapal Belanda dikembalikan. Akhirnya 21 Desember diseranglah Kerajaan Gowa-Tallo, namun karena ada kekwatiran tentang kondisi musim dan pasukan Kerajaan Gowa-Tallo di Buton. Buton merupakan salah satu pangkalan VOC yang dapat diandalkan untuk Indonesia bagian timur. Sementara Armada perang Kerajaan Gowa-Tallo pimpinan Karaeng Bontomarannu telah berlayar ke Buton, sebanyak 450 jung dan 15.000 orang laskar dan itu dianggap sangat membahayakan kedudukan VOC (Kamaruddin, dkk., 1986:131-132). Karena Buton dianggap sangat penting oleh VOC maka mau tidak mau harus dikuasai terlebih dahulu. Selain itu, perencanaan VOC untuk menguasai Kerajaan Gowa-Tallo, maka wilayah laut harus pula dikuasai sebagai tanggungjawab VOC. Sementara penyerangan lewat darat dipercayakan kepada pasukan Arung Palakka. Maka pasukan ditarik ke kapal dan tetap melakukan manuver di perairan, kemudian menyerang pasukan Kerajaan Gowa-Tallo di pantai Laikang sampai naik ke darat tetapi berhasil diserang oleh pasukan Gowa. Akhirnya pasukan gabungan sekutu VOC naik ke kapal dan langsung ke Bantaeng. 25 Desember 1666, menghancurkan Bantaeng sebagai lumbung pangan Makassar atau tanah pusaka raja Gowa. Termasuk membunuh 100 perahu, dan mengangkut beras 6.000 ton walaupun dipertahankan oleh 7.000 orang pasukan (Poelinggomang, dkk., 2004:118).

Pasukan gabungan (VOC dan pasukan Arung Palakka) tiba di Buton pada 1 Januari 1667. Di Buton terjadi perang yang sangat dahsyat, tetapi perang itu dimenangkan mutlak oleh VOC bersama pasukan Arung Palakka dan Kapten Joncker, maka diultimatulah

Kerajaan Gowa-Tallo di Buton (Poelinggomang, dkk., 2004:119). Kekalahan itu terjadi karena tidak seimbangnya jumlah pasukan, kemudian banyak juga pasukan Kerajaan Gowa-Tallo yang berasal dari Soppeng dan Bone kembali memihak ke Arung Palakka dan bergabung dengannya sekitar 5.000 orang, sementara pasukan Makassar banyak yang dibantai dan banyak juga yang dibiarkan mati kelaparan. Kira-kira sebanyak 5.500 orang lasykar Gowa ditawan kemudian ditempatkan di sebuah pulau. Para tawanan ini hanya dibekali pakain seadanya dan beras untuk makan beberapa hari saja. Setelah bekal mereka habis, maka ada kemungkinan mereka mati kelaparan. Kalau ada yang selamat hanyalah orang-orang yang berani berenang mengarungi laut ke daratan Buton atau ke Pulau Pansiano atau yang diculik orang-orang Buton untuk dijadikan sebagai budak (Nur, 2007: 122). Makanya pulau itu dijuluki *Overwinnarseiland* (Pulau Penakluk), ada juga yang menyebut *Makassarch Kerkhof*/kuburan Makassar (Poelinggomang, dkk., 2004:120)

Setelah Buton benar-benar dapat dikuasai dan dikendalikan, maka rencana utama untuk menaklukan Kerajaan Gowa-Tallo semakin terasa dan mendesak. Itulah sebabnya Arung Palakka mengirim 2.000 orang pasukan di bawah pimpinan La Palancoi Arung Bila dan arung Kaju ke Bone untuk dipersiapkan menyusup ke Makassar melalui daratan pada bulan Mei 1667. Namun kabar keberadaannya di Bone tidak begitu dipahami oleh Arumpone La Maddarammeng, sehingga kabar kedatangan utusan Arung Palakka dilaporkan ke Kerajaan Gowa-Tallo. sehingga perangpun tidak dapat elakan. Namun situasi dapat terkendalikan setelah La Maddarammeng kembali memihak utusan Arung Palakka (Saifuddin Nur, 2007; Poelinggomang, dkk., 2004:120-121).

Sementara penyerangan Makassar menurut perencanaan Speelman akan lakukan pada 25 Juli 1667 khususnya Bantaeng,

dan pada tanggal 19 Agustus 1667 menyerang Benteng Galesong; 26 Oktober 1667 pasukan sekutu VOC berhasil mendekati Benteng Sombaopu, 29 Oktober Sultan Hasanuddin meminta gencatan senjata dan berakhir 1 November 1667. Dalam keadaan itu Karaeng Layu dan Bangkala membuat ulah karena keluar dari pasukan Makassar dan bergabung dengan pasukan sekutu VOC bahkan membakar daerah Lengkesse. Setelah melakukan terus pendekatan antara kedua belah pihak, akhirnya mulai perundingan pada 13-18 November 1667. Perundingan itu dikenal dengan Perjanjian Bungaya; orang Makassar sebut Cappaya ri Bungaiya, sementara VOC sebut *Bongaaisch Verdrag* (Poelinggomang, dkk., 2004:123-126).

Tiga hari setelah pendaratan Arung Palakka dan pasukannya di Pattiro, datanglah menghadap arung Appanang bersama La Palancoi Daeng Mabela arung Bila serta To Saddeng Arung Belo. Mereka meminta izin untuk ke Soppeng melihat-lihat keadaan negerinya yang telah ditinggalkannya selama 7 tahun dan akan mengajak orang-orang Soppeng bergabung dengannya untuk bersama-sama memerangi Kerajaan Gowa-Tallo. Permintaan mereka ini diterima baik oleh La Tenritatta Arung Palakka dan berangkatlah mereka bersama 30 orang prajurit menuju Soppeng. Tetapi dalam perjalanannya itu, mereka mendapat informasi bahwa kota Watang Soppeng telah lima hari diobrak-abrik oleh orang-orang Sawitto yang dipimpin oleh Sullewatang Sawitto (Nur, 2007: 110). Pasukan Sawitto tidak dapat berbuat banyak setelah mendapat serangan kilat pada subuh-subuh oleh tiga serangkai bersama pasukannya.

Tiga serangkai, setelah sampai lagi ke Pattiro, mereka melaporkan keadaan dan peristiwa yang terjadi di Soppeng. Kemudian La Palancoi Arung Bila atas nama Tiga serangkai mengajukan usul lagi kepada La Tenritatta Arung Palakka bahwa: “sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menyerang Kerajaan Gowa-Tallo, sebaiknya lebih dahulu

dibuat suatu perjanjian yang secara sungguh-sungguh dengan orang-orang Bone; agar kita tidak lagi dihianatinya seperti halnya yang terjadi pada tujuh tahun silam; ketika kita dalam pelarian menuju Palette (Nur, 2007: 127)". Kita sudah melakukan perjanjian dengan Bone yang dinamai *Pincara Lopie ri Attapang*, tetapi Bone membantu pasukan Gowa mengejar kita ke Palette. Usulan tiga serangkai ini sangat disetujui oleh La Tenritatta Arung Palakka Datu Marioriwawo. Maka La Tenritatta mengutus arung Cabalu untuk mengunjungi Bone. Dari misi itu diperoleh keyakinan bahwa orang-orang Bone telah pulih kembali semangatnya setelah kehadiran La Tenritatta Arung Palakka di tengah-tengah mereka. Mereka berjanji akan sehidup-mati dengan orang-orang Soppeng untuk memerangi Kerajaan Gowa-Tallo.

Persoalan dan perencanaan lain, La Tenritatta mengirim utusan ke Lamatti dan Bulu-bulu untuk diberi pilihan apakah akan memihak kepadanya (Arung Palakka) atau kepada Kerajaan Gowa-Tallo. tetapi Lamatti dan Bulu-Bulu memihak kepada Kerajaan Gowa-Tallo. Akhirnya terjadi perang antara utusan pasukan Arung Palakka dengan Lamatti-Bulu-Bulu secara sengit. Setelah pertempuran berlangsung selama tiga hari, pasukan utusan Arung Palakka terdesak mundur dan terpaksa kembali ke Pattiro. Tiga hari kemudian, laskar gabungan di bawah pimpinan La Tenritatta bersama 30 orang serdadu Belanda yang dilengkapi 2 pucuk meriam lapangan pimpinan Kapten C. Poleman melakukan penyerangan ke Lamatti dan Bulu-bulu, dan kalahlah Lamatti dan Bulu-Bulu (Pananrangi, 1991:175-179).

Kasus Lamatti dan Bulu-Bulu dianggap selesai karena sudah bersumpah berada di pihak Arung Palakka. Dan kesempatan lain, La Tenritatta Arung Palakka membagi dua pasukannya, yaitu untuk penyerangan dari arah selatan dipimpin langsung oleh beliau sendiri dan didampingi oleh To Saddeng Arung Belo dan arung Kaju serta Daeng Mattoana. Sementara penyerangan dari arah utara

dipercayakan kepada arung Appanang bersama La Palancoi Arung Bila. Setelah pembagian tugas itu, maka penyerangan untuk arah utara langsung bergegas dan tidak mau mengulur-ngulur waktu agar tidak memberi kesempatan pihak lawan untuk mempersiapkan diri. Merekapun segera berangkat ke Barru untuk memulai tugasnya (Nur, 2007: 130-131).

Pertama-tama menemui dan mengingatkan kepada La Mappajanci Daeng Matajang selaku Karaeng Tanete XII, bahwa antara Tanete dengan Soppeng adalah satu, sebagaimana sering disebutkan dalam suatu ungkapan bahwa: *Tanete Pole, Soppeng su'* yang maksudnya Tanete dibagian dalam, sedang Soppeng dibagian luar. Mendengar pernyataan itu, raja Tanete dalam situasi dilema, dan muncullah suatu ide untuk tidak disalahkan oleh Kerajaan Gowa-Tallo. Ide yang dimaksud itu adalah pertempuran pura-pura antara Tanete dengan pasukan Soppeng. Peperangan ini hanyalah siasat untuk menunjukkan kesetiaan Tanete kepada Gowa tetapi karena kalah perang, maka yang kalah perang harus tunduk kepada yang menang, itulah sebabnya Tanete harus tunduk dan bergabung kepada pasukan Soppeng yang menang (Pananrangi, 1991: 180-183)

Pasukan tiga serangkai meneruskan penyerangan ke Berru Riaja, yang masih setia kepada Gowa sehingga terjadi perang sengit dan meneleng korban jiwa antara kedua belah pihak. Namun tiba-tiba datang utusan dari Gowa untuk memberi pesan kepada Berru Riaja untuk mencari keselamatan, makanya ia menyerah kepada Soppeng (Pananrangi, 1991: 184-187). Kemudian pasukan Soppeng menaklukan Cilallang dan Magalung dengan sumpah setia, bahwa sampai turunan-turunannya, dimana Soppeng dianggap sebagai angin dan dua daerah tadi sebagai daun. Terus Soppeng menaklukan Mangambe, Manise, Ma'rang, Labakkang, mereka menyerah dan berjanji setia, termasuk anak cucunya tidak memperoleh keselamatan

jika ada yang berhianat atas janji itu. Lalu Soppeng menaklukkan Barrasa dan Siang Pangkajene (Pananrangi, 1991: 187-194). Pasukan Soppeng bergerak ke Balusu' kemudian ke Madello dan Nepo.

Pasukan Soppeng dari Nepo, mereka bergerak ke Selatan menuju Makassar, dan ketika berada di Siang, seorang utusan datang membawa pesan dari La Tenritatta dan mengatakan bahwa: "Jangan meninggalkan rakyat Siang dan Barassa di negeri mereka, tetapi angkutlah mereka ke Binamu". Dengan selesainya perang dipantai Barat dan utara Makassar ini, maka berangkatlah pasukan Soppeng dipimpin oleh arung Appanang dan kawan-kawan ke Binamu untuk bergabung dengan pasukan pimpinan La Tenritatta Arung Palakka. Setelah Soppeng menaklukkan daerah-daerah utara Makassar, pasukan Soppeng ke Binamu (Poelinggomang, dkk., 2004: 195; Nur, 2007: 132-134)

Pada saat yang sama, yaitu pada tanggal 6 Juli 1667 armada Kompeni Belanda di bawah pimpinan Laksamana C.J. Speelman berlabuh di depan pantai Bantaeng. Dan pada keesokan harinya merekapun menyerang kota Bantaeng yang dijaga oleh laskar Gowa sebanyak 7.000 orang dipimpin Kareang Layu', Karaeng Bontonompo da Karaeng Bangkala, sehingga terjadi perang yang sengit sampai berjatuhnya korban jiwa antara kedua belah pihak. Perlawanan Kerajaan Gowa-Tallo di Bantaeng ini akhirnya dapat dikalahkan oleh pasukan gabungan sekutu VOC dan pasukan Arung Palakka dan Kapten Joncker (Nur, 2007: 132).

Pada 10 Juli 1667 yaitu setelah berunding dengan arung Amali, Laksamana C.J. Speelman memerintahkan seluruh armadanya untuk berangkat menuju Makassar. Di pantai depan daerah Binamu, C.J. Speelman memerintahkan pasukannya mendarat dan membakar beberapa rumah dan lumbung padi di daerah tersebut. Kemudian dari sana mendapat informasi bahwa Benteng Barombong dipertahankan

oleh laskar Mandar di bawah pimpinan *Mara'dia* Balanipa, Benteng Somba Opu diperkuat dengan laskar sebanyak 40.000 orang, diantaranya terdapat 10.000 orang Wajo di bawah pimpinan La Tenrilai' To Sengngeng Arung Matoa Wajo XXIII. Sepanjang pantai dari Benteng Barombong hingga Benteng Ujungpandang terdapat kubu-kubu pertahanan sebagai mata-rantai pertahanan. Itulah sebabnya pasukan gabungan sekutu VOC harus membuat rencana dan strategi yang matang.

Salah satu strategi pasukan gabungan sekutu VOC adalah pasukan melakukan manuver-manuver dan menakut-nakuti lawan dengan pasukan dan peralatan militer yang canggih sesuai dengan zamannya. Untuk lebih membingungkan musuhnya pula adalah mengulur waktu penyerangan, tetapi hanya menunggu datangnya La Tenritatta Arung Palakka beserta laskarnya, sebab tanpa pasukan Arung Palakka dikuatirkan penyerangan akan kalah sebagaimana pengalaman yang terjadi di Lamatti dan Bulu-Bulu. Maka C.J. Speelman memerintahkan armadanya untuk mundur-mandir dari Barombong ke Makassar. Namun beberapa hari ditunggu, La Tenritatta Arung Palakka belum juga muncul sehingga membuat C.J. Speelman merasa sangat cemas. Pada tanggal 23 Juli 1667, La Tenritatta Arung Palakka tiba di Bantaeng tanpa rintangan apa-apa dan laskarnya telah bertambah menjadi 8.000 orang (Nur, 2007: 131-135; Poelinggomang, dkk., 2004:120-127).

Pada tanggal 26 Juli 1667, La Tenritatta Arung Palakka dan laskarnya bersama serdadu Belanda pimpinan Kapten C. Poleman meninggalkan Bantaeng menuju Binamu. Pada keesokan harinya, yaitu tanggal 27 Juli 1667, mereka dicegat oleh laskar Kerajaan Gowa-Tallo yang jumlahnya sangat besar dan kuat, dipimpin oleh Karaeng Lengkesse dan Karaeng Karunrung serta *Mara'dia* Balannipa. Jumlah laskar Gowa ini menyamai jumlah laskar La Tenritatta Arung

Palakka sehingga perangpun berlangsung seimbang hingga sore hari. Dalam perang ini, La Tenritatta terjun langsung memimpin jalannya pertempuran, demikian pula Kapten C. Poleman, namun pada akhirnya laskar Gowa mengundurkan diri ke bukit-bukit. Pada tanggal 15 Agustus 1667 seluruh laskar La Tenritatta yang berjumlah 10.000 orang telah berada di sekitar Galesong.

Melihat kenyataan ini, Sultan Hasanuddin segera memanggil Karaeng Lengkese' dang Karaeng Karunrung serta Mara'dia Balannipa bersama seluruh lasyarknya sebanyak 10.000 orang untuk segera meninggalkan Binamu dan kemudian bergabung dengan laskar Gowa lainnya di Galesong. Dengan demikian maka benteng Galesong akan dipertahankan oleh laskar Gowa sebanyak 30.000 orang dan akan dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin selaku Raja Gowa XV. Pada tanggal 16 Agustus 1667, mulailah pertempuran sengit antara laskar La Tenritatta Arung Palakka bersama Kompeni Belanda dengan pihak Kerajaan Gowa-Tallo di Galesong. Kedua belah pihak silih berganti terdesak dan saling kejar-mengejar. Selama tiga hari tanpa henti siang maupun malam, keduanya saling menyerang dan bertempur mati-matian. Dalam pertempuran sengit itu meneleng korban jiwa yang sangat banyak dianatara kedua belah pihak, salah satu raja yang meninggal adalah Mara'dia Balannipa, termasuk Daeng Mangago putra Karaeng Popo' (Nur, 2007: 137-138)

Pertempuran pun diteruskan setelah Benteng Galesong berhasil dilumpuhkan oleh pasukan gabungan sekutu VOC di Benteng Barombong dan Somba Opu. Pertempuran di Barombang yang sangat sengit membuat pasukan gabungan sekutu VOC mengalami banyak korban jiwa ketika ingin menerobos masuk ke pusat pertahanan Kerajaan Gowa-Tallo. Sehingga terjadi korban jiwa yang sangat banyak antara kedua belah pihak. Pada saat itu Speelman meminta bantuan secepatnya dari Batavia, sehingga datanglah bantuan sebanyak 5 kapal

perang yang dipimpin oleh Kapiten Pierre Dupon (Poelinggomang, dkk., 2004:122). Dengan tambahan pasukan itulah, akhirnya pasukan gabungan Gowa dapat dipukul mundur sampai ke Benteng Somba Opu.

Pertempuran pada 26 Oktober 1667, VOC berhasil memukul mundur pasukan Kerajaan Gowa-Tallo sampai ke Benteng Somba Opu. Kerajaan Gowa-Tallo dalam posisi terdesak seperti itu dijadikan kesempatan bagi Speelman untuk mengajak Sultan Hasanuddin menyerah dan melakukan perundingan. Itulah sebabnya pada 29 Oktober 1667, Speelman menyurut kepada Sultan Hasanuddin untuk melakukan gencatan senjata selama tiga hari. Namun sampai 1 November 1667 sebagai batas akhir gencatan senjata, Sultan Hasanuddin belum memberikan jawaban yang memuaskan Speelman, sehingga malam harinya dilakukan penyerangan ke Benteng Somba Opu. Hal itu dilakukan karena Arung Palakka telah berhasil membujuk Karaeng Layu dan Karaeng Bangkala berpihak padanya. Dua karaeng itu merupakan bagian dari tulang punggung pasukan Kerajaan Gowa-Tallo yang berada dalam Benteng Somba Opu. Tetapi karena sudah bersekongkol dengan Arung Palakka, dua karaeng itu bersama pasukannya langsung keluar dari Benteng (Poelinggomang, dkk., 2004: 122-123).

Situasi tersebut membuat Kerajaan Gowa-Tallo semakin terdesak dan tidak banyak lagi berbuat apa-apa, kecuali melakukan pendekatan terus kepada VOC dan sekutunya. Sampai akhirnya terjadi perundingan yang dimulai pada 13 November itu, yang kemudian menghasilkan Perjanjian Bungaya. Seandainya dua karaeng itu tidak berhasil dibujuk dan bekerja sama dengan Arung Palakka, maka di situlah terjadi perang besar dan sangat dahsyat. Tetapi sesungguhnya perang besar dan sangat dahsyat bukan tidak terjadi tetapi hanya tertunda. Sebab Perjanjian Bungaya sangat

memberatkan dan merugikan Kerajaan Gowa-Tallo, sementara para pembesar Kerajaan Gowa-Tallo sangat tidak setuju atas perjanjian itu. Itulah sebab Karaneg Karunrung membujuk terus Sultan Hasanuddin untuk berperang dengan VOC bersama sekutunya. Akhirnya terjadi betul perang sejak April 1668 sampai Juli 1669 yang menalangi korban jiwa yang sangat banyak antara kedua belah pihak. Speelman sendiri mengakui bahwa perang yang besar dan paling dahsyat yang pernah dialaminya hanyalah Perang Makassar. Speelman juga mengakui bahwa perang tersebut yang paling banyak menalangi korban jiwa orang Belanda (Poelinggomang, dkk., 2004:126-130).

Soppeng pada Masa VOC Hingga Hindia Belanda

Kedudukan Kerajaan Soppeng menjelang Perang Makassar sampai pasca awal Perjanjian Bungaya masih memiliki peran yang sangat penting dalam pergolakan politik di Sulawesi Selatan. Tetapi setelah VOC mempertegas posisinya sebagai penguasa di Sulawesi, sepaik terjang dan kedudukan Kerajaan Soppeng tidak begitu banyak terlihat. Padahal Kerajaan Soppeng tidak berada pada posisi kerajaan yang dikuasai secara langsung oleh VOC, tetapi posisi dan kedudukannya sebagai kerajaan sekutu, sama dengan posisi dan status Kerajaan Bone. Raja-raja atau *datu-datu* Kerajaan Soppeng Pascaperang Makassar, sepertinya tidak bernafsu untuk memegang peran penting dalam dinamika yang terjadi di Sulawesi Selatan. Mungkin motifasinya terbatas pada Perang Makassar saja karena merasa dilecehkan oleh Kerajaan Gowa-Tallo, dan setelah terwujud balas dendamnya, maka selesailah pula ambisinya. Sebab setelah itu, tokoh-tokoh Soppeng yang tiga serangkai juga tidak terlalu muncul dipanggung politik dan hanya menyisahkan Arung Palakka.

Sementara Kerajaan Bone semakin memperlihatkan kekuatan dan kekuasaannya di bawah bayang-bayang Arung Palakka. Peta

politik di Sulawesi Selatan Pascaperang Makassar, Kerajaan Bone, Soppeng dan banyak lagi kerajaan lainnya berada di bawah kendali Arung Palakka. Sepak terjang Arung Palakka inilah yang dikuatirkan oleh VOC, akan mengancam kedudukannya dan ambisinya menguasai Kerajaan Gowa-Tallo. Dari sejak awal VOC ingin menguasai secara langsung Kerajaan Gowa-Tallo dan kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di sekitarnya. Penguasaan langsung kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan oleh Belanda (VOC) merupakan target yang bertujuan untuk memegang monopoli politik pemerintahan dan monopoli perdagangan di kawasan timur Indonesia (Pemerintah Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1991:114-118). Target Belanda ini, ingin diwujudkan dalam Perang Makassar, namun target ini tidak dapat terlaksana dengan baik karena harus berbagi dengan sekutunya, yaitu pasukan Arung Palakka. Itulah sebabnya penguasaan langsung kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pascaawal Perang Makassar hanya beberapa kerajaan saja yang ada di wilayah ini, sementara Kerajaan Bone, Soppeng dan beberapa lagi kerajaan lainnya ditempatkan sebagai kerajaan sekutu (Poelinggomang, dkk., 2004: 132).

Rencana penguasaan langsung kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan menyisihkan banyak permasalahan. Permasalahan yang dimaksud lebih kepada kemampuan Belanda untuk menaklukkan dan menguasai. Sebaliknya kerajaan-kerajaan lokal di wilayah ini masih perlu dipertanyakan kerelaannya dan kemauannya untuk tunduk dan setia kepada Belanda. Tetapi sebenarnya penguasaan langsung Belanda untuk wilayah ini, bukan terletak pada penguasaan langsungnya tetapi lebih kepada otoritas kekuasaan politik dan monopoli perdagangan. Untuk memantapkan tujuan Belanda tersebut, maka dikeluarkanlah kebijaksanaan berkaitan dengan pengaturan

wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Setelah Perang Makassar 1666-1669, Makassar dibagi 4 dengan nama Gouvernement Van Makassar atau Pemerintahan Makassar (Poelinggomang, dkk., 2004: 132).

Jika diperhatikan pengaturan wilayah berdasarkan Perjanjian Bungaya, maka jelas bahwa wilayah yang dinyatakan berada di bawah kekuasaan VOC adalah daerah-daerah yang dulunya di bawah pengaruh Kerajaan Gowa-Tallo. Atau kerajaan-kerajaan yang berkoalisi dengan Kerajaan Gowa-Tallo sepanjang abad itu. Kerajaan itu adalah daerah-daerah yang mengelilingi wilayah Kerajaan Gowa-Tallo dan sebagai pagar batas kerajaan itu. Pada bagian timur terdapat daerah kekuasaan Kompeni yang disebut Distrik-distrik Bagian Timur (*Oostder Districten*) seperti Bulukumba dan Bonthain (Bantaeng). Pada bagian barat di batasi oleh wilayah Makassar, pada bagian utara di batasi oleh wilayah Distrik-Distrik Bagian Utara (*Noorder Districten*) dan pada bagian selatan dibatasi oleh wilayah Distrik-Distrik Bagian Selatan (*Zuider Districten*). Pengaruh demikian ini jelas bertujuan untuk dapat menciptakan benteng penghalang bagi usaha kegiatan Kerajaan Gowa-Tallo di bidang pelayaran dan perdagangan maritim serta usaha perluasan pengaruh kekuasaan.

Kebijakan ini diambil atas kenyataan bahwa kekalahan Kerajaan Gowa-Tallo atas bantuan dari Kerajaan Soppeng dan Bone tidak bisa diabaikan oleh VOC. Maka di dalam kebijakan dan pengaturan Kerajaan Gowa-Tallo dan sekutu-sekutunya yang berada di bawah kekuasaannya dikendalikan oleh VOC bersama sekutunya Arung Palakka. Sebagai bukti nyata dalam Ketentuan tersebut, maka seluruh kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo Pascaperang Makassar, Bone/Soppeng mendapatkan keistimewaan. Keistimewaan ini menjadikan Kerajaan Bone sebagai kerajaan penguasa atas beberapa wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo dan sekutu-sekutu Kerajaan Gowa-Tallo seperti Distrik-distrik Bagian Timur (*Oostder Districten*), dan Distrik-Distrik

Bagian Selatan/*Zuider Districten* (Poelinggomang, dkk., 2004: 184-187).

Pascaperang Makassar (1666-669) yang diakhiri dengan Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667. Kemudian perjanjian ini selalu diperbaharui setiap ada pergantian penguasa kerajaan lokal di wilayah ini. Setiap pembaharuan Perjanjian Bungaya, juga selalu diikuti pernyataan pendek. Khusus pemerintahan penguasaan langsung dalam prakteknya tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya karena memang itu bukan tujuan utama Belanda. Walaupun demikian penguasaan langsung tetap merupakan jalan untuk mencapai tujuan utama Belanda sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu tercatat bahwa Belanda beberapa kali merencanakan dan melakukan aturan penguasaan langsung wilayah ini. Namun yang besar imbasnya adalah terjadi pada pascaawal Perang Makassar, dan yang kedua terjadi pada awal abad XX, tepatnya tahun 1905 dalam kebijakan ekspedisi militer Belanda. Penguasaan langsung yang pertama di bawah kekuasaan Kompeni (VOC) dan sekutunya, sementara penguasaan langsung yang kedua di bawah kekuasaan penuh Pemerintah Hindia Belanda. Daerah Bugis sendiri masuk dalam rencana penguasaan langsung Pemerintah Hindia Belanda tersebut.

Keistimewaan Kerajaan Bone dengan memberikan izin untuk ikut mengendalikan Distrik-Distrik Bagian Timur (*Oostder Districten*) dan Distrik-Distrik Bagian Selatan (*Zuider Districten*). Salah satu anggota distrik bagian timur adalah Bantaeng, sementara pada sisi lain, Bantaeng juga ditempatkan sebagai kerajaan yang dikuasai langsung oleh Kompeni (VOC). Penguasaan langsung Bantaeng oleh VOC dalam pelaksanaannya berada di bawah kekuasaan dan pengawasan Kerajaan Bone sebagai sekutu terkuat VOC dalam menaklukkan Kerajaan Gowa-Tallo. Pascaperang Makassar ada pemberian wewenang atau pengaturan tentang posisi Arung Palakka terhadap

Kompeni, dimana setiap pembesar kerajaan yang ingin menemui pimpinan Kompeni harus seizin Arung Palakka, dan sebaliknya kalau Kompeni ingin melakukan sesuatu kepada kerajaan lain harus terlebih dahulu memberitahukan Arung Palakka (Nur, 2007: 162). Sehingga si sinilah muncul konflik-konflik kecil dan kemudian membesar pada masa kekuasaan Inggris.

Kerajaan Gowa-Tallo sendiri ditempatkan sebagai kerajaan sekutu, sedangkan daerah-daerah yang dinyatakan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo sebelum Perang Makassar dinyatakan berada di bawah kekuasaan Kompeni sebagai daerah kekuasaan langsung. Walaupun demikian pada kenyataannya daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan langsung itu tetap berada di bawah kekuasaan penguasa-penguasa setempat. Pengaruh langsung dari Kompeni hanya terwujud dalam daerah Makassar, yang merupakan bandar niaga pada waktu itu. Hal ini disebabkan Kompeni hanya bertujuan menguasai kegiatan pelayaran perdagangan maritim saja.

Daerah-daerah yang dinyatakan sebagai daerah kekuasaan langsung hanya sekedar mendapatkan pengakuan keunggulan dan kekuasaan (Poelinggomang, 2004:). Itulah sebabnya keterlibatannya dalam pelaksanaan kekuasaan tidak pernah terlaksana di daerah-daerah yang dinyatakan sebagai daerah kekuasaannya. Campur tangan mereka hanya dalam hal pergantian raja-raja atau penguasa. Campur tangan dalam urusan inilah yang sering dilakukan oleh VOC, tetapi hal ini pula yang merupakan sebab munculnya sikap perlawanan penguasa lokal. Situasi tersebut didorong oleh kenyataan bahwa campur tangan itu lebih banyak dilakukan terhadap kerajaan yang dinyatakan sebagai kerajaan sekutu daripada daerah yang dikuasai langsung, khusus Kerajaan Gowa-Tallo. Namun mereka harus bersedia menerima dan menandatangani Perjanjian Bungaya yang diperbaharui, dan bersedia mengikuti aturan-aturan yang telah dicapai yang dicantumkan dalam

perjanjian itu (Poelinggomang, 2004:37).

Campur tangan Kompeni terhadap pelaksanaan kekuasaan dan pemerintahan tidak pernah terlaksana dengan baik. Hubungan kekuasaan hanya terjadi antara penguasa setempat dan pejabat Kompeni yang berada di Makassar. Pelaksanaan kekuasaan dan pemerintahan pada kenyataannya tetap berada di bawah penguasa setempat dan dilakukan sesuai dengan kebiasaan setempat. Sistem dan struktur politik pemerintahan setempat tidak pernah tersentuh perubahan yang mendasar dari pihak Kompeni. Walaupun secara politik Kompeni sebagai pemegang kekuasaan. Masa kekuasaan Kompeni ini berlangsung lama, yaitu berawal ketika dicapainya Perjanjian Bungaya (1667) hingga akhir abad XVIII (Desember 1799) yang dibuktikan melalui perjanjian dan pernyataan pendek. Kompeni (VOC) pada tahun ini harus dibubarkan karena mengalami kerugian yang sangat besar sebagai akibat korupsi yang akut dalam tubuh VOC.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa rencana penguasaan langsung Sulawesi Selatan dilakukan dalam dua fase waktu yang berbeda. Fase pertama terjadi pada awal Pascaperang Makassar dan fase kedua terjadi pada ekspedisi militer Hindia Belanda pada tahun 1905. Pada fase kedua ini menempatkan wilayah Sulawesi berada di bawah kekuasaan penuh Hindia Belanda setelah ditaklukkan terlebih dahulu. Sehingga pada tahun 1906 Sulawesi Selatan secara keseluruhan telah berada langsung di bawah kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan pernyataan pendek (Poelinggomang, 2004:49).

Pengaturan wilayah Sulawesi Selatan pada masa kekuasaan VOC maupun pada masa Pemerintahan Hindia Belanda selalu mengalami perubahan. Namun perubahan itu selalu mengikuti, dan atas pertimbangan kepentingan Belanda. Khusus pada masa

kekuasaan VOC wilayah Sulawesi Selatan, Belanda memfokuskan pada penanganan pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo. Penanganan secara khusus Kerajaan Gowa-Tallo karena kerajaan ini yang dianggap berbahaya dan mengancam kedudukan Belanda. Untuk menangani kerajaan ini, maka kekuasaannya dibagi-bagi dalam beberapa provinsi serta beberapa distrik yang ada di dalamnya sebagaimana dijelaskan di atas. Namun kebijakan ini adalah kebijakan yang terwariskan dan diwariskan oleh pemerintahan Inggris dan dipertahankan untuk sementara waktu oleh Pemerintah Hindia Belanda sebelum ada sistem baru.

Namun daerah yang selalu menjadi sengketa adalah daerah selatan dan timur Makassar, khususnya Bantaeng dan Bulukumba. Daerah-daerah ini, dianggap potensial oleh kedua belah pihak (VOC dan Arung Palakka). Maka VOC selalu berusaha agar daerah ini tetap menjadi daerah penguasaan langsung VOC agar mudah dikontrol. Sedangkan setiap distrik-distriknya tetap dikepalai oleh seorang bangsawan setempat dengan gelar lokalnya seperti *Karaeng*, atau *Arung*. Sebelum Perjanjian Bungaya 1667, wilayah itu berada di bawah pengaruh wilayah Kerajaan Gowa-Tallo, kemudian setelah perjanjian menjadi wilayah kekuasaan VOC yang dipinjamkan kepada raja-raja setempat. Wilayah itu cukup potensial dalam produksi pangan karena tanahnya subur, termasuk disebutkan bahwa di daerah ini perahu layar pinisi banyak diproduksi (khusus di Lemo-lemo dan Tanah Beru). Wilayah ini juga merupakan daerah transisi antara pengaruh kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo dan pengaruh kekuasaan Kerajaan Bone (Poelinggomang, dkk., 2004: 185-186).

Letak geografis dan potensi wilayah *Oostder Provincie* (provinsi bagian timur), khususnya Bantaeng dan Bulukumba, sudah sejak dulu selalu diincar oleh Bone. Setelah perjanjian Bungaya 1667, Arung Palakka, raja Bone XIV (1672-1696), sebagai sekutu terkuat

VOC dalam menaklukkan Kerajaan Gowa-Tallo. Dalam hal ini Kerajaan Bone memperoleh Bantaeng, Bulukumba, Lamuru, Pacciro, Mario, dan sebagian Soppeng, sebagai daerah-daerah pinjaman. Pencabutan hak pinjam Bone terhadap wilayah *Oostder Provincie* tidak menciutkan minat Arung Palakka untuk menguasai daerah itu. Pada tahun 1688, Arung Palakka memohon kepada VOC kiranya daerah Lange-lange di Bulukumba dapat dihadiakan kepada Daeng Talele (istri Arung Palakka). Dan pada 1690 Arung Palakka meminta tiga puluh rakyat Bulukumba untuk diperbantukan kepadanya. Namun Willem Hartsink (1685-1690) sebagai ketua (*voorzitter*) VOC di Makassar ketika itu menolak kedua permohonan Arung Palakka tersebut. Namun demikian, ketika alat-alat persenjataan Kompeni Belanda semakin berkurang dan tidak berdaya lagi mengontrol pergolakan politik di Sulawesi Selatan. Maka wilayah ini diserahkan kepada Inggris pada 1812. Sebelum 1797, wilayah *Oostder Provincie* telah berada di bawah pengaruh kekuasaan Bone (Poelinggomang,dkk., 2004: 185-195).

Namun perlu pula dijelaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil dan diterapkan oleh Kompeni (VOC) di wilayah koloni (Indonesia) tidak terlepas pada situasi dan kondisi yang terjadi di negeri Belanda pada khususnya dan Eropa pada umumnya. Namun tidak berarti, pendirian dan sikap VOC di tanah jajahannya tidak ada, tetap ada dan bahkan sikap dan pendirian VOC telah melampaui batas-batas kewajaran. Demikian juga kebijakan yang terjadi di setiap kerajaan yang ada di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya diterapkan kebijakan baru. Sehingga boleh dikatakan bahwa kebijakannya sama antara satu kerajaan dengan kerajaan lain, cuma dalam prakteknya kadang berbeda, tergantung kepentingan Belanda.

VOC sebagai kongsi dagang yang berasal dari beberapa perusahaan dagang yang ada di tujuh provinsi negeri Belanda, turut mempengaruhi aktifitas VOC dan kebijaksanaannya di tanah jajahan. Setiap anggota dari kongsi dagang ini terjadi persaingan secara tidak langsung, yang turut mempengaruhi dalam tubuh VOC. Sebaliknya, pemerintah Belanda juga sangat menentukan sikap dan kebijakan yang di ambil di tanah jajahan, tetapi cukup disayangkan pula karena negeri Belanda juga menjadi bola permainan politik antara Perancis dengan Inggris. Sehingga Indonesia sebagai jajahan Belanda, selalu mendapat pengaruh Perancis dan Inggris. Keputusan dan kebijakan kekuasaan politik pemerintahan Hindia Belanda pada setiap kerajaan lokal tidak terlepas dari pengaruh itu.

Usaha Belanda untuk membendung ambisi Inggris dan melindungi kepentingan dan keuntungan Belanda dalam perdagangan, ternyata menempatkan kedudukan Kompeni dalam kesulitan. Disebabkan karena tidak hanya menghadapi Inggris tetapi yang terpenting adalah penguasa-penguasa Melayu dan orang Bugis. Inggris yang melapangkan jalan bagi perdagangannya dengan Cina terus mempertahankan jalinan komersialnya dengan orang Bugis sebagai pedagang terpenting diperairan itu (Sulawesi dan Indonesia timur pada umumnya). Setelah Gowa runtuh, Bone mampu mengkonsolidasikan diri dan memperkuat posisinya di Sulawesi Selatan dengan pemerintahan terpusat dari garis keturunannya (Sutherland, dkk. 2004:10). Kekuatan dan kekuasaan Bugis itulah yang dimanfaatkan oleh Inggris.

Inggris mempercayai bahwa orang Bugis dan Cina sangat penting untuk mengintegrasikan jaringan-jaringan lokal dan menghubungkannya dengan pasar-pasar yang jauh. Kegiatan perdagangan Bugis pada masa itu mengalami peningkatan dengan mempergunakan dua rute utana untuk memasuki Maluku, yaitu menghubungkan Selat Malaka dengan Teluk Tomini termasuk

melintasi darat di lengan utara Sulawesi di antara Palu dan Parigi. Kedua, sebelah barat Selat Makassar, pemukiman-pemukiman di Berau dan Pasir menjadi penting. Namun perlu dipahami bahwa abad XVII, Bugis merupakan satu istilah yang faktanya mencakup siapa saja dari Sulawesi Selatan yang tersebar di seluruh Malaysia dan Indonesia dikenal sebagai orang Bugis. Jadi bukan hanya orang dari Bone, Soppeng dan Wajo yang disebut Bugis (Sutherland, dkk. 2004:11-12). Inggris juga terus giat untuk merealisasikan niatnya, sampai akhirnya memperoleh Penang pada Agustus 1786. Di pihak lain banyak bangsawan Melayu dan orang Bugis melakukan perlawanan melalui tindakan perampokan terhadap pelayaran niaga Kompeni.

Ancaman Belanda bukan hanya datang di negaranya sendiri tetapi juga di daerah koloninya Indonesia. Kedua ancaman inilah yang melemahkan posisi Belanda baik secara politik maupun dalam perdagangan maritim. Pergolakan politik yang terjadi di Eropa, menjadikan Belanda sebagai sasaran tembak sehingga mempengaruhi kebijakan dan sikap Belanda di tanah jajahan. Lagi pula di tanah jajahan disertai pula pergolakan politik seperti gerakan Batara Gowa I Sangkilang, Gerakan Karaeng Bontolangkasa dan L Maddukelleng (Poelingomang, dkk., 2004: 148-159). Selama penguasaan Sulawesi Selatan oleh VOC sampai masuknya Inggris, persetujuan antara Kompeni Belanda dengan Gowa atau bagian dari kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo sering terjadi konflik. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan sekutu VOC lainnya tidak banyak melakukan konflik dengan Kompeni Belanda, kecuali Kerajaan Bone, yang sering memprotes kebijakan Kompeni Belanda. Termasuk Kerajaan Soppeng tidak banyak kedengaran melakukan protes, sehingga adem-adem saja selama masa kekuasaan Kompeni Belanda (Pananrangi, 1991: 112-114).

Kerajaan Soppeng sebagai kerajaan sekutu Kompeni Belanda tidak diintervensi oleh kekuasaan Kompeni Belanda secara internal. Sebaliknya Kerajaan Soppeng juga tidak melakukan protes yang menyebabkan terjadinya konflik, sehingga Kerajaan Soppeng sejak masa VOC sampai masuknya Inggris tidak banyak perubahan yang bersifat kesteral (keluar). Perubahan-perubahan yang terjadi hanyalah perubahan yang sifatnya internal, misalnya pergantian raja dan kebijakannya, dan itupun tidak diintervensi oleh Kompeni Belanda seperti kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Misalnya 19 Agustus raja Soppeng La Tenribali Matinroe ri Datunna meninggal dan dia digantikan puteranya To Essang Matinroe ri Salasana, samasekali tidak ada intervensi dari Kompeni Belanda (Kamaruddin, dkk., 1986:153-155). Berbeda dengan situasi dan kondisinya pada masa kekuasaan Inggris, dan setelah masuknya kembali Belanda di Sulawesi Selatan, banyak kerajaan yang melakukan perlawanan, termasuk Kerajaan Soppeng. Hal itu terjadi karena Kerajaan Bone dan Soppeng merasa tidak dihargai oleh yang menyerahkan begitu saja Sulawesi Selatan kepada Inggris tanpa sepengetahuannya secara resmi. Tetapi sebelum kedatangan Inggris memang banyak terjadi perlawanan yang berkepanjangan dan merepotkan Belanda. Itu sebabnya sebagai salah satu faktor menyebabkan Kompeni gagal mempertahankan kepentingan dan keuntungannya di wilayah koloninya.

Kembali kepada VOC yang akan dibubarkan karena mengalami kemunduran beberapa tahun terakhir. Hal itu juga disebabkan karena tindakan penyelewengan kekuasaan dan korupsi yang dilakukan para pegawainya. Kolusi yang terjadi dalam tubuh VOC telah terjadi sejak dekade awal berdirinya lembaga ini. Pegawai lembaga ini terjadi persaingan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi setiap anggotanya dan bagi negara induk (Belanda). Kalau dilihat secara kasat mata pada masa itu, tujuan VOC untuk memperoleh

keuntungan pada masa itu telah mencapai dan bahkan telah melebihi target yang ditetapkan oleh Belanda. Cuma persoalannya, keuntungan itu hanya atas nama VOC, tetapi dalam kenyataannya bersifat perorangan. Nampaknya pernyataan itu bukan jempolan semata, tetapi kalau kita melihat hak dan wewenang yang diberikan VOC dari negara Belanda, adalah sangat besar. Seperti hak dan wewenang atas keamanan (militer) sendiri, hak dan wewenang memiliki mata uang sendiri, hak dan wewenang memegang pemerintahan serta hak dan wewenang untuk memonopoli perdagangan. Hak-hak yang sangat besar inilah yang menyebabkan VOC dapat bertindak sewenang-wenang (Pemerintah Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1991:114-118).

Namun keuntungan itu, kurang disertai dengan manajemen yang baik dalam tubuh VOC sehingga kolusi semakin menjadi-jadi pada anggota dan para pegawai lembaga ini. Keadaan seperti itu terus berlangsung sampai akhir hayatnya, meskipun telah diusahakan untuk memperbaikinya sejak 1688 dengan menyelenggarakan pengiriman pegawai atau pejabat Kompeni (VOC) yang langsung didatangkan dari Belanda. Tetapi perdagangan gelap dan penyelundupan yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat Kompeni di Hindia Belanda dalam tubuh VOC masih tetap terlihat. Kemudian diperpara oleh perilaku dan tindakan pegawai-pegawai Kompeni yang giat mengembangkan kegiatan niaga pribadi dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai pegawai VOC. Mereka dalam melaksanakan kebijakan VOC untuk monopoli perdagangan, dilakukannya untuk memperkaya diri sendiri. Akhirnya pada 1791 (tujuh belas direksi), atau para direksi Kompeni di negeri Belanda, membentuk *Commisseries-Generaal van Nederlandsch-indie* (komisaris Jenderal Hindia Belanda). Namun komisi ini juga gagal memulihkan VOC dan memperbaiki keadaan di wilayah koloni.

Sementara pada sisi lain, kedudukan koloni Belanda terancam oleh Inggris, sehubungan dengan terjadinya pergolakan politik di Eropa. Ditambah lagi dengan superioritas negara-negara kaya secara teknologi dan politik, seperti negara Inggris dan Perancis pada masa itu semakin aktif melakukan reaksi. Pada 1795 Inggris berhasil menguasai bagian terbesar dari koloni Belanda yang meliputi: Tanjung Harapan, Malabar, Koromandel, Bengal, Sion, Malaka, dan Maluku yang dalam hal ini adalah Indonesia. Aksi yang dilakukan oleh Inggris sangat mengancam kedudukan koloni Belanda yang terus berlangsung, sampai memasuki abad XIX. Kenyataan ini terbukti, di mana Inggris mulai memblokir Batavia pada 1800, sehingga Kompeni Belanda sama sekali tidak berdaya untuk melakukan kegiatan perdagangan. Keberhasilan Inggris untuk melumpuhkan kepentingan dan kedudukan Kompeni itu berakibat pada direksi perkumpulan dagang itu dihapuskan pada tahun 1796 tetapi baru terlaksana pada 1799 akhir Desember (Poelinggomang, dkk., 2004: 186-188).

Wilayah koloni yang diserahkan dari Belanda ke Inggris pada waktu itu hanya meliputi koloni yang berada di Jawa, Sumatera, Banjarmasin (Kalimantan) dan Makassar, karena wilayah koloni lainnya berada di bawah pengawasan Inggris. Setelah serah terima itu, pihak Belanda giat mengupayakan jalan untuk melakukan perjanjian perdamaian dengan Inggris guna memperoleh kembali wilayah koloninya. Usaha itu akhirnya berhasil dicapai pada 1802, di mana Inggris bersedia mengembalikan semua koloni yang didudukinya kecuali Seilon dengan syarat pihak Belanda bersedia membuka wilayahnya bagi perdagangan bebas. Syarat itu yang mempengaruhi Chasse, gubernur Makassar dalam mengambil kebijaksanaan di daerah koloni. Sebab jika Belanda tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut maka tanah-tanah koloni Belanda tetap berada di bawah kekuasaan Inggris. Itulah sebabnya pula Chasse berhati-hati mengambil

suatu keputusan tetapi bisa dibaca ketika memperbaiki keadaan pelabuhan Makassar. Setelah pelabuhan ini sudah diperbaiki, Chasse mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes Siberg (1801-1804), agar membuka pelabuhan itu bagi perdagangan bebas pada tahun 1803 (Poelinggomang, dkk., 2004:169-171).

Kesimpulan

Sulawesi Selatan pada abad XVII merupakan abad yang sangat dinamis dalam pergolakan politik dan perkembangan beberapa kerajaan lokal yang ada di daerah ini. Pada abad ini, ada kerajaan yang berhasil mencapai puncak kejayaan, tetapi sepanjang abad itu pula mengalami kehancuran yang paling mendasar, seperti yang dialami oleh Kerajaan Gowa-Tallo. Namun pada sisi lain, ada juga kerajaan yang secara totalitas mengalami pergolakan pada masa itu dan berhasil mengalami perkembangan yang pesat seperti Kerajaan Soppeng dan Bone. Dalam konteks abad XVII itu ada dua kerajaan di Sulawesi Selatan yang paling santer dibicarakan oleh para penulis, yaitu Kerajaan Gowa-Tallo dan Kerajaan Bone. Sebenarnya pandangan itu benar adanya, cuma tidak lengkap jika tidak memasukkan Kerajaan Soppeng. Lalu bagaimana dengan kerajaan lain selain tiga kerajaan itu, sesungguhnya hampir semua kerajaan lokal di Sulawesi Selatan terlibat dalam pergolakan politik abad XVII. Tetapi hanya dua yang melakukan persaingan dan rivalitas yang sangat ketat pada masa itu (Kerajaan Gowa-Tallo dan Kerajaan Bone).

Kerajaan Soppeng memang tidak sedang melakukan persaingan atau rivalitas dengan kerajaan lain secara nyata pada abad itu. Tetapi Kerajaan Bone yang menepatkan Kerajaan Soppeng dalam pusaran pergolakan politik pada abad itu. Hal itu terjadi karena Kerajaan Bone berhasil mengikat secara kekeluargaan Kerajaan

Soppeng, baik dalam perkawinan maupun dalam beberapa perjanjian. Dan Kerajaan Soppeng sangat kuat memegang janji terhadap Kerajaan Bone, terutama Perjanjian Tellumpoccoe. Kerajaan Bone juga menempatkan Kerajaan Soppeng dalam situasi yang sulit. Dimana pada saat pengerahan tenaga kerja yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa-Tallo dari beberapa kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone mengirim tenaga kerja bukan hanya dari Kerajaan Bone tetapi juga dari Kerajaan Soppeng. Celaknya pula, karena tenaga kerja dari Kerajaan Soppeng, ada beberapa tokoh dan bangsawan yang sangat berpengaruh ikut dalam rombongan tenaga kerja itu. tokoh dan bangsawan Kerajaan Soppeng yang dimaksud adalah *Arung Palakka*, *Arung Bila*, *Arung Appanang*, *Arung Citta* dan tokoh-tokoh lainnya.

Tokoh-tokoh Kerajaan Soppeng itulah yang memegang peran penting dalam pergolakan politik pada abad XVII di Sulawesi, baik pra Perang Makassar maupun Pascaperang Makassar. Perang tersebut tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada latar belakang yang mendorong atau jejak-jejak peristiwa yang mendahuluinya. Buntut awal dari perang tersebut selalu mengacu pada pengerahan tenaga kerja yang dikirim oleh Tobala'. Pra Perang Makassar setelah kematian Jennang Tobala' Kerajaan Bone dalam pertempuran, praktis Kerajaan Bone dalam suasana kevakuman, tetapi tokoh-tokoh dan bangsawan Kerajaan Soppeng itu berada dalam perjuangan yang sulit. Merekalah yang melakukan pelarian untuk mencari bantuan melawan kekuasaan dan penindasan Kerajaan Gowa-Tallo; merekalah yang menawarkan kerja sama dengan VOC untuk menaklukkan Kerajaan Gowa-Tallo; merekalah yang merancang dan membuat strategi dalam Perang Makassar; merekalah yang mengambil inisiatif menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekutu Gowa-Tallo di bagian utara dan selatan Makassar menjelang Perang Makassar; dan merekalah yang menjadi aktor utama dalam Perang Makassar, di samping sekutu-

sekutu lain dari VOC di pihak persekutuan VOC.

Sulawesi Selatan Pascaperang Makassar menghasilkan dua kekuasaan dan kekuatan besar sebagai pemenang dalam Perang Makassar, yaitu VOC dan Kerajaan Bone. Sementara Kerajaan Soppeng sudah tidak bernafsu lagi untuk ikut terlibat dalam pergolakan politik di Sulawesi Selatan. Sehingga Kerajaan Bone-lah yang sangat populer dan memegang supremasi kekuasaan politik di Sulawesi Selatan. Kerajaan Soppeng lebih memilih hidup dalam suasana ketenangan sebagaimana pada masa sebelum terjadi pergolakan politik.

Kekuasaan dan kekuatan Kerajaan Bone semakin besar karena sengaja dibangun dengan seksama. Sebab Pascaperang Makassar terjadi lagi persaingan yang sangat ketat antara Kerajaan Bone dengan VOC. Setelah Perang Makassar, VOC lebih banyak mengambil inisiatif dan mengatur Sulawesi Selatan, sehingga VOC memetahkan wilayah Sulawesi Selatan dalam beberapa wilayah pemerintahan. Kerajaan Bone dan Soppeng diberi status kerajaan sekutu, termasuk Kerajaan Gowa-Tallo, tetapi wilayah Kerajaan Gowa-Tallo diperkecil dan wilayah yang dibagi-bagi itu dijadikan wilayah penguasaan langsung VOC, termasuk ada kerajaan yang diberi status kerajaan pinjaman. Walaupun Kompeni Belanda melakukan pengaturan dan pembagian wilayah sebagaimana disebutkan di atas, namun tidak terlalu ditekankan dalam pelaksanaannya, tetapi lebih kepada tujuannya.

Situasi berlanjut sampai masa-masa berikutnya, sehingga kekuasaan Kompeni Belanda di Sulawesi Selatan mengalami pasang surut dan berlangsung berkepanjangan sampai masuknya kekuasaan Inggris pada 1811-1816. Kemudian kekuasaan Hindia Belanda berlanjut lagi sampai abad XIX. Sementara Kerajaan Soppeng selama masa itu tidak terlalu banyak diberitakan karena lebih banyak konsentrasi membangun kerajaannya secara internal. Dan memang

Kerajaan Soppeng dalam sejarah pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan lebih memilih suasana kedamaian seperti itu. Namun Kerajaan Soppeng bukanlah kerajaan kecil yang dapat disepelekan. Tetapi Kerajaan Soppeng sebagai salah satu kerajaan yang memiliki integritas dan memiliki andil besar pada abad XVII.

Rokomendasi

Tulisan ini merupakan salah satu tulisan sejarah lokal yang khusus mengkaji tentang pergolakan politik dan perkembangan Kerajaan Soppeng pada pra dan Pascaperang Makassar. Tulisan ini sangat penting karena tulisan tentang sejarah Kerajaan Soppeng abad XVII selama ini selalu ditempatkan sebagai pelengkap (bukan pemeran utama) dari Kerajaan Bone pada abad XVII, khususnya dalam Perang Makassar. Sementara dalam tulisan ini, malah menempatkan Kerajaan Soppeng sebagai pelaku utama dalam pergolakan politik pada pra dan Pascaperang Makassar. Untuk itu, melalui tulisan ini direkomendasikan:

1. Tulisan ini masih banyak kekurangannya, untuk itu diharapkan agar para sejarawan atau penulis sejarah lokal lebih menyempurnakannya. Tetapi harus lebih kritis dan mengedepankan fakta-fakta sejarah ketimbang subyektifitas belaka.
2. Diharapkan tulisan dapat dijadikan bahan ajar muatan lokal, bukan hanya untuk daerah Soppeng secara khusus saja, tetapi Sulawesi Selatan pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dkk. (editor), 1985. *Ilmu sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta, Gramedia
- . (editor). 1990. *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan*, Yogyakarta, LIPI dan Gadjah Mada University Press
- Andaya, Leonard Y. 2004. *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan abad ke-17*, Makassar, Inninawa
- Depdikbud. 1981. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang, Proyek inventarisasi dan dokumentasi sejarah nasional
- Departemen Dalam Negeri. 1991. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan. Ujung Pandang, Pemerintah Provinsi Daaerah Tingkat I Sulawesi Selatan*
- Gottschalk, Louis. 1982. (penerjemah Nugroho Notosusanto), *Mengerti sejarah*. Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Hamid, Pananrangi. 1991. "Sejarah Kabupaten Tingkat II Soppeng", Makassar, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang
- Kadir, Harun, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Makassar, Kerjasama BAPPEDA Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin
- Kartodirdjo, Sartono. 1988. *Pengantar sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium jilid I*. Jakarta, Gramedia
- . 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta, Gramedia
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta, Tiara Wacana dan Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Mappangara, Suriadi. 2003. *Kerajaan Bone Dalam Sejarah Politik*

Sulawesi Selatan Abad XIX. Makassar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

- Patunru, Abdurrazak Daeng. 1993. *Sejarah Gowa*, Ujung Pandang, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan
- Patunru, Abdurrazak Daeng. 1993. *Sejarah Bone*, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan
- Paeni, Mukhlis. (editor). 1986. *Dinamika Bugis Makassar*, Makassar: PT. Sinar Krida
- Poelinggomang, Edward L. dkk. 2004. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I*. Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan
- Poelinggomang, Edward L. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta, Ombak
- . 2005. "Sejarah Tanete Dari Agangnionjo Hingga Kabupaten Barru" pemerintah Kabupaten Barru
- Rafiuddin Nur, M. 2007. *Lontara'na Soppeng: Dari Kerajaan Kembar Menuju Kabupaten*, Makassar, Rumah Ide
- Ricklef, M.C. 1995. *Sejarah Indonesia Moderen*, cetakan kelima, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Surianingrat, Bayu. 1981. *Sejarah Pemerintahan Di Indonesia: Babak Hindia Belanda dan Jepang*, jilid I. Jakarta: Dewaruci Press
- Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta, Sinar Harapan
- Sutherland, Heather, dkk. 2004. *Kontinuitas dan Perubahan Dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, Yogyakarta, Ombak
- Scott, James C. 1989. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES,
- Wardaya T, Baskara. (ed). 2004. *Pembebasan Manusia: sebuah Refleksi multidimensional* Yogyakarta, Buku Baik



Bagian Ketiga

SOPPENG DI BAWAH KEKUASAAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA 1905-1942

Oleh: Muhammad Amir⁸

A. Pendahuluan

Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda semakin bergiat untuk memperluas wilayah dan kekuasaan kolonialnya di Sulawesi Selatan. Perluasan wilayah dan kekuasaan tersebut, bukan hanya bertujuan menguasai secara langsung seluruh daerah ini, melainkan juga untuk mencegah masuknya pengaruh politik bangsa asing lainnya pada kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Selain itu, juga dimaksudkan untuk melapangkan perluasan penanaman modal swasta Belanda di Sulawesi Selatan. Perluasan penanaman modal swasta Belanda tersebut, terutama ditujukan kepada daerah-daerah yang potensial bagi usaha pertanian, perkebunan, dan pertambangan (Harvey, 1989:45; Abduh, dkk. 1985: 93-96). Oleh karena itu, penguasaan secara langsung seluruh wilayah Sulawesi Selatan juga tidak terlepas dari upaya menciptakan “ketertiban dan ketentraman” guna menjamin keberhasilan usaha penanaman modal swasta Belanda di daerah Sulawesi Selatan.

⁸ Staf peneliti aspek kesejarahan pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan.

Dalam rangka perluasan wilayah dan kekuasaan tersebut, pemerintah Hindia Belanda mempersiapkan ekspedisi militer untuk menaklukkan dan memaksa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Terutama yang tidak bersedia menyerahkan kekuasaannya atau yang belum dikuasai secara langsung. Penyerahan kekuasaan itu ditandai dengan penandatanganan *korte verklaring* (pernyataan pendek) oleh para raja atau penguasa lokal di daerah ini, yaitu pernyataan tunduk, taat, dan patuh sepenuhnya di bawah kekuasaan Belanda (Poelinggomang, 2004:2).⁹ Pada waktu itu, kerajaan-kerajaan di daerah ini yang belum dikuasai secara langsung dan dianggap sebagai kerajaan sekutu atau pinjaman berdasarkan pembaharuan Kontrak Bungaya (1824), antara lain Kerajaan Luwu, Gowa, Bone, Wajo, Soppeng, Tanete, Barru, Konfederasi Ajattappareng (Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappang, dan Alitta), Konfederasi Massenrempulu (Enrekang, Maiwa, Duri, Kassa, dan Batulappa), dan Konfederasi Mandar (Balanipa, Sendana, Majene, Pambauang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang).¹⁰ Oleh karena sebagian kerajaan itu menolak pernyataan pendek, sehingga menjadi sasaran dari rencana ekspedisi militer Belanda pada 1905.

Ekspedisi militer Belanda tersebut, juga karena rakyat Sulawesi Selatan di bawah pimpinan raja-rajanya terkenal sebagai penentang yang gigih terhadap kekuasaan Belanda. Perlawanan rakyat Sulawesi Selatan dalam menentang kekuasaan Belanda, bukan hal yang baru tampak setelah ekspedisi militer Belanda pada 1905. Tetapi

⁹ Pada dasarnya isi *korte verklaring* tersebut, ialah pernyataan kesetiaan kepada Ratu Belanda dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, setuju untuk tidak mengadakan hubungan dengan kekuatan-kekuatan asing, dan berjanji untuk melaksanakan semua peraturan dan perintah yang sudah atau mungkin akan ditetapkan oleh Ratu, Gubernur Jenderal atau wakilnya. Dari pernyataan itu, tampak dengan jelas bahwa pemerintah Hindia Belanda bermaksud untuk menguasai secara langsung seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

¹⁰ Dalam perkembangannya Kerajaan Bone, Wajo, dan Tanete berubah menjadi kerajaan pinjaman (*leen voerstendom*).

jauh sebelumnya, yaitu sejak kehadiran dan usaha VOC (*Vreenigde Oost Indische Compagnie*) untuk menguasai perdagangan maritim di kawasan timur Nusantara pada abad ke-17, tindakan penolakan atau perlawanan terhadap VOC senantiasa terjadi. Bahkan menjelang akhir abad ke-19, ketika pemerintah Belanda mulai menampakkan keinginannya untuk menguasai seluruh Sulawesi Selatan, telah timbul banyak sekali gerakan perlawanan. Itulah sebabnya menjelang akhir abad ke-19, daerah ini dijuluki “pulau keonaran” (*de onrust eiland*) oleh Belanda (PaEni, dkk. 2002:2; Kadir, dkk. 1984:61).

Kenyataan itulah yang mendasari pemerintah Hindia Belanda melancarkan tindakan militer dalam memperluas wilayah dan kekuasaan kolonialnya di Sulawesi Selatan. Tindakan militer terhadap kerajaan-kerajaan yang berdaulat itu dikenal dengan “politik pasifikasi” (*pacificatie politiek*). Secara harafiah, politik pasifikasi berarti politik perdamaian. Namun di balik kebijakan itu, bahwa yang terpenting adalah bagaimana menguasai secara langsung seluruh wilayah Hindia Belanda. Sebab secara *de jure* wilayah Hindia Belanda berada dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, tetapi secara *de facto* sejumlah kerajaan masih dinyatakan merdeka dan berdaulat. Itulah sebabnya pelaksanaan politik pasifikasi itu diikuti dengan pengiriman ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang masih merdeka dan berdaulat yang dalam konsep pemerintahan kolonial diberi status kerajaan sekutu atau sahabat. Tindakan militer itu terlebih dahulu dilakukan terhadap Bone, sebab kerajaan ini bukan hanya memiliki pengaruh yang kuat dan gigih menentang rencana kebijakan pelabuhan wajib pajak di Sulawesi Selatan, melainkan juga menolak menandatangani pernyataan pendek (Kroesen, 1906: MvO).

Setelah Kerajaan Bone berhasil dikalahkan, pasukan Belanda kemudian mengarahkan serangannya kepada kerajaan-kerajaan yang telah membantu Bone dalam perlawanan terhadap pasukan

Belanda. Kerajaan Soppeng salah satu di antara sejumlah kerajaan yang memberikan bantuan pasukan kepada Bone pada pertempuran di Bajoe dan Pasempe. Selain itu, Soppeng juga memberikan bantuan berupa perbekalan dan jaminan pengamanan kepada raja Bone bersama laskarnya ketika mereka berada di daerah Citta (Soppeng). Itulah sebabnya ketika pasukan Belanda tiba di Soppeng, mereka segera mengirim pesan kepada datu Soppeng untuk menahan raja Bone. Oleh karena datu Soppeng tidak memenuhi permintaan itu, sehingga pasukan Belanda melancarkan serangan terhadap Kerajaan Soppeng. Meskipun laskar Soppeng memberikan perlawanan atas serangan itu, namun pasukan Belanda berhasil mengalahkan laskar Soppeng dan Datu Soppeng Sitti Zaenab Arung Lapajung terpaksa menerima *korte verklaring* (pernyataan pendek) pada 28 September 1905 (Anonim, 1915:60; Patunru, 2004:113). Kekalahan itu berakibat pemerintah Kerajaan Soppeng kehilangan kedudukan kekuasaannya, yang kemudian digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Gambaran ringkas tersebut, tidak hanya memberikan petunjuk tentang dinamika kesejarahan Kerajaan Soppeng, tetapi juga tentang penataan dan pelaksanaan pemerintahan periode kolonial Belanda di daerah itu. Karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkapkan dan menjelaskan dinamika kesejarahan di era kolonial. Sebab, periode itu amat penting dalam lembaran sejarah Indonesia, namun masih kurang diketahui. Selain itu, juga karena berbagai persoalan otonomi daerah yang terjadi akhir-akhir ini, tampaknya tidak terlepas dari latar belakang sejarah daerah itu, terutama pada periode kolonial. Di samping itu, juga dapat menambah referensi atau nuansa lokal (Sulawesi Selatan) dalam sejarah nasional yang masih terasa sepi hingga kini. Kenyataan itulah yang mendorong saya untuk meneliti lebih lanjut tentang “Soppeng

di Bawah Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda 1905-1942". Sebab bagi penulis, periode itu tidak saja memiliki makna sejarah yang belum terungkap secara utuh, tetapi juga dapat memberikan pengetahuan yang amat penting dalam membangun karakter dan jati diri bangsa serta dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Kajian tentang penataan Soppeng pada periode kolonial sesungguhnya sangat kompleks. Sebab, tidak saja berkaitan dengan perubahan politik dan hubungan kekuasaan, tetapi juga tidak terlepas dari kepentingan ekonomi dan sosial budaya. Namun, hal ini belum banyak mendapat perhatian dari peneliti dan sejarawan. Kajian yang ada tentang itu,¹¹ hanya mengungkapkan secara sepintas, sehingga periode itu belum terungkap secara utuh. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengungkap dan menjelaskan tentang dinamika kesejarahan daerah itu pada periode kolonial. Bertolak dari uraian itu, maka yang menjadi pokok persoalan dalam kajian ini adalah bagaimana penataan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah Soppeng pada periode kolonial?

Mengacu pada pokok persoalan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan berbagai hal menyangkut dinamika kesejarahan daerah itu, terutama pada periode kolonial. Sebab, persoalan-persoalan yang melatari penataan dan perubahan sosial yang menyertainya harus dijelaskan dan tidak dapat diabaikan dalam memahami secara utuh dinamika kesejarahan daerah

¹¹ Misalnya, Hamid, Pananrangi. 1991. *Sejarah Kabupaten Daerah TK. II Soppeng. Ujung Pandang: Laporan Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional*; Patunru, Abdurrazak Daeng. 2004. *Soppeng*, dalam *Bingkisan Patunru, Sejarah Lokal Sulawesi Selatan*. Makassar: Pusat Kajian Indonesia Timur bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin; dan Sumange, Hary. 2003. *Sejarah Soppeng*. Soppeng: Yayasan Bina Budaya Soppeng. Selain itu, terdapat pula sejumlah tulisan dari pejabat Belanda, misalnya *Memori van Overgave Onder-afdeeling Soppeng* oleh Gezahheber Soppeng (Anonim), 28 Februari 1927; *Memori van Overgave Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden* oleh H.N.A. Swart (1908); *Memori van Overgave Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden* oleh Quarles, de Quarles (1910).

itu pada periode tersebut. Selain itu, yang tidak kalah penting pula untuk diungkapkan dan dijelaskan adalah tentang terjadinya sejumlah gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial pada periode itu.

Oleh karena itu, tampak bahwa penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkapkan apa, di mana, kapan, dan bagaimana penataan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah itu pada periode kolonial, tetapi juga untuk mengungkapkan dan menjelaskan mengapa terjadi resistensi atau gerakan perlawanan terhadap Belanda. Persoalan-persoalan yang terkandung di dalamnya mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan sebab-musabab dan faktor-faktor kondisional yang mendasari terjadinya gerakan perlawanan terhadap Belanda.

Berdasarkan persoalan penelitian dan tujuan penelitian tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis dan kelembagaan. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah bahan referensi dan memperkaya khasanah historiografi Indonesia, khususnya sejarah lokal di Indonesia. Sebab, dalam sejarah nasional hingga kini masih kurang proporsional nuansa lokalnya, khususnya di luar Jawa. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk kepentingan kajian lebih lanjut.

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara, terutama di dalam membangun jati diri dan menggalang persatuan bangsa. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah di dalam menentukan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan pada era otonomi daerah dewasa ini.

Secara kelembagaan, yaitu tersedianya data dan informasi tentang dinamika kesejarahan, khususnya menyangkut penataan Soppeng pada periode kolonial di Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya

Sulawesi Selatan, baik untuk kepentingan masyarakat umum, maupun untuk kajian lebih lanjut. Perlu disadari bahwa realitas dewasa ini merupakan kelanjutan dari masa lalu. Itulah sebabnya para sejarawan sering menampilkan pernyataan, bahwa studi sejarah tidak hanya suatu dialog antara sejarawan dengan masa lalu, tetapi seharusnya dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia (Carr, 1986; Poelinggomang, dkk. 2004:13).

Penggunaan metode dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu keharusan. Dalam suatu penelitian pada hakekatnya dapat menggunakan berbagai macam cara atau metode.¹² Penggunaan metode tersebut, tergantung dari jenis, persoalan, dan tujuan penelitian (Sumadi, 1992:15). Sejarah sebagai bahagian dari ilmu-ilmu sosial yang mengkaji peristiwa yang terjadi pada masa lampau, memiliki metode tersendiri yang disebut metode sejarah (*historical method*) yang meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian sejarah. Secara tematik dapat dikategorikan sebagai sejarah lokal,¹³ dengan fokus perhatian pada penataan Soppeng periode kolonial 1905-1942. Oleh karena itu, metode yang dipergunakan adalah metode penelitian sejarah.¹⁴ Pada intinya metode

¹² Sebenarnya metode mempunyai hubungan erat dengan metodologi, namun dapat dibedakan antara keduanya. Menurut Sartono Kartodirdjo, bahwa metode dan metodologi adalah dua fase kegiatan yang berbeda untuk tugas yang sama. Metode adalah "bagaimana memperoleh pengetahuan" (*how to know*), sedangkan metodologi adalah "mengetahui bagaimana harus mengetahui" (*to know how to know*). Dalam kaitannya dengan ilmu sejarah, metode sejarah adalah "bagaimana mengetahui sejarah", sedangkan metodologi adalah "mengetahui bagaimana mengetahui sejarah" (Kartodirdjo, 1992:ix; Sjamsuddin, 2007:14).

¹³ Sejarah lokal dimaksudkan sebagai suatu peristiwa masa lalu dari sekelompok komunitas yang hidup dan berkembang di daerah geografi tertentu. Mengenai batas-batas dan asal mula sejarah lokal serta maknanya bagi penulisan sejarah nasional (Abdullah, 1985:310-323).

¹⁴ Menurut Gilbert J. Garraghan, bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara sistematis, menilainya, dan mengajukan sintesa secara tertulis (Garraghan, 1957:33). Sementara Louis Gottschalk merumuskan metode penelitian sejarah sebagai suatu

penelitian sejarah ini, meliputi *heuristik* (mencarian dan pengumpulan sumber), kritik (analisa sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi atau penulisan sejarah (Notosusanto, 1978:18). Prosedur kerjanya dilakukan secara sistematis. Maksudnya, kritik dilakukan setelah data terkumpul, begitu pula interpretasi dilakukan setelah melalui tahap penilaian atau kritik sumber.

Prosedur penelitian mengikuti tahapan-tahapan kegiatan penelitian sejarah dan menyajikan dengan berpedoman pada prinsip penulisan sejarah, yaitu secara kronologis. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber, baik berupa dokumen dan sumber-sumber sejarah lainnya yang tersimpan pada lembaga kearsipan, maupun berupa naskah *lontarak*, surat kabar, majalah, hasil penelitian, dan sumber tertulis lainnya pada lembaga perpustakaan dan sejumlah instansi pemerintah yang bergiat dalam pendataan sejarah dan kebudayaan daerah. Antara lain, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Balai Bahasa, Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala, dan Museum.

Selain itu, juga dilakukan penelitian di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengumpulkan sumber-sumber penulisan sejarah dan bahan dokumenter lainnya yang tersimpan pada instansi pemerintah kabupaten, lembaga swasta, dan koleksi-koleksi pribadi. Di samping itu, dilakukan pula penelitian terhadap tradisi-tradisi lisan. Sebab, pada umumnya rakyat yang menyimpan tradisi lisan, selalu menuangkan kenyataan historis dan landasan kultur kehidupan politik dan sosial mereka dalam bentuk cerita rakyat dan sejenisnya. Hal ini

prosedur dalam menyusun detail-detail yang disimpulkan dari dokumen menjadi suatu kisah sejarah yang saling berkaitan (Gottschalk, 1986:18).

dimaksudkan untuk menghindari sikap memarjinalkan kenyataan historis yang tidak tertuang dalam naskah (dokumen dan manuskrip).

Dokumen dan keterangan yang dikumpulkan tersebut, sebelum diinterpretasi dan digunakan dalam penyusunan naskah, dikritik terlebih dahulu untuk memastikan otentitas dan validitasnya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan keterangan dan ulasan yang bermanfaat dan objektif, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Langkah selanjutnya, adalah melakukan penafsiran terhadap sumber yang telah dikritik atau lulus seleksi sebagai suatu fakta. Penafsiran ini dilakukan dengan jalan merangkaikan berbagai fakta dan memberikan penjelasan terhadap fakta-fakta itu secara maksimal dan objektif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan arti dan makna fakta itu dalam rangka penyusunan naskah hasil penelitian.

Tahapan terakhir dari seluruh rangkaian penelitian ini adalah penulisan naskah hasil penelitian (historiografi) dalam bentuk kisah sejarah yang bersifat deskripsi analitis, tanpa mengabaikan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Oleh karena itu, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peristiwa itu dan perubahan sosial yang menyertainya harus dijelaskan faktor-faktor penyebabnya. Berbeda halnya dengan penulisan yang bersifat deskripsi narasi, yang hanya menampilkan gambaran kisah sejarah dalam urutan waktu (kronologis). Sebab, disadari bahwa penulisan sejarah yang hanya bersifat deskripsi narasi, kurang memberikan kepuasan bagi pemahaman peristiwa dan perubahan sosial yang menyertainya.

B. Sekilas Tentang Kerajaan Soppeng

Soppeng merupakan salah satu dari sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan, dengan ibu kota Watansoppeng. Secara astronomi terletak

antara 4° Lintang Selatan dan 4° 32' Lintang Selatan, serta antara 119° 42' 18" Bujur Timur dan 120° 13' Bujur Timur dengan luasnya sekitar 1400 km². Sedangkan letak administrasinya adalah berbatasan dengan:

- Sebelah utara dengan Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Wajo
- Sebelah timur dengan Kerajaan Wajo dan Kerajaan Bone
- Sebelah selatan dengan Kerajaan Bone
- Sebelah barat dengan Kerajaan Tanete dan Kerajaan Barru

Dalam catatan naskah lokal yang disebut *lontarak* disebutkan bahwa masyarakat Soppeng berasal dari dua tempat, yaitu Sewo dan Gattareng. Masyarakat yang berasal dari Sewo menempati daerah yang disebut Soppeng ri Aja (Soppeng Bagian Barat). Sementara masyarakat yang berasal dari Gattareng menempati daerah yang disebut Soppeng ri Lau (Soppeng Bagian Timur). Soppeng ri Lau terdiri atas sejumlah *wanuwa* atau kampung, di antaranya Salotungo, Lompoe, Kubba, Panincong, Talagae, Attasalo, Mangkuta, Maccile, Watuwatu, dan Akkampung. Sedangkan yang termasuk Soppeng ri Aja ialah Pesse, Seppang, Pising, Launga, Mattabulu, Ara, Lisu, Lawa, dan Madello ri Lau. Sementara Tinco, Cenrana, Salokaraja, Malaka, Mattoanging, termasuk ke dalam Soppeng ri Lau dan Soppeng ri Aja (Invetaris Arsip Soppeng, 2006:vii).

Sebelum terbentuk menjadi sebuah kerajaan sekitar awal abad ke-14, terdapat sejumlah kelompok kaum yang dipimpin oleh seorang kepala *wanuwa* yang digelar *matowa* di Soppeng. Kelompok kaum itu mendiami sebuah wilayah yang disebut *wanuwa* atau gabungan kampung (desa), sesuai dengan besar kecilnya kelompok kaum tersebut. Semula terdapat 60 *wanuwa* di Soppeng, yang terdiri atas 30 *wanuwa* di Soppeng ri Aja dan 30 *wanuwa* di Soppeng ri Lau. Dalam *lontarak wanuwa-wanuwa* itu dikategorikan atas tiga jenis, yaitu Wanuwa Palili Lompo (Lamuru, Mario ri Wawo, Goagoa,

Pattojo, Ujumpul, Lompengeng, Baringeng, Tanatengnga, Appanang, Belo, Ganra, Bakke, Leworeng, Mario ri Awa, dan Citta); Wanuwa Palili Biccu (Jampu, Galung, Gattareng, Bua, Beccoing, Palakka, Umpungeng, Bulumatanre, Kampiri, Kading, Balusu, dan Kirukiru); Wanuwa Napanoe Rakkalana (Sompe, Bila, Salotungo, Kubba, Pao, Panincong, Maccope, Maccile, Mangkutu, Akkampung, Ujung, Cenrana, Pacciro, Awo, Tellang, Pasaka, Kajuara, Areppang, Tinco, Madello ri Lau, Tappareng, Botto, Seppang, Pesse, Ucing, Langga, Weccoing, Kulo, Watu Laia, Ara, Mattobulu, Cirowali, Uddungeng, Maingeng, dan Lisu (Hadrawi, 2016:156).¹⁵

Pada umumnya orang berpendapat bahwa orang-orang Soppeng pada mulanya berasal dari negeri Luwu, yaitu sebuah kerajaan yang tertua di Sulawesi Selatan. Pada zaman dahulu Datu Luwu atau utusannya selalu pergi ke Soppeng untuk menyelesaikan berbagai kesulitan yang tidak dapat diselesaikan oleh para *matowa* di Soppeng. Menurut legenda, Arung Bila bertugas sebagai wakil Datu Luwu yang sedapat mungkin dapat menyelesaikan persoalan-persoalan, jika datu Luwu tidak ada di Soppeng. Suatu ketika tidak ada datu ataupun utusannya yang mengunjungi Soppeng selama tujuh tahun. Selama itu pula tidak turun hujan di Soppeng, sehingga penduduk tidak dapat mengerjakan sawah dan ladangnya yang mengakibatkan terjadinya kelaparan. Karena itu Arung Bila memprakarsai pertemuan dengan para *matowa* baik dari Soppeng ri Aja maupun dari Soppeng ri Lau untuk membicarakan dan mengambil langkah-langkah agar rakyat Soppeng secara keseluruhan dapat diselamatkan dari bahaya kelaparan (Emanuel, 1948:180; Patunru, 2004:94; Nur, 2007:23).

¹⁵ Dalam perkembangannya jumlah *wanuwa-wanuwa* tersebut mengalami perubahan, sebab ada *wanuwa* tidak dikenal lagi karena ditinggalkan oleh penduduknya dan ada pula yang mengalami pemekaran wilayah sehingga muncul *wanuwa-wanuwa* baru. Dalam catatan pemerintah Hindia Belanda pada 1930, tercatat 397 *wanuwa* atau kampung di Soppeng (Arsip Celebes, No. 9).

Pertemuan antara para *matowa* tersebut, dilaksanakan di tempat terbuka, di bawah pohon besar. Ketika rapat sedang berlangsung, terdengarlah kegaduhan kicauan dua ekor burung kakatua di atas pohon. Hal itu menarik perhatian para peserta pertemuan. Mereka melihat, bahwa kedua ekor burung itu sedang memperebutkan setangkai padi. Arung Bila memerintahkan menghalau burung kakatua itu. Namun beberapa *matowa* berusaha mengikutinya untuk mengetahui ke mana burung itu membawa padi tersebut. Ternyata kedua ekor burung itu terbang ke utara dan sampai pada sebuah hutan di daerah Leworeng. Kedua ekor Burung itu menghilang dalam hutan, yang oleh penduduk dinamai Sekkanyili. Para *matowa* yang mengikuti burung itu, juga masuk ke dalam hutan dan mendapati beberapa orang pada suatu tempat terbuka dalam hutan. Seorang dari mereka berpakaian indah, duduk di atas sebuah batu, dinaungi oleh sebuah payung besar yang dipegang oleh tiga orang sebagai pengikut. Arung Bila bertanya kepada mereka, siapakah gerangan mereka itu. Seorang dari para pengikut itu menjawab, bahwa orang yang duduk di atas batu itu adalah *manurunge* (orang yang diturunkan dari kayangan). Itulah sebabnya orang itu disebut dengan *Petta Manurunge ri Sekkanyili* (Emanuel, 1948:181; Patunru, 2004:95).

Para *Matowa* mermufakat mengantar *Petta Manurunge ri Sekkanyili* ke rumah *Matowa Tinjo* yang terletak tidak jauh dari hutan tersebut. Dalam perjalanan ke rumah *Matowa Tinco*, *Petta Manurunge* memberitahukan kepada Arung Bila, bahwa ia memiliki sepupu yang juga turun dari kayangan, yang bernama *Manurunge ri Gowarie* di *Libureng* (*Mario ri Wawo*). Atas perintah dari Arung Bila beberapa *Matowa* berangkat ke *Libureng* menjemput *Manurunge ri Gowarie* ke rumah *Matowa Tinco*. Ketika *Manurunge ri Gowarie* tiba di rumah *Matowa Tinco*, Arung Bila bermusyawarah dengan para *matowa* untuk menawarkan kepada *Petta Manurunge ri Sekkanyili* menjadi datu di

Soppeng ri Aja dan kepada *Petta Manurunge ri Gowarie* sebagai datu di Soppeng ri Lau. Kedua *Tomanurung* itu menerima baik tawaran tersebut, sehingga *Petta Manurunge ri Sekkanyili* diangkat menjadi Datu Soppeng ri Aja dan *Petta Manurunge ri Gowarie* diangkat menjadi Datu Soppeng ri Lau (Emanuel, 1948:181).

Datu Soppeng ri Aja dibantu oleh Arung Bila sebagai *perewa ade* (pemangku hadat) yang mendampingi datu atau raja di dalam menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan Datu Soppeng ri Lau didampingi oleh Matowa Botto sebagai *parewa ade* dalam menjalankan roda pemerintahan, yang kemudian digelar dengan Arung atau Datu Botto. Kedua datu (Soppeng ri Aja dan Soppeng ri Lau) tersebut merupakan dwi tunggal dengan pengertian bahwa mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mereka berkuasa langsung dalam daerahnya masing-masing, tetapi mereka bersama-sama memikul tanggung jawab terhadap keseluruhan Soppeng. Dalam sumber lokal yang bersumber dari *lontarak* disebutkan bahwa *duwa arung na seddimi ata*, artinya dua datu atau raja tetapi hanya satu rakyat (Emanuel, 1948:182; Nur, 2007:24).

Kedua datu bersama para pendampingnya tersebut, merupakan pelaksana pemerintahan yang pertama untuk seluruh Kerajaan Soppeng, yaitu *Arung Eppae ri Soppeng* (raja empat di Soppeng). Dalam perkembangannya jumlah anggota pemerintahan bertambah menjadi lima orang, sehubungan dengan diangkatnya seorang *matowa* sebagai *parewa ade* yang diberi gelaran Arung Ujungmpuluq. Kemudian diangkat lagi seorang *parewa ade* yang digelar Arung Salotungo, sehingga menjadilah empat *parewa ade*. Selanjutnya ditambah lagi tiga orang anggota pemerintahan. Ketiga pejabat baru yang diangkat itu bergelar *Pabbicara*, yaitu Arung Siddo, Arung Massewali, dan Arung Jampu. Sementara keenam puluh *matowa* terbagi dua, yaitu tiga puluh *matowa* langsung di bawah kekuasaan Datu Soppeng ri Aja dan tiga

puluh *matowa* lainnya di bawah Datu Soppeng ri Lau (Emanuel, 1948:182; Patunru,2004:96).

Datu Soppeng ri Aja *Manurunge ri Sekkanyili* yang dikenal dengan nama La Temmamala, memperistrikan *Petta Manurunge ri Gowarie*, Datu Soppeng ri Lau. Perkawinan tersebut makin merapatkan hubungan kekeluargaan di Kerajaan Soppeng. Keturunan dari perkawinan kedua *Tomanurung* inilah yang menjadi cikal bakal raja-raja atau datu Soppeng berikutnya. Pada masa pemerintahan La Mataesso sebagai Datu Soppeng ri Aja terjadi peselisihan dengan saudara sepupunya La Makkaroda Datu Soppeng ri Lau, sehingga terjadi perang saudara yang berakhir dengan kemenangan La Mataesso. La Makkaroda yang kalah dalam peperangan itu, terpaksa meninggalkan negerinya dan pergi ke Bone. La Makkaroda kemudian kawin dengan We Tenripakkuwa putri dari Arumpone La Ulio Botee Matinroe ri Itterung (raja Bone yang keenam). Atas kemenangan La Mataesso dalam peperangan itu, sehingga ia menguasai seluruh Soppeng. Kerajaan Soppeng ri Lau dan Soppeng ri Aja digabungkan menjadi satu yaitu Kerajaan Soppeng. La Mataesso menjadi datu atas seluruh Soppeng dengan gelaran Puang Lipue (Patuntu, 2004:98; Nur, 2007:63).

Setelah La Mataesso wafat, maka yang menggantikannya ialah saudara kandungnya yang bernama La Sekati Tossawangmegga Mallajange ri Asseleng sebagai Datu Soppeng. La Sekati kemudian digantikan oleh kemanakannya yaitu La Mappaleppe Pattolae, putra dari La Mataesso. La Mappaleppe Pattolae yang juga digelar Puang Lipue yang bersama-sama dengan Arumpone La Tenrirawe Bongkanngge, dan Arung Matowa Wajo yang bernama La Mungkace To Udamang membentuk Persekutuan Tellumpoccoe (Bone, Wajo, dan Soppeng) di Timurung pada 1582 (Sjarifuddin, 1989:304). Persekutuan ini melahirkan *Lamumpatue ri Timurung* (Perjanjian

di Timurung). Tujuannya adalah menjalin kerjasama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bersama di kawasan tersebut. Selain itu, juga untuk menentang ekspansi Kerajaan Gowa, khusus terhadap ketiga kerajaan itu dan terhadap kerajaan-kerajaan lainnya.

Kerajaan Gowa pada waktu itu di bawah kendali Manggorai Daeng Mammata Karaeng Bontotangkasa senantiasa memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaannya. Itulah yang mendasari terjadinya perjanjian yang ditandai dengan menanam batu (*lamumpatu*), yang melahirkan aliansi tiga kerajaan (*tellum-poccoe*). Hal ini membuat Raja Gowa bertambah murka terhadap ketiga kerajaan yang bersekutu itu. Dalam tahun 1583 Gowa menyerang Wajo, akan tetapi serangannya itu tidak berhasil. Dalam tahun 1590, Raja Gowa I Manggorai Daeng Mammata Karaeng Bontotangkasa berusaha lagi menyerang Wajo, akan tetapi usahanya itu gagal lagi karena sewaktu baginda naik perahu menuju ke Parepare, tiba-tiba dalam pelayaran, tepatnya di depan Upuq Kassi (Tanete) baginda diamuk oleh seorang di dalam perahu itu, sehingga baginda meninggal dunia. Oleh karena itulah, baginda disebut Karaeng Tunijallok (raja yang diamuk).

Kerajaan Soppeng sebagai anggota Tellumpoccoe selalu berperan aktif membantu Wajo dan Bone dalam menghadapi serangan-serangan yang dilancarkan Gowa terhadap Wajo dan Bone. Setelah Puang Lipue La Mappalleppe Pattoloe wafat, maka baginda digantikan oleh putranya yang bernama Beoe, sebagai Datu Soppeng yang keempat belas. Pada masa pemerintahan baginda itulah, yakni dalam tahun 1609 Raja Gowa Sultan Alauddin datang ke Soppeng dengan laskarnya untuk menyebarkan agama Islam di Soppeng. Sebelumnya, Raja Gowa, yang sejak tahun 1605 memeluk agama Islam, terlebih dahulu menyerukan kepada raja di tanah-tanah Bugis, seperti Sidenreng, Soppeng, Wajo, Bone, dan lain-lainnya, untuk mengikuti

jejak Raja Gowa dan Raja Tallo menerima Islam sebagai agamanya. Akan tetapi raja yang bersangkutan acuh tak acuh memenuhi seruan Raja Gowa itu, sehingga Raja Gowa terpaksa mengangkat senjata terhadap kerajaan-kerajaan yang tetap mempertahankan kepercayaan lamanya.

Datu Soppeng Beoe mulai memeluk agama Islam dalam tahun 1609. Bagindalah yang pertama-pertama di Soppeng memeluk agama Islam. Setelah *Beoe* wafat, baginda digantikan oleh kemanakannya, yakni La Tenribali sebagai Datu Soppeng yang kelima belas. Baginda mempermaisurikan We Bumbungeng Dasajo. Datu Soppeng La Tenribati adalah putra yang lahir dari perkawinan antara Arung Mampu La Maddusila (digelar Mammesampatue) dengan We Tenrigella saudara kandung dari Datu Soppeng Beoe dan putri dari La Mappaleppe Pattoloe.

Setelah Bone di bawah kekuasaan Gowa selama hampir 17 tahun lamanya, Tobala yang pada waktu itu menjadi *jannang* (*regent*) di Bone, memberontak terhadap kekuasaan Gowa pada Agustus 1660. Perlu dikemukakan bahwa Bone mulai berada di bawah kekuasaan Gowa pada tahun 1664, ketika La Maddaremmeng Matinroe ri Bukaka menjadi raja di Bone. Oleh karena baginda mengalami kekalahan dalam perang, sehingga ia ditangkap dan ditawan di Gowa. Turut pula ditawan ketika itu adalah kakek dan ayah dari La Tenritatta To Apatunru Datu Mario ri Wawo karena membantu Raja Bone La Maddaremmeng dalam perang pembebasan budak. Itulah sebabnya ketika Tobala dan La Tenritatta To Apatunru Datu Mario ri Wawo (kemudian lazim disebut Arung Palakka Petta Malampee Gemmena) berusaha membebaskan Bone dan Soppeng dari kekuasaan Gowa. Pemberontakan ini dibantu oleh Datu Soppeng La Tenribali yang merupakan paman dari La Tenritatta To Apatunru.

Raja Gowa Sultan Hasanuddin mengirim laskar Gowa yang kuat ke Bone untuk menumpas pemberontakan dalam bulan itu juga. Laskar Bone dan laskar Soppeng yang semuanya berjumlah sekitar 11.000 orang banyaknya berada di bawah pimpinan Tobala dan La Tenritatta To Apatunru. Atas serangan itu, terjadi pertempuran antara laskar Gowa dengan laskar Bone dan Soppeng di Lamuru (Bone). Di sana laskar Gowa dikepung oleh laskar Bone dan Soppeng. Sementara itu laskar Wajo sebagai sekutu setia dari Gowa menyerbu masuk ke daerah Soppeng untuk membantu laskar Gowa. Oleh sebab itu maka laskar Bone dan Soppeng terpaksa mengundurkan diri dari Lamuru. Laskar Gowa di bawah pimpinan dari Karaeng Sumanna sebagai jenderal dari angkatan perang Kerajaan Gowa, menyerbu masuk ke daerah Bone. Pertempuran-pertempuran di Bone Bagian Utara (Mampu, Sailong, dan Timurung) antara laskar Gowa-Wajo dengan laskar Bone-Soppeng terjadi dengan sengit. Dalam pertempuran sengit di daerah tersebut Tobala tewas pada 11 Oktober 1660.

Dalam sumber lain disebutkan bahwa kekalahan Bone atas Gowa –Tallo (Makassar) di Cimpu (1643) dan Pasempe pada 1645, bukan hanya berimplikasi terhadap Kerajaan Bone sebagai daerah taklukan Kerajaan Makassar, tetapi juga mengakibatkan Raja Bone La Maddaremmeng dan La Tenriaji sekeluarga bersama sejumlah pembesar kerajaan dan bangsawan yang turut dalam peperangan ditangkap dan ditawan. Termasuk keluarga La Tenritatta dari Soppeng ditangkap dan diasingkan ke Siang kemudian dipindahkan ke Makassar. Mereka berada di bawah pengawasan Mangkubumi Karaeng Pattingalloang. Umur La Tenritatta masih belia sekitar sebelas tahun dan ia dibesarkan dalam lingkungan istana Karaeng Pattingalloang. Dalam lingkungan istana ia bertugas sebagai pembawa sirih pinang dan bebas bergaul dengan pemuda-pemuda bangsawan Makassar termasuk Sultam Hasanuddin. La Tenritatta juga dikenal

dengan nama Daeng Serang, nama yang diberikan oleh Karaeng Pattingalloang. Menurut riwayat La Tenritatta sangat disenangi karena berkepribadian kuat, cerdas, gagah, dan simpatik. Ketika Karaeng Pattingalloang wafat pada 15 September 1654, Karaeng Karunrung menggantikan ayahnya sebagai Mangkubumi Kerajaan Makassar yang watak dan perangnya sangat jauh berbeda. La Tenritatta pun beralih ke tangan Karaeng Karunrung dan sebagai konsekuensinya tentu saja merasakan perbedaan perlakuan yang sangat signifikan (Kamaruddin, 1986:117; Jumadi, 2010:18).

Sementara itu, rakyat Bone di bawah kekuasaan Makassar semakin mengalami penderitaan seiring dengan jatuhnya benteng Panakukang, yakni salah satu benteng pertahanan Makassar ke tangan VOC pada 12 Juni 1660. Oleh karena Mangkubumi Karaeng Karunrung memerintahkan kepada *Jennang* Tobala Arung Tanete untuk mengerahkan sebanyak sepuluh ribu orang dari Bone ke Makassar. Mereka diperintahkan untuk menggali parit dan membuat kubu-kubu pertahanan di sepanjang pantai sekitar Sombaopu. La Tenritatta mendengar dan melihat sendiri kondisi orang-orang Bone yang dipekerjakan secara paksa dan diperlakukan sebagai budak. Perlakuan terhadap mereka sangat kasar dan dipaksa bekerja dari pagi sampai petang. Laksana berpacu dengan waktu karena pekerjaan sudah harus rampung sebelum musim hujan pada November. Di antara mereka tidak sedikit yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia akibat pekerjaan yang keras itu. Mereka yang mencoba melarikan diri, mendapat hukuman berat apabila tertangkap. Karena semakin banyak yang melarikan diri, maka para tawanan perang yang terdiri atas bangsawan Bone dan Soppeng dikerahkan untuk mengganti mereka. Dalam pekerjaan seperti inilah nenek dan ayah La Tenritatta tewas dibunuh karena melawan perlakuan itu. Bahkan La Tenritatta pun kemudian diperintahkan turut serta dan dipaksa bekerja dalam

rangka penyelesaian penggalian parit atau kanal yang dirancang untuk memisahkan benteng Panakukang yang diduduki oleh VOC dengan benteng Sombaopu yang menjadi pusat pertahanan dan pemerintahan Kerajaan Makassar (Patunru, 1989: 126; Andaya, 2004:62; Nuryati, 2012:159).

Perlakuan tersebut menimbulkan dampak psikologis terhadap La Tenritatta dan sebagai realisasinya ia bersumpah utang darah dibayar darah. Untuk itu maka disusunlah rencana pemberontakan bersama *Jennang Tobala Arung Tanete*, dan para pimpinan (*ponggawa*) lainnya. Rencana itu mulai terlaksana ketika diadakan pesta panen di Tallo pada Agustus 1660. Sultan Hasanuddin dan para pembesar kerajaan lainnya meninggalkan istana menghadiri pesta tersebut. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh La Tenritatta dan bangsawan-bangsawan Bugis lainnya beserta para pekerja baik dari Bone maupun Soppeng melarikan diri dari Makassar kembali ke kampung halamannya.¹⁶ Empat hari kemudian, mereka tiba di Lamuru. La Tenritatta segera mengadakan konsolidasi dan mengirim pesan kepada Datu Soppeng La Tenribali, sedangkan Tobala Arung Tanete meneruskan perjalanan ke Bone (Watampone) menemui dewan *Ade Pitu* Kerajaan Bone dan menyusun kekuatan. Beberapa hari kemudian La Tenritatta, La Tenribali, dan Tobala bertemu di Attapang (Mampu). Pada pertemuan yang diselenggarakan di atas rakit perahu di Attapang (*pincara lophie ri Attapang*) itu, dihadiri pula sejumlah bangsawan tinggi dari masing-masing pihak. Di antaranya La Maddusila Arung Mampu dan Arung Bila (ayah Daeng Mabela) pada pihak Datu Soppeng La Tenribali; anggota dewan *Ade Pitu* (Arung Tibojong dan Arung Ujung), Arung

¹⁶ Berdasarkan *Lontarak Bilang Raja Gowa dan Tallok*, bahwa *Jennang Tobala* bersama para pekerja kembali ke Bone pada 7 Agustus 1660 (Kamaruddin, 1986:123; Andaya, 2004: 62). Sementara sumber lain menyebutkan bahwa La Tenritatta bersama Tobala melarikan diri dari Makassar dan kembali ke Bone pada pertengahan September 1660 (Patunru, 1989:129; Ali, 1976: 5).

Kaju, Arung Pannyili, Arung Cabalu, dan Daeng Pabila pada pihak Tobala Arung Tanete; Arung Appanang, Arung Belo, Daeng Mabela (putra Arung Bila), dan Datu Citta pada pihak La Tenritatta (Qahhar, 2010:64; Patunru, 1989:129).

Pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah bangsawan tinggi dari Bone dan Soppeng di Attapang tersebut, bukan hanya melahirkan kesepakatan antara Kerajaan Bone dengan Soppeng untuk bersatu padu dalam perjuangan melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Tetapi juga mengangkat La Tenritatta dan Tobala sebagai pimpinan tertinggi perlawanan Bone dan Soppeng terhadap Makassar. Selain itu, dewan *Ade Pitu* Kerajaan Bone juga mengumumkan pengangkatan La Tenritatta menjadi *arung* (raja) di Palakka, mewarisi neneknya Sultan Adam La Tenriruwa Arung Palakka Matinroe ri Bantaeng. Sejak itu La Teritatta lebih dikenal dengan nama Arung Palakka sehingga nama itu yang digunakan dalam pembahasan selanjutnya. Setelah pertemuan itu, Arung Palakka dan Tobala segera menyusun kekuatan untuk memperkuat markas perlawanan yang dipusatkan di Lamuru dengan kekuatan sekitar 11.000 personil (Petta Nabba, 2006:127; Ali dan A. Amrullah Amal, 1989: 30).

Sementara itu, Sultan Hasanuddin memerintahkan Karaeng Karunrung, Karaeng Sumanna, Karaeng Tallo, dan Karaeng Cenrana memimpin pasukan Makassar untuk menumpas pemberontakan Arung Palakka dan Tobala pada 10 Agustus 1660. Beberapa hari kemudian pasukan Makassar tiba di Lamuru dan segera menyerang markas Arung Palakka dan Tobala. Pertempuran sengit pun terjadi antara pasukan Makassar dengan laskar Bone dan Soppeng di Lamuru. Pada awal pertempuran kekuatan berimbang, tetapi pasukan Wajo yang turut membantu Makassar menyerang Soppeng dari belakang sehingga laskar Soppeng terpaksa kembali ke daerahnya melawan Wajo. Oleh karena itu, pasukan Makassar berhasil mendesak laskar

Bone sehingga mundur ke arah utara dan bertahan di daerah Mampu, Timurung, dan Sailong. Setelah kurang lebih dua bulan saling serang antara kedua belah pihak, terjadilah pertempuran yang amat menentukan di Mampu pada 11 Oktober 1660. Pada pertempuran sengit ini, pasukan Makassar dan Wajo berhasil mengalahkan laskar Bone dan Soppeng yang ditandai dengan gugurnya Tobala bersama 269 orang laskarnya (Kamaruddin, 1989:132).

Kekalahan tersebut memaksa Arung Palakka bersama sejumlah pangeran Bugis bergerilya di daerah pegunungan antara Bone, Soppeng, Barru, dan Wajo. Oleh karena mereka senantiasa mendapat ancaman dan kejaran dari pasukan Makassar, sehingga tidak ada lagi tempat yang aman baginya di Sulawesi Selatan. Itulah sebabnya mereka kemudian memutuskan meninggalkan daerah ini menuju Jawa untuk meminta bantuan dan menjalin kerjasama melawan Makassar. Gagasan ini mendapat dukungan dari Datu Soppeng La Tenribali dan memberikan bantuan dana seratus *kati* (1 *kati* = 625 gram) emas. Datu Soppeng kemudian berpesan kepada Arung Appanang, Arung Bila (Daeng Mabela) dan Datu Citta agar jangan berpisah dengan Arung Palakka, dan jangan kembali sebelum menemukan kekuatan yang dapat melawan Makassar.¹⁷

La Tenritatta yang tidak dapat lagi meneruskan perlawanannya di daratan Sulawesi Selatan, meninggalkan pantai Pallette dan berlayar menyeberang ke Buton bersama pengikut-pengikutnya untuk memperoleh perlindungan dari Sultan Buton pada hari Sabtu 25 Desember 1660. Pembesar Kerajaan Soppeng yang setia dan ikut pada La Tenritatta untuk meneruskan perjuangannya melawan Gowa, ialah

¹⁷ Dalam *lontarak* antara lain disebutkan bahwa "*Makke dai Datu Mario (Arung Palakka) ri Petta ri Soppeng. Iya engkau puang de'na onroku ri tana Ugi, ... Melomanakkeng tawereng ulawenna Soppeng kisomperangngi ri Jawa... Makke dai Datu Soppeng Matinroe ri Datunna, nigana sijammu padammu to Soppeng musilaongang. Makke dai Datu Mario kakaku Arung Appanang, anaureku Arung Bila sibawa Datue ri Citta...*" (*Lontarak Kerajaan Soppeng*, No.1: 26)

Arung Bila, Arung Belo, Arung Apanang dan Datu Pattojo. Sementara Datu Soppeng La Tenribali yang telah aktif membantu La Tenritatta diangkut ke Gowa sebagai tawanan oleh Sultan Hasanuddin. Datu Soppeng La Tenribali digantikan oleh putrinya yang bernama We Adda sebagai Datu Soppeng kelima belas (setelah wafat disebut *Matinroe ri Madello*).

Setelah tiga tahun lamanya La Tenritatta bersama pengikutnya tinggal di Buton di bawah perlindungan Sultan Buton, beliau bersama kawan-kawannya meninggalkan Buton, berangkat ke Betawi dengan membawa pasukan Bugis sekitar 400 orang banyaknya pada 1663. Untuk dapat meneruskan perilawannya terhadap Gowa hingga Bone bebas dari kekuasaan Gowa, maka bagi La Tenritatta Arung Palakka tidak ada jalan lain dari pada meminta bantuan dari Kompeni (VOC) yang pada waktu itu mempunyai armada yang sangat kuat. Dalam tahun 1667 berkobarlah peperangan yang maha besar antara Kompeni-Belanda bersama La Tenritatta Arung Palakka di satu pihak dengan Raja Gowa Sultan Hasanuddin dan sekutunya di lain pihak. Peperangan itu berakhir dalam Nopember 1667 dengan kekalahan Sultan Hasanuddin. Lahirlah Perjanjian Bungaya pada 18 Nopember 1667. Di dalam peperangan itu rakyat Soppeng aktif membantu La Tenritatta Arung Palakka.

Setelah peperangan itu berakhir, Datu Soppeng La Tenribali dibebaskan dari tawanan dan dikembalikan ke Soppeng dan dipulihkan segala hak dan kehormatannya. Bahkan beliau diangkat kembali menjadi Datu Soppeng, atas kehendak Arung Palakka dan persetujuan Laksamana Speelman. Datu Soppeng La Tenribali turut juga sebagai anggota persekutuan (*bondgenootschap*) menandatangani Perjanjian Bungaya tersebut. Setelah La Tenribali wafat, beliau digelar *Matinroe ri Datunna* (yang wafat dalam kedatuannya). Baginda digantikan oleh putranya yang bernama La Tenrisenge To Esa sebagai

Datu Soppeng kedelapan belas.

Datu Soppeng La Tenrisenge To Esa mempermaisurikan Datu Pammana yang bernama We Tenripada Daeng Manessa Pettampungae. Dari perkawinan tersebut lahir seorang putra yang bernama La Kareddu Arung Sekkanyili. La Kareddu ini memperistrikan seorang anak dari Patampanuwa di Pammana (seorang pembesar Hadat di Pammana). Dari perkawinan ini lahir seorang putra yang bernama La Mappaseng Arung Pattojo yang bergelar anumerta *Matinroe ri Duninna*. Beliau adalah suami pertama dari We Tenri Leleang Datu Tanete dan Datu Luwu, yang bergelar *Matinroe ri Soreang*. Selanjutnya Datu Soppeng La Tenrisenge To Esa memperistrikan seorang bangsawan Melayu yang bernama Ince Amina, putri dari Ince Husain Datuk Jurutulis di Makasar. Dari perkawinan itu lahir seorang putra yang bernama Ince Camummu.

Setelah Datu Soppeng La Tenrisenge To Esa wafat dan digelar *Matinroe ri Salassaqna*, baginda digantikan oleh La Patau yang juga menjadi Raja Bone. Di dalam menjalankan kekuasaan di Soppeng, baginda didampingi oleh Ince Camummu sebagai *Sulle Datu*. Pada 17 Desember 1704, We Bataritoja dalam usia 16 tahun dikawinkan oleh ayahandanya dengan Sultan Sumbawa yang bernama Mas Madina. Perkawinan tersebut dilangsungkan untuk memenuhi amanat dari Raja Bone La Tenritatta Petta Rorisompae pada masa hidupnya kepada Sultan Sumbawa Mas Bantam, ayahanda dari Mas Madina. Satu tahun kemudian We Bataritoja bercerai dengan suaminya. La Patau wafat di Nagauleng (Cenrana-Bone) pada 17 September 1714, sehingga baginda disebut *Petta Matinroe ri Nagauleng* dalam usia 42 tahun. Baginda digantikan oleh putrinya dari Luwu, yaitu We Bataritoja Daeng Talaga Sitti Zainab Zukjasuddin, sebagai *Arumpone* dan *Datu* di Soppeng. Baginda juga pada waktu itu menjadi *Datu Luwu*, sehingga baginda menjadi raja pada tiga kerajaan (Luwu, Bone, dan Soppeng).

Namun dalam perkembangannya berhubung dengan suasana politik di Bone, maka We Bataritoja dengan sukarela menyerahkan tahta Kerajaan Soppeng kepada saudaranya yang dari Gowa, yaitu La Padassajati To Appamole (juga bergelar Arung Palakka) pada 10 Agustus 1715. Sebelumnya La Pareppa To Sappewali Sultan Ismail, putra sulung dari La Patau MatinroE ri Nagauleng diangkat menjadi raja di Gowa pada 1709 untuk menggantikan neneknya Sultan Abdul Jalil. Hanya dua tahun lamanya (1709-1711) baginda menduduki tahta Kerajaan Gowa. Disebutkan bahwa pada waktu itu baginda merangkap sementara waktu kedatuan di Soppeng dan memegang tahta Kerajaan Bone.

We Bataritoja kemudian kawin dengan sepupunya yang bernama Daeng Mammuntuli yang pada waktu itu menjadi Arung Kaju pada 1716. Dalam tahun 1724 untuk kedua kalinya We Bataritoja diangkat menjadi Raja Bone dan Datu Soppeng. Baginda didampingi oleh suaminya, yaitu Arung Kaju. Akan tetapi suaminya itu berkhianat pada baginda, sehingga perkawinannya putus. Arung Kaju menggabung pada Arung Matowa Wajo La Maddukkelleng dan menurunkan We Bataritoja dari tahtanya. Oleh karena itu, maka We Bataritoja menyingkir ke Makassar untuk memperoleh perlindungan Kompeni Belanda. Atas desakan Wajo maka rakyat Bone mengangkat Denradatu Sitti Nafisah Karaeng Langello, saudara dari Raja Gowa I Mallawagau. Akan tetapi pengangkatan itu tidak sah.

Menyikapi persoalan tersebut, We Bataritoja mengusulkan kepada Kompeni-Belanda untuk mengangkat La Temmasonge Arung Baringeng menjadi Arumpone dan Datu Soppeng menggantikan We Bataritoja. Beliau adalah juga putra dari Raja Bone La Patau Matinroe Nagauleng. Pada waktu itu beliau menjadi Punggawa Bone (Kepala Angkatan Perang Kerajaan Bone). Pada mulanya beliau ragu-ragu menerima jabatan Arumpone itu, karena pada waktu itu ada

oposisi di kalangan bangsawan-bangsawan tinggi di Bone terhadap pengangkatan La Temmasonge itu menjadi Raja Bone. Pada Oktober 1752 barulah baginda dilantik dengan resmi menjadi Arumpone. Baginda juga merangkap kedatuan di Soppeng.

La Tammassonge digelar Sultan Abdurrasak Jalaluddin. Baginda wafat pada 1775 dan digelar Petta MatinroE ri Mallimongeng (Makassar). Perlu dicatat di sini, bahwa pada masa pemerintahan La Patau MatinroE ri Nagauleng (1696-1714) dan kemudian setelah baginda wafat, baik di Bone maupun di Gowa dan Soppeng suasana politik sangat ruwet, terlebih kemudian setelah baginda wafat. Perebutan kekuasaan di kerajaan-kerajaan itu senantiasa terjadi. Dirwayatkan, bahwa sewaktu La Patau masih memegang kekuasaan di Bone dan Soppeng, putranya yang bernama La Padassajati melakukan suatu kesalahan di Bone, sehingga ayahandanya murka kepadanya. Beliau meninggalkan Bone dan pergi ke Gowa meminta suaka dari Raja Gowa Sultan Abdul Jalil (neneknya) pada 1709.

Raja Bone La Patau bersama Hadat Bone menuntut pada Raja Gowa supaya La Padassajati diserahkan kepada pemerintah kerajaan Bone, tetapi pemerintah Kerajaan Gowa acuh tak acuh memenuhi tuntutan tersebut. Dalam tahun itu juga Raja Gowa Sultan Abdul Jalil wafat. Baginda digantikan oleh La Pareppa Tosappewali menjadi raja di Gowa. Bagindapun menolak tuntutan pemerintah Kerajaan Bone, dalam hal ini ayahandanya sendiri. Oleh karena itu maka Kerajaan Bone terpaksa memaklumkan perang kepada kerajaan Gowa. Terjadilah pertempuran dalam daerah Gowa antara laskar Kerajaan Bone dengan laskar Kerajaan Gowa, yaitu antara ayah dan anak. Peperangan itu lazim disebut *bundu pammanakang* (perang keluarga). Pertempuran itu hanya berlangsung beberapa hari lamanya saja. Atas desakan Kompeni peperangan itu berakhir secara damai pada 19 Agustus 1710. Akhirnya La Padassajati kembali ke Bone. Kemudian

beliau menduduki sebentar tahta Kerajaan Bone dan beliau menjadi datu juga di Soppeng.

Sementara baginda menduduki tahta kerajaan di Soppeng, lantas pada suatu waktu, baginda membunuh Datu Lamuru yang bernama La Cella atas tuduhan bahwa La Cella berusaha menurunkan La Padassajati dari tahtanya. Berhubung dengan kejadian itu, maka Persekutuan Tellumpoccoe (Bone, Wajo dan Soppeng) mengambil tindakan tegas terhadap La Padassajati. Baginda ditangkap dan diasingkan ke luar daerah, konon kabarnya ke suatu tempat yang bernama Beula (orang katakan tempat itu di salah sebuah pulau di sebelah timur Pulau Buton), Di sanalah La Padassajati wafat, sehingga baginda disebut *MatinroE ri Beula*.

Ketika La Temmassonge menjadi Arumpone dan Datu Soppeng, baginda menyerahkan tahta Kerajaan Soppeng kepada saudaranya yang bernama La Tongeng Datu Laisu putra dari Arumpone La Patau dan I Bajang (perempuan dari Bukaka-Bone). Permaisurinya ialah We Jatu Arung Attangsalo (Raja di Mario Sebelah Selatan Sungai). La Tongeng Datu Laisu wafat di desa yang bernama Loqna dalam daerah Mario, sehingga beliau digelar *Matinroe ri Loqna*.

Setelah wafat, maka beliau digantikan oleh La Mappajanci Daeng Massuro Sultan Musa sebagai Datu Soppeng pada 1765. Baginda adalah putra dari Arung Pattojo La Mappaselling *Matinroe ri Duninna* dan Datu Luwu We Tenrileleang *Matinroe ri Soreang*. Permaisuri baginda ialah We Tenri Olle Datu Bolli, putri dari Arumpone La Temmassonge *Matinroe ri Malimongeng*. Dari perkawinan itu lahir seorang putra yang diberi nama La Mappapoleonro dan seorang putri yang diberi nama We Tenriampareng.

La Mappajanci Daeng Massuro wafat di Laburau (Soppeng), sehingga baginda digelar *Matinroe ri Laburau*. Baginda digantikan

oleh putranya, yaitu La Mappapoleonro sebagai Datu Soppeng pada 1782. Permaisuri baginda ialah Datu Luwu yang bernama We Tenriawaru Sitti Hawang. Permaisuri Baginda yang lain ialah We Alu Arung Apala, saudara kandung dari Arumpone La Tenrituppu MatinroE ri Rompegading. Dengan terjadinya kedua perkawinan itu, maka bertambah luas dan eratlah hubungan kekeluargaan antara kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan, seperti Soppeng, Luwu, dan Bone. Dengan demikian maka Soppeng dapat menduduki posisi yang penting di antara kerajaan besar di Sulawesi Selatan, seperti Luwu, Bone, Wajo, dan Gowa.

Dari perkawinannya dengan Datu Luwu We Tenriawaru Sitti Hawang, lahirlah beberapa putra dan putri, di antaranya La Tenrioddang (kemudian menjadi Datu Luwu), We Hamida (kemudian menjadi Datu Luwu), La Peppang (kemudian menjadi Opu Pabbicara di Luwu), Palettei (kemudian menjadi Opu Cening dan Datu Larompong), We Pancai Tana Arung Akkampung, La Tempedding Arung Marimari, dan La Tinauleng. Sementara dari perkawinannya dengan We Alu Arung Apala lahir seorang putra yang bernama La Unru dan seorang putri yang bernama, We Tenri Kawareng Arung Balusu.

La Mappapoleonro wafat di Soppeng pada 1820, setelah hampir empat puluh tahun lamanya menduduki tahta Kerajaan Soppeng. Baginda digelar Matinroe ri Amalaqna (yang wafat dalam amalnya). Beliau digantikan oleh jandanya, yakni Tenriawaru Sitti Hawang Datu Luwu. Setelah Tenriawaru Sitti Hawang wafat di Luwu, maka baginda digantikan oleh We Tenriampareng, saudara dari La Mappapoleonro. Raja putri ini mempersuamikan La Pabeangi Arung Sengkang yang menjadi Sulle Datu Soppeng (mewakili istrinya). Dari perkawinan itu lahir seorang putri yang bernama We Tenri yang menjadi Arung Sengkang. Putri tersebut menjadi permaisuri La Palettei Datu

Larompong. Dari perkawinan ini lahir seorang putra yang bernama To Lompeng.

Setelah We Tenriampareng wafat dan digelar *Matinroe ri Barugana* (yang wafat dalam balairungnya), maka beliau digantikan oleh kemanakannya, yaitu La Unru. Hanya beberapa waktu La Unru menduduki tahta Kerajaan Soppeng lantas wafat dan digelar *Matinroe ri Tenngana Soppeng*. Baginda digantikan oleh La Onrong Datu Pattiro putra dari La Patongi Datu Pattiro (putra dari We Tenrikawareng Arung Balusu) dan We Pannangareng Datu Lampulle (putri dari La Rumpangmegga Dulung Lamuru, Datu Tanete dan We Pancaitanya Arung Akkampung). Beliau diangkat menjadi Datu Soppeng pada 1822 dalam usia sekitar 12 tahun. Tidak cukup satu tahun lamanya beliau menduduki tahta Kerajaan Soppeng. Beliau dimaazulkan oleh Hadat Soppeng di bawah pimpinan Arung Bila, karena beberapa orang anggota keluarganya yang mendampinginya telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Hadat Soppeng mengangkat To Lompeng Arung Sengkang menjadi Datu Soppeng.

Pada masa pemerintahan To Lompeng terjadi suatu perselisihan antara beliau dengan Hadat Soppeng. Perselisihan itu berjalan sedemikian sengitnya, sehingga To Lompeng terpaksa meninggalkan Soppeng dan berdiam di Larompong (Luwu) pada 1860. Meskipun Arung Bila berusaha mengembalikan To Lompeng ke Soppeng, namun segala usahanya itu sia-sia. Dalam tahun 1862 To Lompeng wafat di Luwu. Selama itu dan sampai pada waktu meninggalkan Soppeng, To Lompeng tetap menolak menandatangani Perjanjian Bungaya yang diperbaharui pada 1824. Sewaktu Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Baron van der Capellen datang ke Makassar pada Juli 1824 untuk mengajak raja-raja di Sulawesi Selatan menandatangani Perjanjian Bungaya yang harus dibaharui. To Lompeng ataupun wakilnya tidak datang ke Makassar untuk bertemu dan memberi penghormatan

kepada wakil pemerintah Belanda tersebut.

Sewaktu terjadi perang saudara di Sidenreng dari tahun 1832 sampai tahun 1844, yaitu antara Addatuang Sidenreng La Panguriseng dengan saudaranya yang bernama La Patongai Datu Lompulle, Datu Soppeng To Lompeng bersama Datu Mario ri Awa La Makkaraka Baso Tancung aktif membantu La Patongai. Sedangkan La Panguriseng dibantu oleh Belanda dan Arung Rappang serta Addatuang Sawitto. Peperangan tersebut berakhir dengan kemenangan di pihak La Panguriseng.

Setelah To Lompeng wafat, Hadat Soppeng mengangkat Abdul Gani Baso Batupute Datu Mario ri Wawo menjadi Datu Soppeng pada 1867. Baginda adalah putra dari La Wana Datu Botto dan We Tungke Datu Mario ri Wawo (putri dari La Rumpang Dulung Lamuru dan Datu Tanete). Dalam tahun 1873 baginda mengambil tindakan keras terhadap Bakke dan Appanang, dua kerajaan kecil bawahannya, akibat tindakan Datu Bakke La Sangaji yang telah melakukan serangan terhadap Datu Tanete We Tenriolle ke dalam daerah Kerajaan Tanete. Latar belakang serangan itu ialah perselisihan yang tidak dapat didamaikan yang terjadi antara La Sangaji Datu Bakke dengan permaisurinya, yaitu We Tenriolle, yang berakibat terjadinya perceraian suami-isteri tersebut.

Datu Soppeng Sultan Abdul Gani Baso Batupute menyita semua sawah milik dari La Sangaji di Bakke dan Appanang. Hasil sawah-sawah itu harus dipergunakan untuk membayar kepada Kerajaan Tanete denda sejumlah Rp. 2.000,- yang dijatuhkan oleh pemerintah Kerajaan Soppeng atas diri La Sangaji. Dalam tahun 1875 Watansoppeng menjadi ibu kota Kerajaan Soppeng. Dalam tahun 1897, Sultan Abdul Gani Baso Batupute wafat di Pakkasaloe, sehingga baginda disebut Matinroe ri Pakkasaloe.

Sultan Abdul Gani Baso Batupute, digantikan oleh We Tenri Watu Sitti Zainab Arung Lapajung menjadi Datu Soppeng. Pada waktu itu, baginda menjadi Arung Enneng dengan gelaran Patola di Wajo. Suaminya ialah sepupu derajat satu kalinya, yaitu La Pabeangi. Sitti Zainab adalah putri dari Datu Botto La Walinono (saudara kandung dari Sultan Abdul Gani Baso Batupute) dan Mappannyiwi Arung Sengkang Patola Wajo. Pada masa kekusaan Datu Soppeng We Tenri Watu Sitti Zainab inilah pemerintah kolonial Belanda melancarkan ekspedisi militer terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk Kerajaan Soppeng pada 1905.

C. Soppeng Dalam Mata Rantai Ekspedisi Militer Belanda

Pemerintah Hindia Belanda semakin menaruh perhatian atas pulau-pulau yang berada di luar Pulau Jawa dan Madura menjelang abad XX. Perhatian itu tidak saja semata-mata berlandaskan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga dilandaskan pada kepentingan politik. Sebab, tanpa penguasaan pada bidang politik, adalah satu hal yang mustahil untuk dapat menguasai bidang ekonomi. Sehubungan dengan itu, pemerintah kolonial Belanda merasa perlu terlebih dahulu melakukan penguasaan politik untuk lebih menanamkan kekuasaannya atas daerah-daerah yang berada di luar Jawa. Selain itu, juga karena ada kekhawatiran bahwa daerah-daerah yang belum dikuasai secara langsung kelak akan melakukan hubungan dengan kekuasaan asing lainnya. Jika hal itu terjadi, maka dapat dipastikan bahwa Belanda akan menemukan kesulitan untuk membangun satu kesatuan politik di wilayah Hindia Belanda.

Pada awal tahun 1900-an, pemerintah Hindia Belanda di Makassar mulai menyebarkan informasi kepada kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, bahwa kebijakan “pelabuhan bebas” akan

dihapuskan, dan kepada mereka akan dibebankan uang ganti rugi atas pungutan pajak impor, ekspor, cukai, pajak pelabuhan, pajak jangkar, dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut pelayaran dan perdagangan.¹⁸ Ganti rugi itu pada dasarnya merupakan langkah politik untuk menegaskan bahwa wilayah-wilayah kerajaan di kawasan ini berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Tentu saja kerajaan-kerajaan di daerah ini menolak kebijakan itu karena akan mengurangi sumber pendapatan dan wilayah kekuasaan mereka. Sikap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan itulah yang antara lain menyebabkan pelaksanaan kebijakan pelabuhan wajib pajak di Makassar tertunda.¹⁹

Kenyataan itulah yang mendasari pemerintah Hindia Belanda, berkesimpulan bahwa satu-satunya pemecahan terhadap “keresahan” yang menyusahkan Belanda yang sudah berlangsung bertahun-tahun

¹⁸ Makassar dinyatakan sebagai pelabuhan bebas mulai 1 Januari 1847 dan berubah menjadi pelabuhan wajib pajak mulai pada 1 Agustus 1906. Patut dikemukakan bahwa ketika pemerintah kolonial Belanda ingin membatalkan kedudukan Makassar sebagai pelabuhan bebas pada 1872. Banyak pihak beranggapan bahwa kebijakan itu pasti merugikan kedudukan ekonomi pemerintah karena pelaut dan pedagang dari Sulawesi Selatan yang ketika itu dipandang memainkan peranan penting dalam dunia perdagangan maritim akan mengalihkan kegiatan mereka ke bandar niaga asing, khususnya Singapura, Penang, dan bandar-bandar di Semenanjung Melayu. Peran penting mereka itu berkaitan dengan penguasaan perdagangan produksi laut yang sangat dibutuhkan oleh pedagang Eropa untuk menjalin perdagangan mereka dengan Cina, penghasil produksi teh yang sangat laris di Eropa (Poelinggomang, 2002: 90).

¹⁹ Sebab-sebab lain tertundanya pelaksanaan kebijakan wajib pajak di Makassar; *Pertama*, menurut hasil penelitian Vermeulen (1896) dan laporan Gubernur Sulawesi, Gerrit W.W.C. Baron Hoevell (1898-1903) pada 1900, bahwa penduduk Sulawesi Selatan memegang peran penting dalam kegiatan niaga di wilayah Kepulauan Hindia Belanda bagian timur. Kedua laporan ini menyebabkan pemerintahan meragukan keterangan bahwa kebijakan pelabuhan wajib pajak hanya akan mengurangi volume perdagangan di Makassar sebesar 22 persen. *Kedua*, kerajaan-kerajaan bumiputera dapat memblokir pelayaran penduduk ke bandar niaga pemerintah. *Ketiga*, diperkirakan pendapatan dari kerajaan-kerajaan bumiputera tidak dapat dipenuhi. *Keempat*, kerajaan-kerajaan bumiputera dapat mengembangkan bandar niaga mereka untuk bersaing dengan bandar niaga pemerintah sehingga muncul perdagangan gelap. *Kelima*, kerajaan-kerajaan bumiputera dapat meningkatkan hubungan politik dan ekonomi dengan negara asing sehingga mengancam kedudukan politik dan ekonomi pemerintah (Poelinggomang, 2002:90-91).

di wilayah yang dijuluki dengan “pulau keonaran” (*de onrust eiland*), adalah “kampanye pengamanan” atau penaklukan secara militer, serupa dengan yang dilakukan di Aceh (Harvey,1989:46). Karena itu Cornelis Alexander Kroesen (1903-1906), yang menggantikan kedudukan Van Hoevel sebagai gubernur Sulawesi, memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat di Batavia (surat tertanggal 11 Februari 1904) untuk melakukan tindakan militer terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama terhadap Bone dan Luwu. Sebab kedua kerajaan ini memiliki pengaruh yang kuat dan gigih menentang kebijakan ganti rugi pemungutan pajak (Kroesen,1906:MvO; Poelinggomang, 2002:91).

Perluasan wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan melalui tindakan militer, mencapai puncaknya pada pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heutsz (1904-1909). Ketika Van Heutsz menggantikan kedudukan Willem Roosenboom (1899-1904) sebagai Gubernur Jenderal pada 1 Oktober 1904, ia mulai mencanangkan suatu kebijakan untuk menguasai secara langsung seluruh wilayah Hindia Belanda. Van Heutsz memberikan label kebijakannya itu yang secara halus disebut sebagai politik perdamaian (*pacificatie politiek*). Sesungguhnya kebijakan ini bukan hanya dirancang untuk menguasai sepenuhnya atas seluruh wilayah koloninya di Hindia Belanda, melainkan juga supaya kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan terhindar dari campur tangan bangsa asing lainnya (Poelinggomang,2002:91; Kadir,dkk. 1984:45).

Pemerintah Hindia Belanda mengalihkan perhatiannya ke Sulawesi Selatan setelah situasi di Aceh dapat dikendalikan. Hal ini diharapkan segera dapat menyelesaikan segala hambatan yang dihadapi di daerah ini, terutama dalam merealisasikan kebijakan wajib pajak. Menteri Koloni memberikan saran bahwa apabila perundingan dengan kerajaan-kerajaan berdaulat tentang jumlah

ganti rugi tidak menghasilkan kesepakatan, maka jangan mengakhiri perundingan dengan mereka. Menyikapi pernyataan Menteri Koloni tersebut, Van Heutzs dalam suratnya kepada Direktur Departemen Keuangan (tertanggal 25 Januari 1905), menyatakan bahwa sesuai dengan keinginan Menteri Koloni, secepatnya dilakukan kontrak dengan para penguasa lokal di Sulawesi Selatan. Hal ini bukan hanya dimaksudkan untuk mengambil alih hak pajak perdagangan dan semua yang berkaitan dengan masalah tersebut, melainkan juga segera mempersiapkan agar pelaksanaan pemungutan pajak perdagangan dapat dilaksanakan pada 1 Januari 1906. Direktur Departemen Keuangan, dalam pertimbangan dan sarannya, menyatakan bahwa demi menjamin kepentingan perdagangan, penguasa-penguasa lokal di Sulawesi Selatan harus bersedia mengakui hak pemerintah Hindia Belanda untuk memungut pajak perdagangan di wilayah kekuasaan mereka (Poelinggomang, 2002:92).

Gubernur Jenderal Van Heutzs mulai melaksanakan politik pasifikasi dengan langkah-langkah militer setelah perundingan dengan penguasa lokal di Sulawesi Selatan menemui jalan buntu. Karena itu dipersiapkanlah suatu ekspedisi militer Belanda, guna menaklukkan dan memaksa penguasa-penguasa lokal menerima tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini terutama ditujukan terhadap kerajaan-kerajaan yang masih berkedudukan sebagai kerajaan sekutu atau sahabat. Gubernur Sulawesi C.A. Kroesen kembali mengajukan saran kepada Van Heutzs pada April 1905, agar selain Kerajaan Bone dan Luwu dilakukan pula tindakan penaklukan terhadap Kerajaan Gowa. Sebab, Kerajaan Gowa dianggap gagal memenuhi kewajiban menurut perjanjian atau dianggap telah melanggar perjanjian yang telah ditandatangani, yaitu mengirimkan sejumlah pasukan bersenjata untuk membantu Kerajaan Sawitto, suatu daerah yang bangkit memberontak terhadap kekuasaan

pemerintah Hindia Belanda (Harvey, 1989:47; Latif, 2012:273).

Menanggapi usulan itu, Gubernur Jenderal Van Heutzs dalam pertimbangan dan sarannya, menyatakan bahwa ia tidak yakin pelanggaran yang dilakukan itu dapat dijadikan alasan untuk menaklukkan Kerajaan Gowa, terutama tanpa peringatan terlebih dahulu. Karena itu Van Heutzs memperingatkan bahwa harus bersikap hati-hati agar tidak memancing timbulnya perlawanan atau menghindari kesan bahwa pemerintah Hindia Belanda hanya mencari-cari alasan untuk menguasai secara langsung seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Lebih lanjut Van Heutzs menyatakan bahwa tindakan militer yang pertama harus dilakukan terhadap Bone karena dianggap sebagai “kerajaan yang paling kuat dan yang paling berbahaya” di wilayah ini (Harvey,1989:48).

Gubernur Sulawesi C.A. Kroesen setuju tindakan militer yang pertama dilakukan terhadap Kerajaan Bone. Karena selain kerajaan paling kuat dan berbahaya, juga karena “sikapnya yang kurang ajar”. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kerajaan ini sesungguhnya berstatus sebagai kerajaan pinjaman, namun menolak tuntutan yang diajukan oleh pemerintah kolonial untuk menguasai pelabuhan Bajoe dan Pallime. Menurut C.A. Kroesen bahwa demi menegakkan dan mempertahankan kewibawaan pemerintah Hindia Belanda, dan untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam hubungan dengan para penguasa lokal, serta persetujuan terhadap tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda harus dipaksakan, kalau perlu dengan kekerasan (Kroesen, 1906:MvO).

Sebelum tindakan penaklukan terhadap Bone dilaksanakan, Gubernur Sulawesi C.A. Kroesen terlebih dahulu mengirim utusan untuk menyampaikan surat kepada raja Bone. Utusan yang terdiri atas Residen Brugman bersama Kontrolleur Goedhart serta Cramer sebagai

juru bahasa berangkat dari Makassar pada 21 Juni 1905. Mereka menggunakan kapal laut menuju ke Bone dan tiba di Bajoe pada 22 Juni 1905 (Anonim,1915:Lamp:3). Dengan dua buah kapal perang berjaga-jaga di lepas pantai Teluk Bone, mereka segera mengirim utusan (Karaeng Maros dan Kapitan Melayu) untuk menyampaikan surat kepada raja Bone, yang isinya menuntut Bone untuk memenuhi kewajibannya bekerjasama mengalihkan kekuasaan kepada pemerintah Hindia Belanda, hak penarikan pajak impor dan ekspor, serta penempatan pejabat Belanda di Bone untuk melaksanakan pemerintahan guna mengatur dan mengawasi pelabuhan. Dalam hal itu, suatu kontrak baru diajukan untuk “diperiksa dengan teliti” atau ditandatangani. Setelah isi dan maksud surat itu dipahami dan dipertimbangkan masak-masak oleh Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama dewan *Ade Pitu*, menyampaikan surat balasan penolakan pada 29 Juni 1905 (Anonim,1905-1906:274; Amir,2003:63; Abduh,dkk., 1985:100).

Penolakan Bone tersebut mendorong Van Heutsz untuk segera melaksanakan tindakan militer di Sulawesi Selatan. Dalam suratnya kepada Gubernur Sulawesi C.A. Kroesen tertanggal 14 Juli 1905, tampak jelas keinginan dari pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan tindakan penaklukan dan menguasai secara langsung seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Pada intinya, surat itu berisi perintah kepada Sang gubernur, untuk memaksa semua penguasa atau raja-raja lokal di wilayah ini agar menyerahkan kekuasaan pemerintahannya, yaitu tunduk, patuh, dan taat sepenuhnya kepada pemerintah Hindia Belanda dengan menandatangani *korte verklaring* (pernyataan pendek) dalam waktu yang singkat (Kroesen,1906:MvO; Poelinggomang,2004:46).²⁰

²⁰ Rumusan *korte verklaring* tersebut, dipengaruhi oleh perubahan kebijakan politik pemerintah Belanda berdasarkan Pidato Tahta (*Troom Rede*) Ratu Belanda pada 1901, yang menjadi landasan Politik Etis di Hindia Belanda sekaligus pernyataan

Sehubungan dengan tindakan militer tersebut, Dirk Fock yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1921-1926), menyatakan bahwa ekspedisi militer tersebut dilakukan karena para raja atau penguasa dari kerajaan-kerajaan di wilayah itu tidak mentaati perjanjian dan bersikap tidak adil terhadap rakyatnya, dan khusus terhadap Kerajaan Gowa ditambahkan tuduhan sebagai tempat pelarian para pencuri dan dedengkot penadah barang curian. Sementara menurut Cramer, bahwa pemerintah Hindia Belanda berkewajiban melakukan tindakan bersenjata karena harus bertanggungjawab atas wilayah kekuasaannya (Koll,1911:300-301). Pernyataan-pernyataan itu seakan-akan membenarkan tindakan militer yang dilancarkan pemerintah Hindia Belanda sebagai tugas suci untuk kemaslahatan penduduk bumiputra.

Namun kenyataannya bahwa kebijakan politik pasifikasi hanyalah sebuah kedok. Hal ini tampak dari tuntutan yang diajukan kepada para penguasa lokal di Sulawesi Selatan. Terhadap Kerajaan Bone misalnya, dituntut tiga hal, yaitu: kerajaan diharuskan menandatangani penyerahan wilayahnya kepada pemerintah Hindia Belanda, dan menyetujui ganti rugi penarikan pajak ekspor dan impor, serta mengakui hak pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai pelabuhan kerajaan dan menempatkan polisi di pelabuhan itu. Karena tuntutan itu ditolak oleh pihak penguasa Bone sehingga pemerintah Hindia Belanda segera memerintahkan persiapan pemberangkatan ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di wilayah ini. Ekspedi militer Belanda itu kemudian dikenal dengan sebutan *Zuid*

diplomatis untuk membenarkan penguasaan terhadap kerajaan-kerajaan di wilayah Sulawesi Selatan. *Korte Verklaring* terdiri dari tiga pasal. *Pasal satu* memuat pernyataan menyerahkan wilayah kekuasaan kepada pemerintah Hindia Belanda dan menyatakan kesetiaan dan ketaatan kepada pemerintah Belanda dan perwakilannya di Hindia Belanda. *Pasal dua* memuat janji untuk tidak melakukan hubungan dengan kerajaan asing, musuh pemerintah juga menjadi musuhnya dan sahabat pemerintah menjadi sahabatnya. *Pasal tiga*, mengakui dan menjalankan semua perintah dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah (Somer,1934; Harvey,1989:46).

Celebes Expeditie 1905 (Kielstra,1910:357; Poelinggomang, 2002:93).

Penggunaan kekuatan militer untuk memaksa penguasa lokal menerima dan menandatangani pernyataan pendek yang diajukan, dilakukan karena berbagai upaya diplomasi atau jalan damai tidak berhasil. Bahkan kerajaan pinjaman juga bertekad menolak tuntutan pihak pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai langsung kerajaannya, seperti yang ditunjukkan oleh penguasa Bone. Itulah sebabnya J. H. van Kol dan C. Th. van Deventer menyatakan bahwa pengiriman pasukan pendudukan merupakan suatu “kewajiban”, karena pemerintah Hindia Belanda bertanggungjawab atas ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah Hindia Belanda. Hal inilah yang mendasari surat perintah yang dikirim oleh Gubernur Jenderal Van Heutzs kepada Gubernur Sulawesi C.A. Kroesen ditindaklanjuti dengan pengiriman ekspedisi militer dari Jawa ke Sulawesi Selatan (Poelinggomang, 2004:48; Koll,1911:301).

Sesungguhnya jauh sebelumnya, pasukan ekspedisi Belanda tersebut dibentuk dan dipersiapkan di tiga tempat dengan mendapat tugas untuk menaklukkan Sulawesi Selatan. Setelah persiapan dianggap matang, maka diberangkatkanlah pasukan ekspedisi Belanda itu pada pertengahan Juli 1905. Pasukan dari Jawa Barat diberangkatkan dari Tanjung Priok pada 11 dan 13 Juli 1905. Pasukan bantuan dari Jawa Tengah diberangkatkan dari Semarang pada 13 dan 15 Juli 1905. Sementara pasukan dari Jawa Timur diberangkatkan dari Surabaya pada 13 dan 15 Juli 1905. Semua armada pasukan yang diberangkatkan itu, berlayar menuju suatu tempat yang telah ditentukan, yaitu harus berkumpul di Pelabuhan Bulukumba. Dari Bulukumba mereka meneruskan pelayaran menuju Bajoe, sebuah pelabuhan yang cukup aman di Teluk Bone. Mereka berhasil tiba di perairan Bone pada 19 Juli 1905 (Anonim,1915:26; Poelinggomang,1980:59; Kies,1935:827).

Pada mulanya pasukan ekspedisi Belanda tersebut, di bawah pimpinan oleh Kolonel Infantri Van der Wedden sebagai Panglima Operasi, dan Kolonel Infantri C. A. van Loenen sebagai Wakil Panglima Operasi, serta Kolonel Kaveleri L. D. C. de Lannoy sebagai Panglima Tempur. Berhubung karena Van der Wedden sakit, maka ia kemudian digantikan oleh Kolonel C.A. van Loenen sebagai Panglima Operasi. Jumlah anggota pasukan seluruhnya adalah 1.331 orang, yang terdiri atas 88 perwira dan 576 anggota non tempur. Ekspedisi militer ini diperkuat 7 kapal perang, 1 kapal pengintai, 7 kapal KPM, 1 kapal pemerintah, dan 1 kapal polisi.²¹ Sasaran pertama mereka adalah menaklukkan Kerajaan Bone, sebab kerajaan ini bukan hanya karena menolak menyerahkan penguasaan atas pelabuhan Bajoe dan Pallime kepada pemerintah Hindia Belanda, melainkan juga karena dianggap sebagai kerajaan terkuat, memiliki pengaruh yang luas dan mendapat dukungan dari sejumlah kerajaan sahabat. Hal ini didasarkan atas perhitungan bahwa, jika Kerajaan Bone berhasil dipaksakan menyerahkan kekuasaannya dan menandatangani *korte verklaring*, maka kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan akan mudah ditaklukkan (Kadir, dkk., 1984:47; Mattulada, 1998:382).

Setelah semua armada tiba dan berkumpul di perairan Bone, pimpinan ekspedisi Kolonel C.A. van Loenen mengutus La Patola Daeng Masappo²² untuk menyampaikan ultimatum terakhir kepada raja Bone, yaitu agar bersedia menerima segala tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda dan diberi kesempatan menjawab dalam waktu dua kali dua puluh empat jam. Jika tidak memenuhi tuntutan sebagaimana yang diharapkan, maka pasukan Belanda

²¹ Kapal-kapal perang dan pengangkut tersebut, antara lain; Riemsdijk, De Goen, Bromo, H. N. Hertog, Hendrik, Koningin, Regentes, De Ruyter, Soeland, Boneo, Asahan, Serdang, Brak, Tjantik II, dan Argus (Patang, 1976:24; Patunru, 1989:277).

²² La Patola Daeng Masappo adalah salah seorang narapidana dari Bone yang dibebaskan dari penjara untuk menjalankan tugas membawa ultimatum terakhir kepada raja Bone.

akan melancarkan serangan. Pada dasarnya tuntutan itu sama dengan tuntutan yang disampaikan sebelumnya dan ditambahkan kompensasi seluruh biaya perang dan pembuatan kontrak politik baru (Anonim,1905:353; Anonim, 1915:30).

Dalam sumber lain disebutkan bahwa isi pokok tuntutan itu adalah Bone harus menandatangani ketentuan penyerahan kekuasaan kepada pemerintah Belanda, persetujuan ganti rugi, pelaksanaan penarikan pajak atas ekspor dan impor, mengakui hak pemerintah Belanda dalam daerah Bone. Sehubungan dengan itu, maka pegawai pemerintah Belanda akan ditempatkan di Bone (Kielstra,1910: 362). Selanjutnya, La Pawawoi Karaeng Segeri menyampaikan kepada perutusan Belanda, bahwa sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Bone, baik untuk kepentingan raja maupun untuk kepentingan rakyat Bone, tidak ditentukan oleh raja sendiri. Akan tetapi harus melalui musyawarah yang disepakati oleh dewan *Ade Pitu* Bone (Ali, 1984:14; Amir,2003:87).

Setelah perutusan Belanda kembali ke kapal, La Pawawoi Karaeng Segeri bersama para anggota dewan *Ade Pitu* serta para pembesar kerajaan lainnya, segera mengadakan pertemuan untuk membicarakan tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda dan kedatangan ekspedisi militer Belanda yang sedang bertebaran di perairan Bone. Pada pertemuan itu, mereka bersepakat menolak dengan tegas tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda. Jawaban penolakan La Pawawoi Karaeng Segeri pada 20 Juli 1905, bahwa “semua usaha-usaha untuk membawa Bone kepada pemikiran yang lebih baik haruslah dipandang tidak bermanfaat, dan negeri Bone telah tertutup bagi ekspor dan impor” (Kielstra,1910:362; Kadir,dkk.1984:48).²³ Oleh karena itu, usaha-usaha persiapan dan

²³ Sementara sumber lain menyebutkan bahwa Arumpone menyatakan bahwa dia tidak bermaksud melawan pemerintah, tetapi tuntutan yang diajukan terlalu berat.

memperkuat posisi kekuatan laskar Bone segera dilakukan, dalam rangka menghadapi pasukan Belanda. Sejumlah besar laskar Bone ditempatkan di sepanjang pesisir pantai, mulai dari muara Sungai Cenrana atau Pallime di bagian utara sampai Ujung Pattiro di bagian selatan (Abduh,dkk.,1985:101).

Penolakan Bone atas tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda, merupakan isyarat bagi pimpinan ekspedisi untuk mendaratkan pasukannya guna melakukan penyerangan. Pada 21 Juli 1905, pasukan Belanda mulai melakukan pendaratan di Ujung Pattiro. Penentuan Ujung Pattiro sebagai tempat pendaratan pertama, karena dianggap lebih aman. Di samping itu, juga karena pertahanan di Ujung Pattiro tidak begitu kuat. Oleh karena pertahanan Bone dipusatkan di Bajoe dan sekitarnya, serta di muara Sungai Cenrana atau Pallime. Itulah sebabnya ekspedisi militer Belanda memilih Ujung Pattiro sebagai tempat pendaratan pertama, demi untuk menghindari jangan sampai pasukannya mendapat banyak perlawanan dan kesulitan (Anonim,1905:353;Ali,1984:18).

Meskipun pertahanan Bone di Ujung Pattiro tidak begitu kuat, tetapi pendaratan ekspedisi militer Belanda yang dipimpin oleh Kolonel C. A. van Loenen mendapat perlawanan dari laskar Bone di bawah pimpinan Arung Manajeng.²⁴ Selain itu, juga karena mereka tidak mengenal situasi setempat, semak belukar di sepanjang pantai

Mengenai permintaan konpensasi keuangan yang harus diberikan oleh Bone kepada Belanda, Arumpone menulis "Sekalipun orang menjual seluruh penduduk Bone, hasilnya saya kira tidak akan cukup untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan Jenderal"(Anonim,1915:Lamp.XII; Tol,2009:175).

²⁴ Pada pertempuran di Ujung Pattiro dan sekitarnya, gugur sebagai kusuma bangsa, antara lain; Senrima La Pattawe, La Palilu, La Badullah, La Manakku, La Palagu, La Muhammad, La Canunnu, La Setta, Daeng Masiga, Daeng Mattengnga, Daeng Mallipu, La Sakke, La Rubana, Daeng Massese (pimpinan rakyat Belawae), Dulunna Pajalele, Uwa Cabalu, Rilompengeng, Kapitan Letta Tanah, Laiwa, La Paggalung, Daeng Mananrang (pimpinan rakyat Calo), Laoni, Daeng Mallongi, La Tiwajo, dan Daeng Pagiling di pihak laskar Bone. Sedangkan yang luka-luka, antara lain Daeng Mallaga, Lapawe, Daeng Balede, dan La Bante (Arung Manajeng,1967:20).

susah ditembus, Sungai Pattiro yang berlumpur dan terlalu lebar untuk diseberangi, serta terjadi kekurangan persediaan air minum. Selama berada di Ujung Pattiro, pasukan Belanda senantiasa bergerak dan mencoba mencari jalan namun gagal. Oleh karena itu dua hari setelah pendaratan, pimpinan ekspedisi memutuskan untuk kembali ke kapal dan mencoba melakukan pendaratan di Bajoe. Butuh waktu lima hari untuk menarik mundur seluruh pasukan dari Ujung Pattiro (Anonim,1905:354; Anonim,1915:31).²⁵

Pada 27 Juli 1905, seluruh pasukan Belanda bergerak ke Bajoe dan mulai melakukan pengintaian. Keesokan harinya (28 Juli) mereka mulai berupaya melakukan pendaratan dengan menggunakan sekoci, didahului dan disertai dengan tembakan-tembakan meriam dari kapal-kapal perang Belanda. Tembakan-tembakan meriam itu ditujukan terhadap benteng-benteng pertahanan laskar Bone di Bajoe dan daerah sekitarnya. Di samping itu, juga dimaksudkan untuk melindungi sekoci-sekoci pasukan Belanda yang sedang melakukan pendaratan. Upaya pendaratan pasukan Belanda itu, mendapat perlawanan dari laskar Bone di bawah pimpinan Baso Pagilingi Adul Hamid sebagai Panglima Perang (*Petta Ponggawae*) Kerajaan Bone. Mereka senantiasa bersiap siaga menyongsong kedatangan atau pendaratan musuh (pasukan Belanda) di sepanjang pesisir pantai Bajoe. Demikian pula tembakan-tembakan meriam dari kapal-kapal perang Belanda, dibalas pula dengan tembakan-tembakan meriam yang tidak kalah hebatnya dari laskar Bone (Anonim,1905-1906:313; Mattulada, 1998:373; Ali, 1984:20).

Laskar Bone yang mendapat bantuan dari Gowa, Wajo, dan Soppeng memberikan perlawanan terhadap setiap upaya pendaratan

²⁵ Kegagalan tersebut memunculkan perdebatan dalam pers kolonial. Dengan judul sinis *Patiro-Patira*. Kata Patira merujuk pada kata *patiras* dalam bahasa Prancis yang berarti kambing hitam. Kesalahan dalam pendaratan di Ujung Pattiro, antara lain karena pengetahuan topografis yang hampir tidak ada sama sekali dari pimpinan ekspedisi di Sulawesi Selatan (Geuns,1905: 288).

pasukan Belanda di pantai Bajoe. Namun pasukan Belanda berhasil mendarat di sebelah utara Bajoe, yaitu pantai Benek atau sekitar daerah Toro pada 28 Juli 1905 (Anonim,1905:354; Anonim,1915:31). Pendaratan pasukan Belanda itu, disertai dengan tembakan-tembakan meriam yang hebat dari kapal-kapal perang Belanda terhadap kubu-kubu pertahanan laskar Bone. Keesokan harinya (29 Juli) kembali terjadi pertempuran sengit antara laskar Bone dengan pasukan Belanda di daerah Benek, Toro, Tippulue, Lona, Cellu. Pasukan Belanda akhirnya berhasil menguasai Bajoe dan daerah sekitarnya pada hari itu.²⁶ Bahkan pasukan Belanda berhasil menduduki dan menguasai Watampone, ibu kota Kerajaan Bone pada 30 Juli 1905 (Anonim, 1915:43; Tol, 2009:178; Patunru,1989:279).

Walaupun pasukan Belanda berhasil merebut dan menguasai pertahanan laskar Bone di Bajoe dan Watampone, tetapi mereka masih merasa belum mencapai sukses yang sepenuhnya. Sebab, Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama para pembesar kerajaan belum berhasil ditawan dan dipaksa untuk mengakui kekuasaan pemerintah Belanda. Oleh karena itu, pimpinan ekspedisi militer Belanda, di samping mempersiapkan pasukan khusus untuk mengejar

²⁶ Berdasarkan sejumlah sumber bahwa laskar Bone (menurut dugaan Ch. Kies sekitar 7.000 orang, sedangkan menurut Abd. Razak Daeng Patunru sekitar 2.000 orang) yang terlibat dalam pertempuran di Bajoe dan sekitarnya pada 28 dan 29 Juli 1905. Dalam pertempuran itu, laskar Bone mengalami kerugian yang besar dan kehilangan sekitar 1.000 orang. Menurut Abd. Razak Daeng Patunru, bahwa Bone mengalami kerugian 256 orang tewas dan 9 orang luka-luka, termasuk di dalamnya kurang lebih 100 yang tewas dari kalangan bangsawan tinggi Bone. Sedangkan di pihak pasukan Belanda yang meninggal 48 orang, luka berat 9 orang, dan luka ringan 11 orang, termasuk yang meninggal seorang letnan infanteri yang bernama Posthast dan seorang penembak ulung (*fuseliur*). Tampaknya kerugian yang dialami Bone tersebut, erat kaitannya dengan taktik dan strategi perang yang baru dicanangkan setelah ekspedisi militer Belanda telah siap melancarkan penyerangan, sehingga sangat sederhana dan tidak tertata dengan baik (Kadir,dkk.,1984:48; Patunru,1989:278-279; Kies,1935: 827). Menurut para tawanan perang dan orang-orang yang menyerah, bahwa pasukan Bone berjumlah paling sedikit 2.000 orang dan yang menjadi korban sekitar 500-1.000 orang. Sumber lain menyebutkan bahwa jumlah pasukan Bone 4.000 orang yang gugur 600 orang. Sedang di pihak Belanda tiga orang korban meninggal (Anonim,1905:356; Tol,2009:177).

dan menangkap raja Bone, juga mempersiapkan penyerangan ke pusat-pusat pertahanan laskar Bone di pedalaman. Pasukan Belanda yang melancarkan serangan ke pedalaman, secara berturut-turut berhasil menduduki Pasempe (2 Agustus), Ulaweng (3 Agustus), Tanjung (4 Agustus), dan Otu, Manapotu, Amali, Palongki (5 Agustus), serta Laliku dan Kalu pada 6 Agustus 1905 (Kielstra, 1910:362; Patunru, 1989:280).

Kekalahan beruntun tersebut, mendorong dewan peperangan Kerajaan Bone memutuskan untuk mengungsikan raja Bone keluar dari wilayah kekuasaan Bone untuk menjalin kerjasama dengan kerajaan lain dalam melawan Belanda. Sementara itu, pasukan khusus Belanda di bawah pimpinan Mayor Hildering yang bertugas mengejar dan menangkap raja Bone, terus berusaha mencari keterangan mengenai keberadaannya. Hampir setiap hari usaha pencarian dan pengejaran yang dilakukan oleh pasukan Belanda terhadap raja Bone dan pengawalinya, tetapi selalu mengalami kegagalan. Sebab Sang mayor yang membututi jejak raja Bone selalu tertinggal satu hari perjalanan (Tol, 2009:180). Bahkan beberapa kali pasukan khusus Belanda, menderita kerugian akibat tindakan rakyat yang memperdayai mereka dengan menunjukkan tempat tidak sesuai tempat keberadaan raja Bone bersama pengawalinya. Oleh karena itu, pasukan Belanda terpaksa mempergunakan petunjuk jalan yang diikat dengan tali dan diikuti oleh rombongan pasukan (Patunru, 1989:282; Ali, 1986:67).

Sikap dan tindakan rakyat tersebut, menunjukkan bahwa rakyat Bone turut mendukung rajanya dalam perjuangan melawan pasukan Belanda atau agar tetap tidak mengakui kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Itulah sebabnya rakyat senantiasa memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu, agar menyulitkan pasukan Belanda dalam menemukan tempat persembunyian rajanya. Atau sekurang-

kurangnya dapat mengalihkan perhatian pasukan Belanda ke tempat lain, agar raja Bone beserta pengikut-pengikutnya tetap dalam keadaan aman atau pun agar mereka dapat dengan leluasa mengungsikan diri ke luar dari tempat persembunyian mereka menuju ke tempat yang lebih aman.

Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama laskarnya berhasil meloloskan diri dari pasukan Belanda dan tiba di Lamuru yang berbatasan dengan Soppeng. Daerah Lamuru merupakan salah satu pusat pertahanan Bone yang dikenal dengan Dulung Lamuru dan bertanggung jawab atas wilayah pertahanan Bone bagian barat, dijadikan sebagai tempat konsolidasi bagi laskar Bone. Ketika raja Bone berada di Lamuru, utusan datu Soppeng datang menawarkan bantuan, baik berupa bantuan pasukan dan perbekalan, maupun berupa jaminan pengamanan dan perlindungan serta undangan beristirahat di daerah Soppeng kepada raja Bone bersama laskarnya. Mereka tidak menolaknya dan memilih Citta untuk beristirahat. Itulah sebabnya ketika pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Hilderling tiba di Citta pada 21 Agustus 1905, tidak dapat menemukan keberadaan raja Bone bersama pengawalnya dan segera mengirim pesan kepada datu Soppeng untuk menahan raja Bone (Anonim, 1915:60).

Namun datu Soppeng tidak memenuhi permintaan itu, dan membiarkan raja Bone bersama para pengawalnya meninggalkan Soppeng untuk melanjutkan perjalanan ke utara dengan tujuan Pegunungan Awo (Tanah Toraja). Sebelum mereka sampai di tempat tujuan, raja Bone bersama laskarnya terlebih dahulu melalui beberapa daerah dan harus pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain di wilayah kekuasaan Wajo, yaitu antara lain Wage, Tempe, dan Impakimpa.²⁷ Ketika mereka tiba di Impakimpa, Ranreng Tua Wajo

²⁷ Perlu dikemukakan bahwa Sullewatan Impakimpa gugur dalam pertempuran dengan pasukan Belanda di Lona, sebelah timur Cellu pada tanggal 29 Juli 1905. Hal ini

menawarkan kepada raja Bone, agar berkenan tinggal di Wajo dan apabila pasukan Belanda datang menyerang, maka pasukan Wajo yang akan tampil untuk menghadapi hingga tetesan darah yang terakhir.

Dalam perkembangan selanjutnya, Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama pengawalnya melanjutkan perjalanan, setelah beristirahat selama beberapa hari di daerah Impakimpa. Mereka bertolak dari Impakimpa menuju ke utara dengan melalui Pajalele, Ujung, dan selanjutnya sampai di Lowa. Ketika mereka berada di Lowa, utusan Cakkuridi Wajo datang menemui dan bersedia memberikan bantuan kepada raja Bone dalam meneruskan perjuangan menentang atau melawan pasukan Belanda. Bahkan Cakkuridi Wajo menawarkan mereka untuk beristirahat di istananya di Lowa (Abduh,dkk.,1985:108; Amir, 2003:107).

Uraian singkat tersebut menunjukkan bahwa ada jalinan kerjasama antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Soppeng dalam menghadapi ekspedisi militer Belanda pada khususnya dan perjuangan menentang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan pada umumnya. Sebab tanpa dukungan dan bantuan dari datu dan rakyat Soppeng, raja Bone bersama pengawalnya tentu tidak dapat meloloskan diri dari kejaran pasukan Belanda di daerah Soppeng. Demikian pula jalinan kerjasama dengan Kerajaan Wajo, bukan hanya baru tampak setelah raja Bone bersama pengawalnya meninggalkan wilayah kekuasaan Bone dalam melanjutkan perjuangan melawan pasukan Belanda, dengan melalui perang gerilya di wilayah kekuasaan Kerajaan Wajo. Tetapi jalinan kerjasama itu, telah tampak ketika pasukan Belanda melancarkan serangan secara besar-besaran terhadap laskar Bone di Bajoe dan sekitarnya pada 28 dan 29 Juli 1905. Faktanya

menunjukkan bahwa betapa dekatnya hubungan kerjasama atau kekeluargaan antara Bone dengan Impakimpa pada khususnya dan Wajo pada umumnya (Arung Manajeng, 1967:31; Ernawati, 1997:94).

adalah gugurnya Sullewatang Impakimpa (dari Wajo), salah seorang pimpinan pasukan di pihak laskar Bone pada pertempuran di Bajoe. Selain itu, laskar Wajo di bawah pimpinan Arung Bola La Makkaraka juga telah aktif membantu laskar Bone dalam perlawanan terhadap pasukan Belanda di Pallime dan Sungai Cenrana (Patunru, 1989:283; Amir,2003:108).

D. Penataan Wilayah Kekuasaan Belanda

Setelah pusat Kerajaan Bone berhasil diduduki oleh pasukan Belanda, aksi militer selanjutnya diarahkan kepada kerajaan-kerajaan lainnya, seperti Kerajaan Wajo, Soppeng, Sidenreng, Luwu, Gowa, Barru, Suppa, Sawitto, Enrekang dan lainnya. Menurut Gubernur Sulawesi C.A. Kroesen bahwa “sukses gemilang tindakan militer di Bone, hanya menyelesaikan separuh pekerjaan” (Kroesen, 1906: MvO; Harvey,1989: 49). Itulah sebabnya setelah tindakan penaklukan terhadap Kerajaan Bone, dilakukan pula tindakan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lainya di Sulawesi Selatan. Selain itu, juga karena pada umumnya penguasa lokal bersikap menolak tuntutan Belanda sehingga tindakan militer terus dilancarkan. Meskipun demikian tindakan militer yang dilancarkan pemerintah akhirnya berhasil memaksa kerajaan-kerajaan itu untuk tunduk di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Sementara kerajaan-kerajaan kecil tidak melakukan perlawanan yang berarti. Bahkan sebagian langsung bersedia menerima dan menandatangani pernyataan pendek yang disodorkan oleh Belanda. Hal itu tentunya didasarkan pada kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan besar dan kuat saja tidak mampu menghadapi agresi militer Belanda.

Sehubungan dengan itu, pimpinan ekspedisi militer Belanda Kolonel C.A. van Loenen, menganggap perlu memindahkan pangkalan operasi militernya dari Watampone ke Pompanua (Bone

Bagian Utara). Sebab, letaknya sangat strategis dalam operasi militer selanjutnya. Selain untuk mengejar dan menangkap raja Bone bersama panglima perangnya, juga untuk menduduki daerah-daerah di wilayah Bone bagian utara yang masih bergolak. Di samping itu, juga untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama yang telah aktif membantu perlawanan Bone terhadap pasukan Belanda, yaitu Wajo, Soppeng, Sidenreng, dan Luwu (Anonim,1905-1906:420; Mattulada,1998: 378; Patunru, 1989:283). Pada tanggal 24 Agustus 1905, C.A. van Loenen memindahkan pusat komando operasinya militernya ke Pompanua. Sejak itu, pasukan Belanda mulai melancarkan gerakan operasi militernya di Wajo. Hal ini bukan hanya dimaksudkan untuk menaklukkan Wajo, melainkan juga bertujuan untuk mengejar dan menangkap raja Bone bersama panglima perangnya (*petta ponggawae*).²⁸

Selain itu, pasukan Belanda juga berusaha menguasai Soppeng. Itulah sebabnya C.A. van Loenen bersama pasukannya berangkat ke Soppeng dan mereka tiba Watansoppeng pada 25 September 1905. Pimpinan pasukan Belanda tersebut mengadakan pertemuan di istana datu Soppeng pada 28 September 1905. Pertemuan itu dihadiri oleh Datu Soppeng Sitti Zainab Arung Lapajung bersama beberapa pembesar kerajaan dan raja-raja bawahannya (Anonim,1905-06: 421; Patunru,2004:113). Meskipun pada pertemuan datu Soppeng bersama para pembesar kerajaan bersedia menerima *korte verklaring*

²⁸ Atas operasi militer itu, Ranreng Tua dari Impakimpa terpaksa menyerah kepada pasukan Belanda pada 27 Agustus 1905. Sementara *Petta Pangulunna Jowae* La Muhammad Ali Arung Cenrana menyerah di Pompanua pada 1 September 1905. Tidak lama kemudian, pimpinan pasukan Belanda memperoleh berita yang pasti, bahwa Raja Bone La Pawaoi Karaeng Segeri dan *Petta Ponggawae*, berada di daerah Pitumpanua (perbatasan Wajo dan Luwu). Oleh karena itu, pimpinan pasukan Belanda segera mengerahkan pasukan khusus yang dipimpin oleh Kapten "Marchaussee" March Stipriaan Luisius, berangkat ke Pitumpanua pada 5 September 1905, untuk mengejar dan menangkap raja Bone bersama panglima perangnya (Anonim,1915: 97; Patang, 1976: 24; Mattulada,1998:378).

(pernyataan pendek), namun sejumlah pembesar kerajaan yang tidak menghadiri pertemuan itu menolak pernyataan itu, di antaranya Sulle Datu Soppeng Baso Balusu (wakil Datu Soppeng), Watan Lipue La Palloge (Kepala Angkatan Perang Kerajaan Soppeng), Datu Mario ri Awa La Mappe dan beberapa orang raja bawahan. Mereka merupakan penentang Belanda secara terang-terangan. Sulle Datu Soppeng Baso Balusu sebagai pemimpin gerakan misalnya, memusatkan perlawanannya di wilayah Soppeng bagian barat. Beberapa waktu sebelum pasukan Belanda memasuki Soppeng, ia telah membentuk pasukan bersenjata daerah di Balusu dan sekitarnya. Pembentukan pasukan bersenjata ini dimaksudkan untuk mengadakan perlawanan terhadap serangan pasukan Belanda (Arsip Soppeng, Vol.1:viii; Hadriah, 1999:102).

Pertemuan antara pimpinan pasukan Belanda Kolonel C.A. van Loenen dengan Datu Soppeng Sitti Zainab Arung Lapajung yang diselenggarakan di istana datu Soppeng, menghasilkan keputusan yang sangat memuaskan bagi pemerintah Hindia Belanda. Sebab, datu Soppeng bersama pembesar-pembesar Kerajaan Soppeng bersedia menandatangani *karte verklaring* (pernyataan pendek), yaitu pernyataan penyerahan kekuasaan sepenuhnya kepada pemerintah Hindia Belanda. Di samping itu, C.A. van Loenen juga menuntut kepada pemerintahan Kerajaan Soppeng yang telah membantu perlawanan Bone sebagai berikut: (1) harus membayar biaya perang kepada pemerintah Hindia Belanda sejumlah f 75.000, (2) menyetujui rencana-rencana pemerintah Hindia Belanda tentang pemungutan pajak pembuatan jalan raya, penghapusan perbudakan dan sebagainya, larangan pemakaian senjata tajam di tempat umum dan pengumpulan senjata-senjata api (Arsip Soppeng, Vol.1:ix; Patunru,2004:114).

Selain itu, pimpinan ekspedisi militer Belanda Kolonel C.A. van Loenen juga mendesak kepada Datu Soppeng Sitti Saenab Arung

Lapajung, supaya berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan peringatan kepada Sulle Datu Soppeng Baso Balusu dan kawan-kawannya; (1) menghentikan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, (2) segera datang menyerahkan diri kepada pimpinan pasukan Belanda. Meskipun datu Soppeng telah memberikan peringatan kepada para penentang Belanda itu, tetapi tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, pasukan Belanda mulai mengadakan operasi militer untuk menangkap Baso Balusu dan kawan-kawan di daerah Balusu dan sekitarnya pada permulaan Oktober 1905. Operasi militer Belanda di bawah pimpinan Kapten H.A. de Kooy di wilayah Soppeng bagian barat ini berlanjut pada permulaan Nopember 1905. Namun pasukan Belanda belum berhasil mengalahkan laskar Soppeng yang dipimpin oleh Sulle Datu Soppeng Baso Balusu (Kooy, 1909: MvO; Patunru, 2004: 114-115).

Pada tanggal 10 Nopember 1905 terjadi pertempuran antara pasukan Kapten H.A. de Kooy dengan laskar Soppeng di tempat yang bernama Saring. Pada pertempuran tersebut, 32 orang dari pihak laskar Soppeng gugur, dan 20 pucuk senapan *beumont* dirampas oleh pasukan Belanda. Pada tanggal 12 Nopember 1905 dan pada hari-hari berikutnya terjadi lagi pertempuran di daerah Balusu dan sekitarnya antara pasukan Belanda dan laskar Soppeng. Pada peristiwa ini pasukan Belanda berhasil merampas beberapa senjata *lila*, 20 senapan *beumont*, dan puluhan ribu peluru. Namun pasukan Belanda juga mengalami kerugian, sebab beberapa orang anggota pasukannya tewas dan luka-luka. Sedangkan dari pihak Soppeng sekitar 100 orang laskar gugur dan 150 orang yang luka (Arsip Celebes, No. 7A; Patunru, 2004: 115).

Kapten H.A. de Kooy memperoleh informasi yang dapat dipercaya pada 10 Desember 1905, bahwa Sulle Datu Baso Balusu bersama Watang Lipue La Palloge, Datu Mario ri Awa La Mappede, dan

La Ceppaga Daeng Beta (saudara dari Pabbicara Barru La Bombai Daeng Maggading), berada di Palakka di atas bukit Umpungan, bagian sebelah timur Soppeng. Oleh karena itu, Kapten H.A. de Kooy berangkat dengan sebagian pasukannya menuju ke Watansoppeng, melalui Parepare, Massepe, dan Batu-Batu pada pertengahan Desember 1905 (Patunru, 2004:115). Atas tekanan militer dan pendekatan diplomatis yang dilancarkan terus menerus terhadap para penentang tersebut, pasukan Belanda akhirnya berhasil memadamkan gerakan perlawanan di Soppeng dan daerah sekitarnya.

Setelah gerakan perlawanan tersebut berhasil dipadamkan, pemerintah Hindia Belanda mulai menata wilayah dan kedudukan kekuasaan pemeritahan kolonialnya di Soppeng. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa militer setempat. Pengambilalihan kekuasaan tertinggi itu, setelah Datu Soppeng Sitti Saenab Arung Lapajung bersama para anggota hadat Kerajaan Soppeng secara resmi menandatangani *korte verklaring* pada 18 Januari 1906. Implikasi dari *korte verklaring* ini bukan hanya lenyapnya kedudukan Kerajaan Soppeng dan seluruh wilayah kekuasaannya menjadi wilayah pemerintah Hindia Belanda, melainkan juga hilangnya kedudukan kekuasaan para penguasa kerajaan atau bangsawan pada pusat kerajaan dan sebagai titik awal dari pemerintahan kolonial Belanda di Soppeng. *Korte verklaring* ini kemudian mendapat penetapan persetujuan dan penguatan cq pengakuan dan pengesahan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 10 Juli 1906 (Pemda,1991:194). Pemerintah Kerajaan Soppeng yang terdiri atas Datu Soppeng Sitti Zaenab Arung Lapajung, Sulle Datu Baso Balusu, Arung Bila La Tenridolong Baso Bila, Watang Lipue La Palloge dan tiga pabbicara hadat pada waktu itu, secara resmi berakhir sejak penandatanganan *korte verklaring* dan awal kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Soppeng.

Secara umum pemerintah Hindia Belanda, berhasil menguasai

seluruh Sulawesi Selatan pada 1906. Penguasaan yang didahului oleh ekspedisi militer Belanda pada 1905 itu, bukan hanya berhasil memaksa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan untuk menyerahkan kekuasaannya, melainkan juga mereka bersedia menerima dan mengakui kedudukan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda atas wilayah mereka. Untuk menata wilayah kekuasaan di daerah Sulawesi Selatan, maka Gubernur Sulawesi H.A.N. Swart mengeluarkan surat keputusan tertanggal 31 Desember 1906 No. 6041/2 tentang penataan administrasi pemerintahan. Surat keputusan tentang penataan pemerintahan itu bersifat sementara, sambil menanti keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda secara resmi. Penataan pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan baru terselenggara setelah dikeluarkannya peraturan penataan pemerintahan yang diundangkan dalam lembaran negara (*staatblad*) 1910 No. 573 yang dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1911. Pada dasarnya keputusan yang termuat dalam lembaran negara itu sama dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi H.A.N. Swart pada tanggal 31 Desember 1906 No. 6041/2.

Berdasarkan peraturan tersebut, wilayah Sulawesi Selatan (termasuk Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat sekarang) dijadikan satu wilayah pemerintahan yang dikenal dengan Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*). Wilayah ini dibagi ke dalam tujuh afdeling (bagian pemerintahan), yaitu Afdeling Makassar, Afdeling Bone, Afdeling Parepare, Afdeling Luwu, Afdeling Mandar, dan Afdeling Buton dan Pesisir Timur Sulawesi. Kepala pemerintahan diembankan kepada seorang pejabat pemerintahan yang disebut gubernur. Di bagian pemerintahan (afdeling) ditempatkan seorang asisten residen yang berkedudukan sebagai pimpinan pemerintahan di wilayah tersebut. Bagian pemerintahan (afdeling) dibagi ke dalam beberapa odefdeling (cabang pemerintahan). Pada setiap onderafdeling ditempatkan

seorang kontrolir untuk melaksanakan pemerintahan dan kekuasaan (*Staatblad*, 1910, No.573).

Wilayah bekas Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo, dan Kerajaan Soppeng dijadikan satu wilayah bagian pemerintahan yang disebut Afdeling Bone. Pada awal pelaksanaan pemerintahan kolonial Belanda itu, Gubernur H.AN. Swart mengangkat setiap komandan pasukan yang berada di wilayah afdeling sebagai asisten residen. Pelaksanaan pemerintahan militer-sipil itu dimaksudkan untuk dapat memperkuat dan mempertahankan pemerintahan dari kekuasaan Hindia Belanda yang pada waktu itu belum stabil mengingat masih terdapat kelompok yang menentang. Selain itu, juga untuk menjaga kemungkinan munculnya perlawanan dari pihak yang merasa dirugikan akibat beralihnya kekuasaan ke tangan pemerintah Hindia Belanda. Karena kerajaan-kerajaan lokal ditiadakan dan wilayahnya beralih di bawah pemerintahan dan kekuasaan langsung. Pemerintah Hindia Belanda mengajukan menerapkan bentuk pengaturan wilayah administrasi baru dan menghendaki dilaksanakan secara ketat

Pusat pemerintahan Afdeling Bone berkedudukan di Pompanua. Dalam penataan pemerintahan di Afdeling Bone, bagian pemerintahan ini dibagi ke dalam lima cabang pemerintahan yang disebut onderafdeling, yaitu Onderafdeling Bone, Onderafdeling Bone Utara, Onderafdeling Bone Selatan, Onderafdeling Wajo, dan Onderafdeling Soppeng. Di setiap onderafdeling itu ditempatkan seorang pejabat pemerintahan Hindia Belanda yang berkedudukan sebagai kontrolir (*countroleur*) atau *gezaghrbber*. Ia bukan hanya merupakan pejabat pelaksana pemerintahan yang langsung berhubungan dengan pejabat pimpinan pemerintahan bumiputra. Melainkan ia juga menerima dan melaksanakan segala perintah, peraturan dan ketentuan yang diembankan kepadanya oleh asisten residen.

Pada awal penataan pemerintahan, wilayah kekuasaan pejabat

bumiputra belum ditata secara baik. Penataan wilayah pemerintahan pejabat bumiputra baru terlaksana pada 1911 (*Staatblad* 1910, No. 573) yang kemudian disempurnakan pada 1917 (*Staatblad* 1916 No. 352). Setiap onderafdeling dibagi ke dalam beberapa distrik yang dipimpin oleh seorang pejabat bumiputra yang disebut kepala distrik. Karena itu kontrolir membawahi beberapa pejabat bumiputra yang berkedudukan sebagai pimpinan pemerintahan pada tingkat distrik (*district*) atau yang kemudian lebih dikenal dengan “daerah adat” (*adat gemeenschap*). Misalnya, Onderafdeling Bone Utara dibagi dalam beberapa, di antaranya Distrik Cenrana, Distrik Timurung, dan Distrik Sailong, dengan pusat pemerintahan onderafdeling di Pompanua. Onderefdeling ini berada langsung di bawah Asisten Residen Bone. Oleh karena itu, Pompanua bukan hanya sebagai pusat cabang pemerintahan Onderafdeling Bone Utara, melainkan juga menjadi pusat bagian pemerintahan Afdeling Bone (*Memori Betreffende*, 1912:195-96).

Sementara Onderefdeling Bone memilih Watampone sebagai pusat pemerintahan. Wilayahnya meliputi pula beberapa distrik, di antaranya Distrik Watampone, Distrik Awangpone, Distrik Palakka, Distrik Tanete ri Awang, Distrik Amali, Distrik Ulaweng, Distrik Ponre, Distrik Barebbo, Distrik Sibulue, Distrik Cina, Distrik Bengo, dan Distrik Lamuru. Onderafdeeling ini berada di bawah pimpinan seorang kontrolir *Binnenlandsch Bestuur* (BB), atau sering juga di bawah seorang komandan tentara dengan menggunakan titel *gezaghabber*, dan berkedudukan di Watampone (*Memori Betreffende*, 1912:197-198). Demikian pula dengan Onderafdeling Bone Selatan, ditempatkan seorang *gezaghebber*, dan berkedudukan di Mare. Wilayahnya meliputi Distrik Mare, Distrik Tonra, Distrik Salomekko, Distrik Kajuara, Distrik Kahu, Distrik Libureng, dan Distrik Cani (*Rookmaaker*, 1915:284).

Onderafdeling Wajo meliputi bekas Kerajaan Wajo, yang terdiri atas Distrik Bettempola, Distrik Talotenreng, Distrik Tua, dan Distrik Pitampanua (Kera, Bulete, Batu, Lauwa, Tanete, Pasoloreng, dan Awo). Sebelum menjadi sebuah distrik, Pitumpanua yang terdiri atas tujuh *wanua* itu merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Bone yang dibeli dari Kerajaan Luwu. Pada 1907, Pitumpanua dimasukkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke dalam daerah kekuasaan dan pemerintahan Onderafdeling Wajo. Onderafdeling ini dipimpin oleh seorang *gezaghebber* dengan pusat pemerintahannya di Sengkang (Wolhoff, 1947: MvO; Patunru, 1983:71).

Sementara Onderafdeling Soppeng meliputi bekas Kerajaan Soppeng, yang terdiri atas Distrik Lalebbata, Distrik Mario ri Wawo, Distrik Mario ri Awa, Distrik Lili ri Lau, Distrik Lili ri Aja, Distrik Pattojo, dan Distrik Citta. Pada onderafdeling ini ditempatkan seorang *gezaghebber* sebagai pelaksana kekuasaan dan pemerintahan Hindia Belanda. Ia berkedudukan di Watansoppeng, yaitu pada sebuah bangunan kayu berupa rumah panggung yang terletak di sebelah timur Masjid Raya (sekarang). Dari rumah panggung inilah kemudian dibangun gedung kantor parmanen yang terletak di atas bukit dan berhadapan langsung dengan istana datu Soppeng yang juga terletak di atas bukit. Gedung kantor ini diresmikan pada 30 April 1909. Konon peresmian kantor *gezaghebber* Soppeng yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai kantor *tuan petoro* itu berkaitan dengan hari kelahiran dari putri Ratu Belanda Wilhelmina (1890-1948), yaitu Yuliana (Kooy, 1909: MvO; Gezaghebber, 1927: MvO; Nur, 2007:202).

Onderafdeling Soppeng yang terdiri atas tujuh distrik tersebut, dan setiap distrik itu terbagi lagi ke dalam beberapa onderdistrik atau distrik bawahan. Misalnya Distrik Lalabbata terdiri atas Onderdistrik Lalabbata Alau, Onderdistrik Lalabbata Tennga, dan Onderdistrik Lalabbata Riaja. Distrik Mario ri Wawo terdiri atas Onderdistrik

Mario ri Lau, Onderdistrik Mario ri Tennga, dan Onderdistrik Mario ri Aja. Distrik Mario ri Awa terdiri atas Onderdistrik Awang Salo, Onderdistrik Attang Salo, Onderdistrik Bulu, dan Onderdistrik Panincong. Distrik Lili ri Lau terdiri atas Onderdistrik Lompengeng Riaja Salo, Onderdistrik Lompengeng Rilau Salo, Onderdistrik Macanre, dan Onderdistrik Baringeng. Distrik Lili ri Aja merupakan penggabungan dari sekian banyak *lili* atau *wanua*, di antaranya Galung, Ganra, Lompulle, Bakke, Appanang, Jampu, dan lili yang terletak di sebelah barat Sungai Walanae. Distrik Pattojo terdiri atas Onderdistrik Pattojo dan Onderdistrik Laccokkong. Distrik Citta terdiri atas Onderdistrik Citta Manorang dan Onderdistrik Citta Maniang. Pada setiap distrik atau onderdistrik tersebut ditempatkan seorang pejabat pemerintahan bumiputra, bangsawan di daerah itu (Arsip Celebes, No.7C; Arsip Celebes, No.9; Patunru, 2004: 117).

Pada awal penataan pemerintahan tersebut, pengaturan jabatan bagi pejabat bumiputra yang berfungsi sebagai pimpinan wilayah tingkat distrik belum terselenggara dengan baik. Menurut A.J. Baron Quarles de Quarles (Mei 1908-Agustus 1910), Gubernur *Celebes en Onderhoorigheden*, hambatan bagi pengaturan jabatan pejabat bumiputra itu karena bangsawan di daerah masih belum dapat menerima sepenuhnya dominasi pemerintahan Hindia Belanda dan bersikap menentang (Quarles, 1910:MvO). Meskipun demikian pengaruh kekuasaan dan pemerintahan kolonial berangsur-angsur meluas hingga daerah terkecil, *wanua* maupun kampung. Masa itu juga ditandai dengan perubahan-perubahan struktur pemerintahan. Namun perubahan-perubahan itu tidak didukung oleh tersedianya jumlah tenaga yang dapat digunakan untuk melaksanakan pemerintahan. Kekurangan tenaga yang dapat digunakan untuk menata dan melaksanakan pemerintahan, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Selain

itu, juga karena tanggapan penolakan dari para bangsawan di daerah itu, sehingga pemerintah kolonial memusatkan perhatian pada usaha memperkuat dan mempertahankan kekuasaan dan pemerintahan dengan menggunakan kekuatan militer.

Pada tahun 1916, pemerintah Hindia Belanda mulai memusatkan perhatian dan berusaha menggunakan bangsawan dalam pelaksanaan pemerintahan. Sebab jika diperhatikan penentuan wilayah pemerintahan distrik, atau yang kemudian dinamakan daerah adat (*adat gemeenschap*), maka tampak bahwa pemerintah kolonial memperhatikan kedudukan suatu daerah menurut tradisi setempat. Hal itu dilakukan untuk menghindari pertentangan dan tanggapan penolakan. Pada dasarnya wilayah distrik atau daerah adat adalah merupakan bekas kesatuan pemerintahan setempat yang mencakup satu kesatuan masyarakat. Karena itu pemerintah kolonial berusaha memperkuat dan mempertahankan kedudukan penguasa daerah serta menggeser kedudukan penguasa kerajaan atau penguasa pusat dari susunan pemerintahan. Kedudukan kerajaan digantikan dengan cabang pemerintahan atau *onderafdeling* dan ditempatkan seorang pejabat pemerintahan Belanda yang disebut kontrolir atau *tuan petoro*.

Berdasarkan penataan susunan pemerintahan di *Onderafdeling Soppeng*, setiap distrik atau daerah adat terdiri dari beberapa kesatuan administrasi pemerintahan *onderdistrik* dan *lili* atau *wanuwa* hingga terkecil yang disebut kampung. Luas dan jumlah kampung satu distrik atau daerah adat dan *onderdistrik* bergantung dari luas dan jumlah kampung yang dimiliki daerah itu pada waktu lampau. Itulah sebabnya terdapat daerah adat yang luas dan memiliki jumlah kampung yang banyak dan sebaliknya. Misalnya distrik atau daerah adat Lalabbata memiliki wilayah yang terdiri atas 93 kampung pada tahun 1931. Distrik Mario ri Wawo terdiri atas 95 kampung dan Distrik Mario ri Awa sebanyak 46 kampung. Distrik Lili ri Aja terdiri atas 44

kampung dan Distrik Lili ri Lau sebanyak 57 kampung. Sementara Distrik Pajjoto terdiri atas 25 kampung dan Distrik Citta sebanyak 27 kampung pada tahun 1931 (Arsip Celebes, No.9).

Pada wilayah bagian pemerintahan atau afdeling dan cabang pemerintahan atau onderafdeling ditempatkan pejabat pemerintah Belanda. Onderafdeling merupakan wilayah pemerintahan terkecil bagi pejabat pemerintah Belanda dan kepala pemerintahannya merupakan pimpinan pemerintahan Belanda terendah. Di wilayah daerah adat atau distrik, onderdistrik dan kampung ditempatkan pejabat pemerintah bumiputra dan kepala pemerintahan daerah adat atau distrik merupakan pimpinan pemerintahan bumiputra tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan bumiputra dan jenjang pemerintahan bumiputra berada di bawah jenjang pemerintahan Belanda. Karena itu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan Hindia Belanda di Onderafdeling Soppeng menunjukkan penumpangan pemerintahan dan kekuasaan Belanda di atas pemerintahan dan kekuasaan bumiputra.

Penataan wilayah pemerintahan bumiputra, tampaknya tidak mengubah bentuk pemerintahan tradisional bumiputra awal, sebelum terbentuk menjadi satu kerajaan. Karena wilayah daerah adat atau distrik merupakan bentuk kesatuan kaum atau *wanuwa*. Sejak dahulu setiap *wanuwa* atau *lili* terdiri dari beberapa kampung. Perbedaannya hanya terletak pada pengertian kampung dalam pemerintahan tradisional bumiputra dan dalam pemerintahan bumiputra pada masa kekuasaan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan tradisional bumiputra, kampung hanya merupakan suatu kelompok keluarga yang bermukim di luar pusat pemukiman. Sedangkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kampung merupakan satu kesatuan wilayah pemerintahan yang memiliki batas-batas dari satu kelompok masyarakat yang mendiaminya (Poelinggomang, 2004: 95).

Perubahan yang terjadi hanya pada tingkat kesatuan yang besar sebagai satu kerajaan. Kedudukan kerajaan dan pemerintah pusat pemerintahan tradisional bumiputra ditiadakan. Pemerintah Hindia Belanda membentuk dan menggantikan kedudukan itu dengan cabang pemerintahan atau *onderafdeling*, pemerintahan terendah pemerintah Hindia Belanda. Perubahan itu mendorong perhatian tidak hanya pada usaha pemerintah Hindia Belanda untuk mengalihkan keterikatan dan ketergantungan pejabat pemerintah bumiputra pada pejabat pemerintah Belanda agar mereka dapat menunjukkan kesetiaan dan ketaatan. Melainkan juga usaha pemerintah Hindia Belanda menghadapi kelompok yang tergeser atau tersisih dalam penataan pemerintahan itu dan rakyat dalam pelaksanaan pemerintahan dan kekuasaan. Hal ini jelas memutuskan hubungan kekuasaan langsung antara raja, pejabat pusat kerajaan, dan lapisan istana di satu pihak dan penguasa *wanuwu* dan rakyatnya di pihak lain. Itulah sebabnya pada awal penataan wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, banyak mendapat tanggapan penolakan dan perlawanan dari bangsawan pada pusat kerajaan.

E. Pelaksanaan Pemerintahan

Pelaksanaan pemerintahan di wilayah pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya setelah ekspedisi militer Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah ini adalah bentuk pemerintahan sipil-militer. Bentuk pemerintahan ini didasarkan pada surat keputusan pemerintah, tertanggal 9 Juli 1906. Pelaksanaan pemerintahan sipil-militer diembankan kepada kepada H.A.N. Swart, yang tampil menggantikan C.A. Kroesen (1903-1906) sebagai gubernur Sulawesi pada tanggal 3 September 1906 (Swart, 1908:MvO). Swart adalah seorang anggota militer dari pasukan infantri yang pada waktu itu berpangkat Letnan Kolonel. Untuk melaksanakan pemerintahan,

Gubernur Swart mengukuhkan setiap pimpinan pasukan yang berada di bagian pemerintahan (afdeling) dan cabang pemerintahan (onderafdeling) menjadi pimpinan pemerintahan di wilayah pengawasannya (Poelinggomang, 2004:96).

Pelaksanaan pemerintahan sipil-militer tersebut, bukan hanya dimaksudkan untuk dapat memperkuat dan mempertahankan pemerintahan serta kedudukan dan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Melainkan juga untuk dapat menghadapi dan mengatasi tanggapan penolakan dan perlawanan yang diperkirakan akan muncul dari pihak penguasa dan bangsawan di daerah itu, sebagai akibat penguasaan wilayah dan pengambilalihan kekuasaan mereka. Bangsawan yang memberikan tanggapan penolakan dan perlawanan dikejar, ditangkap dan ditawan, jika perlu diasingkan dengan alasan demi ketentraman dan keamanan. Misalnya, La Tenrisessu Datu Bakke, La Tomanggong Arung Ujung, dan La Matinro Arung Tung. Mereka ditangkap dan diasingkan ke Sumatera, dengan tuduhan telah membantu atau memberi perlindungan kepada Petta Barang.²⁹ La Tenrisessu Datu Bakke diasingkan ke Medan pada 1909, dan belia wafat di sana pada 1930. Bangsawan yang tidak menunjukkan tanggapan penolakan dan perlawanan senantiasa diawasi gerak langkah mereka. Sementara bangsawan yang bersedia menjalin kerjasama dilindungi dan diperbaiki kedudukannya. Namun tindakan terhadap kelompok bangsawan itu, terkadang mendapat tanggapan yang berbeda dari pimpinan pemerintahan pada suatu daerah atau wilayah (Patunru, 2004:120; Poelinggomang, 2004:97).

Pelaksanaan pemerintahan dan kekuasaan di wilayah bagian

²⁹ Petta Barang merupakan pimpinan gerakan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda di daerah Bugis, terutama di Bone dan Soppeng. Ia berhasil ditangkap di Citta, Soppeng pada 1913, dan kemudian dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara serta meninggal dalam pengasingan di Jawa (Amir, 2017:220; Surat Keputusan Pengadilan Bumiputra Watansoppeng, tertanggal 15 Mei 1913, No.11).

pemerintahan (afdeling) diembankan kepada asisten residen. Ia dibantu oleh beberapa orang pembantu, antara lain seorang aspiran kontrolir dan seorang juru tulis. Asisten residen bertanggung jawab terhadap segala urusan pemerintahan di wilayah pemerintahannya dan mempertanggungjawabkan kepada gubernur, yang kemudian kepada residen setelah terjadi perubahan struktur penataan pemerintahan Hindia Belanda pada 1938. Asisten residen membawahi beberapa pejabat kontrolir, yang masing-masing ditempatkan sebagai pimpinan pemerintahan pada cabang pemerintahan (onderafdeling), dalam pelaksanaan pemerintahan. Sebagai pimpinan pemerintahan di tingkat onderadeling, kontrolir menerima dan melaksanakan segala perintah, peraturan dan ketentuan yang diembankan kepadanya oleh asisten residen dan kemudian mempertanggung-jawabkan kepada pimpinannya.

Kontrolir merupakan pejabat pelaksana pemerintahan Belanda yang langsung berhubungan dengan pejabat pimpinan pemerintahan bumiputra dan mengawasi segala pelaksanaan pemerintahan di wilayah kekuasaannya. Selain itu, ia juga menguasai kas onderafedeling, memimpin pasukan polisi, melakukan pengaturan pemungutan pajak, menentukan kerja wajib, melakukan pengadilan, dan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan dan kekuasaan. Di samping itu, ia juga bertindak sebagai penasehat dalam segala hal yang terjadi dalam wilayah pemerintahannya. Dengan kata lain kontrolir merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan kekuasaan. Ia dibantu oleh beberapa orang pegawai bumiputra, seorang jaksa, juru tulis, dan juru bicara. Pegawai bumiputra tersebut berperan sebagai penghubung antara kontrolir dan pejabat pemerintah bumiputra (Venema, 1949: 293; Poelinggomang, 2004:98).

Seorang kontrolir juga membawahi beberapa pejabat bumiputra sebagai pimpinan pemerintahan pada daerah adat atau distrik.

Karena dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda, daerah adat ditempatkan sebagai wilayah pemerintahan bagi pejabat pemerintahan bumiputra, dan sebagai bagian dari cabang pemerintahan (onderafdeling) dan bawahan dari kontrolir. Penentuan wilayah daerah adat, pada umumnya didasarkan pada latar belakang sejarah dari daerah itu sebagai satu kesatuan pemerintahan lokal. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menjalin hubungan kerjasama dengan bangsawan di daerah itu dalam melaksanakan pemerintahan. Hal ini mendorong pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk menguatkan kedudukan pemerintahan daerah adat dan menjauhkan daerah itu dari bentuk pemerintahan kerajaan atau memangkas pengaruh dan kekuasaan raja dan bangsawan pada pusat kerajaan terhadap daerah adat atau distrik.

Penataan wilayah dan pelaksanaan pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah Hindia Belanda bukan hanya memiliki hak dan kekuasaan untuk menata kembali suatu daerah adat, melainkan juga memberikan kemungkinan bagi bangsawan di daerah itu merasakan ketergantungannya dan bersedia bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, tentu saja untuk mengalihkan ketergantungan, kesetiaan dan hubungan mereka dengan raja atau bangsawan pada pusat kerajaan dari bentuk pemerintahan lokal sebelumnya. Tindakan pemerintah Hindia Belanda menguatkan dan mempertahankan daerah adat dan penguasanya tidak hanya mendorong perhatian terhadap masalah tergesernya pusat pemerintahan lokal dan kelompok bangsawan pusat, tetapi juga masalah kekuasaan pemerintah kolonial dan pimpinan daerah adat dapat berperan sebagai pejabat pemerintahan bumiputra dalam melaksanakan pemerintahan (Poelinggomang, 2004:111).

Berdasarkan jenjang kepangkatan kepala distrik atau pimpinan daerah adat berada di bawah kontrolir sebagai pimpinan onderafdeling.

Sebab, kontrolir yang bertugas mengawasi mereka, mengatur dan memberikan tugas-tugas dan perintah untuk dilaksanakan. Kepala distrik secara teratur wajib memperkuat polisi rakyat, melaporkan dengan jelas dan lengkap segala hal tentang pemerintahan di daerahnya, melangsungkan dan memberikan perintah kepada bawahannya, kepala kampung atau polisi kampung. Selain itu, ia juga wajib mengunjungi dan mengawasi langsung kegiatan di wilayah pemerintahannya. Melalui penggunaan tenaga penguasa daerah adat sebagai pejabat pemerintahan bumiputra, pemerintah Hindia Belanda mengharapkan rakyat akan dapat menunjukkan ketaatan dan kesetiaan mereka untuk melaksanakan segala ketentuan, peraturan dan perintah yang disampaikan melalui penguasa mereka, yang dijalin hubungan kerjasama dan dijadikan pemimpin pemerintahan di daerah adat.

Pemilihan kepala distrik diembankan kepada dewan hadat dari daerah adat. Dewan adat dalam melakukan pemilihan, tentunya berkaitan dengan kebiasaan setempat. Persyaratan calon ditentukan oleh derajat kebangsawanan, wibawa, pengaruh, dan pendukung. Karena persetujuan pengangkatan merupakan wewenang pemerintah Hindia Belanda, sehingga ditambahkan persyaratan bersedia bekerjasama dan menjadi bawahan dari pemerintahan kolonial Belanda. Persyaratan ini harus dipenuhi bagi calon kepala distrik untuk menempati kedudukan sebagai penguasa dan sebagai pelaksana pemerintahan di daerah adat. Sebagai penguasa, kepala distrik mendapat pengesahan dari dewan hadat dan dikukuhkan secara tradisional dengan memberikan hak pemegang dan penyimpan *arajang* setempat sebagai lambang kekuasaannya. Sementara sebagai pelaksana pemerintahan, ia dikukuhkan dengan surat keputusan pengangkatan dari pemerintah Hindia Belanda (Poelinggomang, 2004:113).

Secara tradisional, pemegang *arajang* yang berkedudukan sebagai penguasa memiliki hak atas sepuluh persen dari hasil pengolahan tanah, menguasai tanah-tanah penguasa, dan hak-hak atas pajak produksi hutan, pajak perjudian, dan lain-lain. Namun sejak kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, hak-hak pemegang *arajang* umumnya beralih di bawah penguasaan pemerintah kolonial, kecuali hak atas tanah *arajang* dan penyerahan tenaga kerja bagi pemegang *arajang* yang masih tetap dipertahankan bagi penguasa pemegang *arajang*. Sementara dalam kedudukannya sebagai pimpinan pemerintahan daerah adat, ia diberikan penghasilan tetap berupa gaji. Selain itu, dalam kedudukannya sebagai penguasa, kepala distrik juga diberikan penghasilan tambahan dari hasil penarikan pajak (umumnya tiga persen), tanah jabatan, kemudahan, bantuan dan dukungan, serta hak-hak istimewa tertentu (Quarles, 1910:MvO; Gezaghebber, 1927:35)).

Pemerintah Hindia Belanda dalam mempertahankan dan memperkuat kedudukan kepala distrik atau pimpinan daerah adat tersebut, bukan hanya dimaksudkan untuk menciptakan keadaan bagi rakyat agar tetap memandang pemimpin mereka sebagai penguasa tradisional yang dapat memikat ketaatan dan kesetiaan, melainkan juga untuk memikat mereka dan merasa ketergantungannya pada pihak pemerintah Hindia Belanda, sehingga bersedia melaksanakan segala ketentuan, peraturan dan perintah yang diembangkan kepadanya. Untuk lebih memperkuat rasa ketergantungan pejabat pemerintah bumiputra kepada pemerintah Hindia Belanda, kontrolir sebagai pejabat yang langsung berhubungan dengan mereka diberi wewenang untuk menawan orang-orang yang berdasarkan bukti dicurigai, hak untuk memecat, mengangkat dan melindungi pejabat bumiputra. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan pasukan militer untuk dapat menunjukkan bahwa pemerintah kolonial memiliki kekuatan

untuk dapat memaksakan keinginannya bila mendapat tantangan dan perlawanan dari pimpinan daerah adat (Poelinggomang,2004:115).

Berdasarkan laporan serah terima jabatan *Gezaghebber* Onderafdeling Soppeng pada 1927, bahwa cabang pemerintahan (onderafdeling) ini terbagi ke dalam tujuh daerah adat (distrik), sebagai berikut:

1. Distrik Lalabbata di bawah pimpinan pemerintahan Andi Wana (putra Datu Soppeng Sitti Saenab Arung Lapajung). Daerah adat ini terdiri atas tiga onderdistrik, yaitu Onderdistrik Lalabbata ri Aja (46 kampung), Onderdistrik Lalabbata ri Lau (31 kampung), dan Onderdistrik Lalabbata ri Tennga (16 kampung). Pimpinan daerah adat Lalabbata digelar datu dan kepala-kepala daerah bawahannya (onderdistrik) digelar *padangreng* yang sebelumnya digelar *pabbicara*.
2. Distrik Mario ri Wawo di bawah pimpinan Andi Mangkona sebagai pejabat datu sementara. Daerah adat ini terdiri atas tiga onderdistrik, yaitu Onderdistrik Mario ri Aja (29 kampung), Onderdistrik Mario ri Lau (36 kampung), dan Onderdistrik Mario ri Tennga (30 kampung). Pimpinan daerah adat ini digelar datu dan kepala-kepala daerah bawahannya digelar *pabbicara*.
3. Distrik Mario ri Awa dipimpin seorang pejabat yang digelar datu. Daerah adat ini terdiri atas tiga onderdistrik, yaitu Onderdistrik Tanete Manorang (14 kampung), Onderdistrik Tanete ri Attang (24), dan Onderafdeling Boeloe-Boeloe (18 kampung). Kepala pemerintahan daerah adat ini bergelar datu dan kepala-kepala daerah bawahannya bergelar *pabbicara*.
4. Distrik Lili ri Aja dipimpin seorang pejabat yang digelar Pangulu Lompo Galung. Daerah adat ini terdiri atas beberapa daerah bawahan, antara lain Galung, Ganra, Lompulle, Bakke, Appanang, dan Jampu yang masing-masing dipimpin oleh pejabat

yang bergelar *sullewatang* kecuali datu terhadap Lompulle dengan jumlah kampung seluruhnya 44 kampung.

5. Distrik Lili ria Lau dipimpin seorang pejabat yang digelar Arung Lompengeng. Daerah adat ini terdiri atas empat onderdistrik, yaitu Onderdistrik Lompengeng ri Aja Salo, Onderdistrik Lompengeng ri Lau Salo, Onderdistrik Macanre, dan Onderdistrik Baringeng dengan jumlah kampung seluruhnya 57 kampung. Kepala pemerintahan daerah adat ini digelar *arung* dan kepala-kepala daerah bawahannya digelar *sullewatang* terhadap Pajalesang dan Macanre, serta *arung* terhadap Baringeng.
6. Distrik Pattojo dipimpin seorang pejabat yang digelar datu. Daerah adat ini terdiri atas dua onderdistrik, yaitu Onderdistrik Pattojo dan Onderdistrik Laccokkong dengan jumlah kampung seluruhnya 25 kampung. Pimpinan daerah bawahan (onderdistrik) ini masing-masing bergelar *pabbicara* untuk Pattojo dan seorang *padangreng*.
7. Distrik Citta dipimpin seorang pejabat yang bergelar datu. Daerah adat ini terdiri atas dua onderdistrik, yaitu Onderdistrik Citta Manorang dan Onderdistrik Citta Maniang dengan jumlah kampung seluruhnya 27 kampung. Pimpinan daerah bawahan (onderdistrik) ini masing-masing digelar Pabbicara Watancitta (Citta Mmanorang) dan Pabbicara Kampiri untuk Citta Maniang (Arsip Celebes, No.9; Gezaghebber, 1927: MvO).

Pengesahan kedudukan kepala distrik atau pimpinan daerah adat secara tradisional dan pemilihan menurut kebiasaan, sehingga ia tidak dapat melepaskan diri dari ikatan kekeluargaan. Demikian pula penguatan dan pengesahan kedudukan itu oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga ia juga dituntut untuk dapat menunjukkan kemampuan mencapai keberhasilan dalam tugasnya sebagai pelaksana pemerintahan Hindia Belanda. Karena itu, ia bukan hanya berperan

penting dalam hubungan yang berkaitan dengan nilai-nilai tatanan keluarga, melainkan juga berperan sebagai pimpinan pemerintahan di daerah adat yang diharapkan dapat melaksanakan pemerintahan dan mampu menunjukkan keberhasilan. Untuk tugas ini, ia diperhadapkan dengan masalah penataan administrasi pemerintahan. Sehingga persyaratan kebangsawanan saja tidak akan mampu untuk memenuhi tugas sebagai pelaksana pemerintahan Hindia Belanda, karena penataan administrasi pemerintahan membutuhkan tenaga yang berpendidikan dan berpengalaman.

Selain persyaratan pendidikan dan pengalaman, kesediaan bekerja sama dan kebangsawanan juga mempunyai pengaruh yang besar dalam kedudukan pejabat pemerintahan bumiputra. Namun pertimbangan kebangsawanan tetap memainkan peranan utama terhadap menentukan kedudukan dalam pemerintahan. Hal ini bukan hanya karena kebanyakan bangsawan merupakan kelompok yang berwibawa dan oleh rakyat dipandang boleh menjadi penguasa mereka, melainkan juga untuk dapat melaksanakan pengaruh terhadap bangsawan lainnya. Persoalan yang dihadapi oleh bangsawan yang digunakan sebagai pimpinan pemerintahan daerah adat adalah menjadi figur terdepan dalam menghadapi kelompok bangsawan pusat. Padahal dalam tatanan pemerintahan tradisional bumiputra sebelumnya, menetapkan bahwa bangsawan yang lebih rendah tidak diperkenankan memerintah dan melaksanakan kekuasaan terhadap bangsawan yang lebih tinggi (Paeni, 1983:23).

Ketentuan tersebut mendorong pejabat pemerintah Hindia Belanda mengambil alih pelaksanaan pemerintahan dan kekuasaan terhadap kelompok bangsawan pusat dalam penataan pemerintahan bumiputra. Sementara para kepala distrik atau pimpinan daerah adat dibebani tugas melaksanakan pemerintahan terhadap rakyat yang bukan bangsawan. Dalam hubungan ini pula pejabat pemerintah

Hindia Belanda menggantungkan diri pada pimpinan daerah adat dalam pelaksanaan pemerintahan dan kekuasaan. Karena itu dalam penataan pemerintahan pada masa Hindia Belanda, menunjukkan penumpangan kekuasaan pejabat pemerintah Belanda di atas kekuasaan pejabat bumiputra. Itulah sebabnya pemerintah Hindia Belanda menguatkan kedudukan pimpinan daerah adat dengan pola pengesahan tradisional, bantuan, kemudahan dan hak-hak istimewa untuk mempertahankan lambang-lambang kehormatan kedudukan kekuasaan mereka (Poelinggomang, 2004: 128).

Daerah adat terdiri atas beberapa kampung yang merupakan satu wilayah pemerintahan yang terkecil dari jenjang penataan wilayah administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Jauh sebelum penataan kampung sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan pada masa pemerintahan Hindia Belanda tersebut, kampung dalam struktur pemerintahan tradisional bumiputra dikenal sebagai satu kelompok kerabat yang bermukim di tempat tertentu yang berada di luar pusat pemukiman pertama, tempat awal terbentuknya kesatuan kaum atau kelompok masyarakat yang disebut *wanuwa*. Untuk menata dan menyelesaikan permasalahan antaranggota kerabat serta memudahkan hubungan antarkelompok kerabat dan pimpinan kesatuannya, maka mereka memilih salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin *wanuwa* yang dikenal dengan *matowa* (Hadrawi, 2016:139). *Matowa* berperan dalam mengurus segala hal tentang kelompok kerabatnya, menyelesaikan perselisihan, mengarur penyerahan hasil dan angkatan tenaga kerja bagi pimpinan daerah adat. Dalam urusan dengan penyerahan angkatan tenaga kerja dan mengantar hasil penyerahan, *matowa* dibantu oleh seorang *sariang* dan *parannung* yang berperan sebagai pengawas dalam kegiatan tersebut (Poelinggomang,2004:132).

Dalam perkembangannya akibat mobilitas penduduk, kampung bukan lagi merupakan pemukiman dari satu kelompok kerabat

saja. Menetapnya kelompok kerabat pendatang pada pemukiman dari kelompok kerabat awal, mendorong perluasan dan pembukaan pemukiman baru di sekitar kampung awal, yang merupakan kampung-kampung kecil. Wilayah perkampungan itu kemudian dijadikan satu wilayah administrasi pemerintahan pada masa kekuasaan Hindia Belanda yang disebut kampung. Batas-batas wilayahnya ditentukan dengan jelas, umumnya meliputi kampung-kampung kecil di sekitar kampung awal, mengangkat salah seorang penduduk kampung itu menjadi kepala pemerintahan, kepala kampung. Ia dipilih oleh penduduk kampung dari calon-calon yang diajukan oleh masing-masing kelompok kerabat. Karena itu kampung dipandang sebagai wilayah pemerintahan terkecil dan bukan merupakan kesatuan kelompok kerabat (Gezaghebber, 1927:MVO).

Berdasarkan susunan pemerintahan, kepala kampung berada di bawah pengawasan dan perintah kepala daerah adat. Ia bertugas menjamin ketentraman dan keamanan, melaksanakan perintah dan peraturan yang diembankan kepadanya, dan menjaga kebersihan kampung. Kepala kampung wajib menghadap pada kepala daerah adat dan memberikan laporan lisan menyangkut segala hal tentang pemerintahan di kampungnya. Sehubungan dengan tugas yang diembankan kepada kepala kampung, menunjukkan bahwa ia melaksanakan segala hal pemerintahan secara langsung kepada rakyat. Kepala kampung tidak hanya menyatakan perintah-perintah secara langsung kepada rakyat dan melaksanakan peraturan-peraturan pemerintah, tetapi juga mengatur angkatan tenaga kerja wajib dan melakukan pungutan pajak. Karena itu, dapat dikatakan bahwa kampung merupakan pangkal kegiatan pemerintahan.

Kepala kampung diberikan penghasilan berupa tanah jabatan dan jumlah tertentu dari hasil pemungutan pajak. Berdasarkan laporan serah terima jabatan *Gezaghebber Onderafdeeling Soppeng* pada 1927,

kepala kampung memperoleh penghasilan dari hasil pemungutan pajak enam persen dari jumlah pajak (Gezaghebber, 1927: MvO). Dalam surat resmi dari *Gezaghebber Onderafdeeling Soppeng*, De Kooy, kepada Asisten Residen Bone, W.R. de Greve, tertanggal 21 April 1906, No. 20, dinyatakan bahwa dalam wilayah *Onderafdeeling Soppeng* telah dilaksanakan penarikan pajak: kuda beban: f.4,- per tahun, kuda tunggangan: f.2,- per tahun, kerbau: f.1,- per tahun, pembuat gula: f.5,- per tahun, penjual opium: f.25,- per tahun, pedagang kain: f.10,- per tahun, perahu nelayan: f.3,- per tahun, perahu dagang: f.10,- per tahun, pohon kelapa: f.0,25,- per tahun, sawah yang memproduksi 100 ikat padi: f.0,25,- per tahun, kebin biasa: f.1,- per tahun, kebun sirih: f.2,50,- per tahun, kebun tembakau: f.3,- per tahun, kursi bambu: f.0,05,- per tahun, kebun kayu yang baru: f.1,- per tahun, dan kebun kayu yang tua: f.2,- per tahun (Poelinggomang dan Muh. Arfah, 1995: 73; Kooy, 1909: MvO). Pelaksanaan penarikan pajak sesungguhnya bukan hal baru. Sejak lama telah dikenal penarikan pajak bagi penduduk, namun jenis pajak tidak seperti yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Penduduk hanya mengenal penarikan pajak dari produksi, seperti pajak tanah pertanian, produksi hasil hutan. Kedua jenis pajak itu umumnya berjumlah 10 persen dari produksi. Selain itu, juga pajak pasar dan pajak judi. Dua jenis pajak yang terakhir itu dipungut di tempat kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan di kampung, kepala kampung dibantu oleh seorang *sariang* dan beberapa orang polisi kampung. Tugas yang diembankan kepada kepala kampung dalam keberadaannya menghadapkan ia pada berbagai kesulitan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan Hindia Belanda. Persoalan utama yang mereka alami adalah masalah administrasi yang berhubungan dengan pemerintahan. Hal ini erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan kepala kampung. Sebagian

besar kepala kampung di daerah ini tidak berpendidikan serta kurang pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang erat berkaitan dengan kegiatan administrasi pemerintahan. Selain itu, juga karena pejabat pemerintah Belanda yang menggantungkan kegiatan pemerintahan pada pejabat bumiputra dan pegawai yang diperbantukan, sehingga sering terjadi kesalahan-kesalahan administrasi pemerintahan. Itulah sebabnya penataan pemerintahan Hindia Belanda tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, terutama dalam memaksakan rakyat untuk taat dan patuh sepenuhnya kepada pemerintah Hindia Belanda.

Ketidakterhasilan pemerintah Hindia Belanda menundukkan rakyat tersebut, mendorong mereka kembali mendekati kelompok bangsawan pusat kerajaan yang selama ini berhasil ditekan dan disingkirkan, untuk menjalin hubungan kerjasama. Selain itu, juga dimaksudkan untuk dapat mencegah keterlibatan kelompok bangsawan dalam kegiatan organisasi sosial dan politik yang mulai berkembang di Sulawesi Selatan pada tahun 1920-an. Sebab kegiatan organisasi sosial dan politik ini dipandang dapat mengancam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Untuk dapat menjalin hubungan kerjasama, pemerintah Hindia Belanda pemulihan kembali kedudukan bekas kerajaan menjadi daerah kekuasaan berperintahan sendiri yang dikenal dengan swapraja. Kerajaan Soppeng dipulihkan kembali kedudukannya menjadi daerah kekuasaan berpemerintahan sendiri atau swapraja pada tahun 1926, dan Sitti Saenab Arung Lapajung diangkat kembali menjadi Datu Soppeng (Gezaghebber, 1927:MVO).

Pemulihan kembali kedudukan Kerajaan Soppeng tersebut, membuat Datu Soppeng bersama anggota dewan hadat mendapat kesempatan untuk lebih aktif menjalankan tugas dan kewajibannya selaku pemerintah Kerajaan Soppeng. Dewan hadat selaku pelaksana

pemerintahan Kerajaan Soppeng terdiri atas lima anggota dewan, yaitu Datu Soppeng sebagai pimpinan atau ketua, Arung Bila untuk urusan pemerintahan umum, seorang *pabbicara* untuk kehakiman, seorang *pabbicara* untuk kepolisian, dan seorang *pabbicara* untuk urusan pekerjaan umum. Suami Datu Soppeng sebagai Sulle Datu yang bertindak sebagai wakil permaisurinya di dalam hal yang luar biasa, namun ia tidak termasuk anggota dewan hadat Soppeng. Keadaan itu berlanjut hingga akhir kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Datu Soppeng Sitti Saenab Arung Lapajung wafat di Watansoppeng pada tanggal 20 Desember 1940. Ia digantikan oleh putranya, yaitu Andi Wana Arung Lalabbata sebagai Datu Soppeng. Andi Wana dilantik pada tanggal 9 Januari 1941 (Gezaghebber, 1927:MvO; Patunru, 2004:122).

E. Penutup

Pemerintah Hindia Belanda melancarkan ekspedisi militer untuk menguasai secara langsung kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan (termasuk Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat sekarang) pada 1905. Penguasaan secara langsung itu, bukan hanya dimaksudkan untuk lebih mengintensifkan dan mengokohkan kedudukan kekuasaan pemerintah kolonial, melainkan juga untuk menguasai sumber daya ekonomi yang potensial bagi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, juga untuk mencegah masuknya pengaruh bangsa asing lainnya pada kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Kerajaan-kerajaan yang berhasil ditaklukkan, kemudian dipaksa menandatangani *korte verklaring* (pernyataan pendek), yaitu pernyataan penyerahan kekuasaan sepenuhnya kepada pemerintah Hindia Belanda. Implikasi dari pernyataan itu adalah: 1) lenyapnya kedudukan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan; 2) seluruh wilayah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan menjadi

wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda; 3) penguasa lokal (para bangsawan) kehilangan kedudukan kekuasaan mereka; dan 4) awal dari pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan.

Setelah berhasil menguasai seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk Kerajaan Soppeng, pemerintah Hindia Belanda mulai menata wilayah kekuasaannya dan tetap menggunakan nama Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya (*Gouvernement Celebes Onderhoorigheden*). Pemegang kendali kekuasaan pemerintahan diembankan kepada seorang gubernur (*gouverneur*) atau residen setelah terjadi perubahan struktur penataan pemerintahan Hindia Belanda pada 1938. Wilayah pemerintahan ini dibagi atas tujuh bagian pemerintahan (*afdeling*), yaitu Afdeling Makassar, Afdeling Bonthain, Afdeling Bone, Afdeling Parepare, Afdeling Luwu, Afdeling Mandar, dan Afdeling Buton dan Pesisir Timur Sulawesi (*Boeton en Oostkust Celebes*).

Setiap *afdeling* dijabat oleh seorang asisten residen dan setiap *afdeling* terbagi atas beberapa cabang pemerintahan (*onderafdeling*). Afdeling Bone misalnya terdiri atas lima *onderafdeling*, yaitu Onderafdeling Bone, Onderafdeling Bone Utara, Onderafdeling Bone Selatan, Onderafdeling Wajo, dan Onderafdeling Soppeng. Setiap *onderafdeling* dijabat oleh seorang kontrolir (*controleur*) atau *gezaghebber* dan setiap *onderafdeling* terbagi atas beberapa distrik (*district*) atau daerah adat (*adat gemeenschap*). Setiap distrik dikepalai oleh seorang kepala distrik atau kepala daerah adat yang penyebutannya terkadang berbeda antara satu distrik dengan distrik lainnya, misalnya datu untuk Distrik Lalebbata, Distrik Mario ri Wawo, Distrik Mario ri Awa, Distrik Pattojo, dan Distrik Citta, serta Arung untuk Distrik Lili ri Lau dan Pangulu Lompo Galung untuk Distrik Lili ria Aja.

Setiap distrik terbagi pula atas beberapa kampung (*wanuwa*)

dan setiap kampung dikepalai oleh seorang kepala kampung. Dalam penataan wilayah distrik ditentukan berdasarkan pada latar kesejarahannya, baik sebagai bekas *kedatuan* maupun *wanuwa* atau *lili*. Oleh karena itu, maka kesatuan wilayah distrik sering juga disebut dengan daerah adat (*adat gemeenschap*). Pejabat pemerintahan baik kepala kampung maupun kepala distrik dijabat oleh pegawai bumiputra. Sementara pejabat pemerintahan pada tingkat gubernur hingga kontrolir dijabat oleh pegawai Belanda. Sehubungan dengan penataan tersebut, jelas bahwa bangsawan pada pusat kerajaan tersisihkan dalam birokrasi pemerintahan Hindia Belanda atau dengan kata lain bangsawan kerajaan kehilangan kedudukan kekuasaan dalam birokrasi kolonial Belanda. Hal ini bukan hanya berimplikasi pada bangsawan kerajaan, yang kehilangan kedudukan politik dan sumber-sumber ekonomi atau kesejahteraan yang selama itu berada dalam kewenangan mereka. Melainkan juga pada sebagian orang merdeka yang merupakan pengikut dari bangsawan, yang bergantung pada lahan pertanian yang dikuasai oleh kaum bangsawan.

Pengambilalihan kekuasaan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut, mendapat respon dari kelompok bangsawan kerajaan yang kehilangan kedudukan kekuasaan. Tidak dapat dielakkan pihak yang terakhir merasa dirugikan dan tidak puas dengan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Untuk membendung tindak perlawanan atau tanggapan penolakan, pemerintah Hindia Belanda melaksanakan pemerintahan sipil-militer untuk memperkuat dan mempertahankan kedudukan kekuasaannya. Selain itu, pemerintah kolonial juga mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang menunjukkan tanggapan penolakan dan bersikap menentang. Mereka ditawan dan jika dipandang perlu diasingkan, misalnya La Tenrisessu Datu Bakke, La Tomanggong Arung Ujung, dan La Matinro Arung Tung. Sementara terhadap kelompok bangsawan yang bersedia bekerjasama

dirangkul dan diperbaiki kedudukannya. Pemerintah kolonial berusaha pula memperlemah kedudukan bangsawan kerajaan dengan mengambil alih tanah-tanah penguasa, misalnya *galung arajang* dan *galung akkarungeng* yang merupakan sumber penghasilan mereka.

Pelaksanaan pemerintahan militer-sipil itu dilakukan dengan menetapkan dan mengangkat pimpinan pasukan militer pendudukan menjadi kepala pemerintahan pada daerah yang ditaklukkannya. Penempatan dan pengangkatan itu jelas menunjukkan bahwa pejabat pemerintah kolonial bukan merupakan pejabat yang berpengalaman dan memiliki wawasan pengetahuan di bidang pemerintahan. Karena itu mereka menggantungkan kegiatan pemerintahan pada pegawai bumiputra yang diperbantukan kepadanya, sehingga pemerintahan tidak dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan, terutama dalam memaksakan rakyat untuk taat dan patuh sepenuhnya kepada pemerintah Hindia Belanda. Itulah sebabnya mereka kembali mendekati kelompok bangsawan kerajaan yang selama ini berhasil ditekan dan disingkirkan, untuk menjalin hubungan kerjasama. Jalinan kerjasama inilah yang melapangkan pemulihan kembali kekedudukan bekas Kerajaan Soppeng menjadi daerah kekuasaan berperintahan sendiri yang dikenal dengan *swapraja* pada 1926.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, dkk. 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud.
- Abdullah, Taufik. 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ali, A. Muhammad. 1976. *Jejak Perjuangan La Tenri Tatta Datu Mario Arung Palakka*. Ujung Pandang: Kantor Cabang Lembaga Sejarah dan Antropologi.
- Ali, A. Muhammad dan A. Amrullah Amal. 1989. *Arung Palakka Potret Seorang Pembebas*. Watampone: Pemda Bone.
- Ali, Andi Muh. 1984. *Bone Selayang*. Watampone: Damai.
- Ali, Andi Muh. 1986. *Rumpu'na Bone (Perang Bone) 1905*. Watampone: Damai.
- Amir, Muhammad. 2003. *Perlawanan Bone Terhadap Belanda Tahun 1905*. Makassar: Eramedia.
- Amir, Muhammad. 2017. Gerakan Petta Barang di Daerah Bugis 1906-1913, dalam *Jurnal Al-Qalam*, Vol.23 No.2. Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- Andaya, Leonard Y. 2004. *Warisan Arung Palakka; Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17*. Makassar: Innawa.
- Anonim 1905. Gubeurtenissen bij het begin der Boni expeditie door een ooggetuige; uit mijn dagboek”, dalam *Boon's Geillusreerd Magazin* 7.
- Anonim. 1905-1906. “De Gubeurtenissen in Zuid-Celebes”, dalam *Weekblad voor Indie* 2.
- Anonim. 1915. “De Expeditie naar Zuid-Celebes in 1905-06”, dalam *Indisch Militair Tijdschrift*, Extra Bijlage.
- Arsip Celebes, No. 7A. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

- Arsip Celebes, No. 7B. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip Celebes, No. 7C. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip Celebes, No. 8A. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip Celebes, No. 9. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arung Manajeng, Andi Malla. 1967. *Transliterasi dan Terjemahan Lontarak Rumpakna Bone (Perang Bone) 1905*. Ujung Pandang: Team Penelitian Sejarah Bone.
- Carr, Edward H. 1986. *What is History ?* Harmondsworth: Penguin Books.
- Emanuel, L. A. 1948. *Memorie van Overgave van den Aftredende Assistant Resident van Bone*. Terjemahan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Ernawati. 1997. *Perjuangan Baso Pagilingi Abdul Hamid Menentang Kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di Kerajaan Bone Pada Tahun 1905*. Ujung Pandang: Skripsi IAIN Alauddin.
- Jumadi. 2010. *Arung Palakka Sosok Pejuang Tanah Bugis*. Makassar: Rayhan Intermedia.
- Garraghan, Gilbert J. 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordam University Press.
- Guens, M. van. 1905. Patti-ro-Patira, dalam *Weekblad voor Indie* 2-17, 20 Agustus: 287-291.
- Gezaghebber. 1927. *Memori van Overgave Gezaghebber Onderafdeeling Soppeng*. Terjemahkan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah (Diterjemahkan Nugroho Notosusanto)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Dahriah. 1999. Kerajaan Balusu dan Benda-benda Peninggalannya di Kabupaten Barru, dalam *Buletin Bosara No.13 Tahun V*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Hadrawi, Muhlis. 2016. *Jejak Awal Wanuwu-Wanuwu Soppeng dan Pertumbuhannya: Kajian Berdasarkan Manuskrip*. Yogyakarta: Ombak.
- Hamid, Pananrangi. 1991. Sejarah Kabupaten Daerah TK. II Soppeng. Ujung Pandang: Laporan Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Harvey, Barbara S. 1989, *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: Grafiti.
- Inventaris Arsip Soppeng Vol. 1 (1908-1959). Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kadir, Harun, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang: Kerjasama Pemda Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan dan Unhas.
- Kamaruddin, dkk. 1986. *Lontarak Bilang Raja Gowa dan Tallok (Transliterasi dan Terjemahan Naskah Makassar)*. Ujung Pandang: Depdikbud.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kielstra, E.B. 1910. *Kumpulan Artikel*, Koleksi Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kies, Ch. 1935. *De Expeditie naar Zuid Celebes in 1905*. J.G. BGN I.
- Koll, H. van. 1911. *Nederlandsch Indie in de Staten Generaal 1897-1909*. s'Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Kooy, H.A. 1909. *Memori van Overgave Gezaghebber Onderafdeling Soppeng*. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Kroesen, C. A. 1906, *Memorie van Overgave van het Bestuur Over het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

- Latif, Abd. 2012. *Konfederasi Ajatappareng 1812-1906, Sejarah Sosiopolitik Orang Bugis di Sulawesi Selatan*. Bangi: Disertasi Doktor Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia.
- Lontarak Kerajaan Soppeng*, No.1. Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Mattulada. 1998. *Sejarah, Kebudayaan, dan Masyarakat Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Memori Betreffende.1912. Memori Betreffende de Onderafdeeling Bone met Bijlagen (Opgemaath Ingevalge Schrijven van het Departemen van Oorlog VII Afdeling, 12 Agustus 1912, No.765).
- Notosusanto, Nugroho. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu.
- Nur, M. Rafiuddin. 2007. *Lontara'na Soppeng; Dari Kerajaan Kembar Menuju Kabupaten*. Makassar: Rumah Ide.
- Nuryati. 1994. *Kerjasama Antara Kerajaan Bone Dengan Kerajaan Buton Pada Abad ke-17*. Ujung Pandang: Skripsi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Ujung Pandang.
- PaEni, Mukhlis dkk. 2002. *Batara Gowa: Messianisme Dalam Gerakan Sosial di Makassar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- PaEni, Mukhlis. 1986. "Landasan Kultur Dalam Pranata Sosial Bugis Makassar", dalam *Dinamika Sosial Bugis Makassar*. Ujung Pandang: PLPIIS.
- Patang, Lahajdji. 1976. *Sulawesi dan Pahlawan-Pahlawannya*. Jakarta: YKGM.
- Patunru, Abdurrazak Daeng. 2004. *Soppeng*, dalam *Bingkisan Patunru, Sejarah Lokal Sulawesi Selatan*. Makassar: Pusat Kajian Indonesia Timur bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.

- Patunru, Abdurrazak Daeng. 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Su;awesi Selatan.
- Patunru, Abdurrazak Daeng. 1983. *Sejarah Wajo*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Su;awesi Selatan.
- Pemda. 1991. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri Di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Sulawesi Selatan.
- Petta Nabba, Andi Palloge. 2006. *Sejarah Kerajaan Tanah Bone*. Makassar: Yayasan Al Mualim.
- Poelinggomang, Edward L. 2002. *Makassar Abad XIX: Kajian Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Poelinggomang, Edward L. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Jakarta: Ombak.
- Poelinggomang, Edward L. dkk. 2004a. *Sejarah Perkembangan Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Selatan*. Makassar: Laporan Hasil Penelitian, Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Poelinggomang, Edward L. & Muh. Arfah. 1995. "Perlawanan Rakyat Pasca Ekspedisi Militer Belanda di Sulawesi Selatan Pada 1905". Ujung Pandang: Laporan Penelitian Bidang Jarahnitra Kanwil Depdikbud Provinsi Sulawesi Selatan.
- Poelinggomang, Edward L. 1980. *Perlaanan Rakyat Gowa Terhadap Pendudukan Belanda Tahun 1905*. Yogyakarta: Skripsi Sarjana Universitas Gadjah Mada.
- Qahhar, H. Abdul. 2010. *Arung Palakka Datu Tungke'na Tana Ugi'e*. Makassar: Yayasan Al Mualim.
- Quarles, de Quarles. 1910. *Memori van Overgave Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Rasyid, Darwas. 2007. "Gerakan Andi Panambong di Soppeng". Makassar: Laporan Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

- Rookmaaker, H. R. 1915. *Memori van Overgave van den Controleur Betreffende de Onderafdeeling Boni ri Attang Afdeeling Boni, Gouvernement Celebes Onderhoorigheden*. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metode Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sjariffudin, Amier. 1989. *Perjanian Antarkerajaan Menurut Lontarak: Mengungkap Salah Satu Aspek Hukum Internasional Adat Abad XV-XVIII di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Disertasi Doktor Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Somer, J. M. 1934. *De Korten Verklaring*. Breda: Corona.
- Sumadi, Suryabrata. 1992. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumange, Hary. 2003. *Sejarah Soppeng*. Soppeng: Yayasan Bina Budaya Soppeng.
- Surat Keputusan Pengadilan Bumiputra Watansoppeng Tertanggal 15 Mei 1913 No. 11.
- Staatblad*, 1910, No. 573. *Nederlandsch Indie*.
- Staatblad*, 1916, No. 352. *Nederlandsch Indie*.
- Swart, H.A.N. 1908. *Memori van Overgave Gouvernement Celebes en Onder-hoorigheden*, Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Tol, Roger. 2009. "Otoritas Tekstual Toloq Rumpaqa Bone; Oleh I Mallaq Daeng Mabela, Arung Manajeng", dalam *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*. Makassar: Inninawa bekerja sama dengan KITLV Jakarta.
- Venema, R. 1949. *Tendentie in het Na Oorlog Staatsrecht de Lagere Rechtsgemeenschappen in Indonesia*, dalam *Indonesia Tahun 3*.
- Wolhoff, G. J. 1947. *Memori van Overgave Adviseur Wajo*. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

TENTANG PENULIS



Syahrir Kila, dilahirkan di Lasape, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, 19 Februari 1960. Ayah bernama Kila Ali, dan ibu bernama Hj. Isyah. Pekerjaan adalah peneliti di Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memperoleh gelar sarjana di Fakultas Sastra, Jurusan Sejarah Universitas Hasanuddin pada tahun 1986; kemudian mengikuti pendidikan S2 pada Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (Untag) Surabaya pada tahun 2005, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Telah melakukan berbagai penelitian tentang sejarah yang diterbitkan oleh berbagai penerbit di Makassar. Juga menulis pada Jurnal Akreditasi Nasional dan tidak terakreditasi. Mengikuti berbagai kegiatan seminar sejarah dan budaya, baik lokal maupun nasional.



Sahajuddin. Lahir di Jeneponto, Sulawesi Selatan pada 19 Mei 1975, ia banyak menghabiskan masa kecilnya di daerah ini. Mulai sekolah di Tingkat Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), semuanya diselesaikan di daerah ini. SD Negeri Lassang-Lassang, Arungkeke (1982-1988); SMP Negeri Batang dan SMP Negeri 1

Allu Bangkala (1988-1991); SMA Negeri 1 Jeneponto (1991-1994). 1994 sampai 1999 menyelesaikan masa kuliah strata satu (S1) Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Madah (UGM) Yogyakarta. Kuliah strata dua (S2) diselesaikan di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar (2005- 2008) pada Program Antropologi Konsentrasi Ilmu Sejarah. 2000 sampai 2014 mengabdikan sebagai pengajar pada Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin (UNHAS). Kini penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sulawesi Selatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 2008. Sejak terangkat, ia menekuni fungsional penelitian bidang sejarah.

Selama mengabdikan sebagai pengajar dan sebagai peneliti, sudah menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk buku, bagian dari buku, jurnal, dan dalam bentuk makalah. Adapun buku-buku yang dimaksud adalah “Andi Sultan Daeng Radja Sebagai Pejuang Nasional yang Visioner”, dalam buku Tokoh Berpengaruh di Sulawesi Selatan, diterbitkan oleh Dian Istana Makassar, 2010; Petani Garam di Arungkeke 1950-1985: Suatu Refleksi Kehidupan, diterbitkan oleh Pustaka Sawerigading Makassar, 2011; Butta Toa Bantaeng Menjawab zamannya 1666-1905, diterbitkan oleh Pustaka Sawerigading Makassar, 2011; Mengenal Bone Hingga Ekspedisi Militer Belanda 1859-1860, diterbitkan oleh De Lamacca Makassar, 2014; Potret Pedagang Kaki Lima: Pergulatan Ekonomi di Pasar Tradisional

Makassar 1998-2006, diterbitkan oleh Pustaka Sawerigading, Makassar, 2015; “Kemenyatuan Antara Laut Dengan Darat Dalam Perdagangan Maritim di Sulawesi Selatan” dalam buku Dunia Maritim Indonesia dalam Perseptif Sejarah, diterbitkan oleh Pustaka Refleksi Makassar, 2017; dan lain-lain.

Sementara tulisan dalam bentuk jurnal, diantaranya adalah Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete Barru Pada Abad XVII”, dalam jurnal Walasuji, 2010; Peranan Kerajaan Bantaeng Dalam Pembangunan Ekonomi Pada Masa Kolonial Belanda”, dalam jurnal Walasuji, 2012; Dasar Negara Indonesia Periode 1945-1959: Antara Kepentingan Nasional dan Golongan”, dalam jurnal Walasuji, 2013; Sejarah Panjang Perjalanan Otonomi Daerah Indonesia”, dalam jurnal Pangadereng, 2015; Konflik Kepentingan di Kerajaan Bantaeng”, dalam jurnal Pangadereng, 2016; Berakhirnya Persekutuan Belanda dengan Kerajaan Bone Abad XIX”, dalam jurnal Walasuji, 2017; Persoalan Etnosentrisme dan Modal Sosial Pagandeng di Kota Makassar Sejak 1950-an”, dalam jurnal Pangadereng, 2017.



Muhammad Amir, dilahirkan di Darampa (Bone), Sulawesi Selatan, pada tanggal 31 Desember 1966. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (1977) dan SMP (1981) di ArasoE, dan SMA di Mare pada 1984. Sarjana Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin (1990), dan Pascasarjana Universitas Hasanuddin – Program Studi Antropologi – Konsekrasi Ilmu Sejarah (2011). Lulus Pelatihan Tenaga Teknis Kesejarahan Tingkat Dasar (2001) dan Tingkat Lanjutan (2003). Menjadi tenaga honorer pada Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional Kanwil Depdikbud Provinsi Sulawesi Selatan (1990-1995), dan tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)

Bidang Kebudayaan di Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru (1996-1997). Staf peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Ambon (1998-2000), dan BKSNT Makassar (2000 hingga sekarang). Sejak tahun 1990 telah aktif dalam penelitian dan penulisan tentang aspek kesejarahan. Karya tulis yang diterbitkan dalam bentuk buku baik tim maupun mandiri, antara lain; Biografi Panglima LAPRIS Ranggong Daeng Romo (1990), Biografi Pahlawan Opu Daeng Risaju (1991), Biografi Pahlawan Haji Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim (1993), Biografi Pahlawan Lanto Daeng Pasewang (1994), Monumen Sejarah Perjuangan Bangsa di Sulawesi Selatan I (1995), Biografi Pahlawan La Sinrang, Bakkalolona Sawitto (1996), Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan (2002), Perlawanan Bone Terhadap Belanda Tahun 1905 (2003), Kerajaan Gowa Pada Abad XIX (2004), Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2 ((2005), Monumen Sejarah Perjuangan Bangsa di Sulawesi Selatan Jilid 2 (2005), Sejarah Polewali Mandar (2006), Biografi Pahlawan I Makkulau Sultan Husain (2007), Andi Abdullah Bau Massepe: Profil Patriot yang Konsekuen Hingga Tetesan Darah Terakhir (2008), Pahlawan Nasional Dari Sulawesi Selatan (2009), Kelaskaran di Mandar-Sulawesi Barat: Kajian Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (2010), Tiga Srikandi Dari Mandar-Sulawesi Barat (2011), Konfederasi Mandar: Kajian Sejarah Persekutuan Antarkerajaan di Sulawesi Barat (2011), Membela Republik Indonesia: Kajian Sejarah Perjuangan Kelaskaran Dalam Mempertahankan Kemerdekaan di Sulawesi Selatan (2012), Konflik dan Perubahan Sosial: Kajian Sejarah Perlawanan Tiga Kerajaan Terhadap Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan (2012), Perlawanan Rakyat Ajatappareng; Kajian Sejarah Perjuangan Menentang Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan 1905-1906 (2013), Gerakan Maraqdia Tokape di Mandar-Sulawesi Barat Pada 1870-1873 (2014), dan Perjuangan Hammad Saleh Menentang Jepang dan Belanda di Mandar 1942-1947 (2014).

SOPPENG

Dari Tomanurung Hingga Penjajahan Belanda

Kerajaan Soppeng merupakan salah satu kerajaan yang diperhitungkan dalam percaturan politik di masa periode kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Namun buku ini tidak secara sepihak hanya membahas bagaimana peranan Kerajaan Soppeng dalam percaturan tersebut. Buku ini lebih fokus pada pergolakan sosial politik dalam perjalanan Kerajaan Soppeng dari masa Tomanurung, Masa Kerajaan sampai pada masa Penjajahan Hindia Belanda.

Kalau menilik percaturan politik di kalangan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, Kerajaan Soppeng tidak sedang dalam persaingan dengan kerajaan lainnya. Justru para pembesar Kerajaan Bone yang cerdas menempatkan Kerajaan Soppeng dalam posisi tersebut, dengan mengikat hubungan kedua kerajaan dalam hubungan kekeluargaan dan perjanjian. Apalagi para pembesar Kerajaan Soppeng mempunyai karakter teguh pada perjanjian.

Buku ini cukup cerdas mengantar para pembaca memahami perjalanan kesejarahan sebuah kabupaten yang lahir dari kerajaan yang mempunyai potensi berperan dalam percaturan politik di masanya. Namun lebih memilih sikap perdamaian dan ketenangan. Sikap-sikap tersebut masih terlihat sampai saat ini, dari sikap dan perilaku masyarakat Kabupaten Soppeng, suatu pewarisan sejarah yang positif.

PUSTAKA
REFLEKSI

Wahana
SARUNG BUKU

Jln. Tamangapa Raya III Perum. Tritura A5 No. 10 Makassar 90235
Telp. 0411- 494086 – 5057064. Fax. 0411- 494086,
Hp. 081343888172 – 081342183116
Email : refleksibooks@yahoo.co.id

ISBN: 978-602-5887-04-8

